

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN KONSEP & ANALISIS

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KONSEP & ANALISIS



Buku yang berjudul **KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis** secara garis besar cakupan materinya meliputi : 1. Kosep, Karakteristik, dan Lingkup Kebijakan Pendidikan; 2. Inovasi dan Perubahan Kebijakan Pendidikan; 3. Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan; 5. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi; 6. Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Keabasan; 7. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Gender; 8. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial; 9. Analisis Kebijakan Pendidikan Multikultural; 10. Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi; 11. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Teknologi Informasi; 12. Analisis Kebijakan Pendidikan Politik dan Kajian Reformasi; 13. Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini.



Astin Lukum, Arwildayanto, Ditya Ibrahim  
Hasdiana, Maimun Ihsan, Marsella D. Gui  
Nursiya Bito, Irmawati, Meiske Puluwulawa  
Nancy Katili, Lillyan Hadjaratie  
Tomi Bidjai, Maryam H. Dumako

# **KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

## **Konsep & Analisis**

### **Penulis :**

Astin Lukum  
Arwildayanto  
Ditya Ibrahim  
Hasdiana  
Maimun Ihsan  
Marsella D. Gui  
Nursiya Bito  
Irmawati  
Meiske Puluhulawa  
Nancy Katili  
Lillyan Hadjaratie  
Tomi Bidjai  
Maryam H. Dumako

**Uwais Inspirasi Indonesia**

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN

## Konsep & Analisis

**ISBN:** 978-623-133-121-2

**Penulis:** Astin Lukum, Arwildayanto, Ditya Ibrahim, Hasdiana, Maimun, Ihsan, Marsella D. Gui, Nursiya Bito, Irmawati, Meiske Puluhulawa, Nancy Katili, Lillyan Hadjaratie, Tomi Bidjai, Maryam H. Dumako

**Tata Letak:** Galih

**Design Cover:** Widi

15.5 cm x 23 cm

xiv + 568 halaman

Cetakan Pertama, Juni 2023

Diterbitkan Oleh:

**Uwais Inspirasi Indonesia**

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor:217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

### Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email:Penerbituwais@gmail.com

Website:www.penerbituwais.com

Telp:0352-571 892

WA:0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

#### Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep dan Analisis** telah terbit. Yang secara garis besar cakupan materinya meliputi : 1. Kosep, Karakteristik, dan Lingkup Kebijakan Pendidikan; 2. Inovasi dan Perubahan Kebijakan Pendidikan; 3. Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan; 5. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi; 6. Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Kebebasan; 7. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Gender; 8. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial; 9. Analisis Kebijakan Pendidikan Multikultural; 10. Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi; 11. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Teknologi Informasi; 12. Analisis Kebijakan Pendidikan Politik dan Kajian Reformasi; 13. Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku ini, semoga dapat menambah wawasan dan referensi tentang hasil analisis kebijakan pendidikan di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak.

**Prof. Dr. Hj. Astin Lukum, M.Si**

## PRAKATA

Alhamdulillah segenap puji syukur kami haturkan atas terbitnya buku yang berjudul **KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep dan Analisis**. Dengan usaha yang sungguh-sungguh dari segenap tim redaksi dan atas bantuan banyak pihak, akhirnya buku ini dapat hadir dan memberikan kontribusi ilmiah di dalam bidang kebijakan pendidikan hari ini.

Terimakasih kami sampaikan kepada teman-teman tim penyunting yang sudah rela bekerja keras dan mereview naskah demi naskah, juga kepada tim *layout* yang sudah bekerja menyelesaikan revisi demi revisi tata letak buku ini.

Terakhir, kami berharap semoga tulisan ilmiah dalam naskah ini menambah khazanah keilmuan dan wawasan kita dalam bidang kebijakan pendidikan. Kritik dan sarannya tetap kami harapkan untuk perbaikan buku ini kedepannya.

**Editor**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 KONSEP, KARAKTERISTIK, DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENDIDIKAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep, Karakteristik, Dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan .....	7
C. Penutup .....	39
<b>BAB 2 INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN</b> .....	<b>41</b>
A. Pendahuluan.....	41
B. Inovasi Dan Perubahan Dalam Kebijakan Pendidikan.....	43
C. Inovasi Pendidikan dalam Konteks Perubahan Kebijakan Pendidikan .....	46
D. Program Inovatif dalam Kebijakan Pendidikan.....	49
E. Penutup .....	79
<b>BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH : PENGGUNAAN <i>PLATFORM MERDEKA MENGAJAR</i></b> .....	<b>81</b>
A. Pendahuluan.....	81
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	81
2. Dasar Hukum Kebijakan.....	88
B. Analisis Kebijakan Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (Pmm).....	92
1. Analisis SWOT .....	92
2. Matriks SWOT.....	100

3. Mengembangkan strategi berdasarkan Matriks SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.....	102
4. Melakukan Prioritas Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara .....	113
5. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	118
C. Penutup.....	125
1. Kesimpulan.....	125
2. Rekomendasi .....	126

## **BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

<b>KEJURUAN: REVITALISASI SMK .....</b>	<b>128</b>
A. Pendahuluan .....	128
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	128
2. Dasar Hukum Kebijakan .....	130
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan .....	136
1. Analisis SWOT.....	136
2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	150
C. Penutup.....	154
1. Kesimpulan.....	154
2. Rekomendasi .....	155

## **BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

<b>TINGGI.....</b>	<b>157</b>
A. Pendahuluan .....	157
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	157
2. Dasar Hukum Kebijakan .....	159
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi.....	161
3. Analisis SWOT.....	166
4. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	172
C. Penutup.....	176
1. Kesimpulan.....	176

2. Rekomendasi.....	177
---------------------	-----

**BAB 6 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH : PENDIDIKAN KEAKSARAAN..... 178**

A. Pendahuluan.....	178
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	178
2. Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; Pendidikan Keaksaraan.....	185
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; Pendidikan Keaksaraan.....	201
1. Analisis SWOT Pendidikan Keaksaraan .....	201
2. Hasil Analisis dan Pembahasan Pendidikan Keaksaraan.....	209
C. Penutup .....	215
1. Kesimpulan .....	215
2. Rekomendasi.....	216

**BAB 7 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN GENDER..... 217**

A. Pendahuluan.....	217
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	217
2. Dasar Hukum Kebijakan.....	219
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Gender .....	226
1. Analisis SWOT .....	226
2. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	240
3. Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan .....	252
4. Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan.....	275
C. Penutup .....	286
1. Kesimpulan .....	286
2. Rekomendasi.....	287

<b>BAB 8 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL .....</b>	<b>290</b>
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	290
1. Pendidikan .....	292
2. Mobilisasi .....	296
B. Dasar Hukum Dan Kebijakan .....	301
C. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Mobilitas Sosial .....	303
1. Analisis SWOT.....	303
D. Hasil Analisa Dan Pembahasan .....	307
1. Program Swot .....	307
2. Strategi Swot .....	309
E. Penutup.....	314
1. Rekomendasi .....	314
2. Kesimpulan.....	315

<b>BAB 9 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA .....</b>	<b>316</b>
A. Pendahuluan .....	316
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	316
2. Dasar Hukum Kebijakan .....	319
B. Analisis Pendidikan Multikultural Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila.....	321
1. Analisis SWOT.....	321
2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	334
C. Penutup.....	340
1. Kesimpulan.....	340
2. Rekomendasi .....	342

<b>BAB 10 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF .....</b>	<b>344</b>
A. Pendahuluan .....	344
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	344
2. Landasan Hukum Kebijakan .....	348
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi .....	351

1. Analisis SWOT .....	351
2. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	381
C. Kesimpulan .....	391

## **BAB 11 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI : LITERASI DIGITAL .....393**

A. Pendahuluan.....	393
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	393
2. Dasar Hukum Kebijakan.....	395
B. Analisis Kebijakan Literasi Digital .....	402
1. Analisis SWOT .....	402
2. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	428
C. Penutup .....	437
1. Kesimpulan .....	437
2. Rekomendasi.....	438

## **BAB 12 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN KAJIAN REFORMASI .....440**

A. Pendahuluan.....	440
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	440
2. Dasar Hukum Kebijakan.....	443
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Politik Dalam Kajian Reformasi.....	446
1. Analisis SWOT .....	446
2. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	464
C. Penutup .....	471
1. Kesimpulan .....	471
2. Rekomendasi.....	472

## **BAB 13 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA TERKINI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) .....474**

A. Pendahuluan.....	474
1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	474

2. Dasar Hukum Kebijakan .....	477
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini .....	479
1. Analisis SWOT.....	479
2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	494
C. Penutup.....	496
1. Kesimpulan.....	496
2. Rekomendasi .....	496
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>498</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks SWOT Kebijakan penggunaan platform merdeka (PMM) .....	101
Tabel 2. Tabel Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Penggunaan <i>Platform</i> Merdeka Mengajar (PMM) ...	111
Tabel 3. Perhitungan IFAS dan EFAS dalam menentukan skala prioritas Analisis SWOT pada penggunaan <i>Platform</i> merdeka mengajar (PMM) .....	115
Tabel 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	116
Tabel 4. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Weakness – Threats</i> (WT) .....	117
Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT .....	147
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO) .....	149
Tabel 1. Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan mengacu pada Subarsono dalam Musfah (2022) .....	163
Tabel 2. Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	163
Tabel 3. Matriks SWOT Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia” .....	167
Tabel 4. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	169
Tabel 5. Analisis USG untuk Strategi Prioritas Kebijakan Pendidikan Tinggi .....	173
Tabel 1.1. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Keaksaraan .....	205
Tabel. Factor Internal .....	206
Tabel. Factor Eksternal .....	207
Table. Hasil Perhitungan Skor Tertinggi .....	208
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO) .....	208

Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan dan Gender .....	226
Tabel 2. Perhitungan Skor Analisis SWOT .....	237
Tabel 3. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Weakness-Threats (WT)</i> .....	239
Tabel 2. Kondisi awal dan komponen kunci pengarusutamaan gender .....	244
Tabel 1. Analisis Matriks SWOT.....	326
Tabel 2. Analisis Matriks Strategis sesuai SWOT.....	328
Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT .....	331
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i> .....	333
Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Inklusi.....	349
Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT .....	377
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i> .....	380
Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT .....	425
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i> .....	427
Tabel 1. Analisis Matriks SWOT.....	449
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i> .....	464
Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini.....	479
Tabel 1. Analisis Matriks SWOT.....	484
Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i> .....	493

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jumlah Guru dan Tenaga kependidikan Menurut Jenjang Usia tahun 2022/2023 .....	83
Gambar 2. Data Pengguna <i>Platform Merdeka Mengajar</i> per tahun 2022 .....	85
Gambar 1. Konsep <i>Link and Match</i> .....	134
Gambar 2. Dampak Revitalisasi SMK Tahun 2019.....	135
Gambar 3. Matriks SWOT Kebijakan Revitalisasi SMK.....	142
Gambar 4. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Revitalisasi SMK .....	145
Gambar 5. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	148
Gambar 1. Data Penduduk Keaksaraan.....	182
Grafik 2. Jumlah Penduduk Tuna Aksara pada tahun 2010.....	183
Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender .....	228
Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender .....	235
Gambar 3. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	238
Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial .....	307
Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	332
Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Inklusif ..	359
Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Inklusif .....	376
Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	379
Gambar 1. Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 .....	397
Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Literasi Digital.....	409
Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Literasi Digital .....	423
Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi .....	426
Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Dan Politik .....	449
Gambar 2. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan politik .....	458

Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan politik .....	463
Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini .....	484
Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini .....	489
Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini .....	492

## BAB 1

# Konsep, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, pendidikan memberikan pondasi yang kuat bagi perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat mempelajari berbagai disiplin ilmu, membantu dalam pengembangan ketrampilan intelektual, sosial, dan praktis. Sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan setara kepada seluruh warganya, suatu negara dapat menciptakan pendidikan yang lebih maju, adil, dan relevan, yang memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan bagi individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan, dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, serta membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu aspek intelektual, emosional, sosial, dan spritual, serta mempersiapkan peserta

didik untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam banyak hal, konsep dan kontribusi Ki Hajar Dewantara sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Taman Siswa dan tokoh pendidikan Indonesia, memberikan inspirasi dan landasan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Ia memperjuangkan pendidikan yang merdeka, inklusif, dan berfokus pada pembentukan karakter. Asas Tut Wuri Handayani merupakan salah satu gagasan yang awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan, serta diterima sebagai salah satu asas pendidikan nasional Indonesia. *Tut Wuri Handayani* mengandung arti “jika dibelakang memberi dorongan). Asas yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri tersebut mengandung makna *among*, *momong*, dan *ngemong*, yang berarti bahwa dalam urusan pendidikan anak tidak hanya satu pihak yang bertanggung jawab, melainkan melibatkan semua pihak untuk memberikan pengaruh yang baik dan mendukung proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan peran lingkungan yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam memelihara dan merawat anak memiliki peran yang sama-sama penting dalam memberikan asuhan dan pendidikan yang baik. Makna ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendidik anak-anak. Lingkungan yang baik dan mendukung dapat memberikan pengaruh positif dan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Asas Tut Wuri Handayani tersebut kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono (seorang filusof dan ahli bahasa) dengan

menambahkan dua semboyan *Ing Ngarso Sung Tulodo* (jika didepan memberi contoh), dan *Ing Madya Mangun Karsa* (jika di tengah membangkitkan kehendak) .

Konsep-konsep yang diusungnya terus menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia dan pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, didasarkan pada asas kemerdekaan. Ia meyakini bahwa pendidikan harus memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur kehidupannya dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat . Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan kebebasan individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, kecerdasan, dan kepribadian mereka sendiri . Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap orang lain . Ia menekankan pentingnya pendidikan yang menghasilkan manusia yang memiliki kemandirian, memiliki kepribadian yang kuat, dan dapat berperan aktif dalam masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab. Ia percaya bahwa pendidikan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur kehidupannya, tetapi tetap bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku, akan menghasilkan generasi yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Ki Hajar Dewantara juga mengutamakan pendidikan yang berkualitas dalam konsep pendidikannya. Ia percaya bahwa pendidikan harus memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan potensi individu. Dengan mengutamakan pendidikan yang berkualitas, Ki Hajar Dewantara berusaha menciptakan sistem pendidikan yang

mampu menghasilkan individu yang berpotensi, memiliki karakter yang kuat, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Pendekatan ini terus menjadi landasan dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas di Indonesia .

Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan ini ditetapkan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 . Tujuan keempat, yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 atau SDG 4, adalah "Pendidikan Berkualitas." Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memperoleh pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta kesempatan belajar sepanjang hayat. SDG 4 mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk akses yang setara terhadap pendidikan awal, dasar, menengah, dan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan keterampilan, dan penghapusan disparitas gender dalam pendidikan. Pemerintah dan organisasi lainnya berupaya untuk mencapai SDG 4 dengan mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan akses ke pendidikan, memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan memastikan bahwa pendidikan mencakup aspek inklusifitas dan kesetaraan gender . Pendidikan yang berkualitas dianggap sebagai fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena dapat memberdayakan individu untuk mencapai potensi mereka secara penuh, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mendorong inklusivitas sosial, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil pemeringkatan pendidikan terbaik di dunia tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih sangat membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Indonesia, dan terdapat tantangan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa

diantaranya adalah hasil pemeringkatan PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2018 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi yang memprihatinkan dalam hal kinerja pendidikan, yaitu urutan ke-72 dari 77 negara yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut (<https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm>). Peringkat Indonesia yang juga tidak pernah mencapai skor rata-rata negara *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) ini masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Selan itu, hasil pemeringkatan negara dengan pendidikan terbaik di dunia yang dilakukan oleh US News and World Report, BAV Group, dan Wharton School of the University of Pennsylvania tahun 2021 menetapkan bahwa peringkat Indonesia yang berada pada urutan ke-54 dari 78 negara (<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>). Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh Worldtop20.org menyatakan bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada pada urutan ke-67 dari 209 negara di dunia, yang berdampingan dengan negara Serbia di peringkat ke-68. Worldtop20.org mengumpulkan data statistik dari 6 (enam) organisasi internasional seperti OECD, PISA, UNESCO, EIU, TIMSS, dan PIRLS.

Pemeringkatan memang hanya merupakan salah satu indikator penilaian sistem pendidikan, tetapi sesungguhnya tidak melukiskan gambaran keseluruhan mengenai pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan terus bekerja meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai upaya, salah satunya adalah bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan seluruh negeri. Melalui implementasi kebijakan dan upaya kolaboratif, pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan SDGs . Pendidikan

yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan isu-isu global menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Tetapi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan kebijakan pendidikan adalah untuk memajukan pendidikan dengan cara meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, metode pengajaran, penilaian, standar pendidikan, pendanaan, pengembangan guru, infrastruktur pendidikan, dan dukungan untuk pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan juga dapat melibatkan upaya untuk memperbaiki kurangnya kesetaraan pendidikan, mengatasi masalah dropout siswa, meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan, dan mempromosikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja .

Kebijakan pendidikan biasanya melibatkan proses perumusan kebijakan, seperti penelitian, analisis data, konsultasi stakeholder, dan pembuatan regulasi atau undang-undang pendidikan. Setelah kebijakan disusun, langkah-langkah implementasi diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam sistem pendidikan, seperti pelatihan guru, penyediaan sumber daya, pembaruan kurikulum, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pendidikan juga harus dievaluasi secara teratur untuk mengukur dampak dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

mengadopsi perubahan dan penyempurnaan kebijakan yang lebih baik. Kebijakan pendidikan berperan penting dalam mengarahkan pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua individu di suatu negara atau wilayah.

## **B. Konsep, Karakteristik, Dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan melibatkan berbagai konsep, karakteristik, dan ruang lingkup yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan.

### **a. Konsep Kebijakan Pendidikan**

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan relevansi pendidikan.

#### **1) Kesetaraan Pendidikan**

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan pendidikan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, agama, gender, bahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Prinsip kesetaraan pendidikan bertujuan untuk menghapus kesenjangan pendidikan yang mungkin ada dalam masyarakat.

Berikut ini adalah contoh kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesetaraan pendidikan :

#### **a) Kebijakan Inklusi Pendidikan**

Kebijakan ini mendorong pendidikan inklusif yang memastikan bahwa individu dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan khusus mendapatkan akses yang setara dan kesempatan untuk belajar. Contohnya, pendirian kelas inklusif di sekolah-sekolah yang mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke

dalam lingkungan belajar yang sama dengan siswa lainnya.

b) Kebijakan Penghapusan Diskriminasi

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Contohnya, kebijakan yang melarang diskriminasi dalam penerimaan siswa, pengembangan kurikulum yang menghargai keberagaman, atau pelatihan guru tentang penanganan dan pengurangan bias dalam pengajaran.

c) Kebijakan Pendidikan untuk Kelompok Marginal

Kebijakan ini fokus pada meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan untuk kelompok-kelompok marginal seperti suku-suku minoritas, masyarakat miskin, anak-anak migran, anak perempuan, atau individu dengan latar belakang yang terpinggirkan. Contohnya, program pemberdayaan komunitas, bantuan transportasi untuk siswa yang tinggal di daerah terpencil, atau program remedi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.

d) Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Pendidikan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang lebih maju dan terbelakang. Contohnya, alokasi sumber daya tambahan untuk sekolah di daerah terpinggirkan, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, atau program mentoring bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

e) Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru

Kebijakan ini fokus pada meningkatkan kualitas guru di semua wilayah untuk memastikan pengajaran yang berkualitas dan setara. Contohnya, program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, peningkatan rekrutmen guru berkualitas di daerah terpencil, atau

insentif bagi guru yang mengajar di wilayah yang sulit dijangkau.

## 2) Pemerataan Pendidikan

Adapun konsep pemerataan pendidikan ini berfokus pada pengurangan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok marginal lainnya. Prinsip pemerataan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang terkait dengan pemerataan pendidikan :

### a) Kebijakan Pendidikan Zonasi

Kebijakan ini membagi suatu wilayah ke dalam zona-zona pendidikan dengan tujuan memastikan distribusi yang merata dari lembaga pendidikan di setiap zona. Hal ini membantu mengatasi ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara daerah yang lebih maju dan terbelakang.

### b) Kebijakan Pengembangan Sekolah di Daerah Terpencil

Kebijakan ini mendorong pembangunan sekolah di daerah terpencil yang mungkin memiliki akses pendidikan yang terbatas. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, rekrutmen guru yang berkualitas, dan alokasi sumber daya tambahan untuk mendukung keberhasilan pendidikan di daerah tersebut.

### c) Kebijakan Bantuan Keuangan untuk Keluarga Kurang Mampu

Kebijakan ini menyediakan bantuan keuangan, seperti beasiswa atau program bantuan biaya pendidikan, kepada keluarga yang kurang mampu secara finansial. Hal ini membantu mengurangi hambatan finansial yang mungkin

menjadi penghalang bagi individu untuk mengakses pendidikan.

d) Kebijakan Pendistribusian Guru yang Adil

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru-guru yang berkualitas didistribusikan secara merata di semua wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Hal ini dilakukan melalui insentif dan program rekrutmen khusus untuk menarik guru ke daerah-daerah yang membutuhkan.

e) Kebijakan Penyediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan ini berfokus pada pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di sekolah-sekolah. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, seperti komputer dan akses internet, serta pelatihan bagi guru dan siswa dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran.

3) Kualitas Pendidikan

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kualitas pendidikan dapat mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas sistem pendidikan, seperti kualitas kurikulum, pengajaran, penilaian, dan sumber daya pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan diarahkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan standar dan penilaian bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Standar yang jelas dan obyektif membantu meningkatkan akuntabilitas dan memberikan panduan yang jelas bagi semua stakeholder pendidikan. Pentingnya kebijakan pendidikan yang berkualitas adalah untuk memastikan bahwa setiap

individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan :

a) Kebijakan Standar Pendidikan

Kebijakan ini mengatur standar yang harus dicapai dalam hal kurikulum, penilaian, dan hasil belajar siswa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa siswa mendapatkan pembelajaran yang relevan dan berkualitas.

b) Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Guru

Kebijakan ini berfokus pada pelatihan dan pengembangan kontinu bagi guru agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini dalam pendidikan. Hal ini mencakup program pelatihan, workshop, pengawasan dan umpan balik yang berkelanjutan, serta kesempatan pengembangan profesional bagi guru.

c) Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Pendidikan

Kebijakan ini mencakup sistem penilaian dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kualitas pendidikan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan berbagai instrumen penilaian, seperti ujian nasional, penilaian formatif dan sumatif, serta penilaian kinerja guru dan sekolah.

d) Kebijakan Kurikulum yang Relevan

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini mencakup memperbarui kurikulum dengan konten yang relevan dan keterampilan yang diperlukan dalam era global, termasuk literasi digital, keterampilan kolaborasi, dan pemecahan masalah.

4) Relevansi Pendidikan

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan relevansi pendidikan menekankan pada pentingnya pendidikan yang

relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta dunia kerja. Kebijakan pendidikan yang berfokus pada relevansi pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta untuk menghadapi tantangan masa depan.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang terkait dengan relevansi pendidikan :

a) Kebijakan Peningkatan Relevansi Kurikulum

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui kurikulum dengan konten yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini melibatkan pembaruan materi pelajaran, pengenalan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, keterampilan digital, dan kemampuan kolaborasi.

b) Kebijakan Penyediaan Program Pendidikan Profesional dan Teknis

Kebijakan ini mencakup pengembangan program pendidikan yang mengarah ke sertifikasi atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan di pasar kerja. Hal ini dapat melibatkan pembentukan sekolah vokasional atau pelatihan teknis yang memberikan keterampilan praktis dan relevan kepada siswa.

c) Kebijakan Penyediaan Layanan Bimbingan dan Karir

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengidentifikasi minat, bakat, dan aspirasi karir mereka. Hal ini melibatkan penyediaan layanan bimbingan karir yang efektif, termasuk informasi tentang pilihan pendidikan dan peluang karir yang relevan dengan minat dan keahlian siswa.

d) Kebijakan Peningkatan Hubungan Sekolah-Masyarakat

Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas lokal. Hal ini melibatkan pembentukan kemitraan dengan organisasi, lembaga

pemerintah, atau komunitas lokal untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- e) Kebijakan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan  
Kebijakan ini mencakup pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial di kalangan siswa. Hal ini melibatkan pengenalan konsep-konsep kewirausahaan, pembelajaran berbasis proyek, dukungan untuk program kewirausahaan siswa, serta kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga kewirausahaan.

#### 5) Pembelajaran Sepanjang Hayat

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat melibatkan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi kesempatan pembelajaran yang berkelanjutan di semua tahap kehidupan individu. Konsep ini mengakui bahwa pembelajaran tidak terbatas pada masa sekolah atau pendidikan formal, melainkan terjadi sepanjang hidup individu dalam berbagai konteks dan tahap kehidupan. Pembelajaran sepanjang hayat mencakup kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan sepanjang rentang kehidupan individu, termasuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Konsep pembelajaran sepanjang hayat melibatkan beberapa prinsip dan konsep kebijakan yang berfokus pada pendidikan yang berkelanjutan dan terus-menerus.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat :

- a) Kebijakan Pendidikan Nonformal

Kebijakan ini mencakup penyediaan kesempatan pembelajaran di luar lingkungan formal, seperti kursus dan pelatihan keterampilan, program pengembangan diri, dan pembelajaran online. Tujuannya adalah memastikan bahwa individu dapat terus belajar dan mengembangkan

diri mereka sepanjang hayat, tidak terbatas pada lingkungan sekolah formal.

- b) Kebijakan Penyediaan Program Pendidikan Keluarga  
Kebijakan ini mencakup program pendidikan yang ditujukan untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat di dalam keluarga. Hal ini melibatkan penyediaan sumber daya, pelatihan, dan dukungan bagi orang tua untuk berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka di rumah.
- c) Kebijakan Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi  
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Hal ini melibatkan penyediaan beasiswa, program bantuan keuangan, dan program fleksibel yang memungkinkan orang dewasa untuk kembali belajar.
- d) Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau  
Kebijakan ini mengakui dan memanfaatkan pengalaman belajar sebelumnya yang dimiliki oleh individu. Hal ini dapat melibatkan penilaian kompetensi, pengakuan sertifikasi atau kualifikasi sebelumnya, dan penyediaan jalur akses ke pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja atau pembelajaran sebelumnya.
- e) Kebijakan Pengembangan Sistem Pembelajaran Online dan Jarak Jauh  
Kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur dan program pembelajaran online yang memungkinkan individu untuk belajar secara fleksibel dan mandiri, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Hal ini melibatkan penyediaan akses internet, pengembangan platform pembelajaran digital, serta pelatihan untuk guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran.

## **b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan**

Sebagai sebuah instrumen kebijakan, kebijakan pendidikan memiliki sejumlah karakteristik yang mempengaruhi implementasinya dan dampaknya terhadap sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa karakteristik umum kebijakan pendidikan:

### **1) Tujuan dan Sasaran.**

Kebijakan pendidikan biasanya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mencapai kesetaraan pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, atau mempersiapkan siswa untuk masa depan. Tujuan dan sasaran memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, kebijakan pendidikan menjadi lebih terarah dan fokus pada upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dan sasaran yang terukur memungkinkan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian kebijakan pendidikan, membantu menetapkan prioritas dalam kebijakan pendidikan, membantu menciptakan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas memberikan arah yang terukur bagi sistem pendidikan. Hal ini membantu menciptakan fokus dan konsistensi dalam upaya pendidikan.

### **2) Dasar Hukum**

Kebijakan pendidikan didasarkan pada dasar hukum yang kuat, seperti undang-undang, peraturan, keputusan, atau kebijakan lainnya. Dasar hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan meyakinkan untuk pelaksanaan kebijakan dan menjamin keadilan serta kepastian hukum. Kebijakan pendidikan yang didasarkan pada hukum memiliki legitimasi dan keabsahan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan,

melindungi dan menjamin hak-hak individu yang terkait dengan pendidikan, memberikan keberlanjutan dalam kebijakan pendidikan, memberikan kerangka hukum untuk penegakan kebijakan pendidikan, serta membantu menetapkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan.

### 3) Konteks dan Keberlanjutan.

Kebijakan pendidikan disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang relevan. Konteks merupakan faktor yang penting dalam kebijakan pendidikan. Setiap negara, daerah, atau lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan tantangan unik. Dengan memperhatikan konteks, kebijakan pendidikan dapat dirancang agar lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Konteks pendidikan terus berubah seiring waktu. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya mempengaruhi tuntutan dan tantangan dalam pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan memperhatikan konteks dan keberlanjutan, kebijakan dapat dirancang agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan dalam dunia pendidikan.

### 4) Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder.

Kebijakan pendidikan yang berhasil melibatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi mereka membantu memastikan kebijakan relevan, diterima oleh pemangku kepentingan, dan mendorong pemilikannya dalam implementasi kebijakan. Stakeholder dalam pendidikan, seperti siswa, orang tua, guru, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, memiliki kepentingan yang beragam. Melibatkan mereka dalam proses kebijakan

memungkinkan pengakuan dan penghormatan terhadap kepentingan yang berbeda-beda. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan kebutuhan dan harapan yang sebenarnya dari mereka yang terlibat dalam pendidikan. Partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam kebijakan pendidikan memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut. Ketika para stakeholder merasa terlibat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan tersebut dan berkontribusi pada implementasinya.

5) Rencana Implementasi.

Kebijakan pendidikan harus disertai dengan rencana implementasi yang jelas dan terperinci. Rencana implementasi membantu dalam memahami secara lebih rinci bagaimana kebijakan pendidikan akan dijalankan dan diimplementasikan, dan ini melibatkan identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil, peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Rencana implementasi juga membantu dalam mengorganisir dan mengoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana implementasi membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan rencana yang baik dan terperinci, sumber daya dapat dialokasikan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan, risiko dapat diidentifikasi dan dievaluasi, untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang keberhasilan implementasi.

6) Evaluasi dan Pemantauan

Kebijakan pendidikan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Evaluasi dan pemantauan membantu dalam mengukur sejauh

mana kebijakan pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, serta membantu dalam pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan pendidikan. Evaluasi dan pemantauan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dengan adanya bukti yang kuat, pengambilan keputusan dapat lebih informasional dan rasional, serta meminimalkan keputusan yang didasarkan pada asumsi atau prasangka semata. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap proses kebijakan pendidikan serta memastikan adanya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

#### 7) Fleksibilitas dan Inovasi.

Kebijakan pendidikan harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan inovasi di bidang pendidikan. Dengan adanya fleksibilitas, kebijakan pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengakomodasi kebutuhan yang baru muncul. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Kebijakan pendidikan yang fleksibel memungkinkan adanya variasi dalam strategi pembelajaran dan pendekatan pendidikan. Ini memungkinkan pemberian perhatian yang lebih baik kepada kebutuhan individual siswa, seperti menyediakan program khusus untuk anak berkebutuhan khusus, penyesuaian kurikulum untuk siswa yang berbakat, atau metode pengajaran yang berbeda untuk memenuhi gaya belajar yang beragam. Fleksibilitas dan inovasi saling terkait dalam kebijakan pendidikan. Dengan memberikan ruang bagi inovasi, kebijakan pendidikan dapat mendorong pengembangan dan penerapan metode, teknologi, dan pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Inovasi pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas,

relevansi, dan daya tarik pendidikan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa.

Karakteristik-karakteristik kebijakan pendidikan membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat memberikan arah yang jelas, mendorong perubahan yang diinginkan, dan berdampak positif pada siswa, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik ini, kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memajukan sistem pendidikan dan memberikan manfaat yang luas bagi siswa, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan.

### **c. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan**

Ruang lingkup kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan relevansi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup umum kebijakan pendidikan :

#### **1) Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah**

Kebijakan pendidikan dasar dan menengah merujuk pada kebijakan yang khusus ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) dalam sistem pendidikan. Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan untuk memastikan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak dan remaja di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang umum diterapkan :

a) Kebijakan Wajib Belajar

Kebijakan ini mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai batas usia tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar.

b) Kebijakan Kurikulum Nasional

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang mencakup mata pelajaran yang penting dan relevan, serta pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan remaja. Kurikulum nasional memberikan panduan bagi sekolah dalam merancang program pembelajaran.

c) Kebijakan Pengembangan Pendidikan Karakter

Kebijakan ini mengakui pentingnya pengembangan nilai-nilai, sikap, dan karakter positif dalam pendidikan. Hal ini melibatkan integrasi pembelajaran tentang nilai-nilai moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi dalam kurikulum.

d) Kebijakan Konseling dan Bimbingan

Kebijakan ini menekankan pentingnya konseling dan bimbingan bagi siswa dalam pengembangan potensi pribadi, pengambilan keputusan karir, dan penanganan masalah sosial dan emosional.

Kebijakan pendidikan dasar dan menengah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang produktif dan bermakna.

2) Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Kebijakan Pendidikan Kejuruan (Vocational Education and Training, VET) adalah serangkaian langkah dan kebijakan

yang diterapkan untuk memajukan dan meningkatkan sistem pendidikan kejuruan di suatu negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan memenuhi kebutuhan industri.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan kejuruan yang umum diterapkan :

a) Pembentukan Kurikulum yang Relevan

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Kurikulum kejuruan harus mencakup keterampilan teknis, pengetahuan praktis, dan keterampilan soft skills yang diperlukan oleh para pekerja di bidang tertentu.

b) Program Magang dan Kerja Praktek

Pemerintah dapat mendorong program magang dan kerja praktek yang menghubungkan siswa dengan dunia industri. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan praktis, dan memperluas jaringan profesional mereka.

c) Sertifikasi Profesi dan Standar Kompetensi

Kebijakan ini bertujuan untuk mengakui dan menghargai keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan. Pemerintah dapat menetapkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional, sehingga meningkatkan pengakuan dan mobilitas tenaga kerja kejuruan.

d) Kerja Sama dengan Industri

Kebijakan ini mendorong kerja sama aktif antara lembaga pendidikan kejuruan dengan industri. Hal ini melibatkan pengembangan kurikulum berbasis industri, penyediaan fasilitas dan peralatan yang relevan, serta kolaborasi dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

e) Pembangunan Lembaga Pendidikan Kejuruan

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas dan modern. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan bagi staf pengajar, peningkatan fasilitas, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran kejuruan.

f) Promosi dan Informasi Karir

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan informasi tentang pilihan karir di bidang kejuruan. Pemerintah dapat mengadakan program promosi karir, penyediaan informasi tentang peluang pekerjaan, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia informasi karir. Kebijakan pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, meningkatkan kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai sektor industri.

3) Kebijakan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pendidikan tinggi merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan tinggi dalam suatu negara. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, aksesibilitas, relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, dan berbagai aspek lainnya. Kebijakan pendidikan tinggi adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan sistem pendidikan tinggi di suatu negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan tinggi yang umum diterapkan :

a) Program Beasiswa

Pemerintah dapat meluncurkan program beasiswa untuk mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi bagi siswa yang kurang mampu secara finansial. Program beasiswa dapat mencakup beasiswa penuh atau sebagian, beasiswa berdasarkan prestasi akademik, beasiswa untuk kelompok-kelompok tertentu, atau program pembiayaan pendidikan yang terjangkau.

b) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tinggi, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, peningkatan kualifikasi dosen dan staf pengajar, pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta pengakuan dan peningkatan standar akreditasi.

c) Penelitian dan Inovasi

Pemerintah dapat mendorong kebijakan penelitian dan inovasi dalam pendidikan tinggi. Ini termasuk memberikan dukungan keuangan, akses ke fasilitas penelitian, dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan riset dan pengembangan teknologi.

d) Kolaborasi Internasional

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan, siswa, dan dosen, serta memperkaya lingkungan pembelajaran. Hal ini dapat melibatkan pengakuan internasional, program pertukaran mahasiswa, dan kerja sama penelitian.

e) Peningkatan Aksesibilitas

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau terbatas aksesnya. Ini dapat mencakup program pendidikan jarak jauh, program pendidikan untuk

kelompok minoritas, atau program pendidikan tinggi bagi pekerja dewasa.

f) Hubungan Industri-Perguruan Tinggi

Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan dunia industri untuk memastikan relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Ini melibatkan program magang, kerja sama riset, serta pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan industri.

Kebijakan pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, sehingga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

4) Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Kebebasan

Kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur dan mengarahkan pendidikan di luar lingkungan sekolah formal. Ini mencakup pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan kebebasan untuk kelompok-kelompok yang mungkin tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah melibatkan berbagai bentuk pendidikan yang tidak terjadi di dalam sekolah tradisional, seperti pendidikan nonformal dan informal. Contohnya termasuk pendidikan komunitas, kursus online, pelatihan keterampilan, program belajar mandiri, dan sejenisnya. Kebijakan ini berfokus pada memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang mungkin tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan seperti keterbatasan fisik, jarak, atau keterbatasan waktu.

Kebijakan Pendidikan Kebebasan, di sisi lain, menekankan pada hak individu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan, minat, dan kondisi mereka tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak pantas. Ini mencakup kebebasan memilih jenis pendidikan yang diinginkan, metode pembelajaran yang sesuai, dan materi yang relevan. Pendidikan kebebasan juga menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan individu. Kebijakan Pendidikan Kebebasan melibatkan upaya untuk memberikan pendidikan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal. Contohnya termasuk pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah konflik, migran, pengungsi, anak yang tinggal di lembaga koreksi, atau individu dengan kebutuhan khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Beberapa contoh kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Program Pendidikan Kesetaraan (Non-Formal): Pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan kesetaraan untuk individu yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Program ini dapat mencakup program pembelajaran dasar, keterampilan hidup, literasi, dan numerasi.
- b) Pendidikan Kesempatan Kedua: Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada individu yang telah keluar dari sistem pendidikan formal untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini dapat mencakup program pemulihan belajar, program diploma, atau akses ke pendidikan tinggi.
- c) Pendidikan Orang Dewasa: Kebijakan ini menargetkan pendidikan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan, memperoleh sertifikat, atau memperoleh

gelar pendidikan lanjutan. Program pendidikan orang dewasa dapat mencakup kursus *part-time*, pelatihan keterampilan, atau program pendidikan tinggi jarak jauh.

- d) Pendidikan Masyarakat: Kebijakan ini berfokus pada memberikan akses pendidikan kepada komunitas tertentu atau kelompok yang mungkin terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Contohnya termasuk program pendidikan untuk masyarakat adat, komunitas migran, atau kelompok minoritas.
- e) Pendidikan Berbasis Teknologi: Kebijakan ini mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses pendidikan kepada individu di luar sekolah formal. Ini dapat meliputi program pembelajaran online, aplikasi mobile, atau platform pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka di luar lingkungan sekolah formal.

## 5) Kebijakan Pendidikan dan Gender

Kebijakan pendidikan dan gender merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan, mempromosikan kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah gender. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Beberapa komponen penting dalam kebijakan pendidikan dan gender antara lain :

- a) Akses Pendidikan yang Merata

Kebijakan ini berupaya untuk memastikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki ke semua tingkatan pendidikan. Hal ini melibatkan mengatasi hambatan-hambatan seperti biaya, jarak, peran gender yang stereotip, dan diskriminasi yang mungkin menghalangi perempuan atau laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

b) Penghapusan Stereotip Gender dalam Kurikulum

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang tidak mempromosikan stereotip gender dan memperhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan serta laki-laki. Kurikulum yang inklusif dan beragam membantu menghapus bias gender dan memberikan contoh yang positif bagi semua siswa.

c) Pelatihan Guru tentang Kesetaraan Gender

Kebijakan ini melibatkan pelatihan guru tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan cara mengatasi bias gender dalam pengajaran. Guru yang terlatih dapat mempromosikan kesetaraan gender dalam kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif.

d) Penguatan Pendidikan Seksual

Kebijakan ini melibatkan integrasi pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dalam kurikulum. Pendidikan seksual yang baik memberikan pengetahuan yang akurat dan informasi yang relevan kepada siswa, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak reproduksi, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan diri.

e) Promosi Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Tinggi dan Bidang STEM

Kebijakan ini berfokus pada mempromosikan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Ini melibatkan pemberian dukungan khusus, beasiswa, dan

program mentorship untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karir dalam bidang tersebut.

f) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

Kebijakan ini melibatkan upaya untuk mengatasi kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan. Hal ini termasuk kebijakan perlindungan, pelatihan staf sekolah, kampanye sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari diskriminasi, dan melindungi hak-hak semua siswa tanpa memandang gender.

Kebijakan pendidikan dan gender bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi perempuan dan laki-laki. Dengan memperhatikan dan mengatasi ketimpangan gender dalam pendidikan, kebijakan ini berusaha untuk mencapai kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan antara perempuan dan laki-laki.

6) Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Kebijakan pendidikan dan mobilitas sosial adalah upaya pemerintah untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesempatan mobilitas sosial bagi individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau terbatas dalam akses ke pendidikan dan kesempatan kemajuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesempatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan dan mobilitas sosial merujuk pada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan mobilitas sosial melalui pendidikan. Kebijakan ini berfokus pada memberikan kesempatan yang adil bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka melalui pendidikan.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan mobilitas sosial :

a) Akses Pendidikan yang Merata

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnisitas. Upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

b) Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan

Kebijakan ini melibatkan penyediaan program beasiswa dan bantuan keuangan kepada individu atau kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang memiliki potensi akademik, tetapi terkendala oleh keterbatasan finansial, agar tetap dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

c) Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil atau Terpinggirkan

Kebijakan ini fokus pada pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Dengan memperluas jangkauan pendidikan, individu dan kelompok yang tinggal di daerah tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

d) Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan. Dengan membekali individu dengan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

#### e) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Melalui peningkatan standar pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan peningkatan kompetensi guru, diharapkan individu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing dalam berbagai bidang.

Dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang mendukung mobilitas sosial, diharapkan kesempatan yang lebih adil dan setara dapat diberikan kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terbatas dalam akses pendidikan. Hal ini membuka pintu bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dan ekonomi secara berkelanjutan. Melalui pendidikan yang mendukung mobilitas sosial, individu dan kelompok yang sebelumnya terbatas dalam akses pendidikan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berprestasi lebih tinggi.

#### 7) Kebijakan Pendidikan Multikultural

Kebijakan pendidikan multikultural adalah upaya pemerintah untuk mendorong pengakuan, penghargaan, dan pemahaman terhadap keragaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial dalam sistem pendidikan]. Kebijakan pendidikan multikultural merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghormati keberagaman budaya, dan mempromosikan pemahaman antarbudaya di dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi,

mendorong toleransi, dan memperkaya pengalaman pendidikan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang budaya mereka.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan multikultural :

a) Kurikulum Multikultural

Kebijakan ini mengharuskan pengembangan kurikulum yang mencerminkan keragaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat. Kurikulum harus mencakup materi, konten, dan perspektif yang menghargai keberagaman, mempromosikan toleransi, dan memperkuat pemahaman antarbudaya.

b) Pendidikan Nilai-nilai Multikultural

Kebijakan ini mendorong penyampaian pendidikan nilai-nilai multikultural di sekolah. Pendidikan ini melibatkan pengajaran tentang toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah membentuk sikap dan perilaku yang inklusif, menghormati, dan menghargai keberagaman.

c) Pelatihan Guru

Kebijakan ini melibatkan pelatihan guru dalam pemahaman dan penerapan pendidikan multikultural. Guru diberikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi pengajaran yang mempromosikan inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Mereka juga dilatih untuk mengatasi stereotip, prasangka, dan diskriminasi dalam pendidikan.

d) Kegiatan Ekstrakurikuler Multikultural

Kebijakan ini mendorong penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pemahaman dan apresiasi terhadap budaya, seni, dan tradisi yang beragam. Ini dapat mencakup festival budaya, pertunjukan seni,

diskusi lintas budaya, atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang mewakili keberagaman.

e) Penggunaan Materi Pembelajaran Multikultural

Kebijakan ini mendorong penggunaan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman dan pluralitas masyarakat. Guru diberikan akses terhadap buku teks, materi sumber daya digital, dan sumber belajar lainnya yang mencakup berbagai perspektif budaya, etnis, dan agama.

f) Dialog dan Dialog Antarbudaya

Kebijakan ini mendorong terciptanya ruang dialog dan dialog antarbudaya di lingkungan pendidikan. Ini melibatkan kegiatan seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, atau program pertukaran siswa yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda.

Melalui kebijakan pendidikan multikultural, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap inklusif, pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman budaya, dan keterampilan untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang multikultural. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan saling menghormati.

8) Kebijakan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pendidikan inklusi merujuk pada kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan segregasi atau pemisahan individu berdasarkan perbedaan mereka, dan memastikan bahwa semua siswa dapat belajar bersama dalam lingkungan

yang ramah dan mendukung. Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan inklusi :

a) Penerimaan Siswa dengan Kebutuhan Khusus

Kebijakan ini menjamin bahwa siswa dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan seperti siswa lainnya. Pemerintah melaksanakan kebijakan penerimaan yang tidak diskriminatif dan memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya pendukung yang diperlukan tersedia di setiap lembaga pendidikan.

b) Penyediaan Dukungan dan Layanan

Kebijakan ini menekankan pentingnya menyediakan dukungan dan layanan yang sesuai bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Ini termasuk pemberian bantuan pendidikan khusus, seperti pendampingan atau modifikasi kurikulum, serta pelatihan guru dalam strategi pengajaran inklusif,

c) Kurikulum Inklusif

Kebijakan ini mempromosikan pengembangan kurikulum yang inklusif, di mana kebutuhan dan kepentingan semua siswa dipertimbangkan. Kurikulum harus mencakup beragam gaya belajar, menekankan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman, serta memfasilitasi partisipasi aktif siswa dengan kebutuhan khusus.

d) Pelatihan Guru

Kebijakan ini melibatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam memahami kebutuhan dan strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Guru diberikan keterampilan dan pengetahuan untuk merancang pengalaman pembelajaran inklusif, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan individu siswa, dan bekerja sama dengan orang tua dan profesional lainnya.

e) Kolaborasi dan Kemitraan

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Kolaborasi ini mencakup berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik, serta membangun jaringan dukungan yang kuat untuk memastikan keberhasilan pendidikan inklusif.

Melalui kebijakan pendidikan inklusi, diharapkan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berhasil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman.

9) Kebijakan Pendidikan dan Teknologi Informasi

Kebijakan pendidikan dan teknologi informasi mencakup upaya pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan aksesibilitas pendidikan. Tujuannya adalah memanfaatkan potensi teknologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang terkait dengan teknologi. Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan terkait dengan teknologi informasi :

a) Infrastruktur Teknologi

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di semua lembaga pendidikan. Hal ini meliputi peningkatan akses ke internet, pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, serta

pengembangan jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya.

b) Kurikulum Berbasis TIK

Kebijakan ini mengintegrasikan teknologi informasi dalam kurikulum pendidikan, sehingga teknologi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Kurikulum ini dapat mencakup mata pelajaran khusus TIK, pengembangan keterampilan digital, dan pemanfaatan alat dan aplikasi teknologi dalam pembelajaran di berbagai disiplin ilmu.

c) Pelatihan Guru

Kebijakan ini melibatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Guru diberikan pelatihan tentang penggunaan alat dan aplikasi teknologi, strategi pengajaran berbasis TIK, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari.

d) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Kebijakan ini mendukung pengembangan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi informasi. Pemerintah memfasilitasi penerapan platform pembelajaran online, materi pembelajaran digital, dan penggunaan alat komunikasi virtual untuk memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel.

e) Penyediaan Konten Edukasi Digital

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan dan distribusi konten edukasi digital yang berkualitas. Konten edukasi ini dapat berupa e-book, video pembelajaran, aplikasi pendidikan, dan platform pembelajaran online yang menyediakan sumber daya belajar yang interaktif dan menarik.

f) Keamanan dan Perlindungan Data

Kebijakan ini mengatur perlindungan data pribadi siswa, keamanan penggunaan teknologi informasi, dan etika digital dalam konteks pendidikan. Hal ini mencakup

kebijakan privasi data, pembatasan akses, dan pengawasan penggunaan teknologi untuk melindungi siswa dari risiko dan ancaman yang mungkin timbul.

Dengan adanya kebijakan pendidikan dan teknologi informasi, diharapkan pendidikan dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting dalam era digital.

#### 10) Kebijakan Pendidikan Politik dan Kajian Reformasi

Kebijakan pendidikan politik dan kajian reformasi merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi politik siswa, serta untuk mengembangkan kajian reformasi dalam konteks pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam proses politik, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan politik, dan mendorong pemahaman tentang pentingnya reformasi dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan politik dan kajian reformasi adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan pemahaman politik dan kajian reformasi di lembaga pendidikan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik, partisipasi aktif, dan pemahaman tentang pentingnya reformasi dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh kebijakan pendidikan politik dan kajian reformasi :

##### a) Kurikulum Pendidikan Politik

Pemerintah dapat menetapkan kurikulum yang mencakup mata pelajaran atau program khusus yang membahas isu-isu politik, sistem politik, dan proses demokrasi. Kurikulum ini dapat memberikan

pemahaman mendalam tentang berbagai aspek politik dan nilai-nilai demokrasi kepada siswa.

b) Program Kajian Reformasi

Pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi program-program kajian reformasi di lembaga-lembaga pendidikan. Program ini dapat mencakup seminar, diskusi, atau penelitian tentang perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta peran individu dalam mendorong reformasi.

c) Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga pemerintah yang terkait dengan politik dan reformasi, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga penelitian, untuk memperkuat pendidikan politik dan kajian reformasi. Kolaborasi ini dapat mencakup penyelenggaraan seminar, diskusi, atau program pelatihan.

Melalui kebijakan pendidikan politik dan kajian reformasi, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta pentingnya perubahan positif dalam masyarakat. Ini akan membantu mereka menjadi warga negara yang aktif, berpikiran kritis, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

11) Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini

Kebijakan pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai inisiatif dan program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan penting di Indonesia :

a) Kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar

Kurikulum 2013 adalah kebijakan pendidikan yang menggantikan Kurikulum 2006. Kurikulum 2013

menekankan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengutamakan pengembangan keterampilan abad ke-21, dan memperkuat karakter pendidikan. Kurikulum ini memberikan penekanan pada literasi, numerasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan pendidikan terkini, yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian dan fleksibilitas dalam proses belajar-mengajar. Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan kepada siswa, guru, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih variatif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masing-masing individu.

b) Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan pendidikan berupa tunjangan biaya pendidikan, beasiswa, bantuan seragam, dan dukungan lainnya kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu.

c) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar adalah program pemerintah yang memberikan bantuan pendidikan berupa uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan. Program ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, seperti biaya sekolah, buku, dan seragam.

d) Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Sekolah adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa di Indonesia. Program ini

mencakup pengembangan perpustakaan sekolah, pelatihan guru, dan kegiatan-kegiatan literasi di sekolah.

e) Program Guru Garis Depan (GGD)

Program Guru Garis Depan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Program ini melibatkan penempatan guru di daerah-daerah tersebut untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa dan masyarakat setempat.

f) Program Beasiswa Unggulan (Bidikmisi)

Program Beasiswa Unggulan atau Bidikmisi adalah program beasiswa yang diberikan kepada siswa berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa berpotensi dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

### C. Penutup

Beberapa kesimpulan terkait dengan konsep, karakteristik, dan ruang lingkup kebijakan pendidikan adalah :

- 1) Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, dan kebijakan pendidikan yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu, memperkuat ekonomi, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 2) Akses yang adil dan kesetaraan dalam pendidikan adalah aspek penting dari kebijakan pendidikan, maka semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kecacatan.
- 3) Kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum

yang relevan, metode pengajaran yang efektif, pelatihan guru yang baik, dan fasilitas pendidikan yang memadai.

- 4) Kebijakan pendidikan yang berhasil, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, dan siswa dalam proses pengambilan keputusan pendidikan, pengawasan terhadap kualitas pendidikan, dan dukungan terhadap proses pembelajaran.
- 5) Kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan pembiayaan yang memadai. Sumber daya yang mencukupi harus dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas, memperbarui kurikulum, memberdayakan guru, dan menyediakan bantuan finansial bagi siswa yang membutuhkannya.
- 6) Evaluasi dan pemantauan yang efektif harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Pemantauan berkala tentang pencapaian siswa, kualitas pengajaran, dan efektivitas kebijakan diperlukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Kesimpulannya, kebijakan pendidikan yang baik dan komprehensif adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada akses yang adil, kualitas pendidikan yang tinggi, inklusi, partisipasi masyarakat, pembiayaan yang memadai, serta evaluasi dan pemantauan yang efektif, kebijakan pendidikan dapat memberikan manfaat besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## BAB 2

# Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Dunia pendidikan terus mengalami perkembangan dengan pesat, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan inovasi. Inovasi pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan yang ada, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Inovasi pendidikan didorong oleh pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan bahwa pendidikan harus dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inovasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, relevan, dan efektif bagi siswa, dan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan mengadopsi inovasi-inovasi ini, diharapkan bahwa pengalaman belajar siswa akan lebih positif, mendorong perkembangan mereka secara holistik, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan.

Melalui berbagai inovasi, pendidikan dapat menjadi lebih efektif, relevan, dan memenuhi kebutuhan siswa, karena inovasi memberikan solusi kreatif dan terobosan dalam memecahkan tantangan pendidikan, serta membantu mengatasi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Misalnya, dengan mengembangkan program pendidikan yang lebih relevan dengan dunia kerja, mengintegrasikan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, mengembangkan strategi

pembelajaran yang beragam, memanfaatkan teknologi pendidikan, atau meningkatkan aksesibilitas fisik dan pendukung untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang ditinggalkan dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan pun dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan yang dihadapi dengan adanya inovasi, sehingga memberikan pengalaman pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan relevan bagi semua siswa.

Kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong inovasi dalam sistem pendidikan. Sebagai panduan dan kerangka kerja, kebijakan pendidikan menetapkan tujuan, standar, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan inovasi yang efektif. Standar ini mendorong pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan memastikan implementasinya yang sukses. Kebijakan pendidikan juga dapat menciptakan kerangka kerja dan mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pemerintah, sektor industri, organisasi masyarakat, dan peneliti, dalam mendukung inovasi pendidikan yang lebih holistik, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kebijakan yang mendukung, fleksibel, dan progresif, dapat memberikan ruang bagi eksperimen dan pengembangan solusi inovatif untuk menghadapi masalah seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya relevansi kurikulum, atau kurangnya akses dan kualitas pendidikan. Inovasi yang terbukti berhasil dapat memberikan dasar bagi perubahan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Contohnya, hasil inovasi dalam penilaian formatif dapat mendorong kebijakan untuk memperkenalkan penilaian yang lebih holistik dan berpusat pada pembelajaran. Maka dengan merumuskan ataupun melakukan perubahan pada kebijakan yang mendukung dan mendorong inovasi, pemerintah dapat memberikan arah bagi pengembangan pendekatan, metode, dan teknologi baru dalam pendidikan.

## **B. Inovasi Dan Perubahan Dalam Kebijakan Pendidikan**

Perubahan dalam kebijakan pendidikan diperlukan agar sistem pendidikan dapat merespons perubahan ini dengan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan masa depan. Siswa perlu dilengkapi dengan keterampilan digital, literasi teknologi, pemahaman tentang penggunaan teknologi yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah, untuk berhasil dalam lingkungan kerja yang kompleks dan berubah-ubah, sekaligus membantu siswa memahami tantangan global. Alasan mengapa persiapan keterampilan ini penting, yaitu :

- 1) Dunia kerja terus berubah dan berkembang dengan cepat, terutama dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi. Peserta didik yang dilengkapi dengan keterampilan adaptabilitas akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, mempelajari hal baru, dan menghadapi tantangan dengan fleksibilitas.
- 2) Teknologi telah menjadi bagian integral dalam hampir semua bidang pekerjaan. Peserta didik yang memiliki keterampilan teknologi yang baik akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja. Mereka harus mampu menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang kemampuan dan aplikasi teknologi terkini.
- 3) Kolaborasi tim dan komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang sangat dihargai dalam dunia kerja. Peserta didik perlu belajar bekerja dalam tim, berbagi ide, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berbagai konteks.
- 4) Kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat penting dalam menghadapi tantangan dan menemukan solusi inovatif. Peserta didik perlu dilatih untuk mengembangkan keterampilan ini, seperti kemampuan analitis, pemecahan

masalah, berpikir kritis, berimajinasi, dan menghasilkan ide-ide baru.

- 5) Peserta didik perlu memperoleh keterampilan belajar seumur hidup, yaitu kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia kerja. Mereka harus memiliki motivasi intrinsik untuk belajar, kebiasaan mandiri dalam mencari informasi, dan keterampilan metakognitif untuk mengatur belajar mereka sendiri.

Keterampilan yang relevan dengan dunia kerja memberikan peserta didik fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi dalam mengembangkan karier mereka. Mereka dapat dengan mudah beralih ke bidang atau sektor yang berbeda, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, dan memanfaatkan peluang karier yang muncul.

Selain itu, inovasi pendidikan juga dapat memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan, gaya, dan minat mereka sendiri. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran dapat disesuaikan dengan preferensi, gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Ini bisa dilakukan melalui penggunaan platform pembelajaran online yang menyediakan materi dan aktivitas yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan individu, serta melalui sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan dan konten pembelajaran berdasarkan kemajuan siswa. Beberapa cara di mana inovasi pendidikan dapat mendukung personalisasi pembelajaran adalah:

- 1) Pembelajaran berbasis siswa, dimana dalam pendekatan personalisasi pembelajaran, siswa ditempatkan di pusat proses pembelajaran. Guru menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Ini bisa dilakukan

melalui penyesuaian tingkat kesulitan, penggunaan bahan pembelajaran yang beragam, dan memberikan pilihan aktivitas yang sesuai dengan minat dan preferensi siswa.

- 2) Teknologi pembelajaran adaptif yang memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dengan menggunakan algoritma yang cerdas, platform pembelajaran adaptif dapat secara otomatis menyesuaikan konten, tingkat kesulitan, dan aktivitas pembelajaran berdasarkan respons dan kemajuan siswa. Ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar dalam tempo mereka sendiri, mengatasi kesulitan secara individual, dan mencapai pencapaian yang optimal.
- 3) Pemahaman kepribadian siswa untuk mengetahui minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan memperoleh informasi ini, guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan preferensi siswa, seperti menggunakan metode pengajaran yang cocok, memberikan tugas yang relevan dengan minat mereka, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung.
- 4) Personalisasi pembelajaran melibatkan memberikan siswa pilihan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Ini bisa berarti memberikan pilihan topik, tugas, atau metode evaluasi yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, memberikan fleksibilitas dalam jadwal belajar, pengaturan kerja kelompok, atau pendekatan pembelajaran yang berbeda dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.

Dengan personalisasi pembelajaran, peserta didik dapat merasakan bahwa pembelajaran mereka relevan, berarti, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pencapaian siswa secara keseluruhan, sambil membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dan karier mereka.

## **C. Inovasi Pendidikan dalam Konteks Perubahan Kebijakan Pendidikan**

Inovasi pendidikan dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan melibatkan pengembangan dan penerapan ide-ide baru, strategi, atau praktik yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan pendidikan yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, relevansi, dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Langkah inovasi pendidikan dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan antara lain adalah :

### a. Analisis kebijakan pendidikan yang ada

Langkah pertama dalam inovasi pendidikan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pendidikan yang sudah ada. Hal ini melibatkan mengidentifikasi kelemahan, tantangan, atau kesenjangan yang mungkin ada dalam kebijakan pendidikan yang sedang berjalan. Analisis ini dapat melibatkan pengumpulan data, penelitian, kajian literatur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan .

### b. Identifikasi kebutuhan dan tujuan

Setelah menganalisis kebijakan pendidikan yang ada, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan kebijakan. Hal ini dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Tujuan perubahan kebijakan dapat berkaitan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, mengatasi ketimpangan pendidikan, meningkatkan relevansi kurikulum, atau mempromosikan inklusi dan keadilan pendidikan.

### c. Pengembangan ide-ide baru dan strategi

Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, langkah berikutnya adalah mengembangkan ide-ide baru dan strategi yang inovatif untuk mencapai perubahan kebijakan yang diinginkan. Ini dapat melibatkan penelitian, benchmarking dengan praktik terbaik di tingkat nasional atau internasional,

dan melibatkan ahli pendidikan, akademisi, atau konsultan untuk memberikan wawasan dan saran.

d. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan

Inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan harus melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, forum, survei, atau pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait. Melibatkan pemangku kepentingan akan memastikan bahwa perubahan kebijakan didasarkan pada pemahaman yang lebih luas dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

e. Implementasi dan pemantauan

Setelah mengembangkan perubahan kebijakan pendidikan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap efektivitasnya. Implementasi dapat melibatkan pengembangan pedoman, panduan, atau peraturan yang mendukung perubahan kebijakan, serta penyediaan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Pemantauan terus-menerus akan membantu mengukur dampak dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan agar kebijakan menjadi lebih efektif.

Dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan, inovasi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan sistem pendidikan. Melalui pengembangan ide-ide baru, strategi inovatif, dan pelibatan pemangku kepentingan yang beragam, inovasi pendidikan dapat menciptakan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan bagi semua peserta didik. Upaya menggabungkan inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan, dapat mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan bagi semua peserta didik.

Menggabungkan inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada, diantaranya melalui upaya :

a. Pengumpulan dan pemanfaatan data

Pengumpulan data pendidikan yang komprehensif dan relevan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan kebijakan. Mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pendidikan dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif. Informasi ini dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan menginformasikan pengembangan kebijakan yang lebih baik.

b. Penelitian dan pemantauan

Perubahan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan penelitian yang cermat. Pemerintah dan institusi pendidikan harus memprioritaskan penelitian pendidikan yang berfokus pada inovasi dan pengukuran dampaknya. Pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan baru juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitasnya.

c. Kolaborasi antara pemangku kepentingan

Untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan komunitas pendidikan lainnya. Kolaborasi ini harus melibatkan diskusi terbuka, berbagi ide, dan kerja sama untuk mengidentifikasi inovasi pendidikan yang paling efektif.

d. Menggabungkan perspektif global

Perubahan kebijakan pendidikan harus mengambil contoh dan pembelajaran dari pengalaman internasional. Melibatkan ahli pendidikan, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara

dapat membantu dalam pertukaran ide, transfer pengetahuan, dan mengadopsi praktik terbaik dari seluruh dunia.

e. Stimulasi kreativitas dan kewirausahaan

Dalam merancang kebijakan pendidikan, penting untuk memberikan ruang bagi inisiatif kreatif dan kewirausahaan dalam pendidikan. Ini dapat mencakup dukungan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan proyek inovatif, pendekatan pembelajaran yang berbeda, atau penggunaan teknologi baru. Mendorong kreativitas akan membuka peluang untuk eksperimen dan mengidentifikasi solusi baru yang dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar.

Melalui penggabungan inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan akses, dan persiapan siswa untuk menghadapi tuntutan masa depan.

#### **D. Program Inovatif dalam Kebijakan Pendidikan**

Ada banyak contoh program inovatif dalam kebijakan pendidikan yang dapat dicetuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah, dan yang populer saat ini adalah program-program inovatif yang dicetuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang disebut dengan “Merdeka Belajar”. Esensi dari kebijakan pendidikan Merdeka Belajar adalah memberikan ruang dan kesempatan kepada para guru dan peserta didik untuk menggali potensi terbesar mereka dalam inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan yang mandiri, guru dan peserta didik diharapkan tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang konvensional, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi nyata dalam pendidikan. Mandiri dalam konteks Merdeka Belajar berarti guru memiliki kebebasan dalam merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif, mengembangkan bahan ajar yang kreatif, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang relevan. Guru juga didorong

untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka melalui pelatihan dan pengembangan diri secara mandiri. Peserta didik juga diberikan kebebasan untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan inisiatif dan kreativitas mereka, serta mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Mereka didorong untuk menjadi subjek aktif dalam belajar, mencari pengetahuan di luar ruang kelas, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Adanya inovasi pendidikan yang muncul dari pendekatan Merdeka Belajar, diharapkan kualitas pembelajaran akan meningkat secara signifikan. Guru dapat menjadi agen perubahan yang menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan berdampak positif pada peserta didik. Sementara itu, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang esensial untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan kata lain, konsep Merdeka Belajar membuka pintu bagi inovasi dan peningkatan kualitas pembelajaran secara mandiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik.

Dalam melaksanakan Merdeka Belajar, setiap unit pendidikan memiliki kemerdekaan untuk berinovasi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kondisi lokal mereka. Ini berarti bahwa unit pendidikan dapat mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai budaya, dan karakteristik siswa di wilayah tersebut. Misalnya, unit pendidikan di daerah pedesaan dengan infrastruktur terbatas dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dengan sumber daya yang tersedia. Mereka dapat memanfaatkan metode pembelajaran berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Sementara itu, unit pendidikan di daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi mungkin mengadopsi

pendekatan pembelajaran yang lebih berbasis teknologi. erdeka Belajar juga menghargai kearifan lokal dan budaya setiap wilayah. Unit pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Hal ini membantu menjaga keberagaman budaya dan identitas lokal dalam proses pendidikan. Dengan memberikan kemerdekaan kepada unit pendidikan untuk berinovasi sesuai dengan konteks mereka, Kebijakan Merdeka Belajar memungkinkan pengembangan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berdampak positif bagi siswa. Ini juga mendorong pemberdayaan unit pendidikan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang unik di lingkungan mereka, serta mencari solusi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Masih dalam konteks kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, eknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengimplementasikan inovasi pendidikan. Teknologi tidak hanya terbatas pada platform online, tetapi juga mencakup berbagai macam alat dan media pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, pendekatan Merdeka Belajar dapat diperluas dan ditingkatkan. Berbagai platform pembelajaran online, aplikasi mobile, perangkat interaktif, dan sumber daya digital dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan berbasis proyek. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan konten pendidikan yang kaya, mendukung pembelajaran berbasis penemuan, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran hybrid yang lebih fleksibel. Ini penting terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19, di mana akses ke pembelajaran online menjadi sangat penting untuk melanjutkan proses pendidikan. Dengan teknologi, guru dapat memberikan materi pembelajaran secara virtual, menyediakan tugas dan latihan online, serta mengadakan

diskusi dan interaksi secara daring. Selain teknologi online, media tradisional seperti televisi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. Melalui kerjasama dengan stasiun televisi, program pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum dapat disiarkan secara terjadwal untuk mencapai siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat elektronik. Hal ini membantu memastikan inklusivitas dalam pendidikan dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memungkinkan adanya beragam pendekatan dan inovasi, serta memperluas akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa akses ke teknologi merata dan pelatihan yang cukup diberikan kepada guru dan siswa agar mereka dapat memanfaatkannya secara efektif dalam meningkatkan pembelajaran.

Sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, ada sebanyak 24 (dua puluh empat) episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi pada kajian buku ini, dipilih 10 (sepuluh) episode yang dinilai cukup relevan dengan topik kajian buku ini.

### **1) Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar**

Episode 1 terkait empat pokok kebijakan Merdeka Belajar terdiri atas :

#### **a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)**

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah ujian yang dilaksanakan oleh sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. USBN bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam bidang akademik. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) di Indonesia, terdapat semangat untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. Tujuan utama UU Sisdiknas

adalah memperkuat peran sekolah dalam proses pembelajaran, termasuk penilaian dan penentuan kelulusan siswa. Namun, implementasi dari semangat tersebut terkadang terbatas oleh adanya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). USBN merupakan ujian nasional yang bersifat standar untuk menentukan kelulusan siswa di tingkat sekolah menengah. USBN melibatkan ujian yang dilaksanakan secara nasional, sehingga secara tidak langsung mengikat kebijakan penentuan kelulusan siswa. Keterbatasan ini menyebabkan sekolah tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kelulusan berdasarkan penilaian internal mereka sendiri. USBN memberikan bobot penilaian yang signifikan dalam proses kelulusan siswa.

Arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar menetapkan bahwa sejak tahun 2020, USBN akan diganti dengan Ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan kebebasan lebih kepada guru dan sekolah dalam menilai kompetensi siswa serta mengadopsi metode penilaian yang lebih komprehensif. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tes tertulis, portofolio, penugasan kelompok, karya tulis, dan metode penilaian lainnya yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas dan mendalam dari pembelajaran siswa, sehingga guru dan sekolah memiliki kemerdekaan ataupun keleluasaan yang lebih besar dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Dengan memberikan kemerdekaan kepada guru dan sekolah dalam menilai hasil belajar siswa, diharapkan pendekatan ini dapat mendorong pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengakomodasi keberagaman siswa. Hal penting dari arah baru dari kebijakan ini adalah untuk memastikan adanya pedoman dan kerangka evaluasi yang jelas, serta pelatihan

yang memadai bagi guru agar dapat melaksanakan penilaian dengan baik dan adil. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara holistik dalam konteks Merdeka Belajar.

#### **b. Ujian Nasional (UN)**

Salah satu kritik terhadap Ujian Nasional (UN) adalah bahwa materi yang diujikan terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung fokus pada menguji penguasaan konten daripada pengembangan kompetensi penalaran dan pemahaman konsep secara mendalam. Hal ini bisa menyebabkan proses pembelajaran di sekolah cenderung menjadi lebih terfokus pada menyelesaikan materi yang diujikan, sehingga aspek penalaran, pemecahan masalah, dan penerapan konsep dalam situasi nyata bisa kurang mendapat perhatian yang cukup. Sehingga Ujian Nasional (UN) dinilai telah menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua, karena tekanan yang timbul sebagai indikator tunggal keberhasilan siswa sebagai individu. Banyak yang berpendapat bahwa peran UN seharusnya lebih berfokus pada pemetaan mutu sistem pendidikan nasional secara keseluruhan daripada hanya sebagai penilaian individu siswa. Dalam konteks Kebijakan Merdeka Belajar, terdapat upaya untuk mengubah paradigma penilaian siswa dengan lebih menekankan pada penilaian yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Hal ini mencakup penggunaan berbagai bentuk penilaian, seperti portofolio, penugasan kelompok, karya tulis, dan metode penilaian lainnya yang mencerminkan kemampuan dan prestasi siswa secara lebih luas.

Arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar menetapkan bahwa tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Mulai pada tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei

Karakter. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih holistik dan menggambarkan kompetensi siswa secara lebih komprehensif. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan menilai pencapaian kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa pada tingkat pendidikan tertentu. AKM akan melibatkan berbagai bentuk penilaian, termasuk tes tertulis, penugasan, proyek, portofolio, dan observasi langsung. Dengan pendekatan ini, penilaian akan lebih fokus pada pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata. Survei Karakter juga akan menjadi bagian dari penilaian dalam sistem AKM. Survei Karakter akan mengukur aspek-aspek kepribadian dan karakter siswa, seperti sikap, nilai-nilai, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Survei Karakter bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter dan membantu mengembangkan siswa secara holistik. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem evaluasi pendidikan yang lebih menyeluruh, menggambarkan kemampuan siswa secara lebih akurat, dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada siswa, orang tua, guru, dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter memang dapat mengacu pada praktik baik yang telah diterapkan di tingkat internasional, seperti *Program for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*. PISA adalah suatu program asesmen yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan pengetahuan serta keterampilan siswa dalam konteks kehidupan nyata. PISA menilai kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains, serta aspek

lain seperti literasi finansial dan pemecahan masalah. Adapun TIMSS adalah suatu studi internasional yang dilakukan oleh *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) untuk mengevaluasi pencapaian siswa dalam bidang matematika dan sains. TIMSS memberikan informasi tentang pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam konteks akademik. Kedua program tersebut merupakan referensi penting dalam pengembangan sistem evaluasi pendidikan di berbagai negara, termasuk dalam konteks perubahan UN menjadi AKM dan Survei Karakter di Indonesia. Dengan mengacu pada praktik baik tersebut, diharapkan evaluasi pendidikan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa dan pengembangan karakter mereka.

### **c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Guru diarahkan untuk mengikuti format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terkadang terlalu kaku dan memiliki banyak komponen. RPP yang membutuhkan penulisan yang sangat rinci dan panjang dapat menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya dapat digunakan untuk fokus pada persiapan dan evaluasi proses pembelajaran yang lebih substansial. Arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar menetapkan bahwa guru diberikan kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya pengajaran mereka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan efektif. Dengan adanya kebebasan ini, guru dapat menyesuaikan format RPP dengan cara yang paling cocok untuk mereka dan siswa. Mereka dapat memilih format yang lebih sederhana dan ringkas, tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi dalam penulisan yang terlalu

rinci. Guru juga dapat menggunakan format yang lebih kreatif dan interaktif, yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

Dalam konsep Merdeka Belajar, terdapat 3 (tiga) komponen inti dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memungkinkan ditulis cukup dalam 1 (satu) halaman saja. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuan Pembelajaran berisi pernyataan yang jelas dan spesifik tentang apa yang diharapkan siswa capai setelah mengikuti pembelajaran. Kegiatan Pembelajaran berisi deskripsi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, termasuk strategi pengajaran, metode, pendekatan, dan sumber belajar yang akan digunakan. Asesmen merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana akan dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa, berupa tes, penugasan, proyek, portofolio, atau bentuk penilaian lainnya yang sesuai dengan kompetensi yang dievaluasi. Ketiga komponen tersebut dianggap sebagai komponen inti yang harus ada dalam RPP, sementara komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri oleh guru. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

#### **d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi**

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi adalah kebijakan yang diimplementasikan dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan, serta mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang terletak di daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam PPDB Zonasi, setiap wilayah atau zona geografis dibagi menjadi zona-zona tertentu. Siswa

yang tinggal di zona tertentu memiliki prioritas untuk diterima di sekolah-sekolah yang berada di zona tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa-siswa di sekitar sekolah memiliki akses yang lebih mudah dan setara dalam mendapatkan pendidikan. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat mengimplementasikan prinsip Tripusat Pendidikan yang melibatkan peran aktif dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, PPDB dapat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Tetapi pada tataran implementasi, PPDB yang melibatkan zonasi belum selalu berjalan lancar di semua daerah, kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah, dan belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Sehingga arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar membuat kebijakan PPDB zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Pembagian zonasi yang pada awalnya terbagi atas 3 (tiga) jalur, yaitu jalur Zonasi (minimal 80%), jalur Prestasi (15%), dan jalur perpindahan (5%), selanjutnya berubah menjadi 4 (empat) jalur yaitu jalur Zonasi (minimal 50%), jalur Afirmsi (minimal 15%), jalur Perpindahan (maksimal 5%), dan jalur Prestasi (sisanya 0 - 30%) disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan demikian, maka daerah memiliki kewenangan untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan pendidikan di wilayah mereka. Dengan adanya kewenangan daerah dalam menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi, diharapkan implementasi PPDB dengan sistem zonasi dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Hal ini juga dapat membantu mencapai tujuan

pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan secara lebih efektif di tingkat daerah.

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada PPDB dengan sistem zonasi, tetapi juga memerlukan inisiatif lain dari pemerintah daerah. Salah satu inisiatif yang penting adalah redistribusi guru ke sekolah yang mengalami kekurangan guru. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis mendalam terkait jumlah guru yang tersedia di setiap sekolah dan memperhatikan kebutuhan guru di setiap wilayah. Jika terdapat sekolah yang kekurangan guru, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk memindahkan atau mendistribusikan guru yang berlebih dari sekolah-sekolah lain ke sekolah tersebut. Selain redistribusi guru, pemerintah daerah juga dapat mengambil inisiatif lain untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti memberikan insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Peningkatan kualitas pendidikan juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan menggabungkan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara holistik di tingkat daerah.

## **2) Kampus Merdeka**

Episode 2 terkait Kampus Merdeka memiliki pokok kebijakan yang terdiri atas :

### **a. Pembukaan Program Studi Baru**

Sejak diperkenalkannya kebijakan Kampus Merdeka di Indonesia, ada perubahan dalam kebijakan pembukaan program studi baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kebijakan Kampus Merdeka memberikan otonomi kepada PTN dan PTS untuk membuka

program studi baru dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : (1) Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B, (2) Program Studi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 Ranking QS, dan (3) Program Studi baru yang diusulkan tersebut bukan di bidang Kesehatan atau Pendidikan. Selain itu, jika dulunya Program Studi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C), dengan arah kebijakan baru pada episode ini, Program Studi baru otomatis akan mendapatkan akreditasi C jika program studi baru tersebut diajukan oleh Perguruan Tinggi dengan status akreditasi A atau B (<https://pusdatin.kemdikbud.go.id/kebijakan-kampus-merdeka-beri-otonomi-perguruan-tinggi-buka-prodi-baru/>).

#### **b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi**

Sebelumnya, Setiap perguruan tinggi dan program studi diwajibkan untuk menjalani proses akreditasi setiap 5 tahun. Proses ini melibatkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertanggung jawab untuk menilai kualitas dan standar pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan kebijakan baru, akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT akan berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Ini berarti perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi tidak perlu mengajukan perpanjangan secara aktif setelah periode 5 tahun. Namun, penting untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tetap dipertahankan selama periode tersebut. Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B atau C memiliki kesempatan untuk mengajukan kenaikan akreditasi secara sukarela. Ini berarti mereka dapat mengajukan permohonan untuk meningkatkan status akreditasi mereka jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAN-PT. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih

banyak otonomi kepada perguruan tinggi dan memfasilitasi proses akreditasi yang lebih efisien.

Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan kembali oleh BAN-PT jika ada beberapa indikasi penurunan mutu yang dapat memicu peninjauan ulang. Misalnya terdapat pengaduan masyarakat terkait mutu atau kualitas suatu perguruan tinggi atau program studi tertentu, dan pengaduan tersebut disertai dengan bukti konkret, BAN-PT dapat melakukan peninjauan ulang akreditasi untuk mengevaluasi keadaan tersebut. Indikasi lainnya adalah jika jumlah pendaftar dan lulusan dari perguruan tinggi atau program studi tertentu mengalami penurunan secara drastis selama lima tahun berturut-turut, hal ini dapat menjadi indikasi penurunan kualitas. Dalam situasi-situasi seperti ini, BAN-PT dapat memilih untuk melakukan peninjauan ulang akreditasi untuk mengevaluasi mutu dan kualitas perguruan tinggi atau program studi tersebut (<https://lldikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/256>).

### **c. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum**

Pada kebijakan sebelumnya, PTN diwajibkan memperoleh akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, dan mayoritas program studi PTN harus terakreditasi A sebelum PTN tersebut dapat memperoleh status Badan Hukum. Dalam arah kebijakan baru, persyaratan untuk mendapatkan status Badan Hukum (BH) lebih dipermudah bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker). PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum tanpa ada persyaratan akreditasi minimum yang ditentukan. Jika PTN merasa sudah memiliki persiapan yang memadai dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, PTN dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Badan Hukum (BH) kapan pun, dan tidak ada batasan waktu tertentu yang ditentukan untuk mengajukan permohonan tersebut (<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/>

*transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/*).

#### **d. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi**

Arah kebijakan baru ini lebih dikenal dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dasar pelaksanaan dari kebijakan ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menguraikan tentang kebijakan yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau di program studi. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi minat, minat lintas disiplin, atau mengambil mata kuliah yang tidak tersedia di program studi mereka. Batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, memberikan kejelasan tentang jangka waktu di mana mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi. Adanya batasan jumlah SKS yang harus diambil di program studi asal (sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan) memberikan kepastian bahwa mahasiswa tetap fokus pada mata kuliah yang relevan dengan program studi mereka dan menjaga kemajuan akademik yang baik. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu menyediakan sistem yang memadai untuk memfasilitasi pengambilan SKS di luar perguruan tinggi atau di program studi yang berbeda. Hal ini melibatkan pengaturan prosedur pendaftaran, transfer kredit, dan pengakuan hasil belajar yang diperoleh di tempat lain. Hal ini dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan pengambilan mata kuliah secara efektif. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pengalaman pembelajaran yang beragam. Dengan mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi atau di program studi yang berbeda,

mahasiswa dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan lintas disiplin.

Perubahan definisi SKS yang mengartikannya sebagai "jam kegiatan" bukan "jam pembelajaran" memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pengertian dan penggunaan SKS dalam konteks pendidikan tinggi. Pengertian "jam kegiatan" dalam definisi SKS menunjukkan bahwa SKS tidak hanya terkait dengan jam tatap muka dalam kelas, tetapi juga mencakup berbagai jenis kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran. Hal ini memperluas ruang lingkup SKS dan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang beragam. Kegiatan belajar yang dapat diambil oleh mahasiswa termasuk belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pengalaman nyata di luar lingkungan kelas tradisional, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang berbeda sesuai minat dan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini dapat mendorong eksplorasi, inovasi, dan pengembangan potensi mahasiswa secara lebih holistik. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat ditentukan oleh pemerintah atau disetujui oleh rektor perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi dalam menentukan jenis kegiatan yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar memiliki kebebasan dalam memilih dan menguasai berbagai keilmuan yang berguna

untuk memasuki dunia kerja. Dalam kerangka Kampus Merdeka, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kompetensi lintas disiplin, mengikuti program perkuliahan yang lebih fleksibel, dan memperoleh pengalaman nyata di luar kelas melalui magang, wirausaha, atau kegiatan lainnya. Tujuannya adalah memberikan mahasiswa kesempatan untuk menggali minat, bakat, dan potensi mereka secara lebih luas, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kehidupan dan karir setelah lulus. Kebijakan Kampus Merdeka berupaya melibatkan mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran, mendorong kreativitas, inovasi, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Dengan demikian, diharapkan lulusan perguruan tinggi dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

### **3) Perubahan Mekanisme Dana BOS**

Perubahan Mekanisme Dana BOS adalah episode ke 3 dari Merdeka Belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah di tingkat dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Dalam program ini, dana BOS diberikan kepada sekolah untuk mendukung berbagai keperluan operasional yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung administrasi kegiatan sekolah (seperti biaya pengelolaan dan pemeliharaan data siswa, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum sekolah), membeli dan memperbarui alat-alat pembelajaran yang diperlukan di sekolah (seperti buku teks, alat peraga, laboratorium, komputer, dan perangkat pembelajaran lainnya), membayar honorarium bagi tenaga pendidik (termasuk guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah), memperluas dan memperbarui koleksi buku di perpustakaan

sekolah, serta untuk memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana sekolah (seperti perbaikan bangunan, perawatan taman, peningkatan aksesibilitas, dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya).

Pada tataran implementasi, sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS. Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengakibatkan sekolah harus menalangi biaya operasional awal tahun dan keterlambatan penyaluran dana BOS tentu dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional sekolah dan proses pembelajaran siswa. Demikian juga dengan implementasi pada alokasi penggunaan, banyak guru honorer yang mengabdikan tanpa penghasilan yang layak, karena penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana BOS juga digunakan untuk keperluan lain yang mendukung operasional sekolah. Namun, karena batasan tersebut, seringkali alokasi dana BOS untuk honor guru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh guru honorer di sekolah, sehingga tidak sedikit guru honorer yang bekerja tanpa mendapatkan penghasilan yang memadai. Sedangkan di sisi lain, kepala sekolah memiliki keterbatasan ruang untuk meningkatkan penghasilan guru honorer terbaik di sekolahnya atau untuk membiayai tenaga kependidikan di sekolah.

Arah baru kebijakan pendidikan merdeka belajar pada episode ini, terjadi perubahan mekanisme dana BOS dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

- a. Sebagai upaya untuk mempercepat penerimaan dana BOS serta mengurangi beban administrasi sekolah, pemerintah telah mengadopsi kebijakan penyaluran dana BOS secara langsung ke rekening sekolah. Dengan penyaluran langsung ke rekening sekolah, proses administrasi yang melibatkan pencairan dan pengelolaan dana dapat disederhanakan.
- b. Adanya fleksibilitas penggunaan dana BOS yang memberikan sekolah kebebasan dalam mengalokasikan dan

menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

- c. Peningkatan nilai satuan BOS yang diterima oleh sekolah dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- d. Pemantauan dan pelaporan yang transparan serta akuntabel dalam penggunaan dana BOS untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pendanaan sekolah.

#### **4) Program Organisasi Penggerak**

Program Organisasi Penggerak adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui episode ke 4 Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia, yang kemudian mendorong hadirnya ribuan Sekolah Penggerak di seluruh negeri <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggerak/>. Program Organisasi Penggerak merupakan inisiatif pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui dukungan dalam menginisiasi hadirnya Sekolah Penggerak. Salah satu fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini, model-model pelatihan yang telah terbukti efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Program Organisasi Penggerak melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi program ini. Organisasi-organisasi ini dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, serta memberikan bimbingan dan pendampingan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh organisasi-organisasi tersebut, terutama yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program

pelatihan guru dan kepala sekolah. Melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sudah terbukti efektif dalam melaksanakan program pelatihan guru dan kepala sekolah merupakan strategi yang baik dalam memastikan keberhasilan Program Organisasi Penggerak. Organisasi-organisasi tersebut biasanya memiliki jaringan yang luas, pengalaman yang kaya, dan metode yang terbukti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Melibatkan organisasi masyarakat dan relawan dalam Program Organisasi Penggerak memiliki beberapa manfaat. Pertama, program ini dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi-organisasi tersebut untuk memperkaya program pelatihan dan memperluas jangkauan program ke lebih banyak sekolah. Kedua, kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan relawan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Ketiga, melibatkan organisasi masyarakat dan relawan dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam mencapai transformasi pendidikan. Dalam skema Program Organisasi Penggerak, organisasi-organisasi masyarakat dan relawan yang memiliki program pelatihan yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Penggerak dapat diajak berkolaborasi. Kolaborasi ini meliputi penyediaan dukungan teknis, pelatihan, supervisi, bimbingan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah serta mengembangkan praktik terbaik dalam pembelajaran.

## **5) Guru Penggerak**

Episode ke-5 dari program Merdeka Belajar adalah Guru Penggerak. Episode ini berfokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Tujuan dari episode ini

adalah untuk memberdayakan guru sebagai penggerak utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui episode ini, guru diberikan wadah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka didorong untuk menjadi inovator dan pemimpin di sekolahnya, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, dan melakukan kolaborasi dengan sesama guru. Guru-guru yang terlibat didorong untuk menjadi pemimpin dalam konteks pembelajaran di sekolah mereka. Mereka diberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam merancang, melaksanakan, dan memantau pembelajaran di kelas. Hal ini melibatkan pengembangan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, menerapkan strategi pengajaran yang inovatif, melibatkan siswa secara aktif, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Program Guru Penggerak juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Guru-guru didorong untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi mereka melalui kegiatan seperti penelitian tindakan, studi mandiri, partisipasi dalam kegiatan pelatihan dan workshop, serta kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Guru-guru diberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka sebagai profesional yang berkompeten dan responsif terhadap perubahan dalam dunia pendidikan.

Program Guru Penggerak juga melibatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak dalam melakukan transformasi pendidikan. Kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki peran yang penting dalam mendukung dan memfasilitasi perubahan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Sebagai mitra guru penggerak, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan profesional guru. Mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan dalam praktik

pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan dalam mendorong kolaborasi antara guru-guru, memfasilitasi diskusi dan refleksi bersama, serta mengamati dan memberikan umpan balik terkait implementasi perubahan dalam pembelajaran, Pengawas sekolah juga memiliki peran penting sebagai mitra guru penggerak dalam melakukan transformasi pendidikan. Mereka melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan umpan balik kepada guru-guru terkait implementasi perubahan dalam pembelajaran. Pengawas sekolah juga memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan serta membantu dalam pengembangan kapasitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional. Melalui kolaborasi antara guru penggerak, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam upaya transformasi pendidikan. Mereka bekerja bersama untuk mengidentifikasi tantangan, merancang strategi perbaikan, serta mengimplementasikan dan memantau perubahan yang dilakukan. Komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat antara semua pihak akan memperkuat proses transformasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

## **6) Program Sekolah Penggerak**

Program Sekolah Penggerak merupakan episode ke 7 Merdeka Belajar, yang merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini didesain untuk lebih efektif dalam mendorong perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program Sekolah Penggerak melakukan intervensi secara holistik yang mencakup beberapa aspek dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, mencakup :

- a. Pendampingan konsultatif dan asimetris, yaitu program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, dimana Kemendikbud berperan sebagai penyedia bimbingan teknis, pedoman, dan dukungan dalam rangka melaksanakan Sekolah Penggerak di tingkat daerah, yang kemudian akan

- memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan program tersebut.
- b. Program Sekolah Penggerak juga melibatkan penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif. Program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Paradigma ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan tahap perkembangan yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran yang beragam dan disesuaikan diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
  - d. Intervensi dalam perencanaan yang berdasarkan pada data Sekolah Penggerak, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan sekolah dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
  - e. Digitalisasi sekolah melalui penggunaan berbagai platform bertujuan untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Dengan mengadopsi teknologi, sekolah dapat mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, memberikan inspirasi melalui sumber daya digital, serta mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa

## 7) SMK Pusat Keunggulan

Kondisi SMK yang masih saja sulit menjawab kebutuhan dunia kerja perlu mengalami sebuah pembenahan, serta

kesempatan kepala, guru, maupun pengawas untuk bisa meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja juga belum banyak. Sehingga kolaborasi antara SMK dan dunia kerja sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja saat ini. Selain itu, fasilitas yang memadai juga merupakan hal yang penting dalam pengembangan SMK. Sehingga pemerintah melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi di mana SMK sulit menjawab kebutuhan dunia kerja. Salah satunya adalah diluncurkannya program SMK Pusat Keunggulan sebagai episode ke 8 Merdeka Belajar, yang memiliki visi menekankan pentingnya keselarasan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja dalam upaya menciptakan lulusan yang dapat terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha yang sukses, serta menekankan peran sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai rujukan atau pengimbas dalam meningkatkan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Dengan demikian, lulusan SMK diproyeksikan siap untuk bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha.

Link & Match adalah pendekatan yang digunakan dalam membangun keselarasan mendalam dan menyeluruh antara SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja. Terdapat 8 aspek dalam pendekatan Link & Match yang penting untuk dipahami, yaitu :

- a) Kurikulum disusun secara kolaboratif antara sekolah dan mitra industri, yang mencakup penguatan *aspek soft skills*, *hard skills*, dan karakter kebecerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b) Pembelajaran berbasis proyek riil dari dunia kerja (*Project-Based Learning/PBL*) yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang mensimulasikan situasi kerja di dunia nyata, serta memastikan bahwa *hardskills* yang diajarkan disertai dengan pengembangan *softskills* dan karakter yang kuat.

- c) Peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur yang berasal dari industri dan ahli dunia kerja agar dapat membawa pengetahuan dan pengalaman langsung dari dunia kerja ke dalam kelas dan membantu siswa memahami secara lebih mendalam tentang keadaan dan perkembangan di dunia kerja.
- d) Praktik kerja lapangan/industri yang semula hanya 3 (tiga) bulan menjadi minimal 1 (satu) semester.
- e) Sertifikasi kompetensi bagi guru/instruktur dan lulusan yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja.
- f) Pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pelatihan bagi para guru/instruktur secara periodik dari dunia kerja/industri.
- g) Melaksanakan penelitian terapan yang bisa mendukung *teaching factory* berdasarkan kebutuhan dunia kerja/industri, yang kemudian hasilnya akan dihilirkan ke pasar industri.
- h) Adanya komitmen yang tinggi dari dunia kerja/industri terhadap penyerapan lulusan SMK PK.

Bentuk dukungan lainnya dari Kemendikbud terhadap program SMK Pusat Keunggulan diantara lain adalah :

- a) Program pelatihan dan pendampingan intensif dan efektif untuk memperkuat peran kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam menerapkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja di SMK PK.
- b) Pembelajaran yang diselenggarakan dengan orientasi kepada penguatan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja/industri, serta pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- c) Bantuan dari segi pendaan berupa hibah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat dan kelengkapan praktik siswa sesuai standar dunia kerja/industri.

- d) Adanya proses pendampingan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, termasuk perencanaan yang dilakukan berdasarkan evaluasi data serta pemanfaatan *platform* digital.
- e) Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal perencanaan serta pengelolaan kegiatan untuk pengembangan sinergitas dengan dunia kerja/industri.
- f) Terjadi kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara intens untuk menciptakan dukungan penyelenggaraan SMK PK yang berkelanjutan.

### **8) Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar**

Krisis pembelajaran di Indonesia telah menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir. Krisis ini mencakup beberapa masalah, termasuk kualitas pembelajaran yang rendah, ketimpangan akses pendidikan, kesenjangan pembelajaran antar wilayah, dan sekarang diperparah oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan hilangnya pembelajaran (*learning loss*) karena penutupan sekolah dan peralihan ke pembelajaran jarak jauh yang tidak selalu efektif. Pembelajaran jarak jauh ini memiliki tantangan tersendiri, seperti aksesibilitas yang terbatas, kesulitan dalam pemahaman materi tanpa kehadiran langsung guru, dan ketidaksetaraan akses teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pencapaian belajar siswa dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antara siswa dari latar belakang yang berbeda.

Penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau yang juga dikenal sebagai kurikulum darurat adalah salah satu pendekatan yang dapat diambil dalam upaya mitigasi ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kurikulum darurat mengacu pada pengurangan atau penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi yang terbatas, seperti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran terbatas di sekolah. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus, seperti kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19, semakin

menekankan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara komprehensif. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran di kondisi yang tidak biasa, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan responsif untuk memastikan bahwa kurikulum dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dalam upaya pemulihan pembelajaran, memberikan sekolah kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka adalah langkah yang penting. Pilihan yang diberikan, yaitu menerapkan kurikulum 2013 secara penuh, menerapkan Kurikulum Darurat (sederhanakan dari Kurikulum 2013), atau menerapkan Kurikulum Merdeka, memberikan variasi yang dapat disesuaikan dengan konteks dan kemampuan setiap sekolah. Implementasi Kurikulum Merdeka juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki sumber daya yang cukup, guru yang terlatih, dan pemahaman yang baik tentang konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka sebelum mengimplementasikannya sepenuhnya.

Platform Merdeka Mengajar merupakan bagian dari episode 15 Merdeka Belajar, yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila, dengan 3 (tiga) maaam fasilitas yaitu : Mengajar, Belajar, dan Berkarya.

#### a. Platform Merdeka Mengajar Untuk Mengajar

Platform Merdeka Mengajar menyediakan berbagai referensi dan sumber daya bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Melalui platform ini, guru dapat mengakses bahan ajar, modul pembelajaran, contoh aktivitas, dan strategi pengajaran yang dapat mereka adaptasi dan implementasikan dalam kelas. Referensi yang disediakan di Platform Merdeka Mengajar didesain untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mempromosikan kreativitas, kolaborasi,

dan pemecahan masalah. Guru dapat menemukan berbagai materi pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajar, serta dapat mengakses bahan tambahan seperti video, infografis, dan materi interaktif untuk memperkaya pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar telah menyediakan lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka. Referensi tersebut mencakup berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan, serta beragam strategi pembelajaran yang dapat membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan relevan.

b. Platform Merdeka Mengajar Untuk Belajar

Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Melalui platform ini, guru dapat mengakses berbagai sumber belajar dan materi pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan pemahaman tentang konsep pembelajaran yang baru dan mendalam serta mengembangkan keterampilan dan strategi mengajar yang lebih efektif. Platform ini menawarkan berbagai fitur pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga guru memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan waktu belajar dengan jadwal mereka. Materi pelatihan yang disediakan meliputi berbagai topik seperti metode mengajar yang inovatif, pengembangan profesional, penilaian autentik, dan manajemen kelas yang efektif. Platform Merdeka Mengajar juga menyediakan ruang komunitas yang memungkinkan para guru untuk saling berbagi pengalaman, bertukar ide, dan memperluas jaringan profesional. Melalui kolaborasi dan diskusi dengan sesama guru, mereka dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang praktik mengajar yang terbaik.

c. Platform Merdeka Mengajar Untuk Berkarya

Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi

praktik baik dalam mengajar. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan bagi guru untuk membangun portofolio hasil karya mereka. Guru dapat mengunggah dan menyimpan berbagai materi pembelajaran yang telah mereka buat, termasuk rencana pelajaran, modul, media pembelajaran, dan proyek kreatif lainnya. Dengan membangun portofolio ini, guru dapat saling berbagi inspirasi dengan sesama guru, melakukan kolaborasi, dan mendapatkan masukan serta umpan balik dari rekan-rekan sejawat. Hal ini mendorong pertumbuhan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

### **9) Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia**

Memahami bahwa hasil Asesmen Nasional (AN) Tahun 2021 menunjukkan skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah dan belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan peserta didik di negara-negara OECD selama 20 tahun terakhir, penting untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna meningkatkan literasi membaca di negara ini. Sehingga tindakan Kemendikbudristek pada tahun 2022 untuk menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia adalah langkah yang positif dalam meningkatkan literasi membaca peserta didik. Upaya ini dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan berkualitas dan juga meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar membaca.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan kompetensi literasi antara sekolah-sekolah yang berada di level 1 dan sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) . Sekolah-sekolah di level 1 biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan untuk meningkatkan literasi siswa. Sementara itu, sekolah di daerah 3T sering menghadapi

tantangan seperti keterbatasan akses terhadap buku, kurangnya fasilitas pendukung, serta kekurangan tenaga pengajar yang terlatih. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca di Indonesia, namun perlu diakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat literasi yang lebih tinggi. Maka hadirilah Merdeka Belajar Episode Ke 23 melengkapi berbagai terobosan Merdeka Belajar sebelumnya yang berfokus pada peningkatan kompetensi literasi siswa (kampus merdeka, program organisasi penggerak, dan kurikulum merdeka). Melalui Episode ini, Kemendikbud mendorong penggunaan metode pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber belajar yang relevan, termasuk buku teks, materi digital, dan sumber informasi lainnya. Untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik dan ketersediaan serta pemanfaatan buku bacaan yang tepat. Pemilihan buku yang tidak tepat membuat upaya penumbuhan minat baca tidak efektif .

### **10) Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan**

Adanya miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung (*calistung*) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) di masyarakat, dapat menghambat pengembangan aspek-aspek lainnya, seperti keterampilan sosial, kreativitas, emosi, motorik halus, dan kemandirianm bahkan tidak jarang, tes terhadap calistung masih ditetapkan menjadi syarat masuk Sekolah Dasar (SD). Sedangkan pembangunan kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan, yang memungkinkan anak untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan manfaat yang mereka dapatkan. Mereka akan merasa senang dan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan minat mereka

dalam mengeksplorasi dan mempelajari hal baru. Pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan menyenangkan membantu anak untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Pembelajaran yang menyenangkan menciptakan pengalaman positif bagi anak. Mereka merasa senang dan bersemangat saat belajar, yang membantu menciptakan asosiasi positif terhadap proses pembelajaran. Ini dapat membentuk sikap positif terhadap belajar di masa depan dan memotivasi mereka untuk terus mengembangkan kemampuan mereka.

Merdeka Belajar Episode ke 24 adalah sebuah kebijakan pendidikan yang mendasari adanya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang dilakukan melalui :

- a. Pengambilan keputusan oleh satuan pendidikan untuk bisa menghilangkan ujian calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD.
- b. Penerapan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru, serta berkenalan dengan guru, staf, dan teman sekelas mereka.
- c. Satuan pendidikan berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang dapat membangun kemampuan fondasi peserta didik secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada jenjang pendidikan dasar. Fondasi tersebut adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti, bahasa untuk berinteraksi dan ketrampilan sosial, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri, serta pemaknaan terhadap belajar yang positif.
- d. Pada Kurikulum Merdeka capaian pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar kelas awal sudah disusun selaras dengan PAUD, dan kegiatan pembelajaran dirancangan

dengan situasi yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi.

Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak bisa mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke SD, agar Peserta didik PAUD dapat terus melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat jenjang SD. Peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD juga tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

## **E. Penutup**

Beberapa kesimpulan terkait dengan inovasi pendidikan dan pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan adalah :

1. Inovasi pendidikan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan pendidikan secara lebih luas dan menghasilkan perbaikan dalam pembelajaran dan kualitas pendidikan.
2. Dukungan kebijakan yang tepat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan skalabilitas inovasi pendidikan. Kebijakan pendidikan merdeka belajar adalah salah satu kebijakan pendidikan yang populer saat ini, dengan fokus pada memberikan kebebasan, fleksibilitas, dan pemberdayaan dalam proses pembelajaran.
3. Upaya keberlanjutan dalam kebijakan pendidikan diperlukan agar perubahan yang diharapkan dapat berdampak jangka panjang dan tidak hanya menjadi program sementara.
4. Analisis kebijakan pendidikan merupakan langkah penting untuk memahami dampak, keefektifan, dan keberhasilan dari kebijakan yang telah dirancang, ditetapkan, dan diterapkan, sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut memberikan hasil yang diharapkan dan apakah terdapat ruang perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya inovasi pendidikan, dukungan kebijakan, keberlanjutan kebijakan, dan analisis kebijakan dalam mencapai perbaikan dalam sistem pendidikan.

## BAB 3

### **Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah : Penggunaan *Platform Merdeka Mengajar***

#### **A. Pendahuluan**

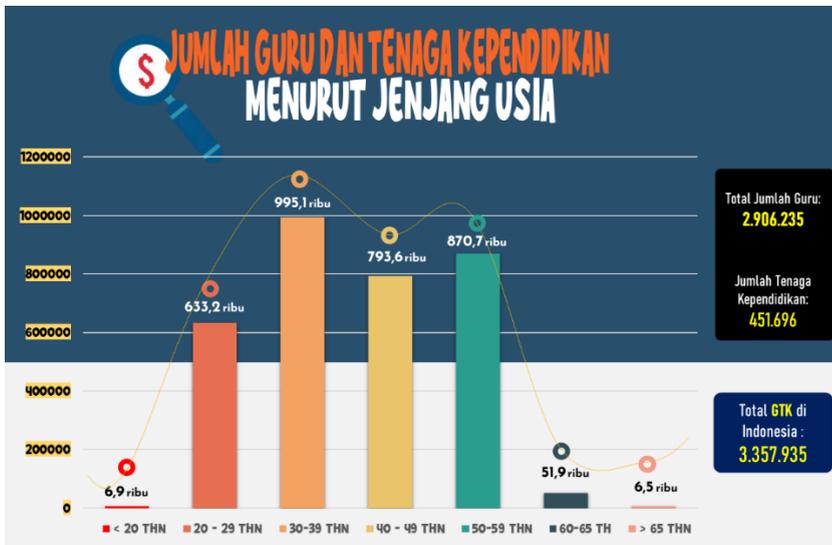
##### **1. Latar Belakang dan Permasalahan**

Sejalan dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 dan era 5.0 society menjadikan ilmu pengetahuan mengalami transformasi yang cukup pesat di segala bidang termasuk bidang Pendidikan. Sama halnya dunia pendidikan yang merupakan dunia yang dinamis, selalu mengalami perubahan mengikuti zamannya. Perubahan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat alamiah dan selalu akan terjadi yang artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah pasti akan terus mengalami perubahan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari munculnya berbagai macam inovasi baik dari segi sistem pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, hal-hal yang berkaitan dengan ranah pendidikan. Salah satu yang dapat dilihat adalah perubahan kurikulum di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan kebutuhan abad ke-21 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atas penggunaan kurikulum merdeka yang merupakan bentuk penyempurnaan kurikulum berbasis karakter sekaligus kompetensi. Segala perubahan tersebut, terjadi akibat adanya, perubahan kebutuhan Kompetensi sehingga mempengaruhi keberlangsungan pendidikan kedepannya.

Banyak hal yang membuat serba-serbi pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Era digitalisasi yang menyentuh pada aspek pendidikan merupakan potensi peningkatan pembelajaran secara optimal yang dapat dilakukan melalui kurikulum. Seiring berjalannya waktu pendidikan pun semakin berkembang mulai dari kebijakan-kebijakan dan pembaharuan standar pendidikan yang berlaku seperti kurikulum serta cara guru dalam mentransfer ilmu kepada siswa. Apalagi, disaat era penggunaan teknologi seperti sekarang ini membutuhkan tenaga pendidik yang terampil di bidangnya.

Untuk memajukan system pendidikan dibutuhkan guru yang professional dan tentunya cakap teknologi. Cakap teknologi menjadi salah tuntutan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru abad 21 dimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Jelas hal ini sejalan dengan adanya gebrakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek, dimana dalam menunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka seorang guru dapat mampu memanfaatkan berbagai macam platform pendidikan khususnya *platform* merdeka mengajar

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia yaitu sebanyak 3,3 juta orang yang tercatat pada tahun 2022/2023. Berikut ini data jumlah guru dan tenaga Kependidikan berdasarkan rentang usianya, yakni:



**Gambar 1: Jumlah Guru dan Tenaga kependidikan Menurut Jenjang Usia tahun 2022/2023**

Sumber: Data <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru> (diakses pada tanggal 13 Mei 2023)

Dari data tersebut jelas bahwa usia guru di Indonesia masih jauh dari kata produktif, dimana ada terdapat hampir dari setengah jumlah guru di Indonesia berada pada rentang usia kurang produktif. Kurangnya guru produktif ini tentunya akan berimbas langsung pada mutu pendidikan. Di era perubahan yang semakin pesat ini, tentunya membutuhkan lebih banyak guru yang produktif dan terampil dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Setiap terjadi perubahan pada kurikulum, guru harus mampu beradaptasi mulai dari prinsip pembelajaran sampai pada proses pelaksanaan assessment serta membentuk kerjasama yang baik antara siswa, Guru, dan juga orang tua agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa pada hakekatnya kurikulum itu ada pada guru. Jika guru tidak bisa mendalami kurikulum yang berlaku, maka tujuan pendidikan yang diinginkan tidak akan

tercapai sehingga kemampuan guru dalam beradaptasi menjadi suatu hal yang penting meskipun memerlukan waktu.

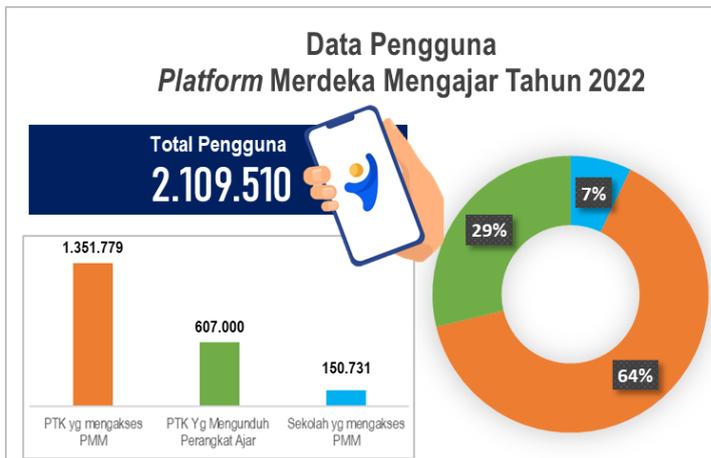
*Platform* merdeka mengajar (PMM) hadir sebagai sebuah aplikasi untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatan kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Dengan adanya *platform* merdeka mengajar (PMM) ini, harapannya guru dapat meningkatkan kinerjanya melalui kreativitas yang dikembangkan oleh dirinya. *Platform* merdeka mengajar diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, dan juga dalam *platform* ini menyediakan berbagai macam pelatihan untuk tingkatan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat.

Prinsip penggunaan platform merdeka mengajar dalam menunjang kurikulum Merdeka belajar diharapkan dapat mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap perlahan-lahan layu. Mendikbud Ristek menggagas istilah *deregulasi* pendidikan karena regulasi pendidikan selama ini dinilai menghambat proses pencapaian reformasi pendidikan yang bermuara pada kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.

Kemendikbudristek mengembangkan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan *platform* edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur mengajar, belajar dan berkarya. Merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam, belajar, dan berkarya. *Platform* ini dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. Berdasarkan Dashboard Aktivasi Akun Pembelajaran Daerah, sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 tercatat telah terbit

sebanyak 30.783.603 akun pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan. Akun pembelajaran untuk jenjang SD telah terbit Sebanyak 7.378.778

Berikut ini data pengguna *Platform* Digital Pendidikan khususnya pada *Platform* Merdeka Mengajar berdasarkan data Kemendikbud per tahun 2022, dan data tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



**Gambar 2. Data Pengguna *Platform* Merdeka Mengajar per tahun 2022**

Sumber: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/inovasi-yang-mentransformasi-pendidikan-nasional> (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

Berdasarkan data diagram di atas bahwa pengguna *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) Per Tahun 2022 tercatat sebanyak 2.109.510 user. Adapun detail capaian penggunaannya yaitu: 1) sebanyak 150.731 sekolah yang telah mengimplementasi kurikulum merdeka yang telah mengakses PMM; 2) sebanyak 1.351.779 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mengimplementasikan kurikulum merdeka telah mengakses *Platform* Merdeka Mengajar, dan 3) sebanyak

607.000 PTK telah mengunduh perangkat ajar pada *Platform Merdeka Mengajar*.

*Platform Merdeka Mengajar* (PMM) dikembangkan, diharapkan mampu menjadi *partner* guru dan tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang didalamnya dikembangkan oleh kemendikbudristek guna memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di Satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam Implementasi kurikulum merdeka (IKM).

*Platform* merdeka mengajar memiliki tiga fungsi utama, yaitu belajar, mengajar, dan berkarya. fungsi-fungsi tersebut sangat bermanfaat bagi para guru dalam segala aspek.

#### 1. Mengajar

*Platform* Merdeka mengajar dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar. Para guru dimudahkan dengan perangkat ajar yang terdapat di *platform* tersebut, assessment murid, dan analisis literasi dan numerasi dengan cepat sesuai tahap pencapaian perkembangan peserta didik. Perangkat ajar yang bisa didapatkan yaitu rencana pelaksanaan pelajaran (RPP), bahan ajar, modul proyek, buku murid dan assessment tidak hanya dapat diakses secara online, Perangkat-perangkat ajar tersebut juga dapat diunduh. Pada bagian assessment murid, para guru dapat mengetahui level kompetensi, informasi, mencari assessment berdasarkan fase dan mata pelajaran serta menerima proses penilaian dilakukan secara otomatis.

#### 2. Belajar

Fungsi selanjutnya yaitu belajar. Maksudnya, guru dapat memperoleh pelatihan secara mandiri dan berkualitas. Tak hanya itu, guru pun akan mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Dalam pelatihan Mandiri, guru akan diberikan topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif dan aksi nyata. Aksi nyata ini biasanya

diimplementasikan dari topik pelatihan yang dipraktekkan secara langsung kepada siswa di sekolah.

### 3. Berkarya

Pada Fungsi berkarya, para guru dapat membagi portofolio dan menampang hasil karyanya di platform Merdeka mengajar dalam bentuk video. nantinya mereka dapat saling berbagi satu sama lain dan memberikan umpan balik (*Feedback*). umpan balik ini nantinya akan menjadi bahan diskusi yang dapat membantu guru dalam mengembangkan dirinya secara mandiri.

Melihat berbagai fitur kemudahan yang disediakan oleh Kemendikbud Ristek dalam *platform* Merdeka Mengajar (PMM), yang dirancang untuk memudahkan guru dalam memahami hakikat implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Kenyataannya belum semua guru yang mengunduh dan memanfaatkan aplikasi *platform* digital tersebut. **Adapun** permasalahan yang menjadi kendala para tenaga pendidik dalam pemanfaatan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) antara lain:

- 1) Minimnya tingkat penguasaan teknologi yang dimiliki tenaga pendidik.
- 2) Akses jaringan yang tidak stabil.
- 3) Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik.
- 4) Tidak semua gawai (*smartphone*) dapat menginstall aplikasi platform merdeka mengajar.
- 5) Tidak semua dapat mengakses platform merdeka mengajar.

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya dilakukan analisis kebijakan terhadap penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) dikarenakan pentingnya pemahaman dan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan *platform* pendidikan tersebut. Kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) dalam lini pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan

yang terjadi di era digitalisasi yang semakin cepat. Oleh karena itu, analisis kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu ditingkatkan. Analisis kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini. Dengan melakukan analisis kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar, dapat diidentifikasi masalah dan tantangan dalam penggunaan *platform* Merdeka Mengajar kedepannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan program yang tepat untuk meningkatkan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM).

Dengan demikian, analisis kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM) **dapat memberikan manfaat yang optimal tidak hanya bagi guru dan murid tapi juga bagi masyarakat** dan dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan di era masa kini.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memfokuskan penulisan yakni untuk melihat Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) di Pendidikan Dasar dan Menengah ?.

## 2. Dasar Hukum Kebijakan

*Platform* Merdeka Mengajar (PMM) dibangun untuk menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang Kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum merdeka dan Pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP,

SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal (*learning loss*) dengan hilangnya pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan *Platform* Merdeka Mengajar.

Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. *Pilihan pertama*, Kurikulum 2013 secara penuh, *pilihan kedua* Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan *pilihan ketiga* adalah Kurikulum Merdeka. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka tak lepas dari peran guru. Untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerik siswa diperlukan struktur kurikulum yang fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi. Sehingga, guru-guru dapat fokus meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan ajar yang tepat agar siswa-siswi meningkat kemampuan literasinya. Selain kurikulum, untuk membantu mewujudkan perubahan sistematis, guru membutuhkan media yang mudah diakses, sebagai alat untuk membantu mereka meningkatkan dan mengembangkan potensi. Menjawab kebutuhan guru tersebut, *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) hadir sebagai sarana edukasi yang dapat membantu guru menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarir, untuk mewujudkan merdeka belajar.

Implementasi penggunaan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada pada kurikulum merdeka. Berikut ini beberapa kebijakan penggunaan *Platform* merdeka mengajar (PMM), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan baik spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang dimaksud Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap zaman.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Dalam poin a dan b yang dinyatakan dalam pasal 20 UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni: dalam melaksanakan tugas profesional guru berkewajiban: a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Berdasarkan perubahan tersebut menjelaskan bahwa syarat menjadi guru profesional menurut PP No 19 Tahun 2017 yaitu berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas; memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

4. **Peraturan** Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran.

Pada dasarnya, bahwa pemanfaatan Dapodik untuk Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui penerapan teknologi. Salah satu sistem pendukung yang dikembangkan oleh Kemendikbud Ristek adalah penerbitan akun pembelajaran atau akun belajar.id bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Hal tersebut syarat akan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) yang dalam penggunaannya memerlukan sebuah akses masuk. Menurut Persekjen No. 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran, akun pembelajaran dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. Penerbitan akun pembelajaran bertujuan untuk: 1) mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui penerapan teknologi; dan 2) meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. Prinsipnya satu akun untuk beragam akses kegiatan belajar mengajar.

*Platform* Merdeka Mengajar (PMM) tergolong topik yang terbilang masih dini yang digagas oleh Kemendikbud Ristek, sehingga setiap perkembangan dan pertumbuhan *platform* ini dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak evaluasi dan penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, tentunya perlu dilakukan analisis SWOT terkait implementasinya dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga Evaluasi pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) dengan jelas dapat dilihat kontribusinya dalam dunia pendidikan.

## **B. Analisis Kebijakan Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (Pmm)**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan suatu metode yang memuat perencanaan strategis untuk mengukur kekuatan (*strength*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang dapat diaplikasikan dalam suatu proyek. Untuk mendukung analisis tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendukung sebuah *goals* organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Faktor-faktor inilah yang menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan di suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan.

Berikut ini tahap analisis SWOT atas kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan *platform* Merdeka Mengajar (PMM), antara lain:

#### **A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan penggunaan *platform* merdeka mengajar**

##### **1) Analisis Strengths (Kekuatan)**

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan *platform* merdeka mengajar (PMM) yang selanjutnya di simbolkan dengan [S1] sampai dengan [S5].

##### **a) Kepemimpinan yang kuat [S1]**

Kepemimpinan yang kuat dari segala pihak baik itu pemerintah, kepala sekolah, dan guru dapat menjadi faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kebijakan *platform* merdeka mengajar (PMM) di lembaga pendidikan (sekolah). Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah terkait dan kepala sekolah akan mampu memberikan arahan dan motivasi kepada guru dan

tenaga pendidik dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM).

**b) Tenaga pendidik yang terampil [S2]**

Tenaga pendidik baik guru dan kepala sekolah yang terampil dan berkompoten dalam menggunakan berbagai macam teknologi tentunya dapat mempengaruhi keberhasilan dari penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM). Penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) mampu mendorong guru dan kepala sekolah untuk terbiasa dalam mengintegrasikan internet untuk pembelajaran. Pembelajaran daring pasca pandemi kemarin membawa dampak positif, sebagian besar guru merasa ketagihan dan mulai terbiasa dalam pemanfaatan teknologi, tentu hal ini akan membuat guru mudah dalam menggunakan *platform* merdeka mengajar (PMM).

**c) Dukungan Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai [S3]**

*Platform* merdeka mengajar (PMM) dapat dilaksanakan dengan efektif dengan fasilitas berupa gawai (handphone dan laptop), akun id.belajar dan jaringan internet yang stabil dan baik. Handphone dan jaringan internet menjadi faktor pendukung utama dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) karena tanpa adanya ke dua hal tersebut penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) tidak akan terlaksana. Karena pada hakikatnya penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) adalah *platform* pendidikan yang memudahkan guru dalam mengajar maka, penggunaan gawai dan internet tentunya dapat memudahkan proses kegiatan belajar mengajar dan penyampaian materi yang diajarkan guru kepada siswa. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan memudahkan guru

dan kepala sekolah dalam menggunakan *platform* merdeka mengajar (PMM)

**d) Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan [S4]**

Jadi untuk dapat mengakses *platform* merdeka mengajar, tenaga pendidik harus mengunduh aplikasi merdeka mengajar di *Google Play Store*. Untuk dapat mengunduhnya hanya dibutuhkan gawai Android dengan spesifikasi minimum Android versi 5 (lollipop) dan kapasitas penyimpanannya hanya 50MB [27]. Hal tersebut menjadi faktor kekuatan bagi tenaga pendidik dalam penggunaan *platform* ini.

**e) Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik [S5]**

Salah satu keunggulannya bahwa *platform* merdeka mengajar (PMM) merupakan program akselerasi dari penerapan kurikulum merdeka belajar. Karena dalam *platform* merdeka mengajar (PMM) terdapat banyak kumpulan ide mengajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Dari banyaknya ide mengajar yang bisa didapatkan dari *platform* merdeka mengajar (PMM) tentu akan menjadi salah satu faktor kekuatan guru dalam membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Ini penting, sebab kelas yang menyenangkan akan membuat siswa kian termotivasi dalam belajar.

## 2) Analisis Weaknesses (Kelemahan)

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan *platform* merdeka mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan [W1] sampai dengan [W5].

**a) Minimnya tingkat penguasaan teknologi [W1]**

Guru senior yang relatif memiliki usia lebih tua terkadang menjadi salah masih perlu pendampingan dan pelatihan dalam menggunakan aplikasi atau media pembelajaran termasuk dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM). Keterbatasan penguasaan teknologi mengakibatkan faktor kelemahan dalam penggunaan platform ini, pasalnya mereka kesulitan dalam mengoperasikan *smartphone* ketika pemanfaatan *platform* merdeka mengajar (PMM).

**b) Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik [W2]**

Pada kenyataannya masih banyak ditemui tenaga pendidik yang masih gagap teknologi. Adanya keterbatasan keterampilan tenaga pendidik, membuat tenaga pendidik belum mampu menggunakan *platform* merdeka mengajar secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan tenaga pendidik kesulitan membuat karya dan mengembangkan kreativitas yang menjadi tuntutan dalam *platform* merdeka mengajar khususnya pada fitur berkarya

**c) Akses jaringan yang tidak stabil [W3]**

Memanfaatkan jaringan internet terkadang memunculkan polemik tersendiri bagi seluruh warga termasuk tenaga pendidik. Masalah jaringan internet yang tidak stabil tidak hanya dimiliki oleh tenaga pendidik yang tinggal di wilayah 3T, tapi juga bagi tenaga pendidik yang berada di perkotaan.

**d) Tidak semua *smartphone* dapat menginstall aplikasi *platform* merdeka mengajar [W4]**

Bagi tenaga pendidik yang memakai gawai/*smartphone* yang bukan Android seperti IOS, akan mengalami kendala dalam pemanfaatan *platform* merdeka mengajar. Pasalnya untuk saat ini, pemerintah hanya menyediakan penggunaan *platform* merdeka mengajar

hanya bagi mereka yang memiliki smartphone Android saja.

e) **Keterbatasan pengaksesan *platform* merdeka mengajar [W5]**

Apabila seseorang ingin dapat mengakses *platform* merdeka mengajar tanpa memiliki akun Google dengan domain belajar.id (Akun pembelajaran) atau madrasah.kemendiknas.go.id (akun madrasah), maka secara otomatis orang tersebut tidak akan bisa dapat mengakses *platform* merdeka mengajar. Hal tersebut dikarenakan bahwa untuk dapat mengakses *platform* merdeka mengajar tenaga pendidik haruslah wajib memiliki akun Google dengan domain belajar.id (Akun pembelajaran) atau madrasah.kemendiknas.go.id (akun madrasah).

**B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan penggunaan *platform* merdeka mengajar**

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar.

1) **Analisis *Opportunities* (Peluang)**

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan [O1] sampai dengan [O5].

a) **Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik [O1]**

Pemanfaatan *platform* merdeka mengajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik membuka peluang bagi guru untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Tenaga pendidik mampu menggunakan beragam

aplikasi maupun web yang mendukung dan tepat diterapkan dalam berkreasi. Misalnya tenaga pendidik membuat video pembelajaran dengan bantuan aplikasi kinemaster yang hasilnya diupload atau/ ditampilkan di akun Youtube pribadi atau/ sekolah. Pemanfaatan website Canva dalam mengkreasi tulisan maupun konten pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pendidik dalam berkarya.

**b) Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru [O2]**

*Platform* merdeka mengajar (PMM) menyediakan materi mengajar yang dapat diterapkan secara langsung oleh guru dalam proses pembelajaran kepada siswa di kelas, dan juga dalam *Platform* ini tersedianya beragam materi pelatihan yang bisa menjadi peluang bagi guru untuk menunjang guru dalam berkarya dan meningkatkan kompetensi

**c) Bisa diakses secara luring dan [O3]**

Beberapa produk dan fitur di *platform* merdeka mengajar (PMM) ini memungkinkan sebuah kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mengakses platform ini secara luring, misalnya dengan mengunduh perangkat ajar yang ada dalam fitur tersebut.

**d) Bisa digunakan untuk gawai (*smartphone*) yang sangat sederhana [O4]**

Apabila tenaga pendidik belum memiliki *smartphone* yang mumpuni, maka *platform* merdeka mengajar dapat diakses melalui browser web, yaitu di laman <https://guru.kemdikbud.go.id/>. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor peluang bagi tenaga pendidik yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan *smartphone* canggih.

**e) Adanya kerjasama antar tenaga pendidik [O5]**

Memungkinkan tenaga pendidik diseluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik dilaman berbagi karya pada fitur di *platform* merdeka mengajar. Dengan hal seperti itu akan memungkinkan terciptanya peluang kerjasama antar tenaga pendidik diseluruh Indonesia untuk saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi.

**2) Analisis Threats (Ancaman)**

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan *platform* merdeka mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan [T1] sampai dengan [T5].

**a) Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah [T1]**

Perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang selalu berubah-ubah menjadi salah satu faktor ancaman dari adanya kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar. Hal ini dapat menjadi penghambat perkembangan program dan kebijakan tentang penggunaan *platform* merdeka mengajar kedepannya.

**b) Adanya deteksi plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik [T2]**

Dalam salah satu fitur yang ada dalam *platform* merdeka mengajar yaitu berkarya dimana tenaga pendidik dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagai inspirasi dan berkolaborasi. Hal ini tidak menuntut kemungkinan adanya sebuah ancaman plagiarisme data konten yang terjadi mulai dari substansi dan model video aksi nyata yang di buat oleh para tenaga pendidik. Misalnya template atau isi konten yang mungkin akan ada yang sama dengan tenaga pendidik lainnya

**c) System Error [T3]**

Sama halnya dengan *platform-platform* digital lainnya yang mengalami kendala system eror, tak bisa dipungkiri hal yang samapun akan berlaku juga terhadap penggunaan *platform* merdeka mengajar akibat dari sistem yang mengalami *maintenances* misalnya. Hal tersebut akan menjadi salah satu ancaman terhadap penggunaan platform merdeka mengajar

**d) Resiko keamanan privasi [T4]**

Digitalisasi dalam berbagai sektor, dimana objek memiliki kemampuan untuk memindahkan data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dua arah, dengan adanya miliaran perangkat yang terkoneksi dengan jaringan internet dapat menjadi ancaman keamanan privasi dan pembagian data baik pribadi, pemerintah, dan masyarakat di seluruh dunia. Tak dipungkiri resiko keamanan privasi pengguna dan data pribadi akan menjadi ancaman terhadap penggunaan *platform* merdeka mengajar. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan dan kekhawatiran tenaga pendidik terhadap penggunaan dari berbagai macam *platform* dan aplikasi yang ada.

**e) Pemutakhiran Akun [T5]**

Perubahan dari guru menjadi admin, atau perubahan jenjang guru misalnya dari SD ke SMP maka tentu akan menjadi ancaman bagi tenaga pendidik. Pasalnya perubahan tersebut akan dibarengi dengan adanya pemutakhiran akun belajar.id secara otomatis. Apabila tenaga pendidik ingin memindahkan riwayat penggunaan *platform* merdeka mengajar dari akun lama ke akun baru, maka aktivitas yang pernah dilakukan tenaga pendidik menggunakan akun lama akan hilang.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan dimatrikskan ke dalam tabel. Berikut ini tampilan dari Matriks SWOT, yaitu:

## 2. Matriks SWOT

Dalam melihat proses penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) kita bisa melakukan analisis SWOT secara lebih komprehensif apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan dari penggunaan *platform* ini sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang tepat nantinya. Pada matriks ini berisi sajian tentang analisis SWOT penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM), untuk kolom kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) di isi dengan faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) yang sedang dipertimbangkan atau sedang diimplementasikan, dan untuk pensymbolannya masing-masing merujuk pada uraian tahapan sebelumnya, yakni [S1] sampai dengan [S5] untuk kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) di simbolkan [W1] sampai dengan [W5]. Demikian juga untuk kolom peluang (*opportunities*) dan kolom tantangan (*threats*) yang diisi dengan faktor eksternal yang menjadi peluang dan tantangan bagi kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) yang sedang dipertimbangkan atau sedang diimplementasikan, dan untuk pensymbolannya masing-masing merujuk pada uraian tahapan sebelumnya, yakni [O1] sampai dengan [O5] untuk kategori peluang (*opportunities*), dan simbol [T1] sampai dengan [T5] untuk ancaman (*threats*). Adapun penyajiannya dapat dilihat dari penyajian tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Matriks SWOT Kebijakan penggunaan platform merdeka (PMM)**

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S1. Kepemimpinan yang kuat S2. Tenaga pendidik yang terampil S3. Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. S4. Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan S5. Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik.	W1. Minimnya tingkat penguasaan teknologi. W2. Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik W3. Akses jaringan yang tidak stabil. W4. Tidak semua <i>smartphone</i> dapat menginstall aplikasi <i>platform</i> merdeka mengajar. W5. Keterbatasan pengaksesan <i>platform</i> merdeka mengajar.
PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O1. Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik. O2. Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru. O3. Bisa diakses secara luring O4. Bisa digunakan untuk gawai ( <i>smartphone</i> ) sederhana O5. Adanya kerjasama antar tenaga pendidik.	T1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah T2. Adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik. T3. System Error. T4. Resiko keamanan privasi T5. Pemutakhiran Akun.

Berdasarkan hasil matriks SWOT yang ada pada tabel 1, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa strategi maupun upaya dalam memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman terhadap penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM).

### 3. Mengembangkan strategi berdasarkan Matriks SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman

Berdasarkan faktor-faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*, serta yang ada pada faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya dikembangkan sejumlah strategi yang terbagi ke dalam 4 kelompok strategi, yakni: 1) Strategi SO (*strengths-opportunities*) merupakan model strategi yang melakukan pemanfaatan semua kekuatan untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya, 2) Strategi ST (*strengths-threats*) merupakan model strategi yang melakukan pemanfaatan semua peluang untuk meminimalkan kelemahan, 3) Strategi WO (*weakness-opportunities*) merupakan model strategi yang meminimalkan semua kelemahan untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya, dan 4) strategi WT (*weakness-threats*) merupakan model strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Berikut ini akan dijabarkan analisis SWOT terkait pelaksanaan kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) di Pendidikan dasar dan menengah.

#### A. Strategi SO (*Strength – Opportunities*)

- 1) **SO-1. Mengembangkan program kepemimpinan instruksional.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dari kepemimpinan yang kuat dengan memanfaatkan peluang pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik. **[S1-O1]** Kepemimpinan instruksional sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia karena apabila seorang kepala sekolah jika menggunakan kepemimpinan instruksional maka kepemimpinan kepala sekolah tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa, sejalan dengan hal itu bahwa peran kepemimpinan yang instruksional juga dapat

meningkatkan profesionalisme guru, hal tersebut terbukti menjadi salah satu strategi SO dalam organisasi sekolah terutama terkait tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

- 2) **SO-2. Mengembangkan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.** Strategi ini diperoleh dari peluang menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru dengan meningkatkan kekuatan tenaga pendidik yang terampil. [S2-O2]

Dalam memberdayakan kompetensi guru tak hanya memberikan motivasi untuk memberdayakan potensi diri, melainkan pula mengikutsertakan pada kegiatan ilmiah di luar sekolah, misalnya pendidikan formal, seminar, penataran serta peningkatan kesejahteraan guru. Melalui upaya menyeluruh maka kompetensi guru secara bertahap akan mengalami peningkatan kualitasnya. Kompetensi profesional guru sangat berperan penting dalam penguasaan terhadap kurikulum mata pelajaran yang berupa kemampuan merencanakan pembelajaran, penguasaan guru terhadap materi pelajaran, penggunaan strategi dan pendekatan pembelajaran. Jika guru mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki, maka secara tidak langsung siswa mampu dalam meningkatkan prestasinya.

- 3) **SO-3. Meningkatkan performa aplikasi *platform* agar semua gawai dapat mengaksesnya.** Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang “Bisa diakses secara luring dan bisa digunakan untuk gawai sederhana” dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari adanya “Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan” [S3-O3, S4-O4]

Strategi ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih prima terhadap penggunaan platform merdeka

mengajar yaitu dengan melakukan peningkatan dan pengembangan performa *platform*. Performa merupakan aspek terpenting dalam sebuah aplikasi. Pengembangan yang disertai peningkatan *performance* merupakan angin segar dan juga solusi bagi semua user. Demi kelancaran tenaga pendidik sebagai user dalam pengguna *platform* merdeka mengajar, maka penting dilakukan sebuah perbaikan dan pengembangan misalnya dengan melakukan perbaikan pada aspek fasilitas penggunaannya yang terbatas pada gawai berchipsetkan Android. Seharusnya *platform* merdeka mengajar tidak hanya terbatas pada si pengguna Android saja, tetapi juga kepada si pengguna lainnya, misalnya IOS. Apabila hal ini dilakukan maka akan membuat penilaian positif dari user terhadap penggunaan *platform* ini.

- 4) **SO-4. Meningkatkan kolaborasi kerjasama antar tenaga pendidik.** Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang “Adanya kerjasama antar tenaga pendidik” dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari adanya “Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik. [S5 & O5]

Strategi ini berupaya bagaimana untuk melakukan kerjasama antar tenaga pendidik dalam pemanfaatan *platform* merdeka mengajar (PMM) di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Apabila kerjasama ini dapat dilakukan maka hal ini akan dapat membantu mempercepat pengembangan pengetahuan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas konten materi dalam platform yang berimbas ada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

## **B. Strategi ST ( *Strengths-Threats* )**

- 1) **ST-1. Memperjelas arah kebijakan program.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan “Kepemimpinan yang kuat” untuk menghadapi ancaman “kebijakan pemerintah yang berubah-ubah”. [S1-T1]  
Untuk menjamin dukungan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) dapat diimplementasikan dengan baik, maka pemerintah terkait perlu memperkuat arah kebijakan program misalnya dengan menetapkan perundang-undangan terhadap penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM). Strategi ini dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi tenaga pendidik dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) agar terarah dengan baik.
- 2) **ST-2. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan “Tenaga pendidik yang terampil” untuk menghadapi ancaman “adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik”. [S2 – T2]  
Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan, menyediakan program pembinaan yang teratur, menyiapkan forum akademik guru disamping kegiatan supervisi. Tujuan dari pembinaan selain mengembangkan watak dan kepribadian adalah tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu
- 3) **ST-3. Meningkatkan efektivitas layanan program.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan “Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan dan Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik” untuk menghadapi ancaman “sistem

error, resiko keamanan privasi dan pemutakhiran akun. [S3-T3, S4-T4, S5-T5 ]

Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan efektivitas layanan program yaitu dengan memfasilitasi forum publik dan memberdayakan fitur *help desk* dalam platform untuk menjawab segala pertanyaan dan keluhan dari pengguna platform, misalnya kendala penggunaan, keamanan data, dan privasi konten yang diunggah ke laman berkarya. Strategi ini dapat membantu membangun kesadaran dan pemahaman si pengguna *platform*. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas layanan program juga dapat dilakukan dari cepat tanggapnya (*fast respon*) admin pengelola *platform* merdeka mengajar atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna *platform*. Hal ini Perlu dilakukan untuk membangun vibes positif atas kepuasan dari si pengguna *platform* merdeka mengajar.

### C. Strategi WO (*weakness – Opportunities*).

- 1) **WO-1. Meningkatkan literasi digital untuk seluruh tenaga pendidik.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang “Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik” untuk mengatasi kelemahan “Minimnya tingkat penguasaan teknologi”. [W1-O1]

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital bagi tenaga pendidik yaitu dengan cara menyajikan konten digital edukatif melalui video-video informasi tentang keterampilan *social networking*, *maintaining privacy*, *managing digital identity*, *creating content*, *reusing / repurposing content*, dsb. Keterampilan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk online dan offline. Harapannya dengan adanya strategi Literasi digital di tengah-tengah pendidik dapat memberikan dampak positif

untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan teknologi.

- 2) **WO-2. Mengembangkan program pelatihan bagi tenaga pendidik.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang “Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru” untuk mengatasi kelemahan “keterbatasan keterampilan tenaga pendidik”. [W2-O2]

Pelatihan untuk tenaga pendidik merupakan strategi yang dilakukan agar tenaga pendidik menjadi profesional dan dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas. Pelatihan ini biasanya mencakup teknik merencanakan hingga cara meningkatkan pembelajaran yang efektif. Pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari offline sampai dengan online. Pelatihan bagi tenaga pendidik bukan sekedar kegiatan biasa yang dilakukan ketika luang, melainkan bisa menjadi kegiatan wajib yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas mengajar.

- 3) **WO-3. Meningkatkan kapasitas internet (*bandwidth*).** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang “Bisa diakses secara luring” untuk mengatasi kelemahan “Akses jaringan yang tidak stabil”. [W3] & [O3]

Strategi meningkatkan kapasitas internet (*bandwidth*) di lingkungan tenaga pendidik tentunya salah satu alternatif dalam persoalan lambatnya akses jaringan internet dalam penggunaan platform merdeka mengajar. Strategi ini memberikan manfaat positif karena semakin besar *bandwidth* yang disediakan, maka kecepatan internet juga akan semakin cepat. Keuntungan memiliki *bandwidth* yang besar yaitu memberikan sistem keamanan ganda agar data dan informasi terlindungi dari incaran malware.

- 4) **WO-4. Melakukan pengembangan aplikasi agar semua chipset smartphone dapat menginstall dan mengakses aplikasi.** Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang “Bisa digunakan untuk gawai sederhana” untuk

mengatasi kelemahan “Tidak semua smartphone dapat menginstall aplikasi *platform* merdeka mengajar”. [W4] & [O4]

Kerja sama antar pemerintah dan developer sangat diperlukan guna meningkatkan performa aplikasi. Sebagai developer berbagai perangkat memberikan potensi audiens yang sangat besar untuk sebuah program aplikasi. Agar berhasil di semua perangkat ini, aplikasi *platform* merdeka mengajar harus memberi toleransi beberapa variasi fitur dan menyediakan antarmuka pengguna fleksibel yang dapat beradaptasi dengan beragam konfigurasi layar. Strategi yang dapat diupayakan dalam mengatasi masalah terkait dengan *platform* merdeka mengajar yakni *platform* harus didesain agar bisa berjalan dibanyak jenis perangkat, mulai dari ponsel hingga tablet, dan tentunya dapat digunakan oleh semua chipset tanpa terkecuali.

5) **WO-5. Meningkatkan kerjasama antar tenaga pendidik dimulai dari tingkat gugus / kecamatan.**

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang “Adanya kerjasama antar tenaga pendidik” untuk mengatasi kelemahan “Keterbatasan pengaksesan platform merdeka mengajar”. [W5] & [O5]

Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan yang ada yaitu dengan cara Meningkatkan kerjasama antar tenaga pendidik dimulai dari tingkat gugus / kecamatan. Melakukan berbagai macam kegiatan seperti KKG ditingkat guru, K3S di tingkat kepala sekolah, dan FGD bagi guru dan kepala sekolah. Kegiatan KKG, K3S dan FGD bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru, kemudian memberikan bantuan profesional kepada guru kelas dan mata pelajaran di sekolah, serta meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan dan pengembangan sikap profesional berdasarkan

kekeluargaan dan saling mengisi (*sharing*) terutama terkait dengan penggunaan *platform* merdeka mengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi keprofesionalan seluruh tenaga pendidik.

#### **D. Strategi WT ( *Weakness – Threats* )**

**1) WT-1. Memperkuat arah kebijakan program cakup teknologi bagi tenaga pendidik dengan adanya koalisi secara penuh dari seluruh pihak.** Strategi ini dilakukan dengan mengatasi kelemahan “minimnya tingkat penguasaan teknologi” untuk menghadapi ancaman “kebijakan pemerintah yang berubah-ubah” [W1] & [T1] Pemerintah harus memperkuat kebijakan program cakup teknologi dengan cara menetapkan langkah tegas terkait dengan kebijakan *platform* merdeka mengajar (PMM) dengan membuat keputusan kebijakan yang absolute dan terarah dengan terkait penggunaan *platform* merdeka mengajar. Strategi ini dilakukan agar ketika terjadi pergantian pimpinan, maka kebijakan atau peraturan yang berlaku sebelumnya tetap berlaku meskipun pimpinannya telah mengalami pergantian sekalipun. Kebijakan yang dibuat harus melibatkan seluruh *stakeholder* dan mengarah kepada arah perbaikan dunia pendidikan.

**2) WT-2. Meningkatkan sistem pengawasan.** Strategi ini dilakukan dengan mengatasi kelemahan “Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik” untuk menghadapi ancaman “Adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik” [W2] & [T2]

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan perlindungan keamanan dan kontrol data bagi pengguna *platform* merdeka mengajar (PMM). Misalnya data pribadi yang terlindungi dari kejahatan cyber, konten yang tidak mudah diplagiasi, dsb.

Agar tidak terjadi ketimpangan data dan untuk melindungi hak cipta konten yang dibuat oleh tenaga pendidik maka perlu di lakukan pengawasan terkait dengan konten yang diunggah oleh tenaga pendidik dalam laman berkarya. Adapun alternatif yang dapat dilakukan yaitu memasukkan program cek anti plagiat dalam *platform*. Strategi ini berupaya agar memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah diprogramkan dalam *platform* merdeka mengajar (PMM) dan hal tersebut akan secara langsung dapat memberikan penilaian positif dari tenaga pendidik

- 3) **WT-3. Memperbaiki layanan dengan meminimalkan pengembangan produk/platform yang berkualitas rendah.** Strategi ini dilakukan dengan mengatasi kelemahan “Akses jaringan yang tidak stabil, tidak semua smartphone dapat menginstall aplikasi *platform* merdeka mengajar, dan keterbatasan pengaksesan *platform* merdeka mengajar produk/*platform* yang berkualitas rendah” untuk menghadapi ancaman “*System Error*, Resiko keamanan privasi dan Pemutakhiran Akun. [W3], [T3], [W4] [T4], [W5] & [T5]

Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan inovasi program. Inovasi program merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan developer untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan dan menyempurnakan sebuah program. Perlu diingat bahwa inovasi program tidak harus mencakup penciptaan program yang sama sekali baru untuk memecahkan masalah yang sama sekali baru. Dengan kata lain, Program yang dikembangkan tidak hanya pada aspek penggunaannya tapi juga pada inovasi dalam aspek sistem resiko keamanan dan privasi si pengguna dan peningkatan kualitas fungsional program. Inovasi program mutlak perlu dikembangkan dengan berbagai manfaat dan dampak

positif yang signifikan. Program yang mengalami inovasi dan disertai sosialisasi kepada pengguna akan lebih optimal dan dapat dihargai oleh pengguna.

Berdasarkan uraian strategi di atas, maka selanjutnya strategi-strategi tersebut di petakan ke dalam tabel matriks strategi dari Analisis SWOT, sebagaimana disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Tabel Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT**  
**Penggunaan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM)**

<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		S1. Kepemimpinan yang kuat S2. Tenaga pendidik yang terampil S3. Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. S4. Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan S5. Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik.
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strengths- Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>

<p>O1. Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik.</p> <p>O2. Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru.</p> <p>O3. Bisa diakses secara luring</p> <p>O4. Bisa digunakan untuk gawai sederhana</p> <p>O5. Adanya kerjasama antar tenaga pendidik.</p>	<p>SO-1. Mengembangkan program Kepemimpinan instruksional</p> <p>SO-2. Mengembangkan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.</p> <p>SO-3. Meningkatkan performa <i>aplikasi platform</i> agar semua gawai dapat mengaksesnya. (S3-O3, S4-O4)</p> <p>SO-4. Meningkatkan kolaborasi kerjasama antar tenaga pendidik</p>	<p>WO-1. Meningkatkan literasi digital untuk seluruh tenaga pendidik</p> <p>WO-2. Mengembangkan program pelatihan bagi tenaga pendidik.</p> <p>WO-3. Meningkatkan kapasitas internet (bandwidth)</p> <p>WO-4. Melakukan pengembangan aplikasi agar semua chipset smartphone dapat menginstall dan mengakses aplikasi.</p> <p>WO-5. Meningkatkan kerjasama antar tenaga pendidik dimulai dari tingkat gugus / kecamatan.</p>
<p><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p>	<p><b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b></p>	<p><b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b></p>
<p>T1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah</p> <p>T2. Adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik.</p> <p>T3. System Error.</p> <p>T4. Resiko keamanan privasi</p> <p>T5. Pemutakhiran Akun.</p>	<p>ST-1. Memperjelas arah kebijakan program</p> <p>ST-2. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik.</p> <p>ST-3. Meningkatkan efektivitas layanan program (S3-T3, S4-T4, S5-T5)</p>	<p>WT1. Memperkuat arah kebijakan penggunaan platform</p> <p>WT2. Meningkatkan sistem pengawasan</p> <p>WT3. Memperbaiki layanan dengan meminimalkan pengembangan produk/platform yang berkualitas rendah (W3-T3, W4-T4, W5-T5)</p>

#### **4. Melakukan Prioritas Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara**

Prioritas strategi yang sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kebijakan, atau tim analisis SWOT berdasarkan survei atau wawancara.

Adapun yang menjadi langkah-langkah umum dalam menetapkan skala prioritas strategi, sebagai berikut:

##### 1) Menentukan Nilai Tingkat Signifikan dan Bobot.

Tingkat signifikan ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s/d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

##### 2) Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s/d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

##### 3) Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding

kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

Untuk menentukan skala prioritas analisis SWOT penggunaan *platform* merdeka mengajar maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan survei pada *Internal Strategic Factor Analisis Summary* (IFAS) dengan menganalisis faktor strategi *internal* dari kekuatan maupun kelemahan pada *platform* merdeka mengajar, dan *External Strategic Factor Analisis Summary* (EFAS) yang dilakukan pada faktor strategi *external* yang mengacu pada peluang dan ancaman penggunaan *platform* merdeka mengajar. Dapat dijabarkan perhitungan IFAS dan EFAS untuk skala prioritas Analisis SWOT penggunaan *platform* merdeka mengajar, antara lain:

FAKTOR INTERNAL (IFAS) : STRENGTH - WEAKNESS					
FAKTOR STRATEGIS		TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATINGS	SKOR
STRENGTH	Kepemimpinan yang kuat	2	0,07	2,50	0,17
	Tenaga pendidik yang terampil	3	0,10	2,00	0,21
	Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.	3	0,10	3,00	0,31
	Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan	4	0,14	3,00	0,41
	Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga pendidik	4	0,14	2,50	0,34
<i>Jumlah strengths</i>					<b>1,45</b>
WEAKNE	Minimnya tingkat penguasaan teknologi	2	0,07	2,00	0,14
	Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik	3	0,10	2,50	0,26

	Akses jaringan yang tidak stabil	3	0,10	3,00	0,31
	Tidak semua smartphone dapat menginstall aplikasi <i>platform</i> merdeka mengajar	2	0,07	2,50	0,17
	Keterbatasan pengaksesan <i>platform</i> merdeka mengajar	3	0,10	2,00	0,21
<i>Jumlah Weakness</i>					1,09
<b>TOTAL IFAS</b>		<b>29</b>	<b>1,00</b>		<b>2,53</b>

**Tabel 3.**  
**Perhitungan IFAS dan EFAS dalam menentukan skala prioritas Analisis SWOT pada penggunaan *Platform* merdeka mengajar (PMM)**

<b>FAKTOR EKSTERNAL(EFAS): OPPORTUNITIES - THREATS</b>					
FAKTOR STRATEGIS		TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
<b>OPPORTUNITIES</b>	Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik.	3	0,09	3,00	0,28
	Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru	4	0,13	2,00	0,25
	Bisa diakses secara luring	3	0,09	2,00	0,19
	Bisa digunakan untuk gawai sederhana	3	0,09	3,00	0,28
	Adanya kerjasama antar tenaga pendidik	3	0,09	2,00	0,19
<i>Jumlah strengths</i>					1,19
<b>THREATS</b>	Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah	4	0,13	3,00	0,38
	Adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga pendidik	3	0,09	2,50	0,23
	System Error.	4	0,13	3,00	0,38
	Resiko keamanan privasi	3	0,09	2,00	0,19
	Pemutakhiran Akun	2	0,06	1,50	0,09
<i>Jumlah Weakness</i>					1,27
<b>TOTAL EFAS</b>		<b>32</b>	<b>1,00</b>		<b>2,45</b>

- 4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

**Tabel 4.**  
**Hasil Perhitungan Skor Strategi**

	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	<b>Strategi SO :</b> $1,45 + 1,19 = 2,64$	<b>Strategi WO :</b> $1,09 + 1,19 = 2,27$
Ancaman ( <i>Threats</i> )	<b>Strategi ST :</b> $1,45 + 1,27 = 2,71$	<b>Strategi WT :</b> $1,09 + 1,27 = 2,35$

Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS skala prioritas faktor dan Analisis SWOT pada penggunaan *Platform* merdeka mengajar (PMM), diketahui bahwa **strategi ST** (*Strengths-Threats*) terpilih menjadi strategi prioritas dengan perolehan **nilai 2,71**. Sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan penggunaan *Platform* merdeka mengajar (PMM) disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini beberapa alternatif program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi ST, yang dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Weakness – Threats* (WT)**

No	Strategi <i>Strenghts – Threats</i> (ST)	Rekomendasi Program
1	Memperjelas arah kebijakan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merevisi penetapan peraturan dan kebijakan yang lebih terarah</li> <li>b. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah</li> <li>c. Pendekatan kolaborasi seluruh <i>stakeholder</i></li> </ul>
2	Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program pelatihan dan workshop cakup teknologi melalui kegiatan FGD &amp; KKG</li> <li>b. Membentuk KOMBEL (Komunitas Belajar)</li> <li>c. Mentoring melalui supervisi terpadu</li> </ul>
3	Meningkatkan efektivitas layanan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana berbasis IT penunjang penggunaan <i>platform</i>.</li> <li>b. Membangun kerjasama antar penyedia layanan program, lembaga pendidikan, dan membangun kemitraan dengan penyedia jasa dan layanan IT.</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada tabel 4, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strengths – Threats* (ST) pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 5. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strengths – Threats (ST)* berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi tabel 2.

### 1) Strategi memperkuat arah kebijakan program cakap teknologi bagi tenaga pendidik dengan adanya koalisi secara penuh dari seluruh pihak

#### a. Merevisi penetapan peraturan dan kebijakan yang lebih terarah

Perlu adanya kebijakan dan terobosan yang inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait *platform* merdeka mengajar (PMM) harus jelas, tegas, dan clear memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Pemerintah dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Sejalan dengan keputusan dan kebijakan yang akan diambil nanti terkait penggunaan *platform* merdeka mengajar harus jelas, tegas, dan clear perlu adanya andil dari seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah terkait untuk memperkuat arah kebijakan program misalnya dengan menetapkan perundang-undangan terhadap penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) dengan jelas, tegas dan terarah.

Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu menetapkan peraturan kala ketika terjadi pergantian pimpinan, maka kebijakan atau peraturan yang berlaku sebelumnya tetap berlaku meskipun pimpinannya telah mengalami pergantian sekalipun dengan memperhatikan kebermanfaatannya dari segala aspek.

b. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Peran penting sosok kepala sekolah selaku pimpinan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas telah diakui sejak lama. Kepala sekolah dan pelatih membutuhkan pengembangan profesional, terutama melalui kelompok tugas kepala sekolah (KKKS). Kepala sekolah membutuhkan pelatihan praktis agar mampu berperan layaknya seorang pimpinan dan menjadi panutan bagi bawahannya. Mereka perlu dibekali juga pelatihan dalam kemampuan manajerial, sehingga mereka dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada guru serta memastikan berlangsungnya pembelajaran yang berkualitas. Kelompok kerja yang dilaksanakan dalam forum K3S akan lebih bermakna apabila dibekali dengan materi pelatihan dan pendampingan yang lebih baik dan komprehensif, serta materi yang memuat modul, video, studi kasus yang lebih independen terkait dengan kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah selaku pimpinan sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah. Kepala sekolah yang baik akan dapat mengupayakan guru sebagai mitranya agar dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam pengembangan karir dan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini bahwa peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk memotivasi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital termasuk penggunaan platform merdeka belajar dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka, dan proses

pembelajaran di kelas. Untuk itu dalam menunjang kegiatan guru diperlukan adanya sebuah hubungan yang baik dan saling mendukung antar warga sekolah termasuk antar kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerjanya.

c. Pendekatan kolaborasi seluruh *stakeholder*

Pendekatan Collaborative yang dijalankan oleh stakeholder pendidikan yaitu berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu yang terkait dengan perubahan kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM). Untuk memastikan adanya dukungan kebijakan dari penggunaan *platform* merdeka mengajar sampai ke tingkat sekolah dan tenaga pendidik, maka dalam hal ini lembaga-lembaga kunci harus dilibatkan. Misalnya lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LP2KS), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK) dinas pendidikan, masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan adanya sebuah strategi yang efektif untuk memenuhi arah tujuan kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar di lembaga pendidikan. Pendekatan kolaboratif dapat dilakukan dengan mengadakan FGD dan K3S dengan menghadirkan para praktisi-praktisi pendidikan (pengawas) dan pemerintah terkait untuk saling bertukar pikiran dalam memberikan alternatif strategi maupun solusi dari setiap tantangan dan peluang yang di hadapi dalam kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar. Kolaborasi tukar pikiran yang dilakukan para stakeholder efektif memberikan solusi yang berkualitas karena hal tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian sebuah persoalan.

## 2) Strategi Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik

### a. Program pelatihan dan workshop cakap teknologi

Upaya dalam meningkatkan kemampuan guru agar cakap teknologi dan terampil dalam memanfaatkan berbagai media berbasis teknologi adalah dengan menyelenggarakan workshop, seminar ilmiah, KKG, MGMP dan IHT. Dalam kegiatan ini guru diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan dan pemanfaatan berbagai macam aplikasi yang sering di pakai dalam dunia pendidikan misalnya *google classroom*, *google form*, *google meet*, *zoom*, dan tentunya pengenalan dan pemanfaatan platform merdeka mengajar dalam menunjang akselerasi implementasi kurikulum merdeka. Disamping itu pula dapat dilakukan pelatihan tentang keterampilan pembuatan media pembelajaran yang menarik melalui perancangan dan pembuatan video pembelajaran, serta cara merancang aksi nyata bagi tenaga pendidik. Aksi nyata perlu dilaksanakan karena hal tersebut merupakan bentuk pemahaman guru terhadap topik yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri pada aplikasi platform merdeka mengajar. Untuk menghindari adanya kesamaan konten materi dalam pembuatan atau perancangan sebuah video pembelajaran maupun aksi nyata maka perlu dilaksanakan program pendampingan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pendidik.

### b. Membentuk KOMBEL (Komunitas Belajar) dalam platform merdeka mengajar

Tantangan utama yang dihadapi guru saat ini yaitu membangun kesadaran profesionalitas dalam rangka memberikan layanan kepada siswa. Adanya kesadaran profesionalitas yang dimiliki akan menggiring guru mampu menciptakan suasana dan iklim belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam rangka memaksimalkan

layanan pembelajaran yang ber fokus kepada kebutuhan siswa (pembelajaran berdiferensiasi) maka upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut maka Kemendikbudristek melalui program sekolah penggerak menginisiasi pembentukan KOMBEL (komunitas belajar) bagi tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi *platform* merdeka mengajar (PMM).

Kombel (komunitas belajar) adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah (komunitas) dimana mereka berpartisipasi aktif. Forum Komunitas belajar (KOMBEL) yang ada pada *platform* merdeka mengajar (PMM) ini dibentuk untuk mendukung seluruh tenaga pendidikan agar dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka. Tujuannya yaitu mengedukasi anggota komunitas terkait pertanyaan dan masalah dalam praktik pembelajaran, kemudian memfasilitasi anggota komunitas untuk dapat terus belajar, mendorong peningkatan kompetensi anggota lewat diskusi dan *sharing* pengalaman, serta mampu mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dalam komunitas dalam pekerjaan sehari-hari.

c. Mentoring melalui supervisi terpadu

Mentoring jika diterapkan dalam pelaksanaan supervisi terpadu kepala sekolah dan pengawas tentu akan memberikan perbaikan dalam kompetensi pedagogik guru. Melihat pada tujuan dari mentoring itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan individu secara bertahap sampai mampu dan mandiri dalam melakukan semua fungsi yang diperlukan. Mentoring ialah sebuah strategi

pembentukan karakter yang dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil. Mentoring dilakukan sebagai salah satu sarana pembinaan yang didalamnya ada proses belajar mengajar yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian bagi tenaga pendidik. Harapannya dengan adanya mentoring seperti ini tenaga pendidik yang mendapatkan kegiatan terprogram seperti ini mendapatkan tambahan pengetahuan dan dapat mengembangkan potensinya. Pelaksanaan supervisi dan mentoring yang baik, idealnya dapat memberikan pengaruh yang positif dalam perbaikan mutu pendidikan disuatu sekolah. Ketika setiap tahapan dari supervisi itu dilakukan dengan baik, dan terdapat kerjasama yang baik diantara para penyelenggara pendidikan, maka dengan sendirinya sekolah tersebut akan memiliki kualitas yang baik pula.

### **3) Strategi memperbaiki layanan dengan meminimalkan pengembangan produk/platform yang berkualitas rendah.**

#### **a. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana berbasis IT penunjang penggunaan platform.**

Bila dikorelasikan dengan dunia pendidikan saat ini di era revolusi industri adanya kemunculan seperti aplikasi pembelajaran semakin beragam, mulai dari penerapan *information management system*, *artificial intelligence*, *office automation system* hingga pada penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka juga mulai diterapkan dan dioptimalkan sebaik mungkin.

*Platform* merdeka mengajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang tenaga pendidik dalam mengembangkan kompetensi pedagogiknya termasuk untuk keterampilan belajar di kelas. Dalam kebijakan penggunaannya bagi tenaga

pendidik, nyatanya belum semua guru dan tenaga pendidik lainnya dapat mengakses aplikasi ini dikarenakan aplikasi *platform* yang disediakan pemerintah ini hanya bagi tenaga pendidik pengguna Android saja dan bagi tenaga pendidik yang tidak memiliki gawai / perangkat berbasis Android tentu tidak bisa mengakses platform ini. Dengan adanya keterbatasan pengaksesan ini, maka perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki layanan dengan cara melakukan pengembangan secara berkala dalam meningkatkan kualitas *platform* ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerja sama antar pemerintah dengan pihak developer dengan melakukan pengembangan aplikasi yang dapat diinstall dan diakses di semua gawai (*smartphone*) tanpa terkecuali. Dalam memperbaiki layanan pendidikan perlunya dilakukan sebuah pengembangan dan inovasi yang tepat sasaran. Inovasi program mutlak perlu dikembangkan dengan berbagai manfaat dan dampak positif yang signifikan. Program yang mengalami inovasi dan disertai sosialisasi kepada pengguna akan lebih optimal dan dapat dihargai oleh pengguna.

- b. Membangun kerjasama antar penyedia layanan program, lembaga pendidikan, dan membangun kemitraan dengan penyedia jasa dan layanan IT.

Pembangunan infrastruktur perlu dibenahi lebih merata dalam rangka memperkokoh dan mempercepat pemerataan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Pemerataan infrastruktur dilakukan hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Dalam upaya pemberian layanan pendidikan agar dapat berjalan optimal ditengah zaman modernisasi sekarang ini, perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak melakukan kerjasama antar lembaga pendidikan dengan penyedia layanan IT. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara membangun kemitraan dengan

penyedia jasa dan layanan IT. Mulai dari perbaikan infrastruktur teknologi dan informasi (TIK) seperti palapa ring. Kemudian melakukan pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)*, baik di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil sekalipun. Guna mempercepat pengembangan digital di daerah-daerah, dapat dilakukan dari membentuk *digital leader academy*, siber kreasi dan talenta digital yang nantinya akan dikembangkan dengan mitra pengembangan talenta bersama universitas terkemuka yang ada. Harapannya dengan adanya program bermitra yang semakin selaras antar perusahaan penyedia layanan dan jasa dalam bidang IT dengan lembaga pendidikan akan berdampak positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menciptakan SDM (pelajar dan tenaga pendidik) yang lebih baik.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan data di atas dan hasil pembahasan mengenai Analisis SWOT pada kebijakan penggunaan *Platform Merdeka Mengajar (PMM)* di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

- 1) *Platform* merdeka mengajar sangat berperan penting dalam mengakselerasi implementasi kurikulum merdeka. Kesuksesan dalam pelaksanaan MBKM ditentukan oleh keberhasilan sosialisasi dan konsistensi seluruh pihak (*stakeholder* pendidikan) dalam melaksanakan program tersebut
- 2) Kebijakan penggunaan *Platform Merdeka Mengajar* yang lebih jelas, tegas dan terarah akan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memperjelas arah pengimplementasian kurikulum merdeka di dunia pendidikan.

- 3) Melakukan program pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik secara berkala dan kontinu merupakan strategi yang tepat untuk menciptakan tenaga pendidik yang terampil dan cakap teknologi. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dengan adanya keterlaksanaan program ini membantu tenaga pendidik untuk mengatasi tantangan zaman modernisasi.
- 4) Untuk mencapai pengimplementasian secara optimal pada penggunaan *Platform Merdeka Mengajar*, maka harus dilandasi dengan peningkatan efektivitas layanan program pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana berbasis IT penunjang penggunaan *platform* yaitu dengan membangun kerjasama antar penyedia layanan program, lembaga pendidikan, dan membangun kemitraan dengan penyedia jasa dan layanan IT.
- 5) Untuk mencapai kesuksesan dalam penggunaannya, *platform* merdeka mengajar membutuhkan *effort* yang lebih dan berani untuk mengatasi hambatan yang ada dalam proses pengimplementasiannya.

Kesimpulan-kesimpulan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT Penggunaan *platform* merdeka mengajar, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan, yakni:

- 1) Membangun program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah serta melakukan pendekatan kolaborasi seluruh *stakeholder* pendidikan secara berkala dan kontinu untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu yang

terkait dengan perubahan kebijakan penggunaan *platform* merdeka mengajar (PMM).

- 2) Untuk menghindari kesenjangan teknologi diantara para tenaga pendidik dalam penggunaan *platform* merdeka mengajar maka perlu dilakukan pertemuan ilmiah seperti, Workshop, FGD, K3S (kelompok kerja kepala sekolah), KKG (kelompok kerja guru), KOMBEL dsb tujuannya untuk menciptakan tenaga pendidik yang terampil dan cakap teknologi.
- 3) Melakukan supervisi terpadu dan mentoring kepada seluruh tenaga pendidik untuk melakukan evaluasi penggunaan *Platform* Merdeka Mengajar secara berkala. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan, hambatan, tantangan serta peluang yang dihadapi tenaga pendidik saat menggunakan *platform* ini. Hal ini dilakukan agar teridentifikasi hambatan dan perbaikannya berdasarkan hasil evaluasi penggunaan.
- 4) Untuk menghindari ketimpangan infrastruktur, maka perlu dilakukan pendekatan kolaboratif antar *stakeholder* pendidikan dengan penyedia jasa dan layanan IT. Kerjasama dapat dilakukan dengan melakukan kebermitraan antar sekolah dan diknas pendidikan dengan IT *Service provider* sebagai *vendor* penyedia jasa dan layanan IT. Adanya kerjasama yang solid tentunya dapat membantu menghilangkan ketimpangan infrastruktur yang ada.

Rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## BAB 4

# Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan: Revitalisasi SMK

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pendidikan kejuruan yang merupakan salah satu bentuk pendidikan pada lingkungan pendidikan formal. Pendidikan kejuruan yang sejarahnya sangat panjang. Berawal dari Politik Etika (Etische Politiek) merupakan bentuk pertanggungjawaban politik Pemerintah Belanda terhadap Hindia Belanda. Sebuah tulisan oleh Mr. C. Th. Van Deventer, mengungkapkan bahwa kerisauan kalangan intelektual Belanda terhadap pertumbuhan kapitalisme yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya di Hindia Belanda, sementara Belanda menyatakan dirinya sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi. Dalam tulisannya, ia mengemukakan bahwa Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) tahun 1830 dan Sistem Liberal tahun 1870 yang dilaksanakan Pemerintah Belanda di tanah jajahannya, Hindia Belanda, merupakan politik pengerukan keuntungan. Dan dari sinilah muncul Politik Etika yang dicanangkan Ratu Belanda dalam sidang parlemen Belanda tahun 1901.

Pemerintah Belanda berusaha mengembangkan ekonomi agar memiliki anggaran sendiri dan akhirnya dari pendidikanlah unsur yang perlu dibenahi dan dibangun. Pendidikan kejuruan adalah salah satu di dalamnya, dimana dari sekolah kejuruan akan diperoleh lulusan dengan keahlian teknik. Pendidikan

kejuruan yang pertama kali Sekolah Pertukangan. Sekolah yang merupakan sarana yang digunakan untuk memajukan pertukangan di Indonesia. Dipilihnya Indonesia sebagai tempat penanaman politik etika karena pada saat itu Belanda sedang dalam masa penjajahan ke tanah Indonesia, sedang pada saat itu jika hanya dengan mengandalkan potensi yang ada maka tidak akan berkembang.

Sekolah Pertukangan Pertama kali dibangun di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Betawi dan Semarang, kemudian berkembang lagi Pendidikan Kejuruan Pertanian yaitu sekolah yang berkonsentrasi pada kursus untuk pendidikan pertanian praktis. Kemudian dibangun Pendidikan Kejuruan Teknik, dimana banyak sekali keahlian yang dikembangkan seperti keahlian bangunan, keahlian pertambangan, pendidikan masinis, dan lain-lain. Sejarah singkat pendidikan kejuruan dan bagaimana prosesnya, dan yang awalnya oleh pemerintah Belanda hanya untuk kebangsaan Eropa dan China, tetapi akhirnya mereka mengembangkan untuk masyarakat Pribumi. Mulai saat itu secara perlahan pendidikan kejuruan mulai mendapat tempat pada sistem pendidikan di Indonesia..

Seiring dengan perkembangan pendidikan kejuruan terdapat beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong tercapainya tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil. Salah satu kebijakan tersebut adalah **Kebijakan Revitalisasi SMK yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016** merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia. Kebijakan Revitalisasi SMK ini berisi tentang perombakan sistem pendidikan dan pelatihan dari hulu sampai hilir. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan tujuan agar SMK bisa menghasilkan calon tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan sesuai dengan yang dipersyaratkan dunia industri dan siap terjun langsung untuk

bekerja di segala bidang, sebagai upaya peningkatan kreativitas tenaga kerja Indonesia dan mengurangi pengangguran usia produktif yang masih menjadi permasalahan di Indonesia (Kemdikbud.go.id, 2017).

## 2. Dasar Hukum Kebijakan

Pengembangan pendidikan kejuruan pada Pelita V melalui **Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional** dapat dikatakan merupakan tonggak awal pengembangan pendidikan kejuruan secara terpadu di Indonesia. melalui **PP No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah**. maka instruksi terkait konsep *Link and match* mulai ditegaskan, terdapat 3 pasal sebagai dasar berpijak bagi pengembangan pendidikan kejuruan dimana dikatakan pada pasal 1 ayat 3 bahwa Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, pada pasal 4 ayat 1 bahwa bentuk satuan pendidikan menengah salah satunya adalah sekolah menengah kejuruan dan pada pasal 7 dikatakan Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan lain maka harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.

Sejak saat itu upaya menciptakan kerjasama dan penyesuaian pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri semakin diupayakan. Untuk menjembatani *link and match* antara SMK dan Dunia usaha dan industri maka dilaksanakan **Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG)** dilaksanakan mengacu pada: **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Implikasi *Link and Match* melalui pendidikan sistem ganda tersebut dikembangkan berdasarkan konsep *dual system* di Jerman. yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Dengan kata lain karena penerapan sistem ganda atau dual-system maka dalam pelaksanaan belajar teori di SMK dan praktik di industri. karena itu desain kurikulum dan sistem pengujian juga disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri dengan fokus utama pada bidang pertanian, maritim, pariwisata, dan industri kreatif.

Penerapan pendidikan sistem ganda melalui konsep “Link and Match” menjadi tonggak bersejarah bagi awal upaya pemerintah melibatkan industri dalam pendidikan kejuruan. Kemudian dengan Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) dan Pembentukan MPKN untuk provinsi.

Pada tahun 2003, dengan dicabutnya **Undang-undang No. 2 Tahun 1989 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang secara khusus mempersiapkan kemampuan untuk bekerja dalam bidang tertentu dan siap untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan dapat dipahami sebagai proses belajar mengajar yang mempersiapkan siswa untuk kegiatan profesional di bidang tertentu. Intinya, setiap siswa yang telah menyelesaikan pelatihan teknis dan kejuruan dapat langsung memulai kehidupan kerja tanpa meragukan kemampuannya. Konsep *Link and match* terus dipakai, direvisi, diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>) agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat tercapai. Konsep

penyelarasan dan kesesuaian tersebut mempunyai tujuan sebagai jembatan untuk menyelaraskan antara kompetensi/ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri. (Soesilowati, 2010).

Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2016, terdapat lebih dari 182.99 juta tenaga kerja Indonesia, sebanyak 7.24 juta orang di Indonesia berstatus pengangguran. Mereka belum tertampung di dunia kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar adalah lulusan SMK sebesar 11.24% kemudian menyusul lulusan Sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Rasio lulusan SMK sejak tahun 2005 terus meningkat dan menyumbang pengangguran yang cukup tinggi.

Pada tahun 2016, terbit **Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia**. Inpres yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

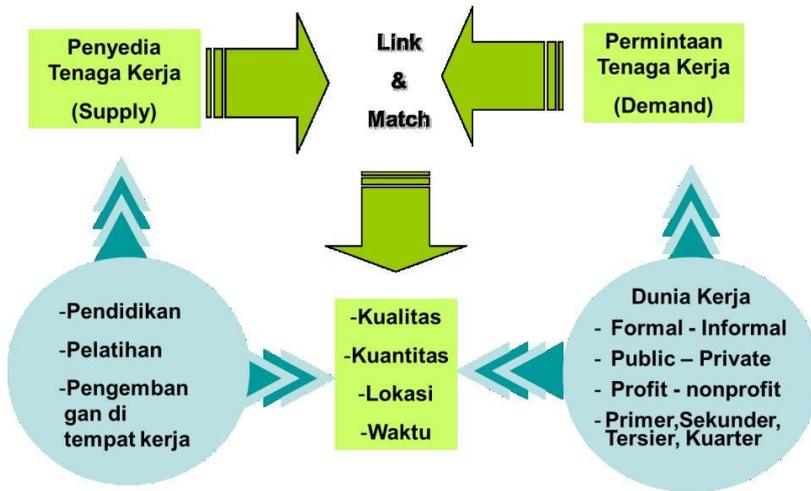
Menindaklanjuti kebijakan revitalisasi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada semua pelaksana di bidang pendidikan untuk bersama-sama melakukan penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi yang menjadi persyaratan pengguna lulusan (*link and match*). Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, maka pendidikan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri merupakan konsep yang dapat digunakan sebagai upaya mengarahkan lembaga pendidikan untuk mengeluarkan output yang tidak sekedar tempat mengembangkan kemampuan dan keahliannya melainkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kementerian Perindustrian ditugaskan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan paktek kerja lapangan dan magang industri bagi guru agar Tujuan *link and match* sebagai peningkatan kompetensi, kecakapan hidup (life skill), kapatasitas sumber daya manusia, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, terutama industri atau lebih sering disebut bersaing tingkat global (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>) termasuk penyediaan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian dari revitalisasi.

Pada tahun 2017, **Permenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017** pun diterbitkan untuk mendukung konsep *Link And Match* sebagai alternatif dalam menjebatani tingginya angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah, angka pengangguran, tingginya lowongan kerja tak terisi, dan rendahnya kualitas pekerja.

Dalam Inpres No 9 tersebut, diinstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Presiden juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Khusus untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), terdapat enam instruksi.

Mengingat lulusan SMK dirancang untuk memasuki dunia kerja (utamanya) yang relevan, maka perencanaan pengembangan SMK harus didasarkan atas *manpower planning approach*, bukan *social demand planning approach* agar lulusannya selaras dengan kebutuhan dunia kerja (Lihat Gambar 1).



Gambar 1. Konsep *Link and Match*

Pada tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK setiap tahunnya semakin menurun.

Berdasarkan data dari sakernas (survei angkatan kerja nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,92 persen. Dengan kata lain tren angka pengangguran lulusan SMK mengalami penurunan. Sedangkan jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Banyak kalangan menyatakan optimis terhadap program Revitalisasi SMK.



## Dampak Revitalisasi SMK



Sumber: BPS

[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id) [f Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/kemdikbud.RI) [Kemdikbud\\_RI](https://www.instagram.com/kemdikbud.RI) [kemdikbud.RI](https://www.tiktok.com/@kemdikbud.RI) [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/channel/UCkEMENDIKBUD.RI)

Gambar 2. Dampak Revitalisasi SMK Tahun 2019

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan *link and match* pendidikan vokasi dengan dunia industri sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**. Revitalisasi Pendidikan Vokasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan Inpres tersebut. Ruang lingkupnya masih terfokus pada integrasi penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terdapat di lingkungan Kemendikbud, yakni di SMK, lembaga kursus dan pelatihan, dan SMALB. Revitalisasi juga menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke *demand-driven*.

Adapun fokus tulisan ini adalah pada pembahasan analisis terhadap kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia yang mencakup pokok bahasan, substansi kebijakan dan proses kebijakan Revitalisasi pendidikan kejuruan. Analisis dan koreksinya terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan kejuruan khususnya Implikasi *link and match* pada kebijakan revitalisasi SMK yang telah dan sedang berlangsung akan ditelaah dengan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*),

dengan harapan dapat memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan revitalisasi SMK, dengan membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada, memanfaatkan peluang yang muncul, serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK. Refleksi yang konstruktif terhadap kebijakan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka untuk memetik pelajaran dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan kejuruan masa lalu untuk kemudian dikoreksi kekurangannya agar menjadi kebijakan pendidikan kejuruan yang lebih baik di masa depan.

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan Pendidikan Kejuruan di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat implementasi program.

Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan pemerintah terkait Revitalisasi SMK pada pendidikan kejuruan:

#### **A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan.**

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui program link and match, yang disimbolkan dengan [S1] sampai dengan [S3] :

**a) Tersusunnya Peta Jalan SMK [S1]**

Terdapat model perencanaan di lingkungan Pendidikan Menengah Kejuruan. Peta Jalan mencakup pembaharuan dan simplifikasi dari struktur, sistematika penyusunan, yang bersifat progresif, fleksibel, sehingga dapat disesuaikan atau disempurnakan dengan mudah setiap saat.

**b) Terjadinya Penyelarasan Kurikulum SMK dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri [S2]**

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), maka dilakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari *supply-driven*, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi *demand-driven* agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK.

**c) Terjalinnnya kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industry [S3]**

Hubungan kerjasama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri dan SMK untuk menjalankan kerjasama antar lembaga agar saling mensupport demi tercapainya tujuan Revitalisasi SMK, meningkatkan pencitraan DUDI dan mengoptimalkan Sumberdaya SMK dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi permintaan pasar kerja.

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui program *link and match*, yang disimbolkan dengan [W1] sampai dengan [W3] :

**d) Keterbatasan Sumber Daya [W1]**

Perlunya pemenuhan guru produktif untuk memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja.SMK.

**e) Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Revitalisasi SMK [W2]**

Kurangnya kesadaran akan pentingnya revitalisasi SMK dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK dimana. SMK sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam penyiapan tenaga kerja dituntut untuk selalu dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang.

**f) Keterbatasan Keterampilan [W3]**

Keterbatasan keterampilan siswa lulusan SMK dikarenakan SMK belum secara optimal membentuk lulusan yang mempunyai dua keterampilan yaitu *hardskills* dan *softskills* dan pada akhirnya lulusannya akan sulit bersaing di dunia kerja. Dalam menyiapkan lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang berkompeten sesuai harapan industri, SMK dapat melaksanakan program-program kegiatan tambahan yang dapat menambah keterampilan lulusan SMK.

**B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman**

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui program *link and match*, yang disimbolkan dengan [O1] sampai dengan [O3] :

**a. Penyelarasan Kompetensi dan Budaya Kerja SMK [O1]**

Dalam penyelarasan kompetensi dan budaya kerja SMK salah satu konsepsi pada pendidikan kejuruan adalah sistem magang bagi peserta didik SMK. Pelaksanaan Magang yang diimplementasikan dalam program PSG atau sekarang dikenal dengan PKL diyakini mampu memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada siswa untuk siap bekerja di dunia kerja, pengalaman ini dinilai sebagai pembelajaran penting bagi siswa dalam menumbuhkan kesiapan kerja mereka.

**b. Kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan etos kerja yang berlaku di Dunia Usaha dan Dunia Industri [O2]**

Penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan dilakukan jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari *supply-driven*, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi *demand-driven* agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan DUDI semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK diantaranya dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI.

**c. Lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri [O3]**

Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri terus diperkuat. Sejak dilakukannya revitalisasi SMK, semakin banyak industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Kerjasama ini dapat mendorong semakin berkurangnya kesenjangan antara harapan DUDI dan kualitas lulusan SMK sehingga lulusan SMK dapat diterima oleh DUDI.

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi ancaman** (*threats*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui program *link and match*, yang disimbolkan dengan [T1] sampai dengan [T3] :

**a. Tidak tercapainya syarat minimal yang diinginkan DUDI [T1]**

Kesenjangan harapan dan kenyataan dalam penyelarasan Budaya Kerja antara DUDI dengan SMK dapat menjadi faktor ancaman eksternal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan DUDI atas apa yang telah diupayakan pada .program kebijakan revitalisasi tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK secara keseluruhan.

**b. Kurangnya fasilitas sarana dan sarana pendidikan [T2]**

Pengalaman kerja sebagai salah satu faktor yang dirasa mampu untuk meningkatkan keahlian profesional siswa SMK. namun mengingat DUDI memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk mengoperasikan peralatan dan teknologi canggih, maka hal ini dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK di sekolah, dimana siswa harus dapat menyesuaikan diri dengan sarana dan prasarana yang ada di DUDI dan kemungkinan belum pernah dijumpai di sekolah.

**c. Penempatan Lulusan SMK Tidak Tepat [T3]**

Berdasarkan spektrum bidang keahlian SMK hingga saat ini telah terdapat 146 bidang keahlian. Kompetensi lulusan SMK harus sesuai kebutuhan pasar kerja pada wilayah sekitarnya. Tersedianya lulusan dengan kompetensi yang tidak sesuai kebutuhan pasar dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK. Hal ini dapat menimbulkan

kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyebabkan kesenjangan revitalisasi SMK karena serta masih terjadi *mismatch* antara pendidikan dan kebutuhan industry.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan revitalisasi SMK, yang memasukkan semua faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom matriks yang sesuai, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 3.

### **C. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak matriks yang sesuai.**

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan (*Strengths*) dan kolom Kelemahan (*Weakness*) diisi dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari kebijakan revitalisasi SMK yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [S1] sampai dengan [S3] serta simbol [W1] sampai dengan [W3] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian juga halnya dengan kolom Peluang (*Opportunities*) dan kolom Tantangan (*Threats*) diisi dengan faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi kebijakan revitalisasi SMK yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai dengan [O3] serta simbol [T1] sampai dengan [T3] pada uraian tahapan sebelumnya.

<b>KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)</b>	<b>KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)</b>
S6. Tersusunnya Peta Jalan SMK. S7. Terjadinya penyesuaian Kurikulum SMK dengan Kebutuhan DUDI. S8. Terjalannya kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri.	W6. Keterbatasan Sumber Daya. W7. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Revitalisasi SMK. W8. Keterbatasan Keterampilan.
<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</b>
O1. Penyesuaian Budaya Kerja SMK. O2. Kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan etos kerja yang berlaku di DUDI. O3. Lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan DUDI.	T6. Tidak tercapainya syarat minimal yang diinginkan DUDI. T7. Kurangnya Fasilitas Sarana Pendidikan. T8. Penempatan Lulusan SMK Tidak Tepat

**Gambar 3. Matriks SWOT Kebijakan Revitalisasi SMK**

Berdasarkan matriks analisis SWOT (Lihat Gambar 3), maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan Revitalisasi SMK.

**D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang ditampilkan pada matriks dan penjelasan berikut:

<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN REVITALISASI SMK</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		S1. Tersusunnya Peta Jalan SMK. S2. Terjadinya penyalarsan kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI. S3. Terjalannya kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri.
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strength-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
O1. Penyalarsan Budaya Kerja SMK. O2. Kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan	SO-5. Memberi lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi . SO-6. Memberikan	WO-6. Mencetak guru produktif yang terampil dalam membimbing siswanya

<p>kompetensi dan etos kerja yang berlaku di DUDI.</p> <p>O3. Lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan DUDI.</p>	<p>Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK.</p> <p>SO-7. Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.</p>	<p>agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang sesuai kebutuhan DUDI.</p> <p>WO-7. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi revitalisasi SMK dan Membangun komitmen jangka panjang dengan DUDI.</p> <p>WO-8. Mengintensifkan pembelajaran berbasis produksi dan bisnis.</p>
<p><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p>	<p><b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b></p>	<p><b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b></p>
<p>T1. Tidak tercapainya syarat minimal yang diinginkan DUDI.</p> <p>T2. Kurangnya Fasilitas Sarana Pendidikan.</p> <p>T3. Penempatan</p>	<p>ST-1. Mencetak lulusan SMK yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dan mampu meraih peluang dengan berbagai resiko</p>	<p>WT-1. Memenuhi dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan yang berstandar.</p> <p>WT-2. Mengoptimalkan peran serta seluruh</p>

Lulusan SMK Tidak Tepat.	<p>yang dihadapi.</p> <p>ST-2. Menyediakan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas sesuai dengan standar DUDI.</p> <p>ST-3. Menyiapkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.</p>	<p>pemangku kepentingan untuk membangun dan mengelola SMK.</p> <p>WT-3. Mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan di pasar kerja.</p>
--------------------------	--	---

**Gambar 4. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Revitalisasi SMK**

**E. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi adalah sebagai berikut :

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

## 2) Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

## 3) Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

**Tabel 1.**  
**Perhitungan Skor Analisis SWOT**

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>Kekuatan (Strengths)</b>					
1	Tersusunnya Peta Jalan SMK.	4	0.25	4	1.00
2	Terjadinya penyesuaian Kurikulum SMK dengan Kebutuhan DUDI.	3	0.19	4	0.75
3	Terjalannya kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri.	4	0.25	3	0.75
<b>Sub Total</b>					<b>2.50</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>					
1	Keterbatasan Sumber Daya.	2	0.13	1	0.13
2	Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Revitalisasi SMK.	1	0.06	2	0.13
3	Keterbatasan Keterampilan.	2	0.13	2	0.25
<b>Sub Total</b>					<b>0.50</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>16</b>	<b>1</b>		<b>3.00</b>
<b>Peluang (Opportunities)</b>					
1	Penyesuaian Budaya Kerja SMK.	4	0.24	4	0.94
2	Kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan etos kerja yang berlaku di DUDI.	4	0.25	3	0.75
3	Lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan DUDI.	4	0.25	4	1.00
<b>Sub Total</b>					<b>2.69</b>

Ancaman ( <i>Threats</i> )					
1	Tidak tercapainya syarat minimal yang diinginkan DUDI.	2	0.13	2	0.25
2	Kurangnya Fasilitas Sarana Pendidikan.	2	0.13	2	0.25
3	Penempatan Lulusan SMK Tidak Tepat.	1	0.06	2	0.19
<b>Sub Total</b>					<b>0.69</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>		<b>17</b>			<b>3.38</b>

- 4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Strategi SO :</b> $1.88 + 2.31 = 5.19$	<b>Strategi WO :</b> $0.76 + 2.37 = 3.13$
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST :</b> $1.88 + 0.75 = 3.125$	<b>Strategi WT :</b> $0.63 + 0.75 = 1.125$

**Gambar 5. Hasil Perhitungan Skor Strategi**

- 5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi *Strength-Opportunities* dengan **nilai 5.19**. Sehingga strategi kebijakan revitalisasi SMK yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah **Strategi SO (Strength-Opportunities)**.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritasasi faktor, diketahui bahwa **Strategi SO (Strengths-Opportunities)** merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan revitalisasi SMK disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan

untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Memberi lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMK terakreditasi</li> <li>b. Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP.</li> <li>c. Menyiapkan tenaga asesor.</li> </ul>
2	Memberikan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi</li> <li>b. Menyelenggarakan Uji Kompetensi.</li> <li>c. Mempunyai tenaga asesor.</li> </ul>
3	Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan peserta didik.</li> <li>b. Memfasilitasi siswa SMK mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.</li> <li>c. Membenahi sarana prasarana pendukung.</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 4.

### 1) Memberi lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi.

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

#### a. Meningkatkan akreditasi SMK.

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan lisensi bagi SMK agar dapat menjadi LSP atau lembaga sertifikasi profesi (LSP). Salah satu persyaratan untuk dapat mendaftarkan SMK menjadi LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah sudah tersertifikasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut akreditasi SMK harus dilakukan.

#### b. Mengupayakan Sertifikat Lisensi dari BNSP agar SMK menjadi LSP.

Untuk memenuhi tuntutan kebijakan revitalisasi SMK maka Pembentukan LSP juga menjadi salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. SMK sebagai penyelenggara pendidikan vokasi diberi kewenangan untuk menjadi LSP P1. SMK yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1 akan menguji peserta didiknya agar mendapatkan sertifikat profesi, dalam kewenangan sebagai LSP 1 SMK hanya menguji peserta didiknya saja.

c. Menyiapkan tenaga asesor.

SMK yang mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

## 2) Memberikan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK..

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Kurikulum yang berbasis pada standar Kompetensi.

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), maka wajib melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan SMK. Selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi pendidikan saja, yang nantinya tidak akan dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberi porsi lebih besar untuk menentukan kurikulum.

b. Menyelenggarakan Uji Kompetensi.

Penyelenggaraan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Dimana Sertifikat kompetensi akan membantu peserta didik untuk menilai diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki melalui hasil ujian. Perolehan hasil uji kompetensi keahlian tertentu bagi siswa dapat menjadi *support* agar semakin terjadi peningkatan kualitas dan kinerja siswa, dan semakin kuat kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI atau dunia usaha, dunia

industri, dunia kerja. UKK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan SMK. Diharapkan melalui program ini, SMK bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten.

c. Mempunyai tenaga asesor.

SMK yang mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

**3) Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.**

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan peserta didik.

Akses sertifikasi lulusan peserta didik SMK melalui uji kompetensi keahlian (UKK). UKK berperan penting dalam kelulusan peserta didik karena hasil UKK akan menjadi indikator pencapaian standar kompetensi kelulusan. Nantinya, sertifikasi yang diperoleh menjadi sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki peserta didik.

b. Memfasilitasi siswa SMK mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.

Pemerintah memfasilitasi siswa dalam memperoleh akses sertifikasi dengan cara menyelenggarakan program bantuan sertifikasi kompetensi dan profesi. Ini dimaksudkan agar lulusan SMK dapat lebih cepat meraih pekerjaan. Perluasan akses bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK, guna memastikan para siswanya memiliki

tanda pengakuan pencapaian kompetensi yang diakui oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

c. Membenahi sarana prasarana pendukung.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis industri adalah salah satu aspek yang penting dalam keberhasilan revitalisasi SMK ini dimana inti dari program ini adalah menekankan sinkronisasi pembelajaran antara SMK dan DUDI. Dari penyelarasan kurikulum bersama DUDI dapat dilihat dari muatan pembelajaran yang diikuti dengan penyesuaian model pembelajaran (*dual based program*, berbasis proyek dan kewirausahaan, sistem blok, beserta sistem penilaiannya). pengembangan bahan ajar bersama, pelaksanaan praktek kerja lapang (PSG atau PKL) di DUDI, sertifikasi kompetensi siswa oleh DUDI, pemagangan guru dan sertifikasinya, penerapan budaya kerja industri di SMK, hingga komitmen DUDI untuk merekrut lulusan SMK.

Sistem pendidikan telah beralih menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar dan industri, meskipun tujuan baiknya kualitas sistem pendidikan ini dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi suatu Negara. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan sebagai cara menanamkan keyakinan dan nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan kritis nantinya dapat menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan tanggap terhadap perubahan yang ada

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari keseluruhan kebijakan ini, pastinya tidak hanya diukur pada selesainya pelaksanaan program dan keterserapan anggaran. Tetapi hal penting adalah bagaimana

peningkatan kompetensi lulusan SMK yang kemudian dapat diserap oleh DUDI.

Pada akhirnya tuntutan dari kebijakan program revitalisasi SMK ini adanya keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri, sehingga penyesuaian pembelajaran di SMK dapat diupayakan oleh semua pihak terkait agar senantiasa diselaraskan dengan DUDI sehingga lulusan yang dihasilkan oleh SMK dapat memenuhi standar kemampuan yang dipersyaratkan industri.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT kebijakan Pendidikan Kejuruan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Jika dilihat jabaran dari kebijakan program revitalisasi SMK dengan implementasi *link and match* ini sangatlah bagus untuk menciptakan iklim pendidikan yang bermuara pada kebutuhan DUDI. Sehingga nantinya lulusan SMK dapat diserap oleh DUDI ataupun bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, karena mereka telah dibekali kompetensi yang mumpuni ketika mengenyam pendidikan di SMK. Yang pada akhirnya angka pengangguran dari SMK dapat ditekan dan mengalami penurunan.
2. Hal-hal pendukung keberhasilan kebijakan program revitalisasi SMK antara lain peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; peningkatan kerjasama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri; serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK harus senantiasa menjadi sub-sub prioritas yang diselaraskan dengan tujuan utama.

3. Informasi mengenai dunia kerja menjadi faktor penting. SMK yang siswanya menjadi tenaga kerja yang terampil tentu saja membutuhkan informasi dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya. Untuk mendukung kesiapan kerjanya siswa SMK wajib memberikan informasi yang lengkap tentang jenis-jeni profesi ataupun pekerjaan yang dapat dipilih oleh siswa. SMK harus bertindak sebagai penyelenggara bursa kerja yaitu sebagai lembaga yang memberikan informasi mengenai pasar kerja, pendaftaran pencari kerja dan menjadi pihak yang turut berperan menyalurkan dan menyesuaikan penempatan kepada siswa lulusan SMK.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT kebijakan Pendidikan Kejuruan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan:

1. Kebijakan Program Revitalisasi SMK yang diimplementasikan melalui *link and match* harus berkelanjutan, dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun, atau secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu dan tertuang dalam rencana strategis. Dengan demikian pada tahun tertentu, tingkat keberhasilan implementasi *link and match* dapat diidentifikasi dan diukur secara pasti berdasarkan data awal .
2. Kebijakan yang dibuat haruslah didasari dari hasil evaluasi dan analisis hal-hal yang menjadi kendala pada implementasi *link and match* sebelumnya. Kebijakan itu diterjemahkan dalam langkah-langkah kongkrit, dan disesuaikan karakteristik masing-masing SMK dengan DUDI yang ada pada wilayah tertentu.
3. Kebijakan *link and match* sebaiknya dipayungi dengan produk hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, maupun SOP yang mengatur secara utuh *link and*

*match* antara SMK dengan DUDI. Produk hukum tersebut perlu memperjelas hak dan kewajiban beserta sanksi jika *link and match* ini tidak dijalankan kedua belah pihak.

**Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi****A. Pendahuluan****1. Latar Belakang dan Permasalahan**

Pendidikan merupakan sektor yang sangat fundamental nilainya dan sangat strategis posisinya dalam mengangkat harkat dan martabat umat manusia, sektor ini merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas setiap individu. Bahkan untuk menentukan kualifikasi majunya suatu bangsa atau negara ukurannya adalah implementasi kebijakan pendidikan di negara tersebut. Pentingnya peran dunia pendidikan dapat dilihat pula dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni agenda pembangunan dunia berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, dimana salah satu tujuannya adalah pendidikan berkualitas (bermutu). Sektor pendidikan juga berkontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP tahun 2020 yang merilis IPM Indonesia masih menempati peringkat ke-107 dari 189 negara dan untuk di negara-negara ASEAN Indonesia menduduki peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand, hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan.

*The founding fathers* sejak tahun 1945 sangat menyadari urgensi pendidikan oleh karena itu tidaklah mengherankan dalam Pembukaan UUD 1945 perihal pendidikan (*mencerdaskan kehidupan bangsa*) telah ditetapkan. Bahkan

dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 ayat 1 sampai 5, lebih ditekankan lagi tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan bagian akhir dari jenjang pendidikan nasional Indonesia setelah pendidikan tingkat lanjutan atas (SLTA). Terdapat beberapa regulasi kebijakan di level pendidikan tinggi, antara lain berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014) dan standarisasi pendidikan tinggi (Permendikbud & Ristek Nomor 3 Tahun 2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah, yakni: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi Pembelajaran; (c) standar proses Pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h). standar pembiayaan Pembelajaran. Dalam implementasinya kebijakan ini diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan mutu (kualitas) penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia belum sesuai standar. Indikatornya, antara lain :

- a. Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi dipandang belum bersesuaian tuntutan dunia kerja atau dalam bahasa lain belum *link and match*. Fakta empirik menunjukkan sampai tahun 2023 dilaporkan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia merupakan produk perguruan tinggi.
- b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan relatif masih terbatas, terutama yang berpendidikan doktor (S3) dan berkualifikasi guru besar. Pada perguruan tinggi negeri (PTN) dosen tetap berkualifikasi doktor telah mencapai 67,48 persen dan pada perguruan swasta (PTS) baru mencapai 10,38 persen, padahal untuk mencapai perguruan tinggi unggul minimal dosen berkualifikasi doktor minimal 75 persen.

- c. Terbatasnya sarana-prasarana di perguruan tinggi menyebabkan mahasiswa kekurangan waktu meningkatkan kemampuan di luar kampus dan organisasi, serta dosen kekurangan kesempatan untuk meneliti dan menulis karya tulis ilmiah.
- d. Pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor penting yang mampu melahirkan *enterpreneur* dengan *orientasi job creating* dan kemandirian, lulusan yang kalah bersaing dengan luar negeri disertai mahalanya biaya pendidikan.

Karya tulis ini difokuskan pada implementasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, hal ini berdasarkan fenomena dan fakta-fakta empirik dimana terdapat empat indikator yang dipandang bermasalah. Apabila permasalahan tersebut dikaji lebih mendalam, penyebabnya adalah belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Mengacu pada problematika dan penyebabnya, dipandang perlu untuk membuat langkah-langkah strategis untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut secara komprehensif dan integratif disertai dengan meningkatkan komitmennya dalam: penyediaan dan pengalokasian dana serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan. Salah satu alat untuk membedah permasalahan kebijakan pendidikan tinggi, yakni dengan membuat Analisis SWOT *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Dari analisis tersebut akan diperoleh hasil identifikasi permasalahan internal dan eksternal, bahkan strategi kebijakannya yang solutif akan diperoleh.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan**

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi di Indonesia, telah diterbitkan berbagai regulasi yang kemudian menjadi landasan, azas atau dasar hukum kebijakan pendidikan tinggi, yakni:

- a. Sistem Pendidikan Nasional diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003.

Undang-undang ini bersifat umum karena memuat kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa: pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan IPTEK serta nilai humaniora.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Prinsip dasarnya, terdapat enam aspek kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan ini memfokuskan pada satuan standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Khusus standar pendidikan tinggi, tujuan utamanya adalah peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan IPTEK dan nilai humaniora.

Memperhatikan dasar hukum kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa, dari aspek regulasi (peraturan perundangan), kebijakan di bidang pendidikan tinggi telah memadai karena salah satu faktor penting dalam tahapan suatu kebijakan, adalah dimilikinya formulasi dan legitimasi kebijakan. Demikian pula dalam disiplin ilmu pendidikan, regulasi (yuridis atau hukum) menjadi salah satu

azas atau landasan pendidikan. Kedua aspek (regulasi, legitimasi dan azas/landasan) pendidikan tinggi menunjukkan pemerintah telah memiliki sumber daya pembangunan yang kuat karena dalam disiplin ilmu kebijakan publik sumber daya tersebut harus dimiliki. Merupakan sesuatu yang mustahil dalam penerapan sebuah kebijakan tanpa adanya landasan atau regulasi serta perolehan legitimasi. Sumber daya inilah yang memberikan kekuatan agar sebuah kebijakan dapat terimplementasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Tetapi tak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan senantiasa muncul yang kemudian akan menjadi *limithing factor*, tidak terkecuali dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi, untuk itulah dibutuhkan analisis kebijakan pendidikan tinggi.

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi**

Kebijakan atau *policy*, merupakan salah satu disiplin ilmu (*policy sciences*) yang membahas perihal kebijakan yang diputuskan oleh otoritas negara (unsur pemerintah) di berbagai sektor pembangunan. *Policy* merupakan jawaban atas masalah masa kini dan harapan masa datang, dan kebijakan publik adalah: “*whatever government choose to do or not to do*”. Hal ini mengindikasikan bahwa “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, itulah yang disebut sebagai kebijakan publik. Apabila ditafsirkan lebih meluas lagi dalam perspektif kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa “seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerbitan berbagai regulasi dapat bermakna sebagai kebijakan”.

Dalam semua pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh pemerintah membutuhkan proses kebijakan, diawali dari membuat rumusan masalah, dilanjutkan dengan pengimplementasian serta diakhiri dengan evaluasi kebijakan. Pandangan lain, menyebutkan prosesnya diawali dengan penyusunan agenda kemudian memformulasikan dan

dilanjutkan dengan adopsi, implementasi serta berakhir saat diadakan evaluasi.

Ihwal ini membuktikan bahwa, dalam setiap proses pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan membuat langkah atau pentahapan, dan semuanya harus dilakukan melalui sebuah analisis yang terstruktur mulai dari penyusunan agenda dan diakhiri pada tahap evaluasi. Demikian seterusnya, apabila mengalami permasalahan atau tidak bermasalah dipandang perlu untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian sehingga kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi terus *up date*. Organisasi yang terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi internal maupun eksternal organisasi diyakini akan terus eksis.

Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan, juga dipandang sebagai aktivitas intelektual dan praktis dalam proses kebijakan. Memperhatikan pandangan para pakar perihal kebijakan, proses dan analisis kebijakan, maka analisis kebijakan pendidikan tinggi dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah (kementerian pendidikan) dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi melalui tahap penyusunan agenda, formulasi dan implementasi serta evaluasi kebijakan.

Apabila mencermati permasalahan “belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia” dalam perspektif analisis kebijakan publik, maka pentahapan analisis kebijakan yang harus ditempuh, yakni dengan memperhatikan karakteristik mulai dari perumusan masalah sampai pada evaluasi kebijakan seperti yang diteorikan oleh Subarsono dalam Musfah (2022) seperti yang ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan mengacu pada Subarsono dalam Musfah (2022)**

No	Tahap	Karakteristik
1	Perumusan masalah	Info perihal kondisi yang menimbulkan permasalahan
2	Peramalan ( <i>forecasting</i> )	Info konsekuensi masa datang apabila diterapkan alternatif kebijakan atau tidak dilaksanakan
3.	Rekomendasi kebijakan	Info manfaat dan rekomendasi alternatif kebijakan yang paling bernilai tinggi
4.	Monitoring kebijakan	Info konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan termasuk kendalanya
5.	Evaluasi kebijakan	Info tentang kinerja atau hasil dari kebijakan

Mengacu pada tabel 1 tersebut, maka untuk menelaah permasalahan “Belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia”, pentahapan dan karakteristik analisisnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia**

No	Tahap	Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi
1.	Perumusan masalah	Masalah: kompetensi lulusan PT, ketenagaan, sarana-prasara, pendanaan
2	Peramalan ( <i>forecasting</i> )	Apabila ditetapkan kebijakan pendidikan tinggi (sesuai perumusan masalah), akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi
3.	Rekomendasi	Rekomendasi: sangat bermanfaat bagi

No	Tahap	Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi
	kebijakan	pemerintah dan publik apabila kebijakan pendidikan tinggi segera diimplementasikan secara komprehensif dan terintegrasi
4.	Monitoring kebijakan	Konsekuensi: penataan ulang kebijakan pendidikan tinggi, kendalanya: peningkatan standarisasi berkelas dunia, dana kendala pendanaan
5.	Evaluasi	Lulusan PT akan dapat bersaing, adaptif dengan IPTEK (teknologi digital), terbangun kualitas PT Indonesia dengan biaya murah ( <i>low cost</i> )

Berdasarkan analisis kebijakan pendidikan tinggi pada tabel 2, menunjukkan bahwa bahwa proses analisis kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tinggi, diawali dengan tahap perumusan masalah, karakteristik (ciri atau penanda) yang dapat diidentifikasi, antara lain: masalah kompetensi lulusan Perguruan Tinggi yang kalah bersaing dengan lulusan luar negeri, Lemahnya *link and match* Perguruan Tinggi dan dunia kerja; kurangnya ketenagaan (dosen) berkualifikasi Doktor dan guru besar; sarana-prasarana yang terbatas serta pendanaan yang masih relatif kecil (walaupun adanya kebijakan penetapan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD). Pada tahap akhirnya, adalah evaluasi kebijakan dimana karakteristiknya berkaitan dengan kinerja atau hasil yang diperoleh ketika kebijakan pendidikan tinggi tersebut diimplementasikan. Ciri utamanya atau karakteristiknya, antara lain: Lulusan Perguruan Tinggi akan dapat bersaing, adaptif dengan IPTEK (teknologi digital), serta terbangun kualitas Perguruan Tinggi Indonesia dengan biaya murah (*low cost*).

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat strategis untuk dilaksanakan mengingat kondisi internal dan eksternal pendidikan tinggi di Indonesia berjalan sangat dinamis yang harus segera mendapat solusi cerdas dari para

pengambil kebijakan, misalnya untuk menjawab : (a) semakin tingginya pengangguran seperti yang dilaporkan BPS pada Februari 2022), bahwa pengangguran terbuka alumni perguruan tinggi (universitas dan diploma/akademi) mencapai 1.120.128 orang atau 13,33 persen dari total 8.402.153 orang. dan (b) mulai maraknya perguruan tinggi luar negeri akan membuka cabangnya di Indonesia, seperti *Lancaster University*, Inggris dan *Deakin University*, Australia.

Selanjutnya pentahapan dan karakteristik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada tabel 2 yang terkait dengan permasalahan belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia akan dianalisis lagi melalui analisis SWOT. Acuan kebijakan yang dianalisis, yakni : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang telah diimplementasikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terdapat banyak permasalahan. Salah satu akar masalahnya adalah: “belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia”. Agar supaya “komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia optimal”, berjalan sesuai harapan, dibutuhkan analisis SWOT sehingga pengambil kebijakan (Kementerian Dikbud dan Ristek) dapat mengoptimalkan

kekuatan dan peluang, sekaligus dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi.

### 3. Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim dari kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), adalah sebuah metode analisis perencanaan strategis yang awalnya digunakan pada organisasi bisnis. Mengingat analisis SWOT dipandang sangat bermakna bagi kepentingan organisasi maka metode ini ditransformasi juga oleh organisasi publik (birokrasi pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan pendidikan tinggi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditengarai terdapat beberapa permasalahan. Salah satu akar masalahnya adalah: “belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan stakeholders) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Identifikasi penyebab masalah dengan penggunaan Analisis SWOT, adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

##### ***Kekuatan (Strengths) :***

- 1) Adanya regulasi kebijakan pemerintah yang mendukung
- 2) Ketersediaan kurikulum yang *up to date*
- 3) Pejabat pengambil kebijakan yang visioner
- 4) Sistem (proses bisnis) pendidikan yang terus direformasi

##### ***Kelemahan (Weaknesses):***

- 1) Terbatasnya pendidik berkualifikasi Doktor & jabatan Guru Besar
- 2) Perguruan tinggi kurang inovatif
- 3) Terbatasnya fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan

- 4) Lemahnya *link and match* Perguruan Tinggi dan dunia kerja

## 2. Faktor Eksternal

### *Peluang (Opportunities) :*

- 1) Kemajuan IPTEK berbasis digital
- 2) Dukungan masyarakat dalam dunia pendidikan
- 3) Kesempatan lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yang profesional
- 4) Kerjasama dengan PT LN yang berkualitas

### *Ancaman (Threats):*

- 1) Bonus demografi yang tidak kredibel/kurang terdidik
- 2) Lambannya transformasi pembangunan
- 3) Tingginya angka pengangguran
- 4) Hadirnya PT luar negeri di Indonesia

Berdasarkan atas hasil identifikasi faktor-faktor penyebab internal dan eksternal organisasi (perguruan tinggi), maka diadakan analisis kebijakan pendidikan tinggi dalam bentuk matriks sebagaimana disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Matriks SWOT Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia”**

	<b>Kekuatan (<i>Sterenght</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</b>
I N T E R N A L	S1. Adanya regulasi kebijakan pemerintah yang mendukung	W1. Terbatasnya pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar
	S2. Ketersediaan kurikulum yang <i>up to date</i>	W2. PT kurang inovatif
	S3. Pejabat pengambil kebijakan yang visioner	W3. Terbatasnya fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan

L	S4. Sistem (proses bisnis) pendidikan yang terus direformasi	W4. Belum terbangunnya <i>link and match</i> PT dan dunia kerja
E K S T E R N A L	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>) :</p> <p>O1. Kemajuan IPTEK berbasis digital</p> <p>O2. dukungan masyarakat dalam dunia pendidikan</p> <p>O3 Kesempatan lapangan pekerjaan lulusan PT yang profesional</p> <p>O4. Kerjasama dengan PT Luar Negeri yang berkualitas</p>	<p>Ancaman (<i>Threats</i>):</p> <p>T1. Bonus demografi yang tidak terdidik</p> <p>T2. Lambannya transformasi pembangunan</p> <p>T3. Tingginya angka pengangguran</p> <p>T4. Hadirnya PT luar negeri di Indonesia</p>

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia kemudian dilakukan analisis SWOT dengan memperhatikan strategi : *SO Strategies* (strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang); *WO Strategies* (strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang); *ST Strategies* (strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman), serta *WT Strategies* (strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman). Hasil analisis keempat strategi tersebut seperti yang disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia**

<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (Strengths) :</b>	<b>KELEMAHAN (Weaknesses):</b>
<b>EKTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya regulasi pemerintah yang mendukung</li> <li>2. Ketersediaan kurikulum yang up to date</li> <li>3. Pejabat pengambil kebijakan yang visioner</li> <li>4. Sistem (proses bisnis) pendidikan yang terus direformasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar</li> <li>2. PT kurang inovatif</li> <li>3. Terbatasnya fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan</li> <li>4. Lemahnya link and match PT dan dunia kerja</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (Opportunities):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan IPTEK berbasis digital</li> <li>2. dukungan masyarakat dalam dunia pendidikan</li> <li>3. Kesempatan lapangan pekerjaan lulusan PT yang profesional</li> <li>4. Kerjasama dengan PT LN yang berkualitas</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi SO:</u></p> <p>Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan IPTEK berbasis digital</li> <li>2. Ketersediaan kurikulum yang up to date dalam mendorong semangat bersekolah (kuliah);</li> <li>3. Adanya pejabat visioner dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yg profesional;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi WO :</u></p> <p>Strategi dalam meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan PT LN berkualitas dalam meningkatkan pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar</li> <li>2. Peningkatan inovasi PT untuk mendukung lulusan yang profesional &amp; diterima pasar kerja.</li> <li>3. Optimalisasi fasilitas (sarana-</li> </ol>

	<p>4. Reformasi Sistem pendidikan melalui Kerjasama dengan PT LN yang berkualitas</p>	<p>prasarana) pendidikan melalui dukungan masyarakat</p> <p>4. Peningkatan link and match PT dan dunia kerja melalui lulusan yang profesional &amp; diterima pasar kerja.</p>
<p><b>ANCAMAN Threats):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bonus demografi yang tidak terdidik</li> <li>2. Lambannya transformasi pembangunan</li> <li>3. Tingginya angka pengangguran</li> <li>4. . Hadirnya PT luar negeri di Indonesia</li> </ol>	<p><u>Strategi ST :</u></p> <p>Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Regulasi pemerintah dalam meminimalisir bonus demografi masy tidak terdidik</li> <li>2. Ketersediaan kurikulum yang up to date dalam menekan angka penangguran</li> <li>3. Pejabat pengambil kebijakan yang visioner melalui peningkatan tranformasi pembangunan</li> <li>4. Sistem (proses bisnis) pendidikan yang terus direformasi untuk meminimalisir angka pengangguran.</li> </ol>	<p><u>Strategi WT:</u></p> <p>Strategi dalam meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peingkatan pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar dalam mengantisipasi kehadiran PT LN</li> <li>2. Inovasi PT untuk mengurangi Bonus demografi masy tidak terdidik</li> <li>3. optimalisasi fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan guna menekan lambannya transformasi pembngunan</li> <li>4. Membangun link and match PT dan dunia kerja dalam mengantisipasi kehadiran PT luar negeri di Indonesia</li> </ol>

Mengacu pada tabel 4, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: (1) Strategi SO; dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi, adalah dengan (a) membuat formulasi kebijakan baru pendidikan tinggi dalam mengembangkan IPTEK berbasis digital; (b) ternyata Kementerian Pendidikan memiliki kurikulum yang *up to date* dalam mendorong semangat bersekolah (kuliah); (c) walaupun dengan segala keterbatasan, Kementerian Pendidikan memiliki pejabat visioner dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yg profesional, dan (d) strategi yang dapat digunakan melalui reformasi Sistem pendidikan melalui Kerjasama dengan PT LN yang berkualitas. (2) Strategi WO, strategi dalam meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yakni: (a) mengoptimalkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PT-LN) yang berkualitas dalam meningkatkan pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar; (b) strategi untuk meningkatkan inovasi PT untuk mendukung lulusan yang profesional & diterima pasar kerja; (c) mengoptimalisasi fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan melalui dukungan masyarakat (dunia usaha), dan (d) membuat program khusus dalam rangka meningkatkan *link and match* PT dan dunia kerja melalui lulusan yang profesional & diterima pasar kerja. (3) Strategi ST, yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dalam analisis ini, strategi yang perlu dilakukan, adalah (a) peningkatan regulasi pemerintah dalam meminimalisir bonus demografi masyarakat tidak terdidik; (b) Kementrian Pendidikan saat ini memiliki kurikulum yang *up to date* dalam menekan angka pengangguran; (c) dimilikinya pejabat pengambil kebijakan yang visioner melalui peningkatan tranformasi pembangunan, serta (d) dibutuhkan strategi untuk terus mereformasi sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dalam rangka meminimalisir angka pengangguran, dan (4) Strategi WT, yakni strategi dalam

meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Strategi yang dianjurkan, adalah: (a) peningkatan kualitas pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar dalam mengantisipasi kehadiran PT LN; (b) agar PT terus berinovasi untuk mengurangi Bonus demografi masyarakat tidak terdidik; (c) optimalisasi fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan guna menekan lambannya transformasi pembangunan, dan (d) membangun *link and match* PT dan dunia kerja dalam mengantisipasi kehadiran PT luar negeri di Indonesia.

Bahwa keempat strategi tersebut diharapkan akan dapat mengefektifkan implementasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia tetapi dibutuhkan skala prioritas untuk pengambilan kebijakan yang paling bernilai dan bermakna dengan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis dan sosiologis.

#### **4. Hasil Analisis dan Pembahasan**

##### **a) Skala Prioritas Pengambilan Kebijakan Pendidikan Tinggi**

Dalam setiap proses pengambilan keputusan, tidak semua kebutuhan organisasi dapat dilaksanakan secara bersamaan maupun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, untuk itu dibutuhkan skala prioritas. Prioritas diadakan atas pertimbangan teknis pelaksanaan (kelayakan, waktu, tempat), ekonomis (efektif dan efisien/mudah dan murah) penganggaran (kalau memungkinkan dengan *zero* atau *low cost* atau berbiaya murah. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan dan memilih skala prioritas, antara lain dengan *Metode Urgency, Seriousness, Growth (USG)*. USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode scoring (nilai 1 sampai 5, misalnya). Proses pelaksanaannya dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, Serta kemungkinan berkembangnya masalah semakin

besar. Dalam kajian ini hanya memilih salah satu strategi dalam menetapkan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, yakni menggunakan Strategi SO atau dikenal dengan strategi agresif.

Untuk menelaah pilihan prioritas yang terpilih disajikan pada tabel 4.

**Tabel 5.**  
**Analisis USG untuk Strategi Prioritas Kebijakan Pendidikan Tinggi**

No.	Strategi	Urgensi	Seriousness	Growth	Skor	ranking
1.	Membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan IPTEK berbasis digital	5	5	5	15	I
2.	Ketersediaan kurikulum yang <i>up to date</i> dalam mendorong semangat bersekolah (kuliah);	5	4	4	13	II
3	Adanya pejabat visioner dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yg profesional;	4	4	4	12	III
4.	Reformasi Sistem pendidikan melalui kerjasama dengan PT LN yang berkualitas.	3	4	4	11	IV

Berdasarkan atas hasil analisis USG seperti yang ditampilkan pada tabel 5, menunjukkan strategi prioritas yang terpilih adalah “membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital”. Formulasi kebijakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses kebijakan yang dimulai dari penyusunan agenda, implementasi sampai penilaian (evaluasi) kebijakan. Bahkan mengingat tahap formulasi kebijakan sangat strategis kedudukannya, maka tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan tidak dapat terlaksana sebelum tahapan ini diselesaikan. Sebuah penelitian menunjukkan, bahwa terdapat empat tahap dalam membuat formulasi sebuah kebijakan, yakni dimulai dari membuat perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Dalam perspektif kebijakan publik formulasi kebijakan, adalah intisari dari kebijakan publik karena harus merumuskan batas-batas kebijakan yang harus diambil. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tinjauan untuk merumuskan apa yang harus dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dengan harapan akan bernilai manfaat bagi organisasi dan publik (dalam hal ini masyarakat pendidikan) sehingga akan menaikkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi, memperbaiki produktivitas kerja dan kinerja organisasi. Di Indonesia, proses formulasi kebijakan dilakukan oleh unsur eksekutif (pemerintah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pada tahapan penyusunan formulasi kebijakan pendidikan tinggi, seyogyanya para pihak mengumpulkan dan mengelola informasi, mencarikan alternatif-alternatif solusi serta mencari dukungan dari berbagai pihak (terutama stakeholders) sampai pada akhirnya kebijakan

memformulasikan kembali kebijakan pendidikan tinggi ini dipilih.

Berdasarkan atas uraian-uraian yang berkaitan dengan formulasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, maka sangatlah mendasar untuk membuat strategi formulasi kebijakan pendidikan tinggi agar kualitasnya lebih meningkat serta dapat meminimalisir indikator-indikator permasalahan yang telah diidentifikasi. Demikian pula kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital yang sangat pesat harus menjadi landasan pilihan utama dalam meformulasikan strategi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Strategi terpilih (membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital), didasarkan atas pertimbangan regulasi yang dibuat pemerintah sangat jelas, terarah dan berbasis teknologi (digital). Saat ini semua aspek kehidupan manusia sudah berbasis teknologi digital, proses pembelajaran telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, selain tatap muka (*offline*) juga telah dikembangkan pembelajaran on-line melalui *Learning Management System* (LMS). Mahasiswa melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengalami pembelajaran dengan *blended learning* (sistem bauran), yaitu: pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung (*synchronous*) dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapan pun (*asynchronous*).

Berdasarkan atas pilihan strategi kebijakan pendidikan tinggi dengan pembelajaran berbasis teknologi digital diyakini akan dapat : (1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam negeri yang selama ini dinilai kalah bersaing dengan dengan lulusan perguruan luar negeri; (2) mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti: dapat menimalisir banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur; (3) mendorong percepatan kolaborasi dengan mitra perguruan tinggi berstandar

internasional; (4) menumbuhkan iklim kreativitas dan inovasi dari setiap dosen dan mahasiswa, dan (5) mempercepat kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha (*link and match* PT dan dunia kerja).

Kelima alasan tersebut secara langsung atau pun tidak langsung akan *drive* akselerasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia karena di era disrupsi saat ini tidak ada pilihan lain yang terbaik, kecuali dengan mengedepankan teknologi berbasis digital.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Indonesia telah memiliki regulasi kebijakan pendidikan tinggi dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Hasil analisis kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia belum terimplementasi sesuai harapan, salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan *stakeholders*) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang berdampak pada mutu standar penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- c. Strategi prioritas yang terpilih dalam meminimalisir permasalahan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia adalah “membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital”. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tinjauan untuk merumuskan apa yang harus dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dengan harapan akan bernilai manfaat bagi

organisasi dan publik (dunia pendidikan) sehingga akan menaikkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi, memperbaiki produktivitas kerja dan kinerja organisasi.

- d. Strategi dalam “membuat formulasi baru kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital” dengan pertimbangan, dapat (1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam negeri yang selama ini dinilai kalah bersaing dengan dengan lulusan perguruan luar negeri; (2) mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti: dapat menimalisir banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur; (3) mendorong percepatan kolaborasi dengan mitra perguruan tinggi berstandar internasional; (4) menumbuhkan iklim kreativitas dan inovasi dari setiap dosen dan mahasiswa, dan (5) mempercepat kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha (*link and match* PT dan dunia kerja).

## 2. Rekomendasi

1. Diperlukan analisis kebijakan pendidikan tinggi yang lebih komprehensif dan integratif sehingga berbagai permasalahan dapat dicarikan solusi, baik yang terkait dengan faktor intenal maupun eksternal organisasi (Kemendikbud Ristek dan Perguruan Tinggi)
2. Produk-produk regulasi kebijakan di bidang pendidikan tinggi sebagai salah satu landasan pendidikan hendaknya terus direformulasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital sehingga Indonesia dapat bersaing serta mencapai *World Class University*.

## BAB 6

### **Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah : Pendidikan Keaksaraan**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Latar Belakang dan Permasalahan**

**P**endidikan ialah suatu proses untuk mengintegrasikan individu yang sedang mengalami pertumbuhan ke dalam kolektivitas masyarakat. Dalam kegiatan pendidikan terjadi pembinaan terhadap perkembangan potensi peserta didik untuk memenuhi kelangsungan hidupnya secara pribadi dan kesejahteraan kolektif di masyarakat. Sebagai usaha sadar, pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka mengisi peran tertentu di masyarakat pada masa yang akan datang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum butir kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari kalimat tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang cerdas, pendidikanlah yang harus dirancang dan diimplementasikan secara baik. Salah satu faktor untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan pendidikan yang maju adalah terciptanya budaya baca di dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang maju dan budaya baca yang telah mengakar pada masyarakat maka akan muncul masyarakat dan bangsa yang cerdas dalam kehidupannya. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 13, memutar jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan

formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu kesatuan sub sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nonformal bermuara pada tujuan utama pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ; mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka jalur pendidikan luar sekolah menjadi sarana yang tepat. Hal ini disebabkan oleh karena pendidikan luar sekolah melakukan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dan berlanjutan sehingga potensi yang dimiliki seseorang dapat dikembangkan secara maksimal. Pendidikan luar sekolah bukanlah barang baru dalam khasanan budaya dan keradaban manusia akan tetapi pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu dalam kehidupan setiap masyarakat jauh dari sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem persekolahan. Pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan / pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Berbagai kelemahan pada sistem persekolahan terutama pada aspek-aspek prosedural yang dinilai mengeras, kaku, serba ketat dan formalistis. Pada intinya, walaupun sistem persekolahan masih tetap dipandang penting, pijakan pemikiran sudah mulai realistis yaitu tidak semata-mata mengandalkan sistem persekolahan untuk melayani aneka ragam bentuk pendidikan yang sekian hari

semakin mekar dan beragam. Pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah dipandang relevan untuk bisa saling menopang dan saling mengisi dengan sistem persekolahan, agar sertiap insan bisa menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Sasaran pendidikan non-formal yang semakin beragam, **tidak hanya sekedar** melayani masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami *drop out* dan putus pendidikan formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar. Permasalahan pendidikan nonformal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka dan buta Bahasa Indonesia. Akan tetapi permasalahan pendidikan nonformal semakin meluas contoh:

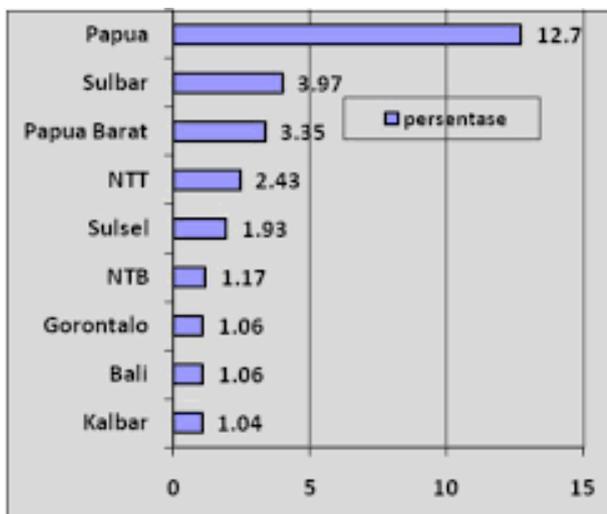
1. Ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan noformal (standar-standar penjaminan mutu pendidikan nonformal),
2. Ketidak jelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal,
3. Masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang belum profesional,
4. Kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan program-program pendidikan nonformal adalah masalah sasaran didik (warga belajar) yang selalu bergulat dengan: masyarakat miskin, terdiskriminasi, penganggur, masyarakat yang kurang beruntung, anak jalanan, daerah konflik, *trafficking*, penganggur, masyarakat pedalaman, daerah perbatasan dll.

Di samping itu pula persoalan pendidikan nonformal juga terletak pada tidak adanya kepedulian kita sebagai masyarakat yang meleak pendidikan terhadap keberadaan pendidikan nonformal dan kondisi masyarakat sekitar. Tantangan utama

Pendidikan Nonformal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal di tengah-tengah mereka. Seringkali masyarakat bertanya tentang apa itu PLS (pendidikan luar sekolah), apa itu PKBM, apalagi tentang PNF (pendidikan nonformal) sebagai istilah baru (sebutan lain bagi PLS). Dengan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program PLS, maka kondisi itu memunculkan masalah baru yaitu; sulitnya mempertahankan lembaga-lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal agar tetap eksis dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan serta potensi sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kapasitas yang baik dalam membaca dan menulis. Program ini muncul karena kondisi riil menunjukkan bahwa buta aksara Indonesia berada pada angka yang cukup tinggi. Program keaksaraan fungsional merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meletakkan dasar perkembangan warga belajar menuju perkembangan yang optimal. Secara umum tujuan program keaksaraan adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh warga belajar dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Data dilihat pada diagram berikut.

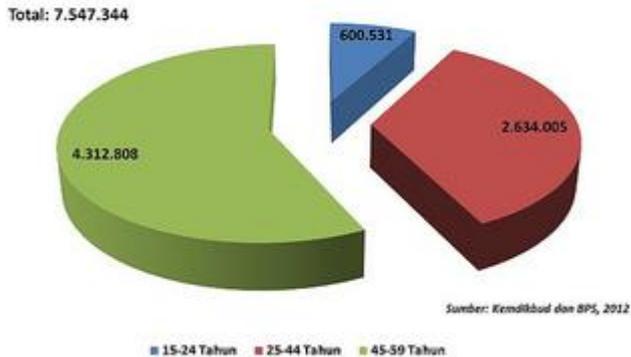


**Gambar 1. Data Penduduk Keaksaraan**

Pada tingkat provinsi, terdapat 9 provinsi dengan jumlah penduduk tuna aksara di atas 200.000 orang. Provinsi tersebut antara lain Papua, Sulbar, Papua Barat, NTT, Sulsel, NTB, Gorontalo, Bali, Kalimantan Barat. Pada tingkat Kota/Kabupaten terdapat 34 Kabupaten dengan jumlah penduduk tuna aksara di atas 50.000 orang. Bahkan terdapat dua Kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 150 ribu orang, yaitu Jember (204.069) dan Sumenep (169.747).

Salah satu bentuk kemampuan yang perlu dikembangkan pada warga belajar dalam program keaksaraan fungsional yaitu kemampuan dalam mengenal huruf latin. Pengenalan huruf latin satu demi satu sangatlah penting karena dimulai dari pengenalan huruf akan bisa merangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Perlunya pengenalan huruf latin terhadap warga belajar. Hal ini dilakukan karena tingkat kemampuan membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Salah satu masalah yang sangat krusial dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu masalah buta aksara yang masih dialami oleh sekitar 8.3 juta penduduk Indonesia.

### Jumlah Penduduk Tuna Aksara Menurut Kelompok Umur, 2010



**Grafik 2. Jumlah Penduduk Tuna Aksara pada tahun 2010**

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), jumlah penduduk tuna aksara dewasa usia 15-59 tahun berjumlah 7.547.344 orang atau 5,02% dengan disparitas gender yang makin membaik. Walau terjadi penurunan disparitas gender, penduduk tuna aksara perempuan tetap lebih besar dari laki-laki.

Untuk memenuhi bagian yang belum sepenuhnya tersentuh pendidikan formal, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, peningkatan budaya baca, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keorngtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan warga yang kurang mampu membedakan huruf besar dan huruf kecil, kurangnya kemampuan warga belajar untuk mengenal huruf vocal dan huruf konsonan. Rendahnya kemampuan warga belajar dalam mengenal huruf latin karena kondisi riil menunjukkan bahwa warga belajar pada umumnya kurang memiliki perhatian dalam proses belajar mengajar khususnya untuk mengenal huruf. Sebagian warga belajar terlihat kurang termotivasi dalam mengenal huruf yang dituliskan tutor di papan tulis. Bahkan mereka lebih menyukai aktivitas yang lain dan kurang tertarik dalam mengenal huruf latin yang diperkenalkan tutor.

Dengan demikian maka perlu untuk mengatasi masalah ini dengan menganalisis berbagai faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan respon warga belajar dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks ini akan pada umumnya kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan tutor di kelas. Sehubungan permasalahan tersebut maka perlu upaya proaktif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pias-pias huruf. Penggunaan pias-pias huruf ini sangat penting dalam membantu warga belajar untuk mengenali dengan tepat bentuk setiap huruf. Hal tersebut pada gilirannya akan mampu untuk meningkatkan pengenalan huruf latin pada warga belajar.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran Bahasa terkait dengan pengenalan huruf latin kepada warga belajar antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dan respon warga belajar dalam proses belajar mengajar tentang pengenalan huruf
2. Warga belajar belum terdorong atau termotivasi untuk fokus dalam mengenal huruf latin

3. Sebagian warga belajar lebih menyukai aktivitas yang lain dan kurang tertarik dalam mengenal huruf latin yang diperkenalkan tutor.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada upaya untuk meningkatkan pengenalan huruf latin serta pias-pias huruf. Dengan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah kemampuan mengenal huruf latin pada Kelompok Keaksaraan Fungsional di PKBM dapat ditingkatkan melalui penggunaan pias-pias huruf?”

## **2. Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; Pendidikan Keaksaraan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); **MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.**

**BAB I KETENTUAN UMUM** Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.
2. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah.

3. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.
4. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan luar sekolah di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Pimpinan Lembaga Pernerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan luar sekolah.

BAB II TUJUAN Pasal 2 Pendidikan luar sekolah bertujuan:

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

BAB III JENIS PENDIDIKAN Pasal 3

1. Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.

2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga belajar dalam bidang tertentu.
3. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
4. Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.
5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

**BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** Pasal 4 : Persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri. Pasal 5 :

1. Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya.
2. Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

## BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 6

1. Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.
2. Jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat
3. Sesuai dengan fungsinya ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

### Pasal 7 :

1. Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
2. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu terdiri atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan dan kewenangan yang disahkan oleh Pemerintah maupun yang tidak disahkan.
3. Jenis tenaga pendidik yang memerlukan pengesahan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

### Pasal 8 :

1. Tenaga Pendidik tertentu yang karena kebutuhan kualifikasi tertentu, diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang ditunjuk oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

## BAB VI WARGA BELAJAR Pasal 9

1. Setiap orang dapat menjadi warga belajar baik dengan maupun tanpa memenuhi persyaratan tertentu.
2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi warga belajar pada satuan pendidikan luar sekolah tertentu ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

### Pasal 10

1. Warga belajar mempunyai hak:
  - 1) belajar secara mandiri;
  - 2) memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
  - 3) memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - 4) pindah ke jalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

### Pasal 11

1. Warga belajar berkewajiban untuk:
  1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali warga belajar yang dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
  2. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
  3. menghormati tenaga kependidikan;
  4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

## BAB VII KURIKULUM Pasal 12

1. Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat tertulis dan tidak tertulis.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri

### Pasal 13

1. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.
2. Kurikulum yang tidak termasuk dalam ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## BAB VIII BENTUK SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Kursus Pasal 14

1. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Warga belajar pada kursus yang menyelenggarakan program Paket A dan B dimungkinkan untuk pindah ke jalur pendidikan sekolah

## Pasal 15

1. Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkat kemampuan yaitu, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada kursus-kursus tertentu diatur oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

## Pasal 16

1. Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga kependidikan, kurikulum dan alat penunjang belajar.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah berkonsultasi dengan Menteri.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja setelah berkonsultasi dengan Menteri.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan

pendidikan kedinasan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerinta Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Bagian Kedua Kelompok Belajar Pasal 17 Kelompok belajar diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan/atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 18

1. Pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar Paket A dan kelompok belajar Paket B.
2. Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
3. Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Lain Pasal 19 Selain kursus dan kelompok belajar, pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan satuan pendidikan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB IX PENILAIAN Pasal 20

1. Terhadap hasil belajar warga belajar dapat diadakan penilaian yang dapat dinyatakan dengan surat keterangan lulus, ijazah atau sertifikat.
2. Terhadap satuan pendidikan yang memerlukan pengesahan dari Pemerintah diadakan penilaian.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

## BAB X PEMBINAAN Pasal 21

1. Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 22

1. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan umum merupakan tanggung jawab Menteri.
2. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan merupakan tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan merupakan tanggung jawab Menteri Agama.
4. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja untuk memenuhi persyaratan jabatan kerja tertentu merupakan tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja.
5. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan merupakan tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) meliputi pemberian bimbingan, dorongan pengayoman dan/atau bantuan.

7. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan secara terkoordinasi.

## BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 23

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional bagi warga belajar warga negara Republik Indonesia di luar negeri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### Pasal 24

1. Warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan luar sekolah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional baik di dalam maupun di luar negeri wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

### Pasal 25

1. Perwakilan negara asing di wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga internasional atau badan/kelembagaan swasta asing di wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

**BAB XII KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 26 Semua ketentuan yang mengatur pendidikan luar sekolah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XIII KETENTUAN PENUTUP** Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1991 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO** Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1991 **MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO** **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 95**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH UMUM** Di Negara Republik Indonesia, kegiatan pendidikan, baik untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun masyarakat, bangsa

dan negara, dibagi dalam dua golongan sebagai bagian dari satu sistem pendidikan nasional, yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah yang sangat mendasar sifatnya adalah pendidikan keluarga. Meskipun pendidikan keluarga amat penting, yang bahkan meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup sebagai anggota masyarakat, pengaturannya merupakan wewenang keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang memerlukan bantuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lingkungannya dapat memperoleh bantuan melalui keikutsertaan orang tua dalam kelompok belajar atau kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri. Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih besar daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung semakin cepat menimbulkan kebutuhan yang beraneka ragam, semakin luas dan semakin banyak untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Kemakmuran yang bertambah luas memungkinkan lebih banyak anggota masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan budaya. Banyak kegiatan pendidikan dalam bidang kebudayaan tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Banyak kegiatan pendidikan dalam kehidupan keagamaan juga tidak dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah. Bahkan berbagai bentuk kegiatan pendidikan Pondok Pesantren, Majelis Taklim, kelompok pengajian telah ada lama sebelum pendidikan sekolah diadakan, sedangkan berbagai bentuk pendidikan dalam kehidupan keagamaan yang baru di luar sekolah lahir sebagai akibat terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan industri serta pertumbuhan perusahaan-

perusahaan kecil menengah maupun besar menuntut tersedianya: 1. tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, dan 2. tenaga kerja yang terlatih untuk dapat menyelenggarakan kegiatan tertentu. Pendidikan sekolah pada umumnya tidak menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi lulusan yang siap latih. Oleh sebab itu, pendidikan luar sekolah juga merupakan jembatan antara pendidikan sekolah dan dunia kerja. Berbagai kursus dan bentuk latihan kerja yang lain memungkinkan lulusan sekolah-sekolah jenis tertentu memperoleh kemampuan kerja yang diperlukan di dunia kerja. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah pada umumnya tidak terpusat, lebih terbuka dalam penerimaan peserta didik dan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah diadakan juga untuk memungkinkan anggota masyarakat yang tidak mendapat kesempatan bersekolah di jenjang pendidikan dasar memperoleh pendidikan dasar melalui program-program yang khusus diadakan untuk mereka, sehingga wajib belajar bagi warga negara sesuai dengan usia yang bersangkutan dapat terwujud sepenuhnya. Pendidikan luar sekolah seiring dengan pendidikan sekolah memungkinkan manusia Indonesia sepanjang hayatnya mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan bilamana ia memerlukannya. Kebanyakan kegiatan pendidikan luar sekolah diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pihak-pihak yang bersangkutan. Peluang amat luas dalam jalur pendidikan luar sekolah untuk mengajar, membimbing dan/atau melatih di satu pihak serta untuk belajar dan berlatih di lain pihak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang tidak dapat diperoleh di jalur pendidikan sekolah. Sistem pendidikan nasional memungkinkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dengan mudah dapat berpindah dari jalur pendidikan luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah dan sebaliknya. Upaya Pemerintah di jalur pendidikan luar sekolah terwujud sebagai

program-program pendidikan masyarakat, seperti program pemberantasan buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar, serta pemberian bantuan keuangan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang memerlukannya bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah diadakan untuk memberi jaminan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bersangkutan atas dasar anggapan bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di luar sekolah harus mendapat kebebasan seluas mungkin. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah ini juga berusaha agar dalam dunia pendidikan terpelihara ketertiban, maka Peraturan Pemerintah ini harus dapat melindungi masyarakat terhadap kemungkinan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah yang dapat merugikannya.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 86 TAHUN 2014. TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pemberantasan buta aksara bagi warga masyarakat, perlu diselenggarakan pendidikan keaksaraan dasar ;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, perlu di susun pedoman ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tahun

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana beberapa kali diubah Dalam Keputusan Presiden Nomor 54/P/Tahun 2014 ;

Memutuskan :

Manetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR. Pasal 1

1. Pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dasar
2. Pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2 ; Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pendidikan Keaksaraan melalui pendidikan luar sekolah untuk mengupayakan pengenalan huruf latin pada sekelompok keaksaraan, akan dilakukan dengan melalui penggunaan pias-pias huruf. Berdasarkan hal tersebut, tentu masih banyak hal yang perlu dilakukan, maka dengan ini diperlukan analisis swot sehingga akan melihat pada suatu peningkatan dalam dunia pendidikan luar sekolah. Berikut akan dibahas pada analisis kebijakan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan keaksaraan.

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; Pendidikan Keaksaraan**

### **1. Analisis SWOT Pendidikan Keaksaraan**

Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di *Stanford Research Institute* yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. SWOT adalah singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*. secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT merupakan perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Analisis swot merupakan kekuatan, kelemahan dan atau peluang, ancaman adalah salah satu alat strategi tertua dan paling banyak di adopsi di seluruh dunia. Namun dikalangan akademis, analisis swot atau pendekatan dikenal dengan kerangka kerja, matriks, model, Teknik atau alat. Swot yang disingkat dari *strengths* (kekuatan), *seaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman), sehingga dalam konteks pendidikan analisis SWOT adalah teknik untuk menilai keempat aspek pengelolaan di lembaga pendidikan kita. Analisis swot adalah alat yang dapat membantu menganalisis apa yang terbaik yang telah dilakukan di Lembaga Pendidikan saat ini, sehingga dapat menyusun strategi untuk kesuksesan masa depan. Swot juga dapat mengungkap area tata Kelola yang menghambat Lembaga Pendidikan, atau yang dapat dieksploitasi oleh kompetitor jika tidak melindungi diri sendiri.

Analisis Swot adalah suatu cara menganalisis factor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam analisis factor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan yang menjadi ancaman (*Threats*)

sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternative strategi yang dapat dijalankan.

Dari penjelasan diatas, analisis SWOT dalam dunia pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari beberapa faktor internalnya yaitu berupa kekuatan dan kelemahan di lingkungan pendidikan luar sekolah, kemudian faktor eksternalnya berupa peluang serta hambatan dari lingkungan. Berikut pemaparan SWOT lebih jelasnya :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan

Faktor internal ; Faktor ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weakness, dimana menyangkut pada kondisi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah dan juga mempengaruhi pembuatan keputusan pada suatu lembaga tertentu. Dalam dunia pendidikan atau sekolah, faktor internal ini dapat dilakukan analisis, seperti : laporan keuangan sekolah, administrasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan juga keadaan guru dan siswa.

1) *Strength* (Kekuatan) / yang di berikan symbol S ini adalah termasuk dalam kondisi faktor internal positif yang memberikan sebuah keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan antar lembaga. Beberapa factor internal yang menjadi kekuatan dalam mempengaruhi pendidikan keaksaraan melalui pendidikan luar sekolah. Faktro tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pendidikan keaksaraan menjawab kebutuhan masyarakat putus sekolah.
- b. Programnya disesuaikan dengan situasi, kondisi warga belajar
- c. Karakteristik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memiliki sifat fleksibel

- d. Adanya anggaran khusus yang disediakan pemerintah
- 2) *Weakness* (Kelemahan) termasuk kondisi internal yang negative yang dapat merendahkan penilaian terhadap suatu sekolah. Kelemahan juga dapat diartikan sebagai keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dilihat dari sumber daya manusia yang rendah, fasilitasnya kurang, kepemimpinan yang buruk, dan lain-lain. Adapun kelemahan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan ini adalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pendidikan keaksaraan
  - b. Kurangnya kepercayaan public terhadap pendidikan keaksaraan
  - c. Adanya diskriminasi ijazah pendidikan keaksaraan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman.
- 1) *Opportunity* (Peluang) merupakan kondisi yang sekarang ataupun kondisi di masa yang akan datang yang dapat menguntungkan suatu sekolah. Peluang termasuk dalam faktor eksternal atau yang dipengaruhi oleh lingkungan diluar sekolah. Jika suatu sekolah dapat membaca peluang dengan baik maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang diharapkan seperti dapat membaca kondisi atau peluang yang dapat memajukan sekolah, menurunkan pesaing dan juga peluang dalam meningkatnya jumlah peserta didik baru. Adapun peluang pada program pendidikan keaksaraan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan
  - b. Terbentuknya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan.

- c. Terbukanya donasi atau bantuan internasional dalam pendidikan keaksaraan
- 2) *Threats* (Ancaman) merupakan faktor eksternal dalam analisis, Ancaman ini menjadi pengganggu yang utama bagi sekolah terutama ancaman bagi sekolah yang posisinya sangat diinginkan oleh sekolah yang lain. Dengan kata lain Ancaman ini dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak menguntungkan bagi sekolah dan juga dapat mempengaruhi masa depan sekolah. Adapun ancaman yang bias ditimbulkan dari program pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :
- a. Tumpang tindihnya kebijakan pendidikan formal dan pendidikan non formal
  - b. Pola pikir masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan
  - c. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
  - d. Integrasi instansi dan program.

Berdasarkan penjelasan factor internal dan external diatas maka sengan ini akan dibuatkan matrix strategi dari analisis swot yang sebagaimana yang akan disajikan pada gambar berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT**  
**Kebijakan Pendidikan Keaksaraan**

<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		<p>S1. Pendidikan keaksaraan menjawab kebutuhan masyarakat putus sekolah</p> <p>S2. Programnya disesuaikan dengan situasi, kondisi warga belajar</p> <p>S3. Karakteristik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memiliki sifat fleksibel</p> <p>S4. Adanya anggaran khusus yang disediakan pemerintah</p>
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strength-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
<p>O1. Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan</p> <p>O2. Terbentuknya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan</p> <p>O3. Terbukanya donasi atau bantuan internasional dalam pendidikan keaksaraan</p>	<p>SO-1. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan</p> <p>SO-2. Mengembangkan program keaksaraan yang meningkatkan motivasi masyarakat</p> <p>SO-3. Melibatkan lembaga yang menyelenggarakan program secara fleksibel</p> <p>SO-4. Pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka agar dipercaya oleh publik</p>	<p>WO-1. Mengoptimalkan pemasarakan pendidikan keaksaraan</p> <p>WO-2. Melibatkan lembaga terakreditasi dalam memvalidasi ijazah pendidikan keaksaraan</p> <p>WO-3. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik</p>

ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )	STRATEGI ST ( <i>Strength-Threats</i> )	STRATEGI WT ( <i>Weakness-Threats</i> )
T1. Tumpang tindihnya kebijakan pendidikan formal dan pendidikan non formal	ST-1. Mengkanji kembali kebijakan pendidikan keaksaraan	WT-1. Mengembangkan strategi pendidikan keaksaraan
T2. Pola pikir masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan	ST-2. Melaksanakan program sesuai dengan pendidikan keaksaraan	WT-2. Sosialisasi di masyarakat
T3. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	ST-3. Pelatihan kepada tenaga pendidik terhadap pendidikan keaksaraan	WT-3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan keaksaraan
T4. Integrasi instansi dan program	ST-4. Kolaborasi pemerintah dengan instansi yang terkait dengan pendidikan keaksaraan	WT-4. Adanya kolaborasi dengan instansi yang terkait dengan diskriminasi ijazah pendidikan keaksaraan

**Tabel. Factor Internal**

FAKTOR INTERNAL: <i>STRENGTH - WEAKNESS</i>					
FAKTOR STRATEGIS		TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	Pendidikan keaksaraan menjawab kebutuhan masyarakat putus sekolah	3	0,13	2,50	0,33
	Programnya disesuaikan dengan situasi, kondisi warga belajar	3	0,13	3,00	0,39
	Karakteristik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memiliki sifat fleksibel	3	0,13	4,00	0,52
	Adanya anggaran khusus yang disediakan pemerintah	4	0,17	3,00	0,52
	<i>Jumlah strengths</i>				1,76
WEAKNESS	Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pendidikan keaksaraan	3	0,13	3,00	0,39

	Kurangnya kepercayaan public terhadap pendidikan keaksaraan W3. Adanya diskriminasi ijazah pendidikan keaksaraan	4	0,17	3,00	0,52
	Adanya diskriminasi ijazah pendidikan keaksaraan	3	0,13	3,00	0,39
<i>Jmlah Weakness</i>					1,30
<b>TOTAL IFAS</b>		<b>23</b>	<b>1,00</b>		<b>3,07</b>

**Tabel. Factor Eksternal**

<b>FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES - THREATS</b>					
FAKTOR STRATEGIS		TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan	4	0,18	3,00	0,55
	Terbentuknya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan	4	0,18	3,00	0,55
	Terbukanya donasi atau bantuan internasional dalam pendidikan keaksaraan	3	0,14	2,50	0,34
<i>Jumlah strengths</i>					1,43
THREATS	Tumpang tindihnya kebijakan pendidikan formal dan pendidikan non formal	2	0,09	2,00	0,18
	Pola pikir masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan	3	0,14	2,50	0,34
	Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	3	0,14	1,50	0,20
	Integrasi instansi dan program	3	0,14	2,00	0,27
<i>Jmlah Weakness</i>					1,00
<b>TOTAL EFAS</b>		<b>22</b>	<b>1,00</b>		<b>2,43</b>

**Table. Hasil Perhitungan Skor Tertinggi**

	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )		Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Strategi SO :		Strategi WO :	
	1,76	1,43	1,30	1,43
	3,19		2,74	
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Strategi ST :		Strategi WT :	
	1,76	1,00	1,30	1,00
	2,76		2,30	

**Tabel 2.**  
**Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi**  
***Strength-Opportunities (SO)***

No	Strategi <i>Strength-Opportunities (SO)</i>	Rekomendasi Program
1	Menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan	a. Sosialisasi Keaksaraan kepada masyarakat b. Pelatihan Keaksaraan
2	Mengembangkan program keaksaraan yang meningkatkan motivasi masyarakat	a. Pelatihan dan Workshop pendidikan keaksaraan. b. Program baca tulis dan berhitung
3	Melibatkan lembaga yang menyelenggarakan program secara fleksibel	a. Melakukan pendekatan kolaboratif antara penyedia keaksaraan dengan dinas terkait b. Program perekrutan tenaga pendidikan profesional
4	Pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka agar dipercaya oleh publik	a. Penyediaan anggaran khusus bagi pendidikan keaksaraan b. Penyediaan inprastruktur yang memadai c. Tersedianya bukti transparansi penggunaan dana keaksaraan

Berdasarkan table 2 rekomendasi program melalui Strategi *Strength-Opportunities* (SO) maka akan dilanjutkan dengan menjelaskan rekomendasi program-program apa saja dalam pendidikan keaksaraan pada hasil analisis dan pembahasan.

## **2. Hasil Analisis dan Pembahasan Pendidikan Keaksaraan**

Pendidikan keaksaraan adalah suatu bentuk layanan pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan pendidikan keaksaraan yaitu memberikan peluang bagi warga yang ingin belajar agar dapat mengasah kemampuan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung (kemampuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari). Keaksaraan dasar merupakan bagian dari upaya memberikan kemampuan kepada keaksaraan bagi penduduk buta aksara dari usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan pendidikan keaksaraan yang sudah ditetapkan pada Strategi So (*Strength-Opportunities*) antara lain sebagai berikut :

### **1. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan**

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga satuan pendidikan nonformal yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 26. PKBM juga merupakan wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM biasanya beragam dan juga tidak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah PKBM itu sehingga memberikan sumbangsih nyata,

membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang tidak mungkin lagi dapat mengenyam studi di sekolah formal, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A, B dan C), Pendidikan Keaksaraan, dan lain-lainnya.

Pendidikan menjadi kebutuhan semua manusia serta menjadi kunci untuk kemajuan sebuah peradaban bangsa dan negara. Tentu saja, dengan menggunakan pendidikan yang berkualitas, bisa menjadi kesempatan untuk bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa lain yang sudah lebih maju dalam hal pendidikannya. Di Indonesia setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan semua masyarakatnya harus mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Namun, pendidikan di Indonesia ini masih bisa dibilang rendah, dan tidak semua warga masyarakat dapat bersekolah secara formal, serta masih banyak siswa-siswi yang mengalami putus sekolah karena keterbatasan biaya, ekonomi serta hal lain yang menyebabkan siswa-siswi tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Adapun program dalam menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Keaksaraan kepada masyarakat

Mengadakan sosialisasi terkait dengan pendidikan keaksaraan kepada masyarakat melalui upaya yang dilakukan oleh pengelolaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang tidak tau membaca, menulis, berhitung juga pengelolaan paket A, B, dan juga C dapat menarik kesadaran masyarakat untuk ikut dalam pendidikan keaksaraan.

b. Pelatihan Keaksaraan

Pendidikan luar sekolah mempunyai beberapa program, diantaranya yang ada pada pendidikan keaksaraan adalah

memberantas buta huruf yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung pada usia 20 tahun keatas. Maka dari itu perlu adanya pelatihan keaksaraan agar masyarakat yang tadinya tidak tau menulis, membaca, berhitung dengan mengikuti program pelatihan keaksaraan akan bisa menulis, membaca dan berhitung. Program keaksaraan yang dimaksudkan adalah dengan melakukan bimbingan kepada warga masyarakat aksara atau yang tidak pernah menginjakkan kakinya dibangku sekolah dan juga putus sekolah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak atau belum bisa membaca, menulis, berhitung menjadi tau bagaimana membaca, berhitung dan menulis.

Dengan mengikut sertakan pelatihan pendidikan keaksaraan masyarakat yang masih buta huruf atau aksara dalam hal baca, tulis, hitung akan dapat bisa membaca menulis dan berhitung dan dapat mengetahui potensi yang dimiliki pada setiap diri masyarakat. Tidak hanya itu, akan tetapi dapat juga membuka ide untuk mencari sumber kehidupan dengan bergalinya potensi yang dimiliki. Dalam hal ini akan memberikan peluang kemudahan sesuai dengan potensi yang dimiliki juga yang ditempati. Mempelajari dan juga dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan untuk dapat meningkatkan kualitas dan mutu hidup serta agar bisa ikut berpartisipasi dalam masyarakat baik itu dalam pembangunan, pembaharuan dan yg lainnya. Sehingga menjadi generasi berpengetahuan yang mampu dan berdaya saing dengan dunia pendidikan.

## 2. Mengembangkan program keaksaraan untuk meningkatkan motivasi masyarakat

Program keaksaran dasar merupakan program khusus yang dilakukan oleh tim Pembina program aksara agar dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung,

dan berbahasa Indonesia bagi peserta aksara yang belum memiliki kecakapan dalam literasi dasar (baca, tulis dan berhitung). Dalam meningkatkan motivasi peserta aksara dalam mengembangkan program keaksaraan, maka dibutuhkan antara lain seagai berikut :

a. Pelatihan dan Workshop pendidikan keaksaraan

Dengan melakukan program kegiatan penyuluhan, pelatihan dan ataupun workshop pada pendidikan keaksaraan bertujuan untuk meberikan pemahaman dan melakukan perubahan pada diri seseorang atau warga aksara. Dengan kata lain program pelatihan dan workshop sebagai wadah komunikasi atau interaksi dalam melakukan perubahan belajar yang tidak tau (Ketidaktauan baca, tulis, berhitung) menjadi tahu (tau membaca, menulis dan berhitung).

b. Program baca tulis dan berhitung

Pentingnya program pendidikan keaksaraan ini dapat membuka pola pikir masyarakat akan kepedulian antara sesama masyarakat mengenai hak pendidikan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, menyamakan mereka dengan masyarakat lainnya, dan mereka yang buta aksara ini merupakan masyarakat yang juga memiliki potensi dan kualitas diri yang luar biasa, namun belum diasah saja sehinga dengan melalui pendidikan keaksaraan ini dapat bisa distukturkan dengan baik. Maka dari itu adanya pendidikan keaksaraan ini membuat masyarakat dapat mengasah potensi kualitas dirinya sendiri dan dapat membangun pola pikir yang intelektual.

3. Melibatkan lembaga yang menyelenggarakan program secara fleksibel

Adapun program dalam melibatkan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan secara fleksibel adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendekatan kolaboratif antara penyedia keaksaraan dengan dinas terkait

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi buta aksara di Indonesia dan bukan tanpa alasan. Keberadaan program keaksaraan ini dapat membantu masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis akan menjadi bisa membaca dan menulis, bukan hanya pada individu masyarakat saja akan tetapi bisa berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri, dan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

- b. Program perekrutan tenaga pendidikan professional

Dalam dunia pendidikan keaksaraan, tutor atau tenaga pendidik yang lulusan dari pendidikan luar sekolah juga berperan penting bagi terlaksananya pendidikan keaksaraan ini. Yang dimana tutor atau tenaga pendidik ini yang lulusan pendidikan luar sekolah yang dapat memberikan kontribusinya dalam membelajarkan dan membimbing masyarakat dalam program keaksaraan ini, dan juga ikut serta dalam pengelolaan program agar tercapainya tujuan yang seharusnya tercapai dengan baik dan dapat menjadikan masyarakatnya yang buta huruf, tidak bias membaca menjadikannya dapat membaca dan menulis setelah mengikuti program ini.

Tutor atau tenaga pendidik lulusan pendidikan luar sekolah ini juga membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang masih buta membaca dan menulis.

4. Pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka agar dipercaya oleh publik

Dalam pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka sehingga agar dipercaya oleh publik maka dengan demikian perlu adanya program, antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran khusus bagi pendidikan keaksaraan

Untuk memastikan dalam program pendidikan keaksaraan akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah maka pemerintah harus mendedikasikan kurang lebih setidaknya ada 3 % dari anggaran Nasional untuk mereka yang bergerak pada bidang program pendidikan keaksaraan. Salah satu cara untuk memastikan dana yang dikhususkan bagi program pendidikan keaksaraan benar diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, maka itu perlu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ditingkat pemerintah daerah. Penganggaran partisipasi telah menjadi strategi utama dalam memastikan sumber daya keaksaraan yang dilaksanakan oleh relawan.

b. Penyediaan infrastruktur yang memadai dalam pendidikan keaksaraan

Dalam hal ini adapun program yang harus di sediakan dalam infrastuktur yang memadai pendidikan keaksaraan maka perlu desain dengan baik berupa sarana, alat dan perangkat untuk menunjang pertumbuhan masyarakat belajar yang kuat.

c. Tersedianya bukti transpalasi penggunaan dana keaksaraan

Sebagai kepedulian pemerintah dalam mengatasi masyarakat aksara, dengan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan layanan bantuan dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan. Dalam hal ini pemberian sejumlah dana dalam penyelenggaraan pemebelajaran pendidikan keaksaraan bagi penduduk buta aksara dari usia 15 tahun sampai 50 tahun. Selama ini pengelolaan BOP pendidikan keaksaraan dilakukan secara konvensional melalui pengusulan dari lembaga penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan atau dinas pendidikan kabupaten ke direktorat pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Pada tahun 2017

dinas telah meluncurkan aplikasi BOP pendidikan keaksaraan daring yang dapat mempercepat proses pengelolaan BOP tersebut. Aplikasi ini sebagai bukti transpalasi penggunaan dana pendidikan keaksaraan, dengan tujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengusulan bantuan dari dinas terkait juga penggunaannya.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur Pendidikan yang ada di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan Pendidikan Indonesia. Pendidikan luar sekolah mampu menutupi keterbatasan yang ada dalam pada jalur Pendidikan formal dan jalur Pendidikan nonformal. Dalam Pendidikan luar sekolah proses Pendidikan dapat berlangsung dalam waktu yang panjang atau yang lebih dikenal juga pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berkembang berdasarkan berbagai alasan sehingga menjadi sesuatu yang berharga dan memberikan solusi terbaik dalam pencapaian tujuan Pendidikan nasional sama artinya dengan Pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekelilingnya. Makna dari pembahasan merupakan pembebasan diri dari belenggu kebodohan.

Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan non formal bagi masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan keaksaraan terdiri atas pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan dasar merupakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang buta aksara latin agar memiliki kemampuan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung tidak hanya itu juga tapi berbahasa

Indonesia dan menganalisa, sehingga dapat memberikan peluang bagi aktualisasi potensi diri dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Rekomendasi**

Agar tujuan Pendidikan Nasional yang dicita-citakan dapat tercapai melalui jalur Pendidikan luar sekolah maka perlu ditekankan pada sasaran yang tepat dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan sasaran itu sendiri. Pemerintah harus menjadikan Pendidikan luar sekolah sebagai jalur Pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat. Jadikan Pendidikan luar sekolah tidak hanya sebatas pelengkap saja tetapi juga merupakan jalur alternatif dalam pencapaian tujuan Pendidikan di Indonesia.

## BAB 7

# Analisis Kebijakan Pendidikan dan Gender

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pendidikan merupakan usaha dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran, penelitian dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Berpijak dari Undang-Undang tersebut maka pendidikan dapat dipandang sebagai wahana untuk membentuk kecerdasan dan etika kepada peserta didik. Dalam upaya mewujudkan tujuan di atas, pendidikan harus selalu diarahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan dimana salah satunya menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Namun kenyataannya, praktek diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi topik yang sering terjadi di hampir seluruh berbagai negara termasuk Indonesia. Alasannya klise dimana masyarakat belum terlepas dari budaya patriarkhis yang telah ribuan tahun menjerat dan memposisikan perempuan berada di bawah kedudukan pria. Di satu sisi faktanya peran perempuan dalam pendidikan sangat penting mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama. Sudah menjadi kodrat bahwa perempuan yang melahirkan dan membesarkan generasi bangsa serta memiliki hubungan emosional yang paling dekat dengan anak. Sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, kaum perempuan mempunyai peran dalam membentuk, menentukan, dan memberi warna terhadap kualitas generasi bangsa.

Dari sini dapat dikatakan pula bahwa ketimpangan gender merupakan masalah sosial dan harus diselesaikan secara integratif holistik dengan melakukan analisis dengan berbagai faktor yang ikut melestarikannya, termasuk faktor pendidikan yang terkadang mendapatkan pembenaran. Dengan demikian agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, maka kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dilestarikan. Konsep kesetaraan gender yang muncul pada abad modern, memberikan angin segar bagi laju pendidikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Setidaknya, konsep ini dapat membuka perspektif masyarakat tentang pentingnya perempuan untuk berkiprah dalam wilayah pendidikan. Dunia pendidikan tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki saja, tetapi setiap perempuan memiliki hak yang sama atas hal tersebut.

Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu peserta Kongres Wanita Sedunia Ke-4 di Beijing Tahun 1995, secara eksplisit Indonesia menerima mandat untuk mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan. Artinya menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan. Sebagai realisasinya, Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1999 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa *mainstreaming* (pengarusutamaan) gender merupakan kebijakan nasional. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang diharapkan mampu menjangkau seluruh instansi pemerintah/swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Sebagai strategi, pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan**

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagaimana hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 48 bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Dalam pelaksanaannya pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan dimana salah satunya menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang tidak diskriminatif bagi perempuan, Pemerintah telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Betapa pentingnya pengarusutamaan gender untuk diterapkan di berbagai sektor kehidupan, begitu pula pendidikan, yang mana pendidikan merupakan ujung tombak dalam memberikan penyadaran serta pembelajaran bagi manusia. Di sektor pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan (Azmy & Pertiwi, 2021). Kebijakan PUG merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang mengakui masih adanya kesenjangan gender di Indonesia, khususnya di beberapa sektor pembangunan, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dalam rangka menyikapi dan

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan kebijakan PUG di bidang pendidikan adalah strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, penulisan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan (Affifah & Nurani, 2019). Menurut Permendiknas, setiap satuan kerja di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi semua kebijakan dan program pendidikan dalam rangka pemberlakuan gender Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Ellemers, 2018). Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Berdasarkan teori di atas dengan segala keterbatasan kebijakan pengarusutamaan gender pada program pendidikan mulai dari sosialisasi, menetapkan tujuan serta menentukan *Content of Policy* (mulai dari aktor pelaksana, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dari kebijakan sampai dengan pengelolaan anggaran. Karena ada beberapa penyebab dan persoalan ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasinya pengarusutamaan Gender program pendidikan masih kurang maksimal.

Dilihat dari segi perubahan yang di harapkan dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, bahwa perubahan yang diharapkan adalah dengan adanya sasaran kebijakan pengarusutamaan gender yaitu penguatan kelembagaan yang dilakukan sebagai program dan target awal

utama dari kebijakan pengarusutamaan bidang sumber daya manusia yaitu terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender bisa terwujud, tidak ada kesenjangan antara kesempatan lanjut studi, pelatihan maupun diklat antara laki-laki dan perempuan, terbukanya akses yang sama pada pengembangan diri bagi laki-laki maupun perempuan, terbukanya kesempatan perempuan dalam menikmati fasilitas pendidikan serta pelatihan. Pada pemahaman pengarusutamaan gender dapat kita tinjau dari segi aktor kebijakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adalah aktor yang memiliki peran penting seperti Kepala Dinas, Kepala Seksi maupun Kepala Bidang yang notabene lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Secara teoritis maka ruang gerak yang lebih didominasi oleh laki-laki maka akan menyebabkan pada tindakan pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dibuat lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki. Dari segi alokasi biaya atau anggaranyang sangat minim dalam pembiayaan pengarusutamaan gender,. Ketersediaan dana memang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, artinya dalam merealisasikan suatu kebijakan anggaran menjadi satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Namun terlepas dari persoalan anggaran tentunya ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan.

Untuk mendukung strategi pengraustamaan gender, partisipasi dan melindungi hak perempuan dalam pembangunan, Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals/SDGs*); 2) Pengarusutamaan Gender; 3) Modal Sosial Budaya; 4) Transformasi Digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan 7 Agenda Pembangunan di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Indonesia 2020-2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik menjadi sangat penting dalam rangka menjamin kualitas hidup, terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan berbagai tindak kekerasan, sehingga mereka dapat berperan dan berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol dalam pembangunan serta memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan secara adil dan setara. Untuk itu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak,

perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Namun, berbagai tantangan juga masih banyak dihadapi dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan, anak dan pemuda. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. Pelaksanaan strategi PUG menghadapi berbagai tantangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: penerapan kebijakan, peranti analisis, serta komitmen dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender yang masih belum optimal, pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan desa masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.

Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi bagi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang meliputi:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha.

3. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.
4. Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Kebijakan pendidikan dan gender melalui strategi pengarusutamaan gender harus disesuaikan dengan perubahan dan kondisi sosial masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan analisis kebijakan pendidikan dan gender untuk mengevaluasi sejauh mana keefektifan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi strategi lainnya yang diperlukan serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pembangunan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dan gender adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) untuk memberikan informasi bagi penentu dan pelaksana kebijakan dengan membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, serta meminimalisir hambatan dan tantangan dalam implementasi pendidikan dan gender.

**Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan dan Gender**

NO	DOKUMEN KEBIJAKAN
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan dimana salah satunya menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
2	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender atau responsif terhadap gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan
3	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan ( <i>mainstreaming</i> ) pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Gender**

### **1. Analisis SWOT**

Berikut ini tahapan analisis SWOT atas kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan gender. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan.

Berikut disajikan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pendidikan dan gender di sekolah, keluarga dan masyarakat.

1. Sistem dan Pendekatan Pembelajaran (S1)
2. Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan (S2)
3. Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan merupakan kekuatan utama dalam membangun aliansi strategis untuk

melakukan perubahan kebijakan dari netral dan menjadi kebijakan responsif gender

4. Kurikulum yang mendukung (S3)
5. Pengembangan Program Pendidikan S4)

Selanjutnya adalah beberapa faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan mempengaruhi kebijakan pendidikan dan gender di sekolah, keluarga dan masyarakat

1. Rendahnya kesadaran kesetaraan gender dalam pendidikan. (W1)
2. Keterbatasan sumber daya (W2)
3. Rendahnya Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan (W3)

Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan gender di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

1. Perubahan kebijakan pemerintah  
Perubahan kebijakan tentang pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender yaitu pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender
2. Kebutuhan peningkatan kualitas SDM  
Kebutuhan peningkatan kualitas SDM menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan dan gender di sekolah, keluarga dan masyarakat. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan gender.

### 3. Partisipasi aktif masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dan gender dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan dan gender di atas sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan gender di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

#### 1. Diskriminasi Gender

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana.

#### 2. Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan bagi perempuan

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan

<b>KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)</b>	<b>KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)</b>
S1. Sistem dan Pendekatan Pembelajaran	W1 Rendahnya kesadaran kesetaraan gender dalam pendidikan.
S2 Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan	W2 Keterbatasan sumber daya
S3 Kurikulum yang mendukung	W3 Rendahnya Akses, Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan
S4 Pengembangan Program Pendidikan	
<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</b>
O1 Perubahan kebijakan pemerintah.	T1 Diskriminasi Gender
O2 Kebutuhan peningkatan kualitas SDM	T2 Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan bagi perempuan
O3 Partisipasi aktif masyarakat	

**Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender**

Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.

**a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)**

Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) merupakan strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk mengoptimalkan kekuatan yang telah dimiliki, yaitu:

- 1) **Strategi SO-1. Meningkatkan program pengembangan sistem pendekatan pembelajaran yang responsif gender dalam menghadapi perubahan kebijakan.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “Pendekatan pembelajaran yang responsif gender sesuai dengan matriks SWOT yang disimbolkan dengan S1 dan O1 pada gambar 1. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan dan gender, organisasi atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan program pengembangan pendekatan pembelajaran yang responsif gender. Pendekatan pembelajaran yang menggabungkan kesetaraan gender termasuk didalamnya mengubah stereotip perlakuan dan partisipasi aktif baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di sekolah
- 2) **Strategi SO-2. Mengembangkan program kemitraan antara stakeholder pendidikan.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang adanya partisipasi aktif masyarakat yang mendukung kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan sesuai dengan matriks SWOT yang disimbolkan dengan S2 dan O3 pada gambar 1. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat yang mendukung pendidikan dan gender, organisasi atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini

untuk meningkatkan program kemitraan antara stakeholder pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

- 3) **Strategi SO-3. Mengembangkan kurikulum yang mendukung responsif gender.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang adanya kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “kurikulum yang mendukung sesuai dengan matriks SWOT yang disimbolkan dengan S3 dan O2 pada gambar 1. Dengan adanya kurikulum yang mendukung pendidikan dan gender, organisasi atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung responsif gender untuk meningkatkan kualitas SDM. Kesetaraan gender dalam kurikulum dan materi pembelajaran termasuk didalamnya revisi berkala untuk menyertakan pendekatan yang sensitif gender dan juga pembentukan lembaga formal yang bertugas untuk menghilangkan stereotip gender dalam buku pelajaran dan materi pembelajaran lainnya.
- 4) **Strategi SO-4. Mengembangkan program Pendidikan dengan konsep kesetaraan gender.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang adanya partisipasi aktif masyarakat yang mendukung kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “pengembangan program pendidikan sesuai dengan matriks SWOT yang disimbolkan dengan S4 dan O3 pada gambar 1. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat yang mendukung pendidikan dan gender, organisasi atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan program pendidikan dengan konsep gender.

## **b. Strategi ST (*Strengths-Threats*)**

Strategi ST (*Strengths-Threats*) diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

- 1) **Strategi ST-1 Evaluasi Sistem dan Pendekatan pembelajaran.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan sistem dan pendekatan pembelajaran dan bertujuan untuk menghadapi ancaman diskriminasi gender sesuai dengan matriks SWOT yang disajikan dan disimbolkan dengan S1 dan T1 pada gambar 1. Evaluasi sistem dan pendekatan pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang berorientasi kesetaraan gender. Pembaharuan sistem dan pendekatan mampu menghasilkan pembelajaran yang inovatif, tepat dan bermanfaat.
- 2) **Strategi ST-2 Mengembangkan program pendidikan dengan yang dapat diakses, dikontrol dan memperoleh manfaat pendidikan bagi perempuan.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan program pendidikan yang mendukung dan bertujuan untuk menghadapi ancaman keterbatasan akses, kontrol dan manfaat pendidikan bagi perempuan sesuai dengan matriks SWOT yang disajikan dan disimbolkan dengan S4 dan T2 pada gambar 1.
- 3) **Strategi ST-3. Evaluasi dan revisi terhadap kurikulum.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan Kurikulum yang mendukung dan bertujuan untuk menghadapi ancaman diskriminasi gender sesuai dengan matriks SWOT yang disajikan dan disimbolkan dengan S3 dan T1 pada gambar 1. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dan materi yang sensitif terhadap gender. Pembaharuan kurikulum mampu mendorong pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang berorientasi kesetaraan gender.

### c. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*)

Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) untuk memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan kebijakan pendidikan dan gender

- 1) **Strategi WO-1. Meningkatkan Akses, Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam pendidikan dan pembangunan dengan pendekatan SDGs.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang adanya kebijakan pemerintah tentang pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender yaitu pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender dalam RPJM dengan pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan akan rendahnya akses Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam pendidikan dan pembangunan sesuai dengan matriks SWOT W3 dan O1 pada gambar 1.
- 2) **Strategi Wo-2. Mempromosikan kesadaran gender sebagai bagian utama dalam pendidikan.** Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang tentang kebutuhan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi rendahnya kesadaran tentang kesadaran gender sesuai dengan matriks SWOT W2 dan O2 pada gambar 1.
- 3) **Strategi WO-3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berorientasi kesetaraan gender.** Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang tentang

kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bertujuan untuk mengatasi kelemahan akan keterbatasan sumber daya manusia sesuai dengan matriks SWOT W2 dan O2 pada gambar 1.

**d. Strategi WT (*Weakness-Threats*)**

Strategi WT (*Weakness-Threats*) dikembangkan untuk mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman

- 1) **Strategi WT-1. Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender.** Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tentang rendahnya kesadaran gender dalam pendidikan dan bertujuan untuk menghadapi ancaman diskriminasi gender sesuai dengan matriks SWOT W1 dan T1 pada gambar 1.
- 2) **Strategi WT-2. Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan.** Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tentang rendahnya akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan bertujuan untuk menghadapi ancaman Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan bagi perempuan sesuai dengan matriks SWOT W3 dan T2 pada gambar 1.
- 3) **Strategi WT-3. Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan.** Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tentang keterbatasan sumber daya dan bertujuan untuk menghadapi diskriminasi gender sesuai dengan matriks SWOT W2 dan T1 pada gambar 1

<b>SWOT</b>	<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
	<p>S1. Sistem dan Pendekatan Pembelajaran</p> <p>S2 Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan</p> <p>S3 Kurikulum yang mendukung</p> <p>S4 Pengembangan Program Pendidikan</p>	<p>W1 Rendahnya kesadaran kesetaraan gender dalam pendidikan.</p> <p>W2 Keterbatasan sumber daya</p> <p>W3 Rendahnya Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan</p>
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
<p>O1 Perubahan kebijakan pemerintah.</p> <p>O2 Kebutuhan peningkatan kualitas SDM</p> <p>O3 Partisipasi aktif masyarakat</p>	<p>SO-1 Meningkatkan program pengembangan sistem pendekatan pembelajaran yang responsif gender dalam menghadapi perubahan kebijakan</p> <p>SO-2 Mengembangkan program kemitraan antara stakeholder pendidikan</p> <p>SO-3 Mengembangkan kurikulum yang mendukung responsif gender</p> <p>SO-4 Mengembangkan program Pendidikan dengan konsep kesetaraan gender.</p>	<p>WO-1 Meningkatkan Akses, Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam pendidikan dan pembangunan dengan pendekatan SDGs</p> <p>WO-2 Mempromosikan kesadaran gender sebagai bagian utama dalam pendidikan</p> <p>WO-3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berorientasi kesetaraan gender.</p>

<b>THREATS</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
T1 Diskriminasi Gender T2 Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan bagi perempuan	ST-1 Evaluasi Sistem dan Pendekatan pembelajaran tanpa diskriminasi gender. ST-2 Mengembangkan program pendidikan dengan yang dapat diakses, dikontrol dan memperoleh manfaat pendidikan bagi perempuan. ST-3. Evaluasi dan revisi terhadap kurikulum.	WT-1. Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender WT-2. Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan WT-3. Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan

**Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender**

Melakukan Priorotas strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survey dan wawancara.

Langkah-langkah umum prioritas adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan misalnya menggunakan skala 1 sd 4 (1= tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting dan 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

## 2) Menentukan Nilai Rating

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 sd 4. Diberi nilai 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal; kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau faktor ancaman tersebut semakin berkurang.

## 3) Menentukan nilai skor

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

**Tabel 2. Perhitungan Skor Analisis SWOT**

No	Faktor Internal/Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	skor
<i>Kekuatan (strength)</i>					
1	Sistem dan Pendekatan Pembelajaran	2	0,10	2	0,2
2	Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan	2	0,10	2	0,2
3	Kurikulum yang mendukung	3	0,14	2	0,28
4	Pengembangan Program Pendidikan	3	0,14	3	0,42
<b>Sub Total</b>					1,1
<i>Kelemahan (weakness)</i>					
1	Rendahnya kesadaran kesetaraan gender dalam pendidikan.	4	0,19	3	0,57
0,382	Keterbatasan sumber daya	4	0,19	2	0,38
30,42	Rendahnya Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan	3	0,14	3	0,42
<b>Sub Total</b>					1,37
<b>Total Skor Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)</b>					2,47
<i>Peluang (Opportunities)</i>					
1	Perubahan kebijakan pemerintah.	3	0,18	1	0,18
2	Kebutuhan peningkatan kualitas SDM	3	0,18	3	0,54
3	Partisipasi aktif masyarakat	3	0,18	2	0,36
<b>Sub Total</b>					1,08
<i>Ancaman (Threats)</i>					

1	Diskriminasi Gender	4	0,24	3	0,72
2	Minimnya akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan bagi perempuan	4	0,24	2	0,48
<b>Sub Total</b>					1,2
<b>Total Skor Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)</b>					2,28

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya.

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	<b>Strategi SO</b> $1,1 + 1,08 = 2,18$	<b>Strategi WO</b> $1,37 + 1,08 = 2,45$
Ancaman ( <i>Threats</i> )	<b>Strategi ST</b> $1,1 + 1,2 = 2,3$	<b>Strategi WT</b> $1,37 + 1,2 = 2,57$

**Gambar 3. Hasil Perhitungan Skor Strategi**

Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari hasil kombinasi *Weakness-Threats* dengan **nilai 2,57** sehingga kebijakan strategi pendidikan dan gender yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah **strategi WT (*Weakness-Threats*)**

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritas faktor, diketahui bahwa strategi WT (*Weakness-Threats*) merupakan strategi prioritas sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan dan gender disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi strategi WT, yang dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Weakness-Threats* (WT)**

No	Strategi <i>Weakness-Threats</i>	Rekomendasi Program
1	Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)</li> <li>b. Pendidikan berbasis pengarusatamaan Gender</li> <li>c. Kampanye dan gerakan <i>He for She</i> dengan memanfaatkan media sosial</li> </ul>
2	Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis dalam perencanaan dan evaluasi untuk memastikan keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan</li> <li>b. Aksi Pendidikan Responsif Gender</li> <li>c. Pendidikan Berbasis Pengarusatamaan Gender</li> </ul>
3	Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>b. Pengelolaan sarana dan prasarana</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada tabel 3, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *weakness-threats* (WT), pada sub sub hasil analisis dan pembahasan.

## **2. Hasil Analisis dan Pembahasan**

### **a. Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG)**

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

PUG adalah upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah dan yang berkebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi "Pengarutamaan Gender" disingkat menjadi PUG (*Gender Mainstreaming*). Istilah pengarusutamaan gender (PUG) berasal dari bahasa Inggris "*Gender Mainstreaming*". Istilah ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada "*Beijing Platform of Action*". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan "*Gender Mainstreaming*" tersebut di negaranya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
- Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan

komponen kunci yang diperlukan rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan pada tabel berikut.

**Tabel 2.**  
**Kondisi awal dan komponen kunci**  
**pengarustamaan gender**

No	Kondisi awal yang diperlukan	Komponen gender
1	Political will dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Peraturan perundang-undangan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945</li> <li>• Tap MPR</li> <li>• Undang-undang</li> <li>• Peraturan Pemerintah</li> <li>• Kepres</li> <li>• Perda</li> </ul>
	Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, propinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender	Kebijakan-kebijakan yang secara sistemik mendukung penyelenggaraan PUG, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan yang responsive gender</li> <li>• penyusunan kerangka kerja akuntabilitas</li> <li>• penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsive gender</li> <li>• pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG.</li> </ul>

	Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender	Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUJ di lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang ditandai oleh terbentuknya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit PUG</li> <li>• Focal point</li> <li>• Kelompok Kerja</li> <li>• Forum</li> </ul> Mekanisme pelaksanaan PUG diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.
	Sumber-sumber daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya.</li> <li>• Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG</li> </ul>
	Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin	Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin
	Alat analisis	Analisis gender untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Penganggaran</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi</li> </ul>
	Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Di Indonesia definisi tersebut diadopsi dalam Inpres No. 9 tahun 200 dan Presiden telah mengintruksikan kepada jajaran eksekutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Panglima Negara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Walikota untuk melaksanakan PUG sebagai pembangunan nasional. Mereka diharuskan untuk melakukannya disetiap tahap mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan Inpres ini juga memberi mandat kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam melaksanakan strategi PUG. Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Lebih nyata penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan

kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut dapat diklompokkan menjadi empat, yakni: • faktor partisipasi, • faktor akses, • faktor kontrol, • dan faktor manfaat/keuntungan. Dengan mengetahui keempat hal tersebut, maka kesenjangan gender akan dapat teridentifikasi yang apada akhirnya untuk menemukan isu-isu gender. Dengan cara-cara ini akan dapat pula ditempuh upaya-upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan gender melalui perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, dengan menggunakan teknik analisis yang disebut *Gender Analysis Pathways (GAP)* dan *Policy Outlook And Action Plan (POP)*.

Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja Pengarusutamaan Gender:

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, hingga evaluasi. Alur Kerja Analisis Gender, dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat tiga tahap utama, yaitu:

1) melakukan analisis kebijakan gender,

Tahap pertama dalam perencanaan, yaitu Analisis Kebijakan Gender, perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (gender neutral) dan kadang-kadang,

secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan Data Pembuka Wawasan kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan.

- 2) memformulasi kebijakan yang responsif gender,  
Tahap kedua, Formulasi Kebijakan Gender, dilakukan untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
- 3) menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan yang responsif gender.  
Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender disusun sebagai suatu rencana aksi berupa kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi kebijakan ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplemtasikan rencana aksi.

Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender diselenggarakan setelah tahap-tahap perencanaan yang responsif gender seperti dikemukakan di atas dilakukan. Dalam upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain.

- Pemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender
- Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi.
- Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, kelompok kerja, string commite antar lembaga, dan pembentukan focal point pada masing-masing sektor.
- Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender.
- Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender
- Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjejaring.

**b. Kampanye dan Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender melalui gerakan He for She melalui Media Sosial**

Menurut Kotler & Roberto (1989) menegaskan bahwa kampanye sosial dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat umum dan individu tertentu. Leslie B. Snyder, mendefinisikan kampanye komunikasi sebagai tindakan terencana yang diarahkan pada audiens tertentu, yang dilakukan selama periode waktu yang telah ditentukan, dan dengan serangkaian tujuan tertentu. Menurut beberapa ahli komunikasi, konsep Rogers dan Storey adalah yang paling banyak digunakan dan diakui oleh para ilmuwan komunikasi adalah kasus untuk dua faktor.. Alasan pertama adalah bahwa definisi tersebut secara khusus menetapkan bahwa kampanye adalah jenis tindakan komunikasi, dan yang kedua adalah bahwa istilah tersebut cukup luas untuk mencakup spektrum penuh dari praktik kampanye yang diamati di dunia nyata. Setiap

kegiatan kampanye komunikasi setidaknya memiliki empat komponen: sejumlah besar khalayak sasaran yang terkonsentrasi dalam waktu singkat, urutan tindakan komunikasi yang direncanakan, dan tindakan kampanye yang dimaksudkan untuk menghasilkan efek atau dampak tertentu. Kampanye juga memiliki kualitas atau kualitas tambahan, seperti sumber yang jelas, siapa pencipta, penyiar, dan orang yang bertanggung jawab atas suatu produk kampanye (pembuat kampanye), sehingga setiap orang yang mendengar pesan kampanye dapat mengenalinya dan bahkan menilainya.

Sedangkan kampanye global yaitu kampanye yang dilaksanakan secara umum serta kampanye ini bersifat keseluruhan dan meliputi seluruh dunia dapat bergabung dalam kampanye ini dan Kampanye ini merupakan usaha untuk meminta bantuan kepada masyarakat agar maksud dapat tersampaikan kampanye ini merupakan bentuk tindakan sosial ini juga mengkomunikasikan secara terencana agar masyarakat akan mendukung seseorang atau suatu kelompok yang sudah terorganisir dalam kurun waktu tertentu

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.

Tujuan sosialisasi. Menurut Agustin (2014), tujuan sosialisasi antara lain: 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 2) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

UN Women memiliki peran penting dalam tugasnya sebagai badan khusus dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam mendorong dalam segala aspek bidang ekonomi, sosial dan politik. Peran utama *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* adalah:

1. Mendukung badan antar pemerintah, seperti komisi status wanita (*Commision On The Status Of Women*) dalam merumuskan kebijakan, standar dan norma global terhadap kesetaraan gender.
2. Membantu negara-negara anggota untuk menerapkan standar ini dan siap memberikan dukungan penuh terhadap teknis dan finansial kepada negara-negara anggota untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Adanya koordinasi terhadap tujuan dari PBB tentang kesetaraan gender dengan meminta pertanggungjawaban atas komitmennya sendiri pada kesetaraan gender dengan melalui pemantauan dan kemajuan terhadap seluruh sistem PBB.

Tujuan dan fokus utama yang ingin dicapai dari kampanye He For She ini adalah mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030. *He For she* meluncurkan IMPACT 10X10X10

untuk mempercepat tujuan ini dan mencapai target. IMPACT 10X10X10 adalah program percontohan yang meminta kepala negara, institusi akademik, dan bisnis untuk memberikan contoh di wilayah mereka dan membawa perubahan struktural dan budaya yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan.

### **3. Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi perempuan**

#### **a. analisis dalam perencanaan dan evaluasi untuk memastikan keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan**

Untuk menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan adalah responsif gender, dapat diindikasikan apakah proses pembentukannya telah mengakomodir dan/atau menganalisis dari perspektif gender yang terdiri atas Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, yang selanjutnya akan disebut sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keempat indikator tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai nilai yang sama kuat, tidak hierarkhis, dan harus dikaji secara holistik.

Pengintegrasian indikator kesetaraan gender dalam tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun hak dasar, dan lebih lanjut terjabarkan dalam 40 (empat puluh) hak konstitusional. Ke-empat belas hak-dasar tersebut, meliputi: 1) Hak atas Kewarganegaraan; 2) Hak atas Hidup; 3) Hak untuk mengembangkan diri; 4) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; 5) Hak atas informasi;

6) Hak atas kerja dan penghidupan yang layak; 7) Hak atas kepemilikan dan perumahan; 8) Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; 9) Hak berkeluarga; 10) Hak atas kepastian hukum dan keadilan; 11) Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; 12) Hak atas perlindungan; 13) Hak memperjuangkan hak; dan 14) Hak atas pemerintahan. Lebih lanjut, dari ke-14 (empat belas) Hak Dasar tersebut, yang terjabarkan menjadi 40 (empat puluh) Hak Konstitusional, masing-masing diidentifikasi indikator gendernya, melalui analisis gender dengan pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki (APKM). Salah satu contoh diantaranya, adalah dalam rumpun Hak atas Kewarganegaraan, terdapat Hak konstitusional, yakni, 'hak atas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan', dan indikatornya sebagai berikut:

- **Akses**, yang dimaksud adalah 'mempertimbangkan bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh informasi, sumber daya, dan pemenuhan hak atas kesamaan dan kedudukan di muka hukum (a.l. hak bantuan hukum, hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut, hak utk menggunakan semua upaya hukum);
- **Partisipasi**, dimaksudkan apakah suatu peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara dan berdaya terhadap perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari tindak kekerasan, turut serta dalam merumuskan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya untuk menduduki posisi jabatan publik pada seluruh tingkat pemerintahan;
- **Kontrol**, yang dimaksudkan adalah apakah perempuan dan laki-laki setara dan berdaya dalam menentukan dan memutuskan untuk memperoleh perlindungan,

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan peradilan yang obyektif dan tidak berpihak, untuk menduduki dan mengisi jabatan pada semua tingkatan birokrasi Negara/ pemerintahan;

- **Manfaat**, yang dimaksudkan adalah menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa akan menghasilkan manfaat yang setara dan adil baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Misalnya, perempuan dan laki-laki/anak perempuan dan anak laki-laki setara dan berdaya dalam menikmati manfaat atas perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan proses peradilan yang obyektif dan tidak memihak, bantuan hukum yang dikehendaki dan cuma-cuma, atau menikmati manfaat dan jaminan perlindungan dari perlakuan non diskriminasi dan penghapusan tindak kekerasan

Langkah-langkah pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya mengikuti tahapan serta rambu-rambu sebagaimana sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun satu hal yang perlu dan penting untuk dipertajam adalah bagaimana perspektif kesetaraan gender dipastikan dapat terintegrasi dalam proses pembentukannya, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan atas Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk dimaksud sesuai dengan hierarki dan jenisnya. Indikator yang digunakan adalah adanya pendekatan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang pendekatan analisis gender.

Pengintegrasian perspektif gender dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan lebih menjamin pada kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, yang keduanya berbeda aspirasi

dan kebutuhan tetapi menjadi penting untuk dianalisis dan dipertimbangkan dalam proses perumusan suatu norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan esensi bahwa pembangunan bidang hukum bukan saja akan mampu menciptakan kepastian hukum, namun sekaligus juga dapat menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat.

Pengguna parameter kesetaraan gender diantaranya sebagai berikut:

- Para pembentuk dan/atau pejabat yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan;
- Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Ahli dan praktisi hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, paralegal, dan profesi lain yang sejenis;
- Para perumus dan pelaksana kebijakan, program dan kegiatan publik dalam pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah.

Pengintegrasian Parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan:

- Pada saat proses merencanakan peraturan perundang-undangan, dapat diawali pada saat penyusunan Naskah Akademik untuk penyiapan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, antara lain, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi, Kabupaten atau Kota;
- Pada saat penyusunan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; atau
- Pada saat melakukan kajian, klarifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan teknis operasionalnya.

Mekanisme pengawasan peraturan perundang-undangan yang responsif gender:

Tanpa mengurangi maksud dan tujuan atas peran lembaga yang berwenang melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan, hendaknya dalam menerapkan hak menguji formal maupun hak menguji materiil terhadap pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan juga akan mempertimbangkan dan melakukan analisis gender dalam melakukan pengawasan demi tetap terjaganya substansi ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, yang merupakan komponen penting dalam upaya untuk menghindari/menghapus diskriminasi gender, baik setiap warga negara laki-laki maupun perempuan. dapat dilakukan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Pengawasan melalui jalur hukum (*Judicial Review*), yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi;
- 2) Pengawasan Pemerintah (*Executive Review*) baik pengawasan secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; atau
- 3) Pengawasan Legislatif (*Legislative Review*), yang dilakukan oleh pihak DPR dalam pembentukan Undang-Undang yang lebih tepat, dan oleh pihak DPRD untuk pembentukan Peraturan Daerah, misalnya, mempertimbangkan prinsip-prinsip dan/ atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Ratifikasi Konvensi CEDAW.. Rencana tindak lanjut Semakin disadari dan dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan yang responsif gender, maka seyogyanya Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini perlu

ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian, Lembaga dan Daerah untuk melakukan analisis gender dalam setiap penyusunan, perumusan dan pembahasannya, demi terjaminnya pemenuhan hak yang adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk efektivitas percepatan dan pelaksanaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan pemahaman konsep dan isu gender dan kesetaraan gender, khususnya guna meningkatkan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, baik melalui bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi, advokasi, atau optimalisasi kegiatan pada sarana pendidikan dan pelatihan yang ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan para aparatur Pemerintah/Negara, para pengambil keputusan atau penentu kebijakan, para pembentuk dan perancang peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan akademisi, ahli dan praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan stake holder lainnya.

#### **b. Aksi Pendidikan Responsif Gender**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif, kepada setiap warga negara, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terjadi pula dalam dunia pendidikan. Bahkan, institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain; (i) Kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi hampir perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki; (ii) Kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan formal menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan; (iii) Perlakuan tidak adil. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki daripada murid perempuan. Para guru terkadang masih berpikiran perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi. Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi *de jure* dan

diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure merupakan diskriminasi secara aturan. Di dalam aturan tersebut laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. Padahal, dalam dunia pendidikan tidak ada Undang-Undang yang membedakan antara keduanya. Justru keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, secara de jure sejatinya tidak ada diskriminasi. Namun secara de facto masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas dua yang berada di bawah laki-laki. Karenanya, mereka tidak berhak memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Dalam konteks perguruan tinggi pun diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Dalam hal pemilihan jurusan misalnya, masih terdapat anggapan jika perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra, sedangkan laki-laki itu teknik. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat juga masih melihat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Karena itu dalam pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain kondisi ini pula yang menyebabkan tingkat Drop Out anak perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki, terutama terjadi pada masyarakat perempuan yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan.

Selain Tap MPR tersebut Inpres No. 9 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pun berisi tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Secara rinci menginstruksikan: “(i) Melakukan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program

pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing; (ii) Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; (iii) Khusus ditujukan Menteri Pemberdayaan Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan ditingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden”.

Berdasarkan Tap MPR dan Inpres tersebut perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pendidikan dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Di sisi lain yang menjadikan perlunya diberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam beraktifitas dalam dunia pendidikan, sebab dimata hukum kedudukan mereka sama.

Setidaknya terdapat tiga hal tujuan pendidikan perspektif gender. Pertama, mempunyai akses sama dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks globalisasi saat ini sudah waktunya kaum perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga anggapan perempuan sebagai warga negara kelas dua menjadi hilang. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Ketiga, persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek (pelaku utama) dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Mustahil hal ini dapat dilakukan jika tidak diawali dari dunia pendidikan. Pendidikan yang

mengutamakan kesetaraan gender menjadi tonggak untuk memajukan bangsa menjadi lebih baik.

Program dan Rencana Aksi Pendidikan Responsif Gender: Secara garis besar, beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meliputi :
  - 1) Perluasan akses PAUD bagi anak perempuan dan laki-laki
  - 2) Pendanaan BOS Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender
  - 4) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
  - 5) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
  - 6) Perluasan pendidikan wajar pada jalur non formal, baik laki-laki maupun perempuan
  - 7) Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, diprioritaskan bagi penduduk perempuan
  - 8) Perluasan akses sekolah luar biasa dan inklusif, bagi anak laki-laki dan perempuan
  - 9) Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia wajar dikdas di daerah terpencil, kepulauan, daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, dan daerah terisolasi, serta anak jalanan, bagi anak laki-laki maupun perempuan.
  - 10) Pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

- 11) Perluasan akses SMA/SMK dan Sekolah Menengah Terpadu, secara adil bagi anak laki-laki dan perempuan
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh yang responsif gender
- 13) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/ Sekolah Menengah Terpadu, dan Sekolah Luar Biasa tanpa diskriminasi.

b. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing

- 1) Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- 2) Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi sekolah yang responsif gender
- 3) Pengembangan pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai profesi
- 4) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, laki-laki dan perempuan.

c. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang responsif gender

- 1) Perluasan pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan kebutuhan gender
- 2) Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dengan memperhatikan kebutuhan gender
- 3) Pembangunan sekolah bertaraf internasional
- 4) Akselerasi program studi kejuruan, vokasi dan profesi yang responsif gender
- 5) Pengembangan sistem, metode dan materi pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang responsif gender.

d. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- 1) Peningkatan sistem pengendalian internal bekerjasama dengan lembaga pengawas
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran, yang responsif gender
- 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat pendidikan, yang responsif gender
- 4) Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
- 5) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan, yang responsif gender
- 6) Peningkatan pencitraan publik
- 7) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, yang responsif gender
- 8) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan KKN
- 9) Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan
- 10) Pengembangan aplikasi SIM terintegrasi, meliputi keuangan, asset, kepegawaian dan data lainnya.

Merumuskan Kurikulum Berbasis Gender dalam Pendidikan:

Kebijakan Nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri misalnya Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Namun kenyataannya terjadi ketimpangan dalam praktek dunia pendidikan. Faktor penyebabnya antara lain: akses,

kontrol, partisipasi 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan benefit. Faktor akses terlihat pada proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang banyak didominasi oleh laki-laki. Penulis buku dan tenaga pengajar banyak dikuasai oleh laki-laki, kontrol kebijakan pun banyak di kuasai oleh laki-laki terutama pada jabatan struktural dari Pusat sampai ke Daerah.

Keadaan tersebut berimplikasi pada partisipasi perempuan dalam laju pembangunan sangat rendah, faktor benefit terlihat pada dominasi laki-laki pada posisi penentu kebijakan, khususnya birokrasi dan jabatan akademis kependidikan. Oleh karena itu, perlu diperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan materi-materi gender dalam kurikulum dengan melakukan upaya pengintegrasian materi-materi gender dalam kurikulum yang berkesinambungan. Upaya pengintegrasian tersebut dapat ditempuh dengan beberapa langkah :

- a. *Contribution aproach*, Upaya tersebut dilakukan dengan memasukkan masalah-masalah gender dalam kurikulum melalui sistem dan kebijakan publik
- b. *Additive aproach*, Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap ide atau gagasan baru tentang gender tanpa mengubah struktur kurikulum yang telah ada
- c. *Transformational aproach*, Upaya tersebut dilakukan dengan mengubah seluruh tujuan, struktur dan perspektif yang ada dengan isu-isu gender
- d. *Social action aproach*, Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman dan ruang diskusi gender di kelas agar peserta didik mampu melihat isu-isu gender dengan bijak dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam menyikapi isu tersebut.

Patut dicatat bahwa dalam mengembangkan integrasi kurikulum perspektif gender sepatutnya memuat nilai-nilai: persamaan hak, perbedaan fisik, kerjasama, partisipasi, keadilan, kesetaraan, kemajemukan dan prinsip demokrasi antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan kurikulum yang dimaksud perlu diambil langkah-langkah kongkrit yaitu: merumuskan visi, misi, tujuan, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis kesetaraan gender, mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar pada standar isi yang dapat diintegrasikan oleh nilai-nilai kesetaraan gender tiap-tiap mata pelajaran dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam indikator atau kegiatan pembelajaran pada silabus dan rencana pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional beberapa tujuan pendidikan yang perlu digenderkan. Tujuan yang digenderkan tersebut diusulkan untuk dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik.
3. Memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian profesionalisme.

Beberapa usul kebijaksanaan penyetaraan gender dalam sektor pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran gender bagi para pengelola pendidikan, khususnya pejabat daerah, kepala sekolah dan guru dalam peran-peran gender yang lebih seimbang dalam proses pendidikan di sekolah. Peningkatan kesetaraan gender terhadap masyarakat bahwa kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan pekerjaan menurut gender sehingga dapat memacu produktivitas masyarakat.
2. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, melalui penetapan sistem kuota serta sistem subsidi untuk perempuan khususnya untuk program-program studi atau jurusan yang bias laki-laki.
3. Meningkatkan kemampuan para pengembang kurikulum dan para penulis buku perempuan secara lebih profesional dan secara proporsional terhadap laki-laki.
4. Meningkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan menurut gender serta partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan dibidang pengelolaan pendidikan nasional.

Tujuan Pendidikan Berperspektif Gender sebagai berikut :

(1) Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, (2) Kewajiban yang sama dan (3) Persamaan kedudukan dan peranan contohnya baik pria dan wanita sama-sama kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Pendidikan dalam perspektif gender bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan kesetaraan gender dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, melalui: (1) pendidik, yang menjadi pendidik (guru di sekolah atau orang tua di rumah) hendaklah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesetaraan gender, dan memiliki keyakinan bahwa pendidikan kesetaraan gender yang mereka ajarkan kepada peserta didik memang akan berguna bagi anak mereka di masa mendatang. Pemahaman guru atau pendidik yang masih bias gender maka akan sulit mengajarkan makna kesetaraan gender kepada peserta didik. Selain dari pada itu guru juga dapat menjadi role model bagi siswa di sekolah. Dengan demikian, pendidik diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender. Sosialisasi kepada para pendidik telah dilakukan oleh pemerintah maupun peningkatan pengetahuan kesetaraan gender yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti dosen-dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mengenai peningkatan pengetahuan kesetaraan gender. Guru yang 'sadar gender' akan dapat memberikan sosialisasi kesetaraan gender kepada siswa-siswanya. (2) peserta didik, peserta didik di rumah maupun di sekolah merupakan individu-individu yang terdiri atas gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi perbedaan itu tidak akan mengesampingkan aspek-aspek dalam proses pembelajaran. Guru hendaklah dapat memotivasi peserta didik, agar dapat memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya seorang perempuan yang memiliki keahlian dalam pertukangan, dan dia sangat berminat dan berbakat di bidang tersebut maka pendidik dapat memberikan motivasi dengan baik. Begitu juga memberikan kebebasan bagi siswa perempuan untuk memilih dan memutuskan pendidikannya, mendorong perempuan untuk berani menyampaikan pendapatnya.

Memberikan kesempatan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. perempuan yang ingin menjadi pemimpin, dan memiliki bakat dalam mengorganisir sebaiknya diberikan peluang yang sama, seperti juga laki-laki. (3) strategi pembelajaran dan media pembelajaran, dalam hal ini media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang disiapkan guru hendaklah bervariasi, karena adanya perbedaan karakteristik belajar peserta didik, termasuk juga perbedaan laki-laki dan perempuan. Strategi pembelajaran juga mengembangkan peserta didik untuk lebih aktif, memiliki kemampuan berpikir kritis dan sikap yang berani dalam menyampaikan pendapat, namun masih dalam ranah sikap seperti jujur dan bertanggung jawab (4) bahan ajar, bahan ajar yang disiapkan hendaklah memberikan dukungan untuk pendidikan kesetaraan gender. (5) evaluasi pembelajaran, dalam memberikan penilaian juga hendaklah tidak bias gender. Sehingga hasil belajar dari peserta didik dapat dinilai secara objektif. (6) kurikulum, aspek kurikulum dapat memasukkan contoh-contoh yang menunjukkan nilai-nilai kesetaraan gender dan pemecahan masalah yang merujuk kepada kesetaraan gender. Kurikulum kesetaraan gender dapat diterapkan secara *hidden kurikulum* secara tersembunyi di dalam materi ajar di sekolah.

### **c. Pendidikan Berbasis Pengarustamaan Gender**

Kesetaraan gender bermakna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya untuk berperan dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan

harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Berdasarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Departemen Pendidikan dan Nasional (Depdiknas) Republik Indonesia melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dan mengupayakan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan pendidikan yang berperspektif gender. Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan pendidikan serta kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berperspektif gender harus disosialisasikan di tingkat pusat dan daerah baik kepada tingkat penentu kebijakan, tingkat pelaksana operasional, dan para *stakeholder* pendidikan.

Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diimban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemerdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya akan menghadapi masalah-masalah dan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya berbagai gejala ketidaksetaraan gender dalam

bidang pendidikan, diantaranya: (1) Pemerataan kesempatan belajar, nilai-nilai sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang serta dianut oleh keluarga dan masyarakat, sebagai penyebab kesenjangan angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi; (2) Pemilihan jurusan dan program studi, adanya stereotip dalam masyarakat tentang gender, perempuan lebih diarahkan oleh keluarga untuk memilih jurusan atau program studi yang lebih menonjolkan perasaan, feminitas, dan lain-lain. Sementara laki-laki cenderung diarahkan untuk memilih ilmu-ilmu dasar dan teknologi. Akibatnya terjadi kesenjangan secara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi; (3) Kurikulum, bahan ajar, proses pendidikan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan masih rendah daripada laki-laki. Keadaan ini dapat mempengaruhi adanya kebijakan pendidikan yang dihasilkan, sehingga produk-produk kebijakan seperti kurikulum, sistem dan proses pendidikan, bahan ajar, perilaku guru/pendidik yang kurang sensitif gender yang selanjutnya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.

Namun demikian, pembangunan pendidikan yang berwawasan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya bangsa dalam pembangunan kualitas SDM baik perempuan maupun laki-laki dengan berorientasi pada produktivitas, pemerataan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, kesetaraan gender di bidang pendidikan menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Meskipun upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan dan tatanan sosial terus dilakukan, diskriminasi masih nampak dalam implementasinya. Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi, jika tidak selamanya perempuan akan termarginalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan.

Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni menghantarkan setiap individu atau masyarakat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan berbasis kesetaraan. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah sebagai berikut; (i) Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam konteks ini sistem pendidikan, tidak boleh melakukan tebang pilih terhadap kondisi masyarakat, terutama dari segi jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan; (ii) Adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat diminimalisasikan; (iii) Memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Para pengambil kebijakan di dunia pendidikan perlu memiliki kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan minat dan bakat yang berbeda tersebut, setiap pendidik perlu menyediakan model dan pembelajaran yang sesuai

dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan; (iv) Pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta didik di waktu yang akan datang dapat teraktualisasikan. Apabila peserta didik laki-laki dan perempuan diberikan pendidikan yang menyuntuh kepada tuntutan zaman, maka ke depan antarkeduanya memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman.

Sejatinya, secara yuridis konsep pendidikan berperspektif gender telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN yang mengamatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut: “(i) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender; (ii) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat”.

Dengan dimilikinya perspektif gender maka prinsip-prinsip pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dapat dimunculkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah kategori inklusivitas gender, data informasi terpilah gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, prinsip akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Agar kaum perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, kompetensi dan manfaat dari seluruh pembangunan maka perlu digagas dan diimplementasikan pendidikan berbasis pengarusutamaan gender. Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender bisa menjadi pintu gerbang bahkan jalan tol tercapainya kesetaraan gender. Melalui pendidikanlah nilai-nilai kesetaraan gender bisa disosialisasikan melalui integralisasi dengan mata pelajaran-mata pelajaran di berbagai tingkat pendidikan, mulai SD hingga perguruan tinggi.

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah pendidikan yang berbasis strategi kebijakan pembangunan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan apresiasi masing-masing. Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender bisa menjadi strategi eliminasi bentuk diskriminasi dalam pendidikan.

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) mampu menanamkan segala nilai yang berkaitan dengan inklusif gender (*gender inclusive*) yaitu segala hal yang berkaitan dengan kebijakan, program atau kondisi yang berkaitan dengan isu gender. Tak hanya itu, Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pun diharapkan mampu mengurangi adanya kesenjangan gender atau perlakuan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dengan melakukan analisis berbagai faktor penyebab kesenjangan gender. Melalui Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pula diharapkan dapat dicegah praktik kekerasan dalam gender (*violence*), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan simbolik, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi.

Melalui Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) diharapkan juga mewujudkan pendidikan adil gender. Pendidikan adil gender adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan potensi, *skill*, talenta dan intelektualnya. Pada gilirannya nanti, pendidikan adil gender yang merupakan buah dari pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) akan menciptakan kemampuan responsif gender yaitu berkemampuan untuk memperlakukan sensitivitas gender dalam menyusun langkah-langkah yang bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Agar membuahkan hasil yang optimal maka pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) harus diimplementasikan pada kebijakan, program dan kegiatan yang berkesinambungan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) tidak harus memiliki kurikulum baru dan khusus, namun bisa integral dan menjiwai kurikulum yang ada. Penyadaran guru tentang inklusif gender perlu dilakukan. Tak hanya guru BK, namun semua guru bidang studi perlu diberi wawasan tentang kesetaraan gender. Pendidikan kesetaraan gender bisa berintegral pada semua mata pelajaran lain, sehingga tak perlu ada penambahan mata pelajaran khusus berkait kesetaraan gender.

Yang utama adalah perlunya disusun buku pelajaran yang inklusif gender sebagai sarana penting keberhasilan dan pencapaian pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Setidaknya ada tiga pelaku utama dalam penyusunan buku-buku pelajaran yang inklusif gender. Tiga pelaku utama itu adalah penulis,

editor dan ilustrator. Ketiga pelaku utama tersebut harus memiliki perspektif gender. Mereka harus mempunyai pemahaman tentang konsep kesetaraan gender dan keadilan gender.

Di samping tiga pelaku utama tersebut diperlukan pihak lain. Pihak lain itu adalah penerbit dan pemerintah. Penerbit menjadi komponen terpenting karena berkaitan dengan penyediaan dan distribusi buku kepada anak didik dan masyarakat. Diperlukan komitmen penerbit untuk menerbitkan buku-buku inklusif gender sehingga berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pihak lain adalah pemerintah sebagai regulator yang berperan menentukan untuk mewujudkan buku-buku inklusif gender yang akan menjadi ujung tombak pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Pihak pemerintah dalam hal ini yang paling berposisi strategis adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Kementerian Agama.

Melaksanakan pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) memang bukan pekerjaan ringan. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak itu dengan berbagai strategi, pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dapat mewujudkan pendidikan yang tidak diskriminatif sehingga memperteguh dan mengokohkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

#### **4. Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan**

##### **a. Perencanaan dan penganggaran responsif gender**

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya

kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender: 1). perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; 3). penganggaran responsif gender : (1) dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3)

anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki. Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- 1) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- 2) Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- 3) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dari perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah: Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang penyusunan RKP, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL, Peraturan Pemerintah

No. 58 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan No. 104/ PMK.02/ 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bertujuan untuk:

- 1) Untuk mendorong percepatan pencapaian target RPJMN 2010-2014, sampai tahun 2009 semua indicator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat nasional, maupun wilayah. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi / analisis gender. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi misalnya Undang-Undang No. 7/1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),

dan kesepakatan Internasional (Beijing Platform for Action/BPFA). Berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di seluruh K/L termasuk SKPD.

- 2) Dalam rangka mengimplementasikan amanah kebijakan nasional tersebut diatas, sejak tahun anggaran 2010 dilaksanakan uji coba penyusunan rencana dan anggaran memasukkan Gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui Gender Budget Statement (GBS), seperti tertuang dalam Permenkeu No. 119/PMK. 02/2009 di 7 (tujuh) K/L, yakni Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PENGINTEGRASIAN ISU GENDER mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran, akan MENGHASILKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER. Pada tahun 2011 sesuai Kepmenkeu 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010, diterapkan pada K/L yang menerapkan ARG meliputi 7 (tujuh) K/L pilot pada tahun 2010 tersebut diatas, ditambah dengan K/L yang menangani Bidang Perekonomian dan Bidang Powsoskum (Politik, Sosial dan Hukum), yang menghasilkan output kegiatan dalam rangka: *f* Penugasan prioritas pembangunan nasional; *f* Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau *f* Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian dan pengumpulan data terpilah)
- 3) Pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender, didahului dengan analisis situasi/analisis gender akan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara, diantaranya:

- a) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;
- b) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;
- c) Menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan dimaksud.

Tahapan Menyusun Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender diantaranya:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di K/L mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional.
- 2) Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan tertentu antara lain tentang Anggaran Responsif Gender, K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 1. *Gender Budget Statement* (GBS) GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain *Gender analys Pathway* (GAP). Untuk output kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*terms of reference*), yang selanjutnya disebut TOR. Penyusunan GBS pada tingkat output telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain *Gender analysis Pathway* atau *GAP*).

ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan; c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran; d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan; e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50%

perempuan untuk setiap kegiatan; g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender. Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut : 1. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut

Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian : a. Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumber daya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS); b. Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; c. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan; d. Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

## **b. Pengelolaan sarana dan prasarana**

Pengelolaan Sarana prasarana pendidikan responsif gender merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sarana prasarana yang responsif

gender dapat memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunanya. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender menjadi tugas dan tanggungjawab bersama, namun sebagian warga kampus memiliki pemahaman yang minim akan sarana prasarana yang responsif gender dengan beranggapan pemenuhan sarana prasarana responsif gender sebagai hal yang tidak penting. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam tentang pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan sebagai acuan bagi instansi, dalam rangka penyediaan sarana prasarana yang responsif gender. Pentingnya pengelolaan sarana prasarana responsif gender diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam hal ini akan diidentifikasi dan dianalisis dalam konteks akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Sarana prasarana responsif gender dibutuhkan karena adanya kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan demikian tidak ada satu jenis kelamin yang terabaikan hak-haknya, namun kenyataannya sarana dan prasarana yang ada masih belum sepenuhnya responsif gender. Berdasarkan indikator sarana prasarana responsif gender antara lain penyediaan toilet terpisah, tempat penitipan dan ruang menyusui/laktasi, penyediaan tempat wudhu dan mushalla yang tertutup dari laki-laki karena perempuan harus membuka auratnya saat berwudhu, serta fasilitas tangga dengan ukuran ideal anak tangga 17 cm ke bawah sehingga tidak menyulitkan bagi lansia dan ibu hamil serta adanya pemasangan CCTV dan pencahayaan yang memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya kejahatan, tetapi kenyataannya dari 6 indikator sarana prasarana responsif gender tersebut tidak semua terpenuhi.

Adapun yang belum terpenuhi yaitu tempat penitipan anak, ruang menyusui/laktas, CCTV dan pencahayaan yang memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya kejahatan. Padahal fasilitas tersebut sangat penting dan dibutuhkan. Kata pengelolaan atau manajemen merupakan suatu istilah kontemporer yang dikenal dan digunakan oleh berbagai organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 623) . Sudjana dalam buku Engkoswara dan Komariah mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah rangkaian dari berbagai aktivitas yang wajar dilakukan dalam suatu organisasi berdasarkan normanorma yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya memiliki hubungan dengan komponen yang lainnya (Aan, Komariyah, 2010: 86). Keberadaan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan. Sarana prasarana merupakan komponen penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Proses pendidikan akan mengalami hambatan dan masalah yang sangat serius, bahkan bisa mengalami suatu kegagalan jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ((Qomar: 2007: 170) Pengelolaan sejatinya adalah proses mendayagunakan sumber daya untuk memperoleh tujuan sebab dengan adanya pengelolaan yang baik maka suatu organisasi akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu yang perlu dikelola dalam organisasi termasuk lembaga pendidikan yakni sarana dan prasarana karena sarana prasarana merupakan bagian penting dalam menukung proses pembelajaran, tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal, oleh

karena itu pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa prinsip secara umum yaitu:

- 1) Prinsip pencapaian tujuan,
- 2) Prinsip efisiensi,
- 3) Prinsip administratif,
- 4) Prinsip kejelasan tanggung jawab,
- 5) Prinsip kekohesian (Matin dan Fuad, 2016: 5) .

Agar semua sarana dan prasarana pendidikan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pembelajaran maka hendaknya sarana prasarana pendidikan tersebut dikelola dengan dengan baik. Pengelolaan dalam sarana prasarana meliputi: 1) Perencanaan. Menurut Dwiantara dan Sumarto dalam (Ahmad Nurabadi, 2014: 8), menyebutkan bahwa perencanaan adalah kegiatan memikirkan, memperhitungkan, meneliti hingga merumuskan tindakan yang akan dilakukukan di masa yang akan datang, baik yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan sarana prasaran, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian serta kegiatan pengendaliannya. 2) Pengadaan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, baik berhubungan dengan jenis barang, spesifikasi barang, jumlah serta waktu dan tempat, harga dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan (Suryobroto, 2004: 116) 3) Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana secara teratur, tertib, rapi dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku (Bafadal. 2004: 53) tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kegiatan menyimpan barang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan barang (Barnawi, 2012:

78). 5) Penggunaan merupakan proses pendayagunaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan harus jelas kegunaannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien (Bafadal, 2004: 31) 6) Pemeliharaan sarana prasarana adalah kegiatan mengurus dan mengatur sarana prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala upaya yang dilakukan secara terus menerus agar sarana dan prasarana tetap dalam keadaan baik. 7) Pemusnahan atau penghapusan, yakni kegiatan menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi.

Fasilitas yang responsif gender merupakan fasilitas pendidikan yang memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunaannya. Indikator sarana prasarana responsif gender antara lain: (1) Penyediaan tempat penitipan anak, (2) Penyediaan ruang menyusui/laktasi, (3) Fasilitas tangga dengan ukuran ideal anak tangga 17 cm ke bawah, (4) Pemisahan Toilet, (5) Fasilitas tempat wudhu dan mushalla, (6) Pemasangan CCTV serta pencahayaan yang memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya kejahatan (Djunaedi dkk. 2014: 25)

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Proses pendidikan berwawasan gender perlu ditingkatkan, karena sampai saat ini gejala bias gender masih kerap ditemukan dalam dunia pendidikan dan sektor lainnya. Laki-laki masih cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih menguntungkan dalam proses pendidikan. Misalnya, dalam buku-buku pelajaran yang mengungkapkan status dan fungsi

perempuan dalam keluarga dan masyarakat belum sepenuhnya peka gender.

Kesetaran gender dalam pendidikan dan pembangunan harus diwujudkan, karena dapat berdampak baik bagi laju dunia tersebut dan bagi peserta didik di dalamnya. Dengan mengedepankan kesetaran gender dalam pendidikan dan pembangunan, peserta didik laki-laki tidak akan merasa dirinya lebih superior daripada perempuan dalam berkiperah di ranah tersebut. Di sisi lain, peserta didik perempuan tidak merasa dirinya inferior dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. Semakin setara antara laki-laki dan perempuan dalam berkiperah dalam pendidikan dan pembangunan, semakin sedikit tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berkiperah dalam pendidikan dan pembangunan. Di sisi lain, semakin setara laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri dalam pendidikan dan pembangunan, semakin memudahkan mereka dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih baik.

## **2. Rekomendasi**

Rekomendasi berdasarkan hasil analisis kebijakan pendidikan dan gender.

1. Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPPA) mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.
2. Kemendiknas mengkaji kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No. 84/2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota dan untuk memperkuat pelaksanaan Keputusan Menteri yang bertujuan mencapai

- pendidikan yang responsif gender dengan pengembangan kapasitas di semua tingkatan dalam sistem pendidikan.
3. Kemendiknas dan Kemenag melakukan penilaian terhadap sejumlah sekolah sampel di beberapa lokasi geografis yang berbeda tentang cara-cara pengintegrasian kebijakan gender dalam rencana dan pelaksanaan manajemen sekolah.
  4. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dengan menggunakan perspektif gender, Peraturan Pemerintah tentang Anggaran propinsi dan kabupaten/kota, dan Peraturan Kemendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 119/2009 tentang Anggaran responsif gender.
  5. Kemendiknas dan Kemenag memberikan lebih banyak perhatian pada propinsi yang belum berhasil dalam menurunkan rasio paritas gender, transisi dan angka putus sekolah, dengan membuat rancangan strategi berdasar kebutuhan yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor dasar yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian indikator di propinsi dan kabupaten/kota.
  6. Kemendiknas mempercepat program pelatihan yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan data terpilah berdasar gender, analisa dan perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk indikator tertentu.
  7. Mempercepat program yang ada yang terkait akses pendidikan dan memprioritaskan propinsi yang memiliki kesenjangan paritas gender yang signifikan dalam indikator pendidikan. khususnya jika disparitas rasio gender terjadi pada angka putus sekolah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Perlu juga dilakukan kajian untuk melihat efektifitas skema yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan gender.
  8. Mengembangkan kebijakan dan mensinkronisasinya di tingkat nasional, daerah dan sekolah untuk memastikan

bahwa perempuan yang menikah dini, hamil dan ibu muda bisa melanjutkan pendidikan. Melaksanakan kampanye untuk membangun kesadaran akan pentingnya mengurangi insiden pernikahan dini dan mendorong kelangsungan pendidikan bagi laki-laki, dan apalagi perempuan, yang menikah dini.

9. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK perlu mengkaji kurikulum pelatihan guru untuk memperbaiki penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga responsif gender.
10. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dan meningkatkan penyediaan buku teks pelajaran yang peka gender pada semua tingkat pendidikan, termasuk teks, gambar dan akses yang sama terhadap kegiatan ekstra-kurikuler olahraga, seni dan sains.
11. Kemendiknas memastikan mekanisme pembiayaan pendidikan bersifat responsif gender. Misalnya, ketika membiayai infrastruktur dan rehabilitasi sekolah baru, dan merancang bangunan sekolah, maka harus memenuhi kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan.
12. Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang jelas, yang mengatur penempatan laki-laki dan perempuan yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan (termasuk pendidikan Islam), terutama dalam posisi kepemimpinan, manajemen, dan akademik di semua tingkatan pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan parlemen).

## BAB 8

### **Analisis Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial**

#### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Pendidikan memiliki Manfaat yang sangat penting bagi setiap orang, dengan memiliki pendidikan yang tinggi dapat membawa perubahan dalam setiap pribadi. Pendidikan memiliki keberadaan sendiri yang memiliki peranan yang sangat penting karena dengan berkembangnya sejarah, nasional, keagamaan utamanya dibidang peradaban umat manusia, ilmu pengetahuan atau pendidikan. Dari pendidikan dan pengetahuan akan melahirkan suatu kekuatan-kekuatan pendorong untuk digunakan dalam suatu pencapaian kemajuan peradaban dan kemajuan pengetahuan serta menciptakan banyaknya corak yang akan memberikan arah perkembangan kemajuan suatu bangsa untuk bersama-sama memajukan peradaban suatu bangsa. Pendidikan sejatinya merupakan sesuatu sistem yang sangat diperlukan oleh semua bangsa dan Negara karena dengan adanya pendidikan tersebut seluruh warga Negara dalam suatu bangsa mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga mereka bisa mengikuti kemajuan zaman dan bisa setara dengan bangsa-bangsa atau Negara-negara yang lebih awal memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan.

Pendidikan suatu proses yang berkelanjutan terus menerus tanpa ada akhir dimulai seseorang dilahirkan ke dunia sampai kehidupan akhirnya, pendidikan yang berkelanjutan menghasilkan suatu kualitas untuk mewujudkan perwujudan

manusia yang merupakan makhluk sosial yang akan menjalani kehidupan yang bermasyarakat untuk menghadapi masa depan masing-masing individu yang harus memiliki landasan dan berakar pada landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan-landasan yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 harus menumbuhkembangkan sikap-sikap yang terdapat didalamnya sehingga mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan kajian yang sangat mendalam dalam suatu proses pendidikan, pendidikan harus memiliki pandangan yang berfilsafat yang harus sesuai dengan kejelasan pada landasan yang memegang teguh pendidikan tersebut. (Mulyasa. 2012:2).

Dengan adanya pengetahuan dalam seluruh aspek maka masing-masing warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perubahan dari diri sendiri, lingkungan keluarga inti, keluarga besar, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas. Dalam kehidupan, pendidikan yang pertama didapatkan oleh setiap orang berasal dari keluarga, orangtua merupakan ilmu pengetahuan pertama kali yang didapatkan oleh seorang anak didik dimana dari keluarga mereka mendapatkan pelajaran kesopanan, saling pengertian, penghargaan, kasih sayang, ilmu pendidikan dan lain sebagainya.

Lembaga yang sangat berperan dalam suatu proses pendidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan salah satunya merupakan lembaga sekolah secara formal dan nonformal, dengan lembaga sekolah maka para peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga bisa memajukan masing-masing individu. Lembaga sekolah mulai pendidikan dini pada awal pendidikan, sekolah taman kanak, sekolah yang paling dasar yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta perguruan tinggi, memiliki tingkat pengetahuan yang menuju kearah lebih tinggi. Dengan adanya lembaga sekolah seluruh proses kegiatan belajar mengajar didalamnya merupakan suatu

kegiatan yang sangat dipercaya oleh semua orang karena didalamnya memberikan ilmu-ilmu pendidikan yang dibutuhkan oleh semua peserta didik. Pengetahuan dapat menambah ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan perubahan kearah lebih baik karena tujuan pendidikan sendiri terjadinya perubahan bagi peserta didik sendiri.

Perubahan-perubahan oleh pengetahuan bisa memberikan perubahan-perubahan dalam diri setiap orang, sehingga dengan adanya perubahan akan merubah dengan meningkatnya kesejahteraan hidup ekonomi yang memberikan kesuksesan. Perubahan yang baik tidak lepas dari peranan dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan dan diadakannya pemerataan dalam pendidikan sehingga pendidikan tersebut dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Perubahan-perubahan yang diinginkan oleh setiap orang dalam kehidupannya untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi sehingga perubahan itu mensejahterakan setiap warga Negara Indonesia.

## **1. Pendidikan**

Pendidikan dalam proses pelaksanaannya harus didasari oleh penanaman karakter bangsa dan bernegara tidak hanya melalui suatu proses yang sederhana, pendidikan yang berkarakter bangsa merupakan suatu pendidikan yang berlandaskan landasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, landasan tersebut merupakan suatu arah yang harus dijiwai oleh masing-masing warga Negara Indonesia mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan yang lebih tinggi sehingga nantinya keberlangsungan hidup di Negara didapatkan dari kontribusi pendidikan yang berlandaskan hukum Negara Indonesia (I Wayan, 2019).

Pendidikan adalah suatu proses yang merujuk pada *humanime* dimana pengertiannya adalah merujuk pada proses memanusiakan manusia. Seharusnya setiap orang dari proses

diatas harus menghormati hak-hak setiap manusia dan memenadang peran penting oranglain sebagai seorang manusia yang harus dihormati. Dengan adanya suatu proses pendidikan dimana peserta didikan merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri yang menerima pengetahuan dari seorang guru secara formal dan informal, dimana setiap insan manusia harus dihormati sebagai generasi yang akan melanjutkan suatu proses pedidikan yang harus menjadi perhatian dengan cara dibantu diarahkan diberikan berbagi ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa meneruskan kehidupan sebagai manusia yang saling menghormati diantara semua umat manusia. Kepedulian tentang suatu pentingnya sebuah pendidikan menuju suatu pendewasaan yang nantinya akan membentuk suatu insan yang mandiri, bermartabat, berpikir kritis dalam mengahdapi setiap permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk itu pendidikan harus membentuk insan yang merupakan sosok yang akan melanjutkan suatu perubahan karena dengan adanya suatu ilmu pengetahuan yang didapatkan yang berkreatifitas yang saling memanusiaikan manusia di seluruh dunia. (Ab Marisyah, Firman, 2019).

Pendidikan sendiri berfungsi untuk menghilangkan kebodohan rakyat Indonesia yang dulunya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari kebodohan dan ketertinggalan menuju kearah yang lebih baik mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk memperbaiki kehidupannya masing-masing. Dengan adanya pendidikan salah satu fungsinya adalah mengembangkan pengetahuan dan watak masing-masing individu sesuai dasar Negara hukum Repiblik Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara Indenesia. Hal yang diuraikan diatas menunjukkan pendidikan Nasional Indoensia memiliki ciri untuk mengedepankan pembangunan karakter, sikap dan transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam landasan Hukum Indonesia yang memilki landasan filosofi Negara Indonesia,

yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di Dunia Internasional (I Wayan CS, 2019).

Secara sadar pendidikan harus terencana dengan dengan baik guna mewujudkan suasana yang aman nyaman kondusif dalam proses pembelajaran para peserta didik dapat secara aktif bisa mengembangkan potensinya dalam dirinya dalam mengembangkan pribadinya masing-masing yang didasarkan pada agama, pengendalian diri, kepribadian yang baik, ahlak mulia dari setiap orang, keterampilan dari berbagai aspek yang bisa dilakukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara pengetahuan umum dan khusus dimana pendidikan merupakan suatu usaha manusia menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejak lahir yang sudah mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan secara formal dan nonformal baik jasmani dan rohani harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yang nantinya mereka bisa mengerjakan tugasnya masing-masing secara mandiri dan bertanggungjawab, guna mempengaruhi pertumbuhan, perubahan dan kondisi setiap manusia. Perubahan-perubahan inilah yang akan memberikan pergerakan dan perubahan dari diri sendiri dan akan berkembang kesekitar lingkungannya (Desi P dkk, 2022).

Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia harus memiliki tujuan yang berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003, merupakan pendidikan harus berawal dari manusia yang berkatualisasi atau sesuai dengan kodrat sebagai manusia yang dipertimbangkan berbagai kemungkinan yang dimiliki atau potensi dari dalam diri sendiri, yang harus diarahkan maju menuju terwujudnya manusia yang dicita-citakan sesuai idealitas diri. Tujuan pendidikan adalah manusia yang harus memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertaqwa, berahlak mulia, sehat, cerdas, berkemauan, berkeinginan, mampu berkarya, berperasaan, memenuhi kebutuhan yang secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya,

berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya Bangsa Indoensia. Dalam penerapannya bahwa dengan adanya pendidikan manusia dapat mewujudkan berbagai potensi dari diri masing-masing manusia dalam berbagai konteks keberagaman, moralitas, individu atau personal, kelompok, sosial dan berkebudayaan yang menyeluruh melalui integritas pendidikan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landsan Hukum Di Indoensia (I Wayan CS, 2019 T).

Tujuan pendidikan Nasional, disesuaikan dengan adanya Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pendidikan, Kebudayaan, agama, yang dirumuskan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia sejatinya yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 lebih ditegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dan mengembangkan manusia seutuhnya yang memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi pekerti luhur, memiliki segala kemampuan keterampilan pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian baik dan mandiri serta memiliki tanggung jawab dalam bermasyarakat yang berkeadilan sosial dan berkebangsaan.

Pendidikan Indonesia harus memiliki kecenderungan untuk mengutamakan pembangunan sikap sosial dan memiliki keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan di Indoensia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan sila pertama bahwa Warga Negara Indonesia harus berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa, sehingga tidak menjadi suatu keraguan dalam menjalankan kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Mobilisasi

Mobilisasi dalam suatu masyarakat atau yang disebut suatu perubahan atau pergerakan sosial yang merupakan suatu proses yang terjadi suatu perubahan, adanya suatu pergeseran, adanya peningkatan ataupun terjadinya suatu penurunan dari suatu status perorangan ataupun sekelompok orang. Menurut ilmu etimologis, mobilitas merupakan suatu kata yang berasal dari dasar suatu kata mobile, yang memiliki arti gerakan yang aktif, cepat, gesit, sehingga mobilitas diartikan sebagai gerakan. Pengertian secara harafiah mobilitas adalah gerakan-gerakan yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan oleh suatu kegiatan seperti ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perubahan dalam kehidupan manusia yang dapat memajukan peradaban dunia. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, dimana terdiri dari suatu pola atau banyak pola yang dapat mengatur setiap individu dalam suatu kelompok sosial, dimana suatu struktur sosial yang didalamnya mencakup sifat hubungan antara masing-masing individu dalam suatu kelompok dan hubungan yang terjadi antara individu dalam kelompoknya.

Dalam suatu mobilitas sosial didalamnya terdapat bermacam-macam mobiltias yang akan diterangkan di bawah ini:yaitu:

### A. Mobilitas Vertikal

Merupakan suatu proses perpindahan status atau keadaan social seseorang atau kelompok pada lapisan masyarakat.

#### 1. Mobilitas vertikal ke atas (*social climbing*)

Merupakan suatu pergerakan atau perubahan karena adanya suatu perubahan dalam bentuk peningkatan atau perubahan dalam suatu kedudukan seseorang atau kelompok. Penyebabnya adalah karena adanya kemajuan yang sangat berpengaruh ke hal yang positif sehingga bisa memberikan perubahan, penyebabnya karena adanya peningkatan prestasi kerja.

## 2. Mobilitas vertikal ke bawah (*social sinking*)

Adalah suatu perubahan status atau kedudukan seseorang menurun ke arah bawah yang terdiri dari:

- ✓ Proses *social sinking* dapat menimbulkan adanya suatu keadaan yang dapat memberikan perubahan psikis bagi setiap individu karena suatu perubahan pada hak dan kewajibannya
- ✓ Terjadinya perubahan yang menurun dapat disebabkan karena menurunnya kedudukan seseorang ke kedudukan yang lebih rendah atau tidak adanya saling menghargai diantara setiap orang dalam suatu lapisan masyarakat sosial.

## B. Mobilitas Horizontal

Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama disebut dengan mobilisasi horizontal. Dapat dikatakan mobilisasi sosial adalah peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari satu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang memiliki tingkat yang sederajat. Ciri utama dari suatu mobilisasi horizontal adalah tidak terjadinya suatu perubahan dalam suatu derajat kedudukannya dalam lapisan masyarakat.

### a. Mobilitas sosial antar wilayah geografis.

Pergerakan sosial ini berupa perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya seperti perpindahan transmigrasi, urbanisasi dan adanya migrasi.

### b. Mobilitas antargenerasi,

Mobilitas yang terjadi diantara generasi terdiri dari dua generasi atau lebih generasi misalnya generasi dari orangtua ayah dan ibu, generasi anak, generasi cucu dan seterusnya.

Pergerakan mobilitas ini ditandai dengan suatu perkembangan dalam taraf hidup bisa naik dan bisa ke arah turun dalam suatu generasi. Mobilisasi ini merupakan

suatu perkembangan perpindahan status sosial dari satu generasi dan generasi yang lain.

Perubahan-perubahan yang diharapkan memberikan dampak yang positif bila digunakan dengan sebaik-baiknya. Pemerataan pendidikan akan sangat bermanfaat bila dilakukan pada seluruh warga Negara Indonesia. Bila pemerataan yang dilakukan tidak seluruhnya maka akan terciptanya suatu kesenjangan dalam semua aspek kehidupan, sosial, agama, pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya. Dari sinilah akan terbentuk suatu masalah yang timbul dimana-mana yang dapat merugikan masyarakat sendiri. Masalah yang ditimbulkan akan diawali dengan ketidakadilan dan perilaku yang melanggar hukum (Mustadi, 2020).

Dalam kehidupan bermasyarakat sangat beranekaragam dimana seluruh kehidupan manusia saling mempengaruhi antar kehidupan dan pendidikan. Pengkajian dalam suatu bidang tertentu haruslah mencakup secara keseluruhan dalam suatu sistem pendidikan yang secara menyeluruh sepanjang daya nalar para cendekiawan.

Masyarakat modern didalamnya pasti terdapat suatu mobilitas atau perpindahan golongan yang hampir seluruhnya dialami semuanya. Status orang bisa naik dan bisa turun yang terdapat dalam masyarakat tersebut yang dapat didasarkan oleh status sosial, status ekonomi, jabatan, kekayaan, kekuasaan dan lainnya sebagainya. Dalam masyarakat mobilitas sosial akan berlangsung terus menerus seiring dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan yang berlangsung di setiap Negara, salah satunya juga masyarakat industri yang diperlukan perubahan-perubahan untuk melangsungkan roda kehidupan.

Masyarakat yang modern dan terbuka dimana setiap orang akan memiliki prinsip untuk menjadikan suatu perubahan yang dapat menduduki atau mencapai suatu keadaan yang lebih baik atau lebih tinggi dari keadaan semula.

Dalam masyarakat modern, yang akan mencapai suatu status yang tinggi dimana didalamnya terdapat banyak perubahan-perubahan yang terjadi, hal ini dapat ditemukan pada Negara-negara yang sudah maju, perekonomian, sosial, keuangan sehingga perubahan-perubahan yang akan terjadi dipermudah dengan faktor-faktor yang telah mendukung suatu perubahan kearah yang lebih baik dan maju (Nasution, 2019).

Lapisan masyarakat dari seluruh lapisan akan mengalami suatu proses perubahan atau mobilitas social dengan cara yang beragam, dimana pergerakan mobilitas social akan mengalami pergerakan ketika seseorang individu atau kelompok berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya baik dalam level tingkatan yang sama maupun ke tingkat lebih tinggi ataupun tingkat berbeda. Dalam kelompok masyarakat akan terjadi perubahan peningkatan kearah yang lebih tinggi tingkatannya dalam kenyataannya memang terdapat banyak mobilitas, yang mengarah ke perubahan naik atau perubahan ke turun (Claudia Em, 2017) (T).

Setiap individu menginginkan mencapai suatu status dan peran dalam suatu pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi dari yang ia dapatkan sehingga seseorang akan mengalami suatu proses perubahan dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya kearah yang lebih baik. Setiap orang menginginkan suatu perubahan atau mobilitas kearah yang lebih tinggi bukan sebaliknya (Claudia Em, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pattinasary 2012 didapatkan bahwa adanya hubungan yang sangat positif antara pendidikan dengan mobilitas sosial di dua provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil yang ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka

semakin besar pula ia memperoleh mobilitas ke atas (*upward mobility*).

Kenaikan status dari keadaan yang lebih rendah kestatus yang lebih tinggi akan berdampak sangat baik dalam kehidupan masing-masing orang, karena dengan peningkatan status ini, mereka dapat merubah keadaan ekonomi, sosial, kehidupan dengan suatu keberhasilan yang mereka capai. Dengan adanya peningkatan pengetahuan maka seseorang akan memiliki kematangan dalam proses kehidupannya, kepribadiannya dan tanggung jawab terutama pada dirinya sendiri (Claudia, 2017) (T).

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan suatu lembaga institusi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam suatu proses dalam mendapatkan cita-cita melalui suatu program pendidikan yang dapat dijadikan suatu kendaraan mobilisasi social bersama dengan lingkungan keluarga lembaga keagamaan, lembaga social, dan lembaga lainnya yang sangat diperlukan dalam mencapai suatu proses mobilisasi social. Peran serta perguruan tinggi sebagai kendaraan mobilisasi akan semakin meningkat dengan peningkatan kemajuan jaman yang memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan dan menjadikan suatu proses perubahan mobilisasi social (Burlutskaia 2014)

Pendidikan sangat berperan penting dalam terjadinya suatu perubahan atau mobilisasi social, bahwa semakin besar diferensiasi pendidikan akan menyebabkan semakin besar peningkatan akan ketimpangan dalam mencapai suatu level pendidikan yang dipengaruhi oleh pengaruh social kultural dan budaya (Thompson & Simmons 2013)

Selain itu mobilitas sosial dalam memperlemah solidaritas kelompok karena mereka yang beralih golongan sosial akan menerima norma-norma baru dari golongan yang dimasukinya dengan meninggalkan norma-norma golongan sosial semula.

## **B. Dasar Hukum Dan Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dimana mewujudkan keadaan suasana pembelajaran dan proses yang dilakukan dalam pembelajaran dapat berjalan dengan sebaiknya, sehingga para peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya masing-masing memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang NO.20 Tahun 2003, pasal 13 Ayat 1, proses pelaksanaan pendidikan melewati tiga tahapan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pendidikan di Indoensia didasarkan pada Undang-Undang no. 20 Tahun 2003, pada pasal 4 yaitu:

1. Pendidikan yang diselenggarakan yang berlandaskan secara demokratis dan berkeadilan yang tidak dilakuan diskriminasi dengan menjunjung tinggi Hak-Hak asasi manusia, Nilai Kultur,dan Kejemukan Bangsa.
2. Pendidikan harus diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang bersistematik secara terbuka dan memilki kemaknaan yang banyak.
3. Pendidikan harus diselenggarakan melalui suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan kepada peserta didik berkelanjutan sepanjang hayatnya.
4. Pendidikan yang diselenggarakan harus memberikan keteladanan, membangun kebutuhan dan mengembangkan kerasi-kreasi yang berkreatifitas dalam suatu proses pendidikan dalam pendidikan.

5. Pendidikan dikembangkan melalui budaya membaca, menulis, dan berhitung untuk seluruh warga Negara Indonesia.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam pelaksanaan dan adanya suatu pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan.

Dari dasar pasal diatas maka pendidikan di Indonesia harus menjadi tanggungjawab semua pihak tidak hanya menjadi tanggungjawab sebuah institusi pendidikan tetapi merupakan tanggung jawab individu, keluarga, masyarakat. Pemerintah yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan keberlangsungan suatu proses pembelajaran yang ada di Indoensia yang memilki andil dalam mensukseskan proses pendidikan nasional di Indonesia. Yang nantinya diharapkan mendapatkan suatu output pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Negara

Beradarkan kebijakan dasar hukum diatas setiap warga Negara Indonesia memilki hak yang sama yaitu mendapatkan pendidikan yang adil dan merata dalam semua tingkatan pendidikan. Pendidikan yang didapatkan bisa memberikan dan menambah pengetahuan setiap warga negara, dapat merubah pola pikir, sikap, perilaku sehingga dapat memberikan perubahan kearah kemajuan yang lebih baik dalam menjalankan kehidupan secara individu, sosial bermasyarakat. Dengan pendidikan juga dapat memberikan perubahan-perubahan seperti perubahan ekonomi, lingkungan atau social yang disebut sebagi mobilitas social. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan makan mobilitas social akan terjadi secara vertical dan horizontal. Kesadaran akan pentingya pendidikan akan menciptakan proses mobilisasi yang secara merata bagi seluruh warga Negara Indonesia.

**Identifikasi Masalah:** dengan masalah yang diatas maka harus dibuat suatu analisa kebijakan (SWOT) pada Pendidikan dan Mobilitas Sosial.

**Rumusan Masalah:** bagaimana Analisis Kebijakan (SWOT) pada Pendidikan dan Mobilitas Sosial.

## C. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Mobilitas Sosial

### 1. Analisis SWOT

#### *Strenght:*

**a. Semua warga Negara memiliki Hak yang sama (S1)**

Semua warga Negara indonesia mempunyai Hak yang sama dalam mendapatkan dalam Bidang pendidikan dan semua bidang Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan

**b. Peningkatan Daya Ekonomi (S2)**

Peningkatan daya ekonomi, masyarakat dan pembiayaan pemerintah dalam dunia pendidikan.

**c. Kesadaran Pentingnya Pendidikan (S3)**

Kesadaran dari individu, golongan, organisasi, keluarga, pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dalam bidang Pendidikan

**d. Dukungan semua Aspek (S4)**

Dukungan dari pemerintah, stakeholder, pemegang kepentingan, Msasyarakat

**e. Memiliki Kesempatan yang sama (S5)**

Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dan berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi.

***Weakness:***

**a. Diskriminasi (W1)**

Pendiskriminasikan dalam suatu kelompok atau lapisan masyarakat dapat menjadi faktor penghambat dalam mencita-citakan suatu tujuan perubahan dalam mobilisasi social. Karena hambatan ini maka seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karena adanya suatu keterbatasan yang mempunyai syarat-syarat menjadi anggota suatu kelompok yang hanya bisa mendapatkan kelayakan pendidikan.

**b. Taraf Ekonomi (W2)**

Rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial. Karena dengan kekurangan keadaan ekonomi warga maka mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi, karena mereka akan lebih mementingkan kebutuhan setiap harinya. Dengan status kemiskinanya merek akan lebih sulit untuk melakukan suatu perubahan ke atas, yang disebabkan karena kekurangannya.

**c. Kesetaraan Gender (W3)**

Dari perbedaan kelamin bisa menyebabkan perbedaan dalam menerima pengetahuan dan pendidikan yang masih berada didaerah-daerah yang terpencil dimana dari perbedaan jenis kelamin bisa menjadi hambatan dalam perubahan mobilisasi social. Di beberapa daerah dimana laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga jenis kelamin menjadi salah satu faktor penghambat.

**d. Kebudayaan (W4)**

Adanya suatu kebudayaan yang dapat menghambat suatu proses pendidikan yang menurut masyarakat yang memiliki adat yang tidak sejalan dengan perubahan

pendidikan saat ini dapat menjadi suatu hambatan dalam proses mobilisasi social.

**e. Pengaruh Sosialisasi (W5)**

Sosialisasi dalam peningkatan pengetahuan dan dalam proses pendidikan akan membantu dalam perubahan mobilisasi social.

***Opportunity:***

**a. Negara demokrasi (O1)**

Negara yang demokrasi setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pengetahuan yang berlandaskan hukum yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila.

**b. Ketersediaan pembiayaan (O2)**

Pemerintah, organisasi, dan masyarakat itu sendiri sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu setinggi-tingginya seperti: beasiswa dalam dan Luar negeri.

**c. Tersedianya fasilitas-fasilitas (O3)**

Tersedianya fasilitas Pendidikan dan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pendidikan.

**d. Sekolah membuka (O4)**

Seluruh sekolah yang ada di Indonesia memiliki tujuan yang sama adalah dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam lingkungan sekolah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap orang sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang dapat meningkatkan keadaan sosialnya.

**e. Guru (O5)**

Guru adalah seorang pendidik bagi peserta didiknya yang dapat menjadi suatu model dalam melakukan perubahan dalam mobilitas sosial yang dengan usaha dan pekerjaannya mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan bagi para peserta didik. Peran guru sangat besar dalam

proses pendidikan karena melalui seorang guru ilmu itu dapat disampaikan kepada para peserta didik, dimana dengan bertambahnya ilmu pengetahuan maka akan dapat terjadi perubahan tingkat pengetahuan dari peserta didik yang selanjutnya dapat terjadi suatu perubahan dalam mobilisasi social.

***Threats:***

Hasil analisis menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni ketimpangan sosial-ekonomi dan disparitas geografi dan kultur.

**a. Faktor individu (T1)**

terdiri atas perbedaan kemampuan, orientasi sikap, penundaan kesenangan, keberuntungan, pola kesenjangan nilai sedangkan faktor struktur terdiri atas fertilitas, bantuan pemerintah dalam pendidikan, dan pola hidup berhutang.

**b. Kesadaran (T2)**

Kurangnya Kesadaran akan pentingnya pengetahuan sehingga kesempatan untuk dapat memberikan perubahan sosial dalam kehidupan tidak dapat dilakukan dengan baik.

**c. Fasilitas-fasilitas (T3)**

Fasilitas pendidikan yang ada tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai penggunaannya, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang sangat minim

**d. Sumber-daya Manusia (T4)**

Sumber daya manusia dalam mobilitas pendidikan yang masih sangat diperlukan, terutama didaerah yang masih terpencil dan sangat terpencil, dimana fasilitas tempat pendidikan yang susah untuk ditempuh baik peserta didik, guru dan pemerintah.

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S9. Memiliki hak yang sama S10. Peningkatan Ekonomi S11. Kesadaran S12. Dukungan S13. Memiliki Hak yang sama	W9. Diskriminasi W10. Ekonomi W11. Gender W12. Kebudayaan W13. Sosial
PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O4. Negara Demokarasi O5. Pembiayaan O6. Fasilitas O7. Sekolah O8. Guru	T9. Faktor Individu T10. Keadasaran T11. Fasilitas T12. Sumber Daya Manusia

**Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial**

## D. Hasil Analisa Dan Pembahasan

### 1. Program Swot

#### a) *Strenght*

1. S1: Pemerataan pendidikan diseluruh wilayah Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila bahwa seluruh warga Negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan Pendidikan
2. S2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Indonesia dalam memperbaiki taraf kehidupan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi
3. S3: Pemberian edukasi bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pendidikan yang dapat merubah taraf hidup pendidikan kearah mobilisasi yang lebih baik.

4. S4: Semua stakeholder yang terlibat dalam proses pendidikan di suatu daerah harus berperan secara aktif sehingga setiap warga Negara mendapatkan pendidikan sebagai haknya dan bisa melakukan mobilisasi sosial.

**b) *Weakness***

1. W.1: Pemerintah harus lebih tegas dalam pelaksanaan pendidikan sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara.
2. W.2: Pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memberantas kemiskinan, sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua warga Negara.
3. W.3: Dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan harus dilakukan kesetaraan semua jenis kelamin tanpa ada diskriminasi dan perbedaan yang dapat merugikan semua pihak.
4. W.4: Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari dunia pendidikan dan pemerintah dan stakeholder harus menjadi pelopor untuk mendorong terlaksananya mobilisasi social kearah lebih baik.
5. W.5: Adat istiadat juga harus mendukung proses pendidikan yang akan memperkaya individu atau kelompok dalam menambah pengetahuan kearah lebih baik.

**c) *Opportunity***

1. O.1: Pembiayaan untuk peningkatan pendidikan harus ditambah atau dinaikkan guna meratakan seluruh pendidikan
2. O.2: Fasilitas-fasilitas pendidikan harus dilakukan pemeliharaan secara rutin guna mendukung proses pembelajaran dan penambahan fasilitas fasilitas

pembelajaran untuk mempermudah dalam proses pendidikan

3. O.3: Peningkatan kesejahteraan para guru atau pendidik

#### **d) Threats**

1. T.1: Harus dilakukan penyertaraan akibat kesenjangan sosial dengan meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. T.2: Pemerataan dilakukan dari kota besar sampai kepedesaan diseluruh pelosok Indonesia dengan peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.

## **2. Strategi Swot**

### **a) Strengths**

1. S1: Pemerataan pendidikan diseluruh wilayah Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila bahwa seluruh warga Negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan Pendidikan. Dengan adanya pemerataan pendidikan semua setiap warga negar Indoensia memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan dari sekolah dini sampai perguruan tinggi karena dengan adanya pendidikan dan pengetahuan yang mereka akan dapatkan dapat memberikan perubahan yang positif dalam setiap warga Negara Indonesia dan merupakan suatu modal untuk diri sendiri sehingga mereka bisa secara mandiri, berkreatifitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan benegara dan terciptanya suatu kedamaian.
2. S2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Indonesia dalam memperbaiki taraf kehidupan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi.

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari tujuannya yaitu bisa mempertahankan kehidupan keberlangsungan hidupnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan sandang, pangan untuk diri dan keluarganya, dengan adanya pendidikan dan pengetahuan dapat memberikan perubahan perekonomian dengan memberantas kemiskinan. Untuk itu pendidikan dan pengetahuan sangat berperan serta dalam memberantas kemiskinan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi setiap orang dan akan terjadi suatu mobilisasi sosial atau perubahan yang memberikan keuntungan.

3. S3: Pemberian edukasi bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pendidikan yang dapat merubah taraf hidup pendidikan kearah mobilisasi yang lebih baik. Setiap warga Negara di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dimana dalam mendapatkan pendidikan memiliki saran dan prasarana yang kurang didaerah terpencil, untuk itu diharapkan dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan dan ajakan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk secara sadar dan mementingkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga dapat tercipta suatu perubahan-perubahan dan terjadilah suatu proses mobilisasi dalam masyarakat.
4. S4: Semua stakeholder yang terlibat dalam proses pendidikan disuatu daerah harus berperan secara aktif sehingga setiap warga Negara mendapatkan pendidikan sebagai haknya dan bisa melakukan mobilisasi sosial. Peran serta pemerintah dan seluruh stakeholder sangat berperan aktif dalam keberlangsungan pendidikan dan pemerataan dalam pendidikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa

terkecuali untuk mengenyam pendidikan sehingga dapat memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupannya.

**b) Weakness**

1. W.1: Pemerintah harus lebih tegas dalam pelaksanaan pendidikan sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara. Pemerataan pendidikan dan tidak adanya suatu diskriminasi kepada seluruh warga negara Indonesia dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dilakukannya suatu proses perubahan atau suatu proses mobilisasi.
2. W.2: Pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memberantas kemiskinan, sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua warga Negara. Harus dilakukan pemerataan dan membantu taraf hidup ekonomi setiap warga Negara Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta memberantas kemiskinan, yang bisa diawali dari suatu pendidikan yang memberikan suatu perubahan atau mobilisasi.
3. W.3 Dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan harus dilakukan kesetaraan semua jenis kelamin tanpa ada diskriminasi dan perbedaan yang dapat merugikan semua pihak.
4. W.4. Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari dunia pendidikan dan pemerintah dan stakeholder harus menjadi pelopor untuk mendorong terlaksananya mobilisasi social kearah lebih baik. Dalam Negara indonesia terdiri dari banyak kebudayaan dimana kebudayaan merupakan salah satu unsur pendidikan dan pengetahuan yang dapat memperkaya pendidikan di Indoensia untuk itu harus dilakukanya pelesatريان

kebudayaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

5. W.5 Adat istiadat juga harus mendukung proses pendidikan yang akan memperkaya individu atau kelompok dalam menambah pengetahuan kearah lebih baik. Adat sitiadat juga salah satu unsur yang bisa menjadikan pendidikan bagi setiap orang sehingga kelestarian adat istiadat harus tetap dijaga untuk keberlangsungan dalam Negara Indonesia.

**c) *Opportunity***

1. O.1. Pembiayaan untuk peningkatan pendidikan harus ditambah atau dinaikkan guna meratakan seluruh pendidikan, dilakukan dengan peningkatan pembiayaan dalam dunia pendidikan sehingga proses pendidikan di Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan dirasakan oleh seluruh warga Negara Indoensia.
2. O.2. Fasilitas-fasilitas pendidikan harus dilakukan pemeliharaan secara rutin guna mendukung proses pembelajaran dan penambahan fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk mempermudah dalam proses pendidikan. fasilitas-fasilitas pendidikan harus ditambah tingkatkan, diperbaharui dan dirawat sehingga bisa membantu dalam proses pendidikan.
3. O.3. Peningkatan kesejahteraan para guru atau pendidik. Mutu seorang pendidik harus lebih tingkatkan karena pendidik merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat melakukan suatu perubahan-perubahan atau mobilisasi dalam masyarakat.

d) *Threats*

1. T.1. Harus dilakukan penyetaraan akibat kesenjangan social dengan meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. T.2. Pemerataan dilakukan dari kota besar sampai kepedesaan diseluruh pelosok Indonesia dengan peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.

Strategi dari Analisis SWOT, sebagaimana yang disajikan oleh Gambar 2.

<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN MOBILISASI SOSIAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		S14. Memiliki hak yang sama S15. Peningkatan Ekonomi S16. Kesadaran S17. Dukungan Memiliki Hak yang sama
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strength-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
O9. Negara Demokarasi O10. Pembiayaan O11. Fasilitas O12. Sekolah O13. Guru	SO-5. Pemerataan pendidikan SO-6. Mempunyai mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan SO-7. Meningkatkan pemberian edukasi akan pentingnya pendidikan	WO-4. Peran Pemerintah WO-5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan emberantas kemiskinan WO-6. Kesadaran dalam dunia pendidikan WO-7. Pemeliharaan dan kelestarian

	SO-8. Peran pemerintah dan stakeholder.	kebudayaan WO-8. Pemeliharaan dan kelestarian Adat istiadat
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b>	<b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b>
T13. Faktor Individu T14. Keadasaran T15. Fasilitas T16. Sumber Daya Manusia	ST-5. Pemerataan pendidikan ST-6. Memberikan kesempatan seluasnya dalam pendidikan ST-7. Memberikan edukasi atau pengetahuan akan pentingnya pendidikan ST-8. Melibatkan pemerintah dan stakeholder lebih tinggi	WT-5. Meningkatkan peran pemerintah WT-6. Peningkatan ekonomi kerakyatan WT-7. Menumbuhkan kesadaran akan pendidikan WT-8. Memelihara dan melestarikan kebudayaan WT-9. Memelihara dan melestarikan adat istiadat

## E. Penutup

### 1. Rekomendasi

- Keterbukaan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan Pendidikan yang memiliki hak yang sama sesuai Undang-undang Pendidikan yang berlaku di Indonesia.
- Lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia
- Memberikan edukasi tentang arti penting pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. Kesimpulan

- a) Pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat diperlukan karena dengan pendidikan seseorang dapat belajar secara informal dan formal dari sejak dini sampai pendidikan tinggi dengan adanya pendidikan dan pengetahuan dapat memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupannya setiap makhluk sosial, dimana akan terjadi perubahan dalam taraf ekonomi, sosial, dan lain sebagainya sehingga bisa menciptakan perubahan-perubahan atau mobilisasi social dari bermasyarakat.
- b) Dalam keberlangsungan suatu proses pendidikan harus melibatkan seluruh aspek yang sangat banyak dalam menciptakan perubahan-perubahan atau mobilisasi sosial yang dapat dirasakan oleh setiap warga Negara di Indonesia.
- c) Aspek-aspek pada pendidikan yang dapat menciptakan suatu perubahan atau mobilsasi hendaknya memperhatikan aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu proses pendidikan.
- d) Dengan dilakukannya suatu analisa-anasila SWOT dari proses pendiidkan dan perubahan makan harus harus dilakukan suatu program dan strategi juga dari berbagai aspek yang menciptakan suatu proses dari suatu pendidikan menjadi perubahan-perubahan atau mobilisasi dalam bermasyarakat atau mobilisasi sosial.

**Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila****A. Pendahuluan****1. Latar Belakang dan Permasalahan**

**P**usat Penguatan Karakter, yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terus berupaya untuk menghasilkan penerus bangsa yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila memiliki enam indikator yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global adalah enam indikator Profil Pelajar Pancasila. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035 melibatkan transformasi teknologi, sosial, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila juga dirancang secara menyeluruh dan komprehensif melalui pembiasaan dan keteladanan. Dimensi-dimensi yang ada bukan hanya menjadi tujuan jangka panjang, tetapi juga diintegrasikan dalam pembelajaran melalui sekurang-kurangnya tiga cara, yaitu 1) sebagai materi pelajaran dalam kegiatan intrakurikuler, 2) sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru, dan 3) sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Ketiga cara tersebut bukan merupakan pilihan untuk sekolah atau pendidik, melainkan kesemuanya perlu dipenuhi agar Profil Pelajar Pancasila dapat dibangun dan dikembangkan dalam diri setiap individu pelajar secara efektif.

Profil Pelajar Pancasila didasarkan pada berbagai fenomena di dunia pendidikan Indonesia, baik yang terkait dengan masalah klasik maupun masalah modern. Masalah sosial seperti diskriminasi di sekolah adalah masalah klasik yang dianggap sebagai ancaman, terutama terhadap Pancasila, ideologi bangsa. Banyak masalah sosial klasik, seperti konflik ras dengan agama, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman radikalisme, telah menyebabkan banyak korban jiwa. Untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila maka pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk meminimalisir konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Disamping itu Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, agama dan golongan. Oleh karena itu, kemajemukan dan keragaman budaya ini harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Seberapa besar perhatian sekolah terhadap multikulturalisme (keragaman budaya, agama, dan kesederajatan) dan pluralisme (kemajemukan) adalah faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan atau enkulturasi, yaitu mentasbihkan seseorang untuk mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Selain itu, pendidikan memiliki peran sebagai warisan kebudayaan, yaitu memberikan kebudayaan kepada generasi muda. Akibatnya, generasi tua harus dapat memberikan manfaat kepada generasi berikutnya.

Pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Banks mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan, yang tujuan utamanya adalah merubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria dan wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan budaya (kultur)

yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi. Pendidikan multikultural dapat menumbuhkan semangat persaudaraan, persaudaraan, persahabatan dan hubungan yang langgeng, semangat tim, persatuan, toleransi di dalam dan di luar sekolah, sehingga membuat lingkungan sekolah lebih aman dan ramah bagi semua peserta didik. Selain itu, pendidikan multikultural memupuk prinsip keadilan sosial bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang identitas mereka. Pendidikan dengan pendekatan multikultural sangat tepat diterapkan di Indonesia untuk pembentukan karakter generasi bangsa yang kokoh berdasar pengakuan keragaman. Kemudian dalam penerapannya harus luwes, bertahap, dan tidak indoktriner menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Pendekatan multikulturalisme erat dengan nilai-nilai dan pembiasaan sehingga perlu wawasan dan pemahaman yang mendalam untuk diterapkan dalam pembelajaran, teladan, maupun perilaku harian yang mampu mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya kreatif.

Kemajemukan dan keberagaman budaya masih kurang dalam praktik pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan saat ini tidak dirancang untuk menangani atau mengatasi masalah yang disebabkan oleh perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan, dan kesalahpahaman budaya atau benturan antar golongan dan kepentingan. Pendidikan multikultural dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau tidak tertulis dalam kurikulum. Namun, pendidikan dapat memasukkan multikulturalisme ke dalam mata pelajaran yang sesuai, seperti PKN dan mata pelajaran IPS.

Berdasarkan uraian di atas profil Pelajar Pancasila merupakan keharusan namun pendidikan multikultural belum secara eksplisit tertuang dalam pendidikan di Indonesia, untuk itu perlu adanya analisis kebijakan pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila. Analisis kebijakan

perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi bagaimana pendidikan multikultural di Indonesia dan juga mengetahui apakah pendidikan multikultural dapat menjadi penguatan Profil Pelajar Pancasila yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan**

Pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

### **1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional.**

Tujuan pendidikan nasional adalah bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran serta proses evaluasi harus mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila.

### **2. Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024**

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 bahwa pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Kompetensi yang dimiliki pelajar Pancasila yaitu kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila mempunyai enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan

berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

### **3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003**

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 mulai butir (1) sampai dengan butir (6) menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan Pendidikan Multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi Pasal 4 butir (1) bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Dalam Pasal 36 butir (3) berbunyi bahwa: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

### **4. Keputusan Pemerintah No 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka.**

Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-

royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pendidikan berbasis multikulturalisme, dimana dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di negeri kita harus membawa pesan dan berlandaskan pendidikan multikultural dan kurikulum pendidikan sebagai upaya pemerintah memberikan penguatan kepada terbentuknya masyarakat berbudaya dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## **B. Analisis Pendidikan Multikultural Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan literasi digital di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat implementasi program.

## **A. Menganalisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila**

Berikut analisis SWOT tentang pendidikan multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila:

### **1. Analisis *Strengths* (Kekuatan)**

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dengan disimbolkan (S) yang mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila:

#### **a. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat [S1]**

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan multikultural sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat mampu memberikan arahan dan motivasi kepada warga sekolah untuk melaksanakan pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila.

#### **b. Guru dan Orang Tua yang Paham akan Multikultural [S2]**

Guru dan orang tua yang paham akan multikultural akan mampu mempengaruhi siswa untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Guru yang memahami pendidikan multikultural akan bersikap tidak diskriminatif dan akan menjadi contoh kepada siswa di sekolah sehingga akan membantu mencapai profil pelajar Pancasila, dan orang tua yang paham akan pendidikan multikultural akan menjadi teladan bagi siswa sehingga tidak memandang orang lain secara diskriminatif dan hanya melihat dari ras, suku bangsa dan status sosial.

#### **c. Kurikulum yang Mendukung [S3]**

Kurikulum yang mendukung pendidikan multikultural di sekolah dapat mempengaruhi kebijakan dan

penerapan pendidikan multikultural di sekolah sehingga bisa menguatkan profil Pelajar Pancasila.

#### **d. Pengembangan Program Pendidikan Multikultural [S4]**

Program yang berkaitan dengan pendidikan multikultural dapat menjadi faktor kekuatan yang mempengaruhi kebijakan pendidikan multikultural di sekolah. Program yang telah dibuat dapat menjadi dasar sekolah untuk melaksanakan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila.

## **2. Analisis Weaknesses (Kelemahan)**

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) dengan disimbolkan (W) yang mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila:

### **a. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan Multikultural [W1]**

Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan multikultural akan membuat penerapan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila akan terhambat karena masih adanya sikap-sikap yang bertentangan dengan multikultural.

### **b. Keterbatasan Keterampilan Pihak Terkait [W2]**

Keterbatasan keterampilan dalam pendidikan multikultural dari tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila.

### **c. Kurangnya Kompetensi Guru [W3]**

Kurangnya kompetensi guru menjadi sangat penting sebagai motor pendidikan dengan pendekatan multikultural. Kurangnya kompetensi guru akan

menghambat penerapan pendidikan multikultural karena pendidikan multikultural merupakan kegiatan pembiasaan sehingga perlu wawasan dan pemahaman yang mendalam untuk diterapkan dalam pembelajaran, teladan, maupun perilaku harian yang mampu mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya kreatif.

**d. Resistensi Masyarakat terhadap Multikulturalisme [W4]**

Resistensi masyarakat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi penerapan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila karena masih ada beberapa masyarakat/etnis yang memiliki perasaan kesukuan/kemapanan yang berlebihan sehingga mendiskriminasi kelompok tertentu.

**3. Analisis *Opportunities* (Peluang)**

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) dengan disimbolkan (O) yang mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila:

**a. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guru [O1]**

Kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam penerapan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah terutama wawasan dan pemahaman yang mendalam guru untuk diterapkan dalam pembelajaran, teladan, maupun perilaku harian yang mampu mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya kreatif.

**b. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan Multikultural [O2]**

Perubahan kebijakan pemerintah dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah sebagai penguatan

profil pelajar Pancasila. Perubahan ini dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan pendanaan dalam pelatihan kompetensi guru dan warga sekolah dalam mendukung penerapan pendidikan multikultural di sekolah sebagai penguatan profil pelajar Pancasila.

**c. Keterlibatan Aktif Masyarakat [O3]**

Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penerapan pendidikan multikultural sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila.

**4. Analisis *Threats* (Ancaman)**

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) dengan disimbolkan (T) yang mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila:

**a. Penolakan dari Masyarakat tertentu [T1]**

Penolakan dari masyarakat/etnis tertentu yang memiliki nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara, sehingga pendidikan multikultural untuk penguatan profil pelajar pancasila sulit untuk diterapkan.

**b. Banyaknya Ideologi Alternatif yang Muncul [T2]**

Adanya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme dapat menjadi tantangan terhadap pendidikan multikulturalisme yang menguatkan profil Pelajar Pancasila.

**c. Arus Globalisasi dan Masuknya Budaya Asing [T3]**

Arus globalisasi dan masuknya budaya asing akan membuat para siswa akan tercermar pemahamannya dan bisa saja akan menghambat pendidikan multikulturalisme yang menguatkan profil Pelajar Pancasila.

**d. Media Informasi yang Menyangkan Perilaku tidak Terpuji [T4]**

Media informasi yang menyangkan perilaku agresif, diskriminasi, dan lain sebagainya akan menghambat pendidikan multikulturalisme yang menguatkan profil Pelajar Pancasila.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan dimatrikskan ke dalam tabel. Berikut ini tampilan dari Matriks SWOT pendidikan multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila:

**Tabel 1. Analisis Matriks SWOT**

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S1. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat	W1. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan Multikultural
S2. Guru dan Orang Tua yang Paham akan Multikultural	W2. Keterbatasan Keterampilan Pihak Terkait
S3. Kurikulum yang Mendukung	W3. Kurangnya Kompetensi Guru
S4. Pengembangan Program Pendidikan Multikultural	W4. Resistensi Masyarakat terhadap Multikulturalisme
PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O6. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guru	T1. Penolakan dari Masyarakat tertentu
O7. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan Multikultural	T2. Banyaknya Ideologi Alternatif yang Muncul
O8. Keterlibatan Aktif Masyarakat	T3. Arus Globalisasi dan Masuknya Budaya Asing
	T4. Media Informasi yang Menyangkan Perilaku tidak Terpuji

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan (*Strengths*) dan kolom Kelemahan (*Weakness*) diisi dengan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [S1] sampai dengan [S4] serta simbol [W1] sampai dengan [W4] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian juga halnya dengan kolom Peluang (*Opportunities*) dan kolom Tantangan (*Threats*) diisi dengan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi kebijakan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai dengan [O3] serta simbol [T1] sampai dengan [T4] pada uraian tahapan sebelumnya.

## **B. Mengembangkan Strategi, untuk Memaksimalkan Kekuatan dan Peluang, serta Mengatasi Kelemahan dan Ancaman**

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang ditampilkan dalam matriks dan penjelasan berikut:

**Tabel 2. Analisis Matriks Strategis sesuai SWOT**

<b>SWOT ANALISIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		S5. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat S6. Guru dan Orang Tua yang Paham akan Multikultural S7. Kurikulum yang Mendukung S8. Pengembangan Program Pendidikan Multikultural
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strenght-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
O4. Kebutuhan peningkatan kompetensi guru O5. Perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan multikultural O6. Keterlibatan aktif masyarakat	SO-9. Meningkatkan program pengembangan kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan. SO-10. Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan kurikuler SO-11. Mengembangkan program pendidikan multikultural SO-12. Melibatkan masyarakat dalam penerapan pendidikan multikultural	WO-9. Mengembangkan kompetensi guru sebagai agen/teladan pendidikan multikultural WO-10. Mengembangkan program pendidikan multikultural di masyarakat WO-11. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan multikultural

<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b>	<b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b>
T5. Penolakan dari masyarakat tertentu	ST-9. Mengembangkan kebijakan dan program filterisasi terhadap ideologi yang memecah persatuan	WT-10. Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan multikultural di sekolah, keluarga dan masyarakat
T6. Banyaknya ideologi alternatif yang muncul	ST-10. Meningkatkan edukasi pendidikan multikultural baik di sekolah dan masyarakat	WT-11. Meningkatkan edukasi pendidikan multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila.
T7. Arus globalisasi dan masuknya budaya asing	ST-11. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan multikultural.	WT-12. Pengembangan program multikulturalisasi dalam masyarakat
T8. Media informasi yang menayangkan perilaku tidak terpuji		

**C. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

2) Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

### 3) Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

Berikut merupakan hasil perhitungan skor Analisis SWOT Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila:

**Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT**

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>Kekuatan (<i>Stengths</i>)</b>					
1	Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat	4	0,15	3	0,44
2	Guru dan Orang Tua yang Paham akan Multikultural	4	0,15	4	0,59
3	Kurikulum yang Mendukung	3	0,11	3	0,33
4	Pengembangan Program Pendidikan Multikultural	3	0,11	3	0,33
<b>Sub Total</b>					<b>1,70</b>
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>					
1	Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan Multikultural	3	0,11	1	0,11
2	Keterbatasan Keterampilan Pihak Terkait	3	0,11	2	0,22
3	Kurangnya Kompetensi Guru	3	0,11	2	0,22
4	Resistensi Masyarakat terhadap Multikulturalisme	4	0,15	1	0,15
<b>Sub Total</b>					<b>0,70</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>27</b>	<b>1</b>		<b>2,41</b>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>					
1	Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guru	3	0,13	3	0,38
2	Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan Multikultural	3	0,13	3	0,38
3	Keterlibatan Aktif Masyarakat	4	0,17	3	0,50
<b>Sub Total</b>					<b>1,25</b>

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>					
1	Penolakan dari Masyarakat tertentu	4	0,17	2	0,33
2	Banyaknya Ideologi Alternatif yang Muncul	4	0,17	2	0,33
3	Arus Globalisasi dan Masuknya Budaya Asing	3	0,13	3	0,38
4	Media Infomasi yang Menayangkan Perilaku tidak Terpuji	3	0,13	3	0,38
<b>Sub Total</b>					<b>1,42</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>		<b>24</b>	<b>1</b>		<b>2,67</b>

- 4) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi Strength-Opportunities dengan nilai 2.95. Sehingga strategi pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah Strategi SO (*Strength-Opportunities*).
- 5) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Strategi SO:</b> $1.70 + 1.25 = 2.95$	<b>Strategi WO:</b> $0.70 + 1.25 = 1.95$
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>	<b>Strategi ST:</b> $1.70 + 1.42 = 2.12$	<b>Strategi WT:</b> $0.70 + 1.12 = 2.12$

**Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi**

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritas faktor, diketahui bahwa **Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)** merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam

mengembangkan pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Meningkatkan program pengembangan kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan.	a. Pelatihan kepemimpinan b. Kolaborasi dengan pihak terkait c. Penelitian dan evaluasi kebijakan
2	Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan kurikuler	a. Penyusunan kurikulum berbasis pendidikan multikultural b. Pengembangan metode pembelajaran interaktif c. Pelatihan guru dalam implementasi pendidikan multikultural
3	Mengembangkan program pendidikan multikultural	a. Pengembangan program pendidikan multikultural b. Pelatihan dan workshop pendidikan multikultural c. Investasi dalam penelitian dan pengembangan
4	Melibatkan masyarakat dalam penerapan pendidikan multikultural	a. Program kolaborasi b. Sosialisasi pentingnya multikultural c. Kolaborasi dengan pemerintah

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 3.

### 1) Strategi meningkatkan program pengembangan kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan

Strategi meningkatkan program pengembangan kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan bisa berupa pelatihan kepemimpinan. Mengadakan pelatihan kepemimpinan terkait penerapan multikultural di sekolah bagi kepala sekolah dapat membantu pemimpin memahami tentang pentingnya pendidikan multikultural untuk diimplementasikan di sekolah. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan akan dapat membantu pimpinan memahami: (1) kejelasan tugas dan pertanggungjawaban, (2) pembagian kerja berdasarkan prinsip *the right man on the right place*, (3) kesatuan arah kebijakan, (4) teratur, (5) disiplin, (6) adil (seimbang), (7) inisiatif, (8) semangat kebersamaan, (9) sinergis, dan (10) ikhlas. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan akan membentuk dan mengembangkan budaya organisasi berbasis pendidikan multikultural, pemahaman yang dimiliki oleh pimpinan sangat mempengaruhi personel dan peserta didik sehingga budaya organisasi sekolah perlu dibentuk dan dikembangkan secara terencana.

Kesadaran dan kepedulian pimpinan sekolah terhadap multikultural dan kelompok minoritas yang ada di sekolah akan mempengaruhi arah kebijakan penerapan pendidikan

multikultural. Pemimpin juga harus kreativitas dan inovasi, namun pemimpin tidak akan bisa berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan, regulasi dan perangkat-perangkat lainnya. Disamping itu, campur tangan dari pihak-pihak yang berkuasa juga ikut mempengaruhi kreatifitas pimpinan sekolah dan pendidik. Kepala sekolah sebagai pelopor pendidikan multikultural dan sebagai pemegang peran kepemimpinan juga harus memastikan bahwa guru memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada para siswanya dan pemimpin harus menerapkan kebijakan, peraturan, dan inisiatif-inisiatif yang mendorong budaya multikultural yang bukan terbatas pada dokumendokumen tertulis namun juga meliputi penegakan aturan-aturan. Proses ini memerlukan peran kepemimpinan kepala sekolah yang berkarakter dan memiliki pengalaman serta pemahaman multikultural yang mendalam.

Dengan adanya pelatihan kepemimpinan maka pelaksanaan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila dan dengan adanya pemimpin yang terlatih akan dapat memastikan warga sekolah memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada para siswanya dan pemimpin harus menerapkan kebijakan, peraturan, dan inisiatif-inisiatif yang mendorong penerapan pendidikan multikultural di sekolah.

Selain pelatihan kepemimpinan, perlu juga melakukan penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap pendidikan multikultural yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan multikultural yang diinginkan. Hasil penelitian dan evaluasi ini harus digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada kebijakan yang ada dan untuk memperbaiki program-program pendidikan multikultural. Dalam

pembaharuan kebijakan dan program pendidikan, kegiatan evaluasi terhadap program yang sedang maupun telah berjalan sebelumnya, perlu dilakukan dengan baik, dengan menjadikan hasil evaluasi program sebelumnya menjadi acuan yang tidak dapat ditinggalkan.

Mayoritas guru relatif masih belum kenal dengan pendidikan Multikultural. Oleh sebab itu, sosialisasi dalam bentuk seminar, diskusi, penelitian workshop, curah pendapat dan lain-lain penting untuk dilakukan. Pendidikan masyarakat juga harus dikelola dengan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Sebelum melakukan evaluasi kebijakan pendidikan multikultural, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah. Tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*). Evaluasi *context* yang menghasilkan informasi mengenai macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya. Evaluasi input, menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan. Evaluasi *process*, menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan. Evaluasi *product*, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai.

Dengan adanya penelitian dan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan kebijakan dan penerapan pendidikan multikultural yang sudah teruji dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah sebagai penguatan profil pelajar Pancasila.

## 2) Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan kurikuler

Penyusunan kurikulum berbasis pendidikan multikultural akan menjadikan pendidikan multikultural wajib dilaksanakan disekolah. Pendidikan multikultural dalam kurikulum ditekankan melalui program kurikuler PPKn di sekolah ntuk mengembangkan nilai-nilai torleransi, menyatukan perbedaan, menghargai hak asasi manusia dalam wadah “Bhineka Tunggal Ika”. Dikolaborasi dengan metode penyampaian materi yang interaktif, disesuaikan dengan igeneration. Kemudian membangun paradigma sekolah inklusif dengan mengembangkan kurikulum syarat dengan nilai yang mengedepankan penghargaan terhadap menghargai hak asasi manusia. Visi dan misi sekolah dikembangkan dengan komitmen untuk tidak mendiskriminasi suatu golongan tertentu. Tujuan utama pendidikan multikultural menjadikan generasi muda menjadi agen peredam konflik antar golongan (SARA) yang disusupin gerakan radikalisme yang kerap terjadi di Indonesia. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi teladan untuk mampu menerima perbedaan dengan penuh toleransi. Kemudian diimbangi dengan pemahaman konsep multikultur secara komperhensif. Dengan demikian, perbedaan suku, adat, ras, dan agama tidak menjadi celah untuk gerakan radikalisme karena sudah dibekali sikap untuk saling menghormati, toleran, tulus terhadap keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Kurikulum pendidikan multikultural membangun kesadaran setiap siswa tentang kenyataan kemajemukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa diharapkan peka dan menyadari bahwa bangsa ini dibangun di atas landasan keberagaman agama, etnik, ras, budaya, dan adat-istiadat, yang menuntut kesediaan semua pihak untuk saling menerima keberadaan yang lain. Struktur negara-bangsa ini bercorak multikultural, sehingga setiap elemen

bangsa harus bersedia hidup secara konsisten. Karenanya, implemetasi kurikulum dalam kerangka pengembangan budaya sekolah hendaknya mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bersatu dalam keberagaman dan beragam dalam kesatuan. Model kurikulum yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan multikultural menggunakan model tematik. Dengan menggunakan model tematik, peserta didik dapat memilih tema-tema mana yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi multikultural yang ada di Indonesia.

Kurikulum pendidikan multicultural bertujuan guna mempermudah siswa ketika memahami makna dari pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Tujuan lain dari adanya kurikulum pendidikan multikultural guna meningkatkan kesadaran peserta didik dalam berperilaku dan menyikapi sebuah kebijakan secara demokratis, pluralis dan humanis.

Kurikulum pendidikan multikultural menjadi sangat penting terutama untuk menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan memperkuat basis solidaritas sosial. Penguatan nilai-nilai multikultural pada pembelajaran itu mutlak diperlukan untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi potensi konflik dalam masyarakat majemuk. Sebagai suatu bentuk strategi membangun keadaban, kurikulum multikultural juga dimaksudkan untuk pembinaan sikap mental kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan siswa dan pada akhirnya dapat penguatkan profil pelajar Pancasila.

### **3) Mengembangkan program pendidikan multikultural**

Pengembangan program pendidikan multikultural di masyarakat dapat membuat penerapan pendidikan multikultural berjalan dengan baik. Pendidikan multikultural sebagai program dalam aktualisasinya perlu diimplementasikan melalui pembelajaran multikultural

berbasis nilai-nilai kebangsaan. Program ini dirancang sebagai salah satu upaya sekolah sebagai institusi untuk berfungsi dalam menghasilkan anak bangsa yang menghargai dan menghormati keberbedaan serta dapat berinteraksi secara cerdas dalam kehidupan multikultural masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi.

Dengan adanya program menampilkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah subyek belajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya

#### **4) Melibatkan masyarakat dalam penerapan pendidikan multikultural**

Melibatkan masyarakat atau mengadakan kerjasama antar sekolah dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pendidikan yang ideal bagi masyarakat, dapat membantu dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Kolaborasi antar personil sekolah dengan orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, komite sekolah, melalui pertemuan orang tua/wali siswa dilakukan dalam rangka sosialisasi penyamaan gerak langkah untuk menerapkan pendidikan multikultural dapat menjadi penguatan efektif, apalagi jika ada dukungan orang tua/wali siswa serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap pendidikan multikultural yang dikembangkan di sekolah sehingga menjadi rutinitas kegiatan di rumah dan di masyarakat.

Kolaborasi dengan pihak terkait harus dimulai dengan personil sekolah dan guru untuk memahami latar belakang siswa dan lingkungannya dengan baik, menerima secara terbuka dan dapat berkolaborasi dengan semua pihak terkait. Kolaborasi antar personil sekolah dengan orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, komite sekolah, melalui pertemuan orang tua/wali siswa perlu dilakukan dalam rangka sosialisasi penyamaan gerak langkah untuk mengembangkan mengembangkan pendidikan multikultural.

Kolaborasi akan memudahkan penerapan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat dan secara langsung akan mengubah pemahaman pihak terkait tentang pendidikan multikultural.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis SWOT pendidikan multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan multikultural didasarkan pada faktor kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat mampu memberikan arahan dan motivasi kepada warga sekolah untuk melaksanakan pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila.
2. Pemahaman guru dan orang tua tentang pendidikan multikultural akan menjadi contoh kepada siswa di sekolah sehingga akan membantu mencapai profil pelajar Pancasila, dan orang tua yang paham akan pendidikan multikultural akan menjadi teladan bagi siswa sehingga tidak memandang orang lain secara diskriminatif dan hanya melihat dari ras, suku bangsa dan status sosial. Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan multikultural akan membuat penerapan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil

Pelajar Pancasila akan terhambat karena masih adanya sikap-sikap yang bertentangan dengan multikultural.

3. Pengembangan kurikulum dan program pendidikan multikultural di sekolah dapat mempengaruhi kebijakan dan penerapan pendidikan multikultural di sekolah sehingga bisa menguatkan profil Pelajar Pancasila.
4. Keterbatasan keterampilan dalam pendidikan multikultural dari tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan pendidikan multikultural menjadi sangat penting sebagai motor pendidikan dengan pendekatan multikultural. Kurangnya kompetensi guru akan menghambat penerapan pendidikan multikultural karena pendidikan multikultural merupakan kegiatan pembiasaan yang harus dilakukan sehingga perlu wawasan dan pemahaman guru yang mendalam untuk diterapkan dalam pembelajaran, teladan, maupun perilaku harian yang mampu mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya kreatif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penerapan pendidikan multikultural sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila.

Kesimpulan ini dapat dijadikan landasan penyusunan strategi pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang efektif, serta meningkatkan pemahaman multikulturalisme di Indonesia.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT pendidikan multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan program pengembangan kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan bisa berupa pelatihan kepemimpinan. Mengadakan pelatihan kepemimpinan terkait penerapan multikultural di sekolah bagi kepala sekolah dapat membantu pemimpin memahami tentang pentingnya pendidikan multikultural untuk diimplementasikan di sekolah, dengan adanya pelatihan kepemimpinan maka pelaksanaan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila dan dengan adanya pemimpin yang terlatih akan dapat memastikan warga sekolah memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada para siswanya dan pemimpin harus menerapkan kebijakan dan peraturan yang mendorong penerapan pendidikan multikultural di sekolah.
2. Melaksanakan penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap pendidikan multikultural yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan multikultural yang diinginkan. Hasil penelitian dan evaluasi ini harus digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada kebijakan yang ada dan untuk memperbaiki program-program pendidikan multikultural, dengan adanya penelitian dan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan kebijakan dan penerapan pendidikan multikultural yang sudah teruji dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah sebagai penguatan profil pelajar Pancasila.
3. Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan kurikuler, penyusunan kurikulum berbasis pendidikan

multikultural akan menjadikan pendidikan multikultural wajib dilaksanakan disekolah. Kurikulum pendidikan multikultural menjadi sangat penting terutama untuk menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan memperkuat basis solidaritas sosial. Penguatan nilai-nilai multikultural pada pembelajaran itu mutlak diperlukan untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi potensi konflik dalam masyarakat majemuk.

4. Mengembangkan pendidikan multikultural di masyarakat dapat membuat penerapan pendidikan multikultural berjalan dengan baik, dengan adanya program menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah subyek belajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya.
5. Melibatkan masyarakat atau mengadakan kerjasama antar pihak sekolah dengan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan yang ideal di tengah masyarakat, dapat membantu dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, dengan kolaborasi akan memudahkan penerapan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat dan secara langsung akan mengubah pemahaman pihak terkait tentang pendidikan multikultural.

Rekomendasi ini dapat membantu dalam merancang dan menerapkan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil Penlajar Pancasila yang efektif, serta meningkatkan pemahaman multikulturalisme di Indonesia.

**Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif****A. Pendahuluan****1. Latar Belakang dan Permasalahan**

**D**i Indonesia sejak akhir 1990-an pada kalangan profesional pendidikan luar biasa mulai ramai membicarakan tentang pendidikan inklusif, dalam bentuk seminar-seminar, diskusi panel, dan sejenisnya. Beberapa di antaranya seminar dan workshop difabel, telah menghasilkan “**Deklarasi Malioboro**”, yang intinya meyakini bahwa sistem pendidikan inklusif paling tepat dan perlu segera direalisasikan (Yogyakarta, 17 maret 2001). Di Bandung pada pertengahan Mei 2002, kaum difabel menggelar unjuk rasa di hadapan DPRD setempat, salah satu tuntutan adalah penghapusan sistem eksklusif (SLB) diganti dengan sekolah inklusif. Pada sisi lain kalangan praktisi maupun birokrasi masih menampakkan adanya dualisme antara yang ingin berubah (progresif) dan kalangan yang ingin aman-aman saja (konservatif), sehingga cenderung menimbulkan polemik dan perdebatan yang tiada akhir, ironinya hal tersebut justru terjadi pada masyarakat pendidikan luar biasa sendiri.

Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sejak 2012 telah melakukan gerakan nasional pendidikan inklusif, dengan tujuan agar semua lembaga pemerintah dan masyarakat mengenal, memahami, dan mengimplementasikan pendidikan inklusif. Bentuk nyata gerakan ini adalah Direktorat PKLK memberikan stimulan dalam bentuk bantuan pemerintah (Banper) kepada kelompok

kerja (Pokja) Pendidikan inklusif provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya Pokja inklusif penerima Bamper tersebut menggerakkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mulai dari sosialisasi, penguatan regulasi, pembentuk plotting sekolah inklusif, peningkatan kompetensi Pokja dan guru di sekolah inklusif, penguatan pangkalan data dan informasi dan ujungnya deklarasi sebagai provinsi, kabupaten/kota inklusif. Dampak dari gerakan ini sangat menggembirakan, pada saat ini lebih dari 12 provinsi dan 113 kabupaten/kota telah mendeklarasikan sebagai provinsi, kabupaten/kota inklusif. Sekalipun sistem pendidikan inklusif telah dideklarasikan dan menjadi komitmen bangsa, tidak berarti bahwa sistem pendidikan inklusif di Indonesia dengan serta merta dapat berjalan seperti yang diharapkan, dan agar tidak tercabut dari akarnya maka aspek historis pendidikan luar biasa di Indonesia perlu dipertimbangkan.

Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. David (2009, p.45) berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah.

Di Asia, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (Kuyini & Desai, 2007; Wu-Tien, Ashman & Yong-Wook, 2008, pp. 14-15).

Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) No. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler secara bersama-sama dengan teman seusianya (Winter, 2006).

Sebagaimana tersurat pada Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan, bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Pada permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 2, disebutkan bahwa pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama ini ada tiga lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. SLB adalah sekolah khusus yang pada awal berdirinya menyelenggarakan pendidikan hanya bagi peserta didik dengan jenis kelainan yang sama, (seperti: SLB/A, SLB/B, SLB/C dst). SDLB adalah sekolah dasar khusus yang menampung berbagai jenis kelainan. Adapun sekolah terpadu adalah sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana prasarana pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama bagi seluruh peserta didik.

Lokasi SLB, SDLB dan Sekolah Terpadu pada umumnya berada di kota/kabupaten, padahal ABK tersebar hampir di seluruh daerah kecamatan dan desa, tidak hanya di kota/kabupaten. Akibatnya banyak ABK yang tidak dapat bersekolah, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya

lemah. Kondisi ini secara nyata menjadi kendala Pemerintah dalam upaya menyukseskan program penuntasan wajib belajar bagi anak-anak bangsa.

Sejak tahun 1997 Indonesia telah “meratifikasi” kesepakatan Salamanca 1994 tentang pendidikan inklusif, selanjutnya pada tahun 1998 s.d 2001 Balitbang Dikbud melakukan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di 7 SD di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Hasil uji coba tersebut selanjutnya oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), dipergunakan sebagai dasar sosialisasi dan praktik implementasi pendidikan inklusif di Indonesia (Budiyanto, 2005). Pada akhir Tahun 2008 di Indonesia tercatat baru memiliki 814 sekolah inklusif yang melayani sekitar 15.181 ABK (Dir PSLB, 2008).

Kondisi ini masih jauh dari prevalensi jumlah ABK yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Sebagai wujud besarnya perhatian Pemerintah dan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di Wilayah kerja masing-masing.

**Perlunya dilakukan analisis kebijakan pendidikan inklusi** dikarenakan pentingnya peniadaan diskriminasi pendidikan bagi populasi individu berkekhurusan. Kebijakan pendidikan inklusi diakui oleh Pemerintah sampai dengan saat ini tidak semua sekolah umum mau menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Alasan yang dikemukakan karena tidak ada guru khusus yang menanganinya mereka dan tidak ada fasilitas yang memadai. Keengganan untuk mengakomodasi anak berkebutuhan khusus disebabkan tidak adanya kesadaran dan

minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan inklusi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusi dapat **memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat karena merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.**

## **2. Landasan Hukum Kebijakan**

Kebijakan tentang implementasi pendidikan inklusi bukan semata-mata atas pertimbangan manusia saja tetapi diperlukan landasan yang kuat. Adapun landasan Hukum dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi meliputi:

### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Abdulrahman, 2003). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi politik, dsb. Walaupun beragam namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan. Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu

berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama, tetap dalam kesatuan. Hal ini terus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi yang nampak atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Inklusi**

NO	DOKUMEN KEBIJAKAN
1	<b>Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen):</b> Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
2	<b>Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak:</b> Pasal 48 berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal Sembilan tahun untuk semua anak, pasal 49 negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan
3	<b>Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional:</b> pasal 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu., ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus., ayat (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.,

---

ayat (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Kemudian pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Selanjutnya pasal 12 ayat (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Dan pasal 32 ayat (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, ayat (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi

- 
- 4 **Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:** Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SDLB, SMPLB, SMALB. Kelima, surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 perihal pendidikan inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya empat sekolah, yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK.

- 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
-

### c. Landasan Empiris

Penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara–negara barat sejak tahun 1980-an. Di antaranya adalah penelitian berskala besar yang dipelopori oleh The National Academy of Sciences (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Dari temuan ini direkomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan secara terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick,1982). Beberapa pakar mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).

Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (teknik statistik yang memadukan data kuantitatif dari beragam penelitian sejenis untuk temuan yang lebih akurat). Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya.

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan Pendidikan inklusi di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan

ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat implementasi program terutama yang terkait dengan kebijakan pendidikan inklusi.

Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusi di Indonesia :

### **1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan**

Berikut adalah **faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusi, yang disimbolkan dengan [S1] sampai dengan [S5] :

#### **a. Kurikulum [S1]**

Pada prinsipnya kurikulum pendidikan inklusif sama dengan kurikulum reguler. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tidak ada kurikulum khusus, untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum yang mendukung pendidikan inklusi dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusi. Kurikulum yang mendukung pendidikan inklusi akan memastikan bahwa siswa mendapatkan edukasi yang memadai tentang pendidikan inklusi.

#### **b. Guru atau Tenaga Pendidik [S2]**

Guru atau tenaga pendidik yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya. Selain itu juga, guru sebagai pelayan yang akan memberikan pelayanan kepada siswa sehingga guru harus lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa.

### c. Siswa atau Peserta Didik [S3]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2,3 dan 4 mendefenisikan anak berkebutuhan khusus sebagai (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selain cakupan tersebut di atas, konsep PDBK dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PDBK yang bersifat sementara (*temporer*) dan PDBK yang bersifat menetap (*permanent*). Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pendidikan inklusi terhadap siswa yang berkebutuhan khusus harus dilakukan penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa yang inklusif, penerimaan jumlah siswa inklusif yang cenderung sedikit dan pemberian les tambahan kepada siswa inklusif perlu dilakukan.

### d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [S4]

Sarana dan Prasarana Sekolah inklusif pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Fasilitas yang memadai, seperti penyediaan buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif, disamping itu juga ruang kelas yang nyaman bagi siswa inklusif akan mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusi. Fasilitas yang memadai akan memudahkan orang untuk mengadopsi pembelajaran dan meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan inklusi.

#### e. **Biaya [S5]**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan sekolah.

Berikut adalah beberapa **faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusi, yang disimbolkan dengan [W1] sampai dengan [W5] :

##### a. **Kurikulum [W1]**

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek kurikulum meliputi :

- 1) Sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan;
- 2) Dalam mengembangkan kurikulum sekolah belum memaksimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam membantu mengevaluasi serta mereviu kurikulum yang dibuat;
- 3) Dalam penerapan kurikulum masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga sekolah mengambil langkah tambahan khusus bagi siswa inklusif;
- 4) Belum tim khusus untuk pembuatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa inklusif.

##### b. **Guru atau Tenaga Pendidik [W2]**

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek guru atau tenaga pendidik meliputi :

- 1) Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan inklusif;
- 2) Tidak ada guru pendamping khusus yang mendampingi anak berkebutuhan khusus;
- 3) Tidak ada pembinaan bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan ini hanya sebatas kepala sekolah

**c. Siswa atau Peserta Didik [W3]**

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek siswa atau peserta didik meliputi :

- 1) Siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif;
- 2) Kelalaian siswa inklusif dalam mengikuti kelas tambahan.

**d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [W4]**

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa inklusif;
- 2) Fasilitas terbatas bagi siswa inklusif

**e. Biaya [W5]**

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek biaya meliputi:

- 1) Penggunaan biaya pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus;
- 2) Biaya dari sekolah yang relatif kecil untuk pendidikan inklusif.

**2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman**

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*)** dan mempengaruhi kebijakan terkait pendidikan inklusif, yang disimbolkan dengan [O1] sampai dengan [O5] :

**a. Kurikulum [O1]**

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek kurikulum meliputi :

- 1) Uji coba sekolah inklusif berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum pendidikan inklusif

2) Meningkatkan kendali mutu pelaksanaan kurikulum sebagai upaya menjamin agar kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan

3) Sekolah bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa

**b. Guru atau Tenaga Kependidikan [O2]**

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek guru atau tenaga kependidikan meliputi :

1) Kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan;

2) Pertemuan rutin dengan orang tua siswa

**c. Siswa atau Peserta Didik [O3]**

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek siswa atau peserta didik meliputi:

1) Sekolah mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif

2) Kesempatan bagi siswa yang *low* untuk naik kelas (kenaikan kelas otomatis)

**d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [O4]**

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana meliputi :

1) Biaya dari pemerintah untuk pendidikan inklusif

2) Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah

**e. Biaya [O5]**

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek biaya meliputi:

1) Pelaksanaan pendidikan inklusif yang berkelanjutan

2) Biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi ancaman** (*threats*) dan mempengaruhi kebijakan terkait pendidikan inklusif, yang disimbolkan dengan [T1] sampai dengan [T5] :

**a. Kurikulum [T1]**

Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan inklusif menjadi ancaman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pendidikan inklusif.

**b. Guru atau Tenaga Kependidikan [T2]**

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek guru atau tenaga kependidikan meliputi :

- 1) Terbatasnya pemahaman guru atau tenaga kependidikan terhadap konsep pendidikan inklusif
- 2) Tidak ada guru pendamping khusus dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus

**c. Siswa atau Peserta Didik [T3]**

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek siswa atau peserta didik meliputi:

- 1) Siswa belum memahami konsep pendidikan inklusif secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya.
- 2) Kerja sama orang tua dan siswa yang kelihatannya kurang.

**d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [T4]**

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah
- 2) Biaya dari pemerintah

**e. Biaya [T5]**

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek biaya meliputi:

- 1) Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah
- 2) Biaya dari pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan literasi digital, yang memasukkan semua faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom matriks yang sesuai, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.

### 3. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak matriks yang sesuai.

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan (*Strengths*) dan kolom Kelemahan (*Weakness*) diisi dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari kebijakan pendidikan inklusif yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [S1] sampai dengan [S5] serta simbol [W1] sampai dengan [W5] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian juga halnya dengan kolom Peluang (*Opportunities*) dan kolom Tantangan (*Threats*) diisi dengan faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi kebijakan pendidikan inklusif yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai dengan [O5] serta simbol [T1] sampai dengan [T5] pada uraian tahapan sebelumnya.

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S5. Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus.	W5. Sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan.
S6. Tenaga Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya.	W6. Tidak ada pembinaan bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan inklusif ini hanya sebatas kepala sekolah .

<p>S7. Penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa inklusif.</p> <p>S8. Buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman.</p> <p>S9. Adanya biaya dari pemerintah.</p>	<p>W7. Siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif</p> <p>W8. Sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa .</p> <p>W9. Penggunaan biaya Pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus.</p>
<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</b>
<p>O14. Uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif,</p> <p>O15. Kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan.</p> <p>O16. Sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.</p> <p>O17. Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah.</p> <p>O18. Biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif.</p>	<p>T5. Terbatasnya pemahaman konsep Pendidikan inklusif.</p> <p>T6. Tidak ada guru pendamping khusus.</p> <p>T7. Siswa belum memahami konsep Pendidikan inklusif secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya.</p> <p>T8. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah.</p> <p>T9. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten</p>

**Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan matriks analisis SWOT pada Gambar 1, maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan pendidikan inklusif.

#### 4. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) adalah strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang telah dimiliki, berupa :

- 1) **Strategi SO-1.** Perlu adanya diversifikasi kurikulum mengingat keberagaman karakteristik siswa atau peserta didik, daerah dan sekolah sehingga cara penyampaian dan pencapaian kompetensi harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah. Diverifikasi kurikulum juga perlu dilaksanakan untuk melayani peserta didik dari daerah terpencil atau terbelakang. Strategi ini diperoleh dengan **memanfaatkan peluang** adanya ”uji coba sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum pendidikan inklusif”. Hal ini bertujuan untuk **meningkatkan kekuatan** ”kualitas pelayanan terhadap siswa yang optimal”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S1] & [O1] pada Gambar 1. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung

pendidikan inklusif dapat memanfaatkan peluang ini untuk diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Program diversifikasi kurikulum dilaksanakan untuk melayani keberagaman kemampuan peserta didik.

**2) Strategi SO-2. Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi sekolah dan tenaga pendidikan.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "Tenaga Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [O1] pada Gambar 1. Pemberian pelatihan pendidikan inklusif bagi sekolah dan tenaga kependidikan bertujuan agar mereka dapat terampil dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas sekolah terutama yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

**3) Strategi SO-3. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa inklusif", hal ini sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S3] & [O3] pada Gambar 1. Strategi ini berfokus pada identifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif. Identifikasi anak dimaksudkan

sebagai suatu upaya seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan/penyimpangan dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi dimaksudkan untuk memahami keuanggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

- 4) Strategi SO-4. Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S4] & [O3] pada Gambar 1. Strategi ini berupaya bagaimana sekolah inklusif dapat menyediakan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi anak inklusif. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi

kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

- 5) **Strategi SO-5. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pendidikan inklusif.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif". Hal ini untuk meningkatkan kekuatan "adanya biaya dari pemerintah", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S5] & [O5] pada Gambar 1.

#### **b. Strategi ST (*Strengths-Threats*)**

- 1) **Strategi ST-1. Meningkatkan Pemahaman Konsep tentang Kurikulum Pendidikan Inklusif yang disusun berdasarkan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan "Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus". Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman "Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan inklusif", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S1] & [T1] pada Gambar 1. Pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya terhadap pemahaman sekolah maupun orang tua terhadap konsep kurikulum pendidikan inklusi seperti dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan workshop yang terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif terutama ditinjau dari kurikulum. Dengan kegiatan tersebut maka terbatasnya pemahaman konsep tentang pendidikan inklusif dapat teratasi sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya.

- 2) **Strategi ST-2. Mengembangkan Strategi Pembelajaran yang Berkelanjutan.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Tenaga Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Kebijakan Pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [T4] pada Gambar 1. Tenaga Pendidik yang berdedikasi dapat mengembangkan strategi pembelajaran terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program-program alternatif, penyesuaian program-program yang telah ada dengan kebijakan baru, serta pengembangan program-program yang berkelanjutan dengan konteks pendidikan inklusif. Program-program tersebut harus memiliki tujuan dan target yang jelas, serta terukur. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan kebijakan, program-program tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- 3) **Strategi ST-3. Memfasilitasi sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebaya yang non inklusif.** Strategi ini penting untuk dilakukan karena ternyata terdapat kekuatan yang perlu dimanfaatkan yaitu adanya “penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa inklusif”, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan menikmati layanan pendidikan yang sama dengan anak-anak non inklusif tanpa adanya diskriminasi. Adanya strategi ini untuk mengatasi ancaman “tidak adanya guru khusus” untuk memberikan layanan pendidikan secara optimal

sehingga menghambat tercapainya kualitas pendidikan bagi semua anak Indonesia termasuk anak inklusif. Strategi pada ST-3 ini merupakan strategi memanfaatkan kekuatan yang terdapat pada analisis SWOT dengan simbol [S3] untuk mengatasi ancaman terutama yang disimbolkan [T2] (Gambar 1). Program yang dapat dikembangkan melalui strategi ini diantaranya sekolah reguler dapat membentuk layanan pendidikan secara terintegrasi atau terpadu dengan anak normal dengan sistem 10 % jumlah anak inklusif di kelas bersama anak non inklusif dalam bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Oleh karena itu perlu juga program mengurangi beban guru di kelas yang memiliki anak inklusif sehingga guru memiliki waktu yang lebih untuk berperan sebagai guru pembimbing anak inklusif. Kondisi ini akan memberikan rasa percaya diri anak inklusif karena mendapatkan hak dihargai dan mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak normal. Dengan demikian meskipun tidak ada guru pendamping khusus untuk anak inklusif tetapi dengan adanya kekuatan penerimaan anak non inklusif terhadap anak inklusif di sekolah reguler, maka penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif secara terpadu dapat diselenggarakan di sekolah reguler untuk meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia tanpa ada yang terkecuali.

- 4) **ST-4 Meningkatkan aksesibilitas pusat sumber belajar sebagai sistem pendukung pembelajaran bagi anak inklusif.** Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuatan adanya ”Buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman” untuk dapat mengatasi ancaman tidak ada guru pendamping khusus” bagi anak-anak inklusif sesuai yang disajikan

pada matriks SWOT yang disimbolkan [S4] dan [T2] pada Gambar 1. Adanya buku dan ruang kelas yang memadai dan nyaman untuk anak-anak inklusif menjadi sumber belajar yang representatif bagi mereka sehingga dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak berkebutuhan khusus, termasuk peningkatan kemampuan akademik anak mereka. Oleh karena itu program yang dapat dikembangkan melalui strategi ini diantaranya memberikan kemudahan akses bagi anak inklusif yang tidak terlalu jauh antara ruang sumber belajar dengan ruang guru pembimbing, serta mengembangkan fasilitas sumber belajar yang sesuai kebutuhan anak inklusif yang memiliki unsur digitalisasi. Dengan demikian meskipun tidak tersedia guru khusus bagi anak-anak inklusif dalam membimbing mereka untuk belajar, namun anak-anak inklusif memiliki motivasi belajar dan berkembang secara akademik dan terangsang sikap aktualisasinya dengan tersedianya buku dan ruang kelas yang memadai khusus untuk mereka.

#### **5) ST-5 Mengoptimalkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif.**

Strategi ini dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan "adanya biaya pemerintah" untuk membiayai pendidikan sehingga menghadirkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan pada analisis SWOT khususnya simbol [S5] bertujuan untuk menghadapi ancaman "perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten" [T5]. Jadi adanya perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi baik dari sisi anggaran maupun sistem pendidikan maka perubahan itu dapat diatasi dengan dengan memanfaatkan adanya biaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Adaptasi

terhadap berbagai perubahan kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan adanya anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan program yang dapat memperkuat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti penyediaan sarana pra sarana pendidikan, media, buku dan perpustakaan berbasis digital, dan peningkatan kompetensi guru.

**c. Strategi WO (*Weakness-opportunities*)**

- 1. Strategi WO-1 Revitalisasi kurikulum untuk model pengembangan sekolah terintegrasi pendidikan anak inklusif.** Strategi ini diperoleh untuk memanfaatkan adanya peluang “uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan Sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan, sesuai dengan yang disajikan pada analisis SWOT yang disimbolkan [W1] dan [O1] pada Gambar 1. Strategi ini akan membantu mengatasi sekolah yang belum melakukan review kurikulum sehingga dengan adanya uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan akan mendorong sekolah harus melakukan terlebih dahulu revisi kurikulum yang dapat menjamin kualitas pendidikan anak inklusif sama halnya dengan anak non inklusif. Program yang dapat dikembangkan dari strategi ini yaitu membuat kurikulum modifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa namun terintegrasi dengan kurikulum bagi siswa non inklusif.

2. **Strategi WO-2. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan”. Dengan demikian strategi ini dapat mengatasi kelemahan ”Penggunaan biaya Pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolakan [W5] dan [O2] pada Gambar 1. Masyarakat dan orang tua siswa merupakan mitra yang penting bagi pemerintah dalam menyukkseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas dan setara dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Kurangnya anggaran yang menyentuh kebutuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat mempengaruhi kinerja sekolah dalam memperkuat pendidikan anak-anak inklusif seperti ketersediaan sarana prasarana bagi anak inklusif, penguatan kompetensi guru dan kesejahteraan guru khusus yang memberikan pembimbingan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. SeHINGA dengan strategi ini dapat digunakan untuk mengembangkan program kerjasama sekolah dan orang tua untuk terlibat dalam menyediakan sekolah yang nyaman bagi anak-anak inklusif.
3. **Strategi WO-3. Meningkatkan komunikasi siswa berkebutuhan khusus dengan siswa non inklusif.** Strategi ini diperoleh dengan adanya peluang “sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif”. Dengan adanya strategi ini dapat mengatasi adanya kelemahan siswa yang tidak memahami konsep pendidikan inklusif” yang sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W3] dan [O3] pada Gambar 1. Sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat mengembangkan program pembimbingan dan pendampingan anak inklusif untuk meningkatkan bakat yang mereka miliki sehingga siswa inklusif memiliki bakat khusus yang dapat memberikan peluang komunikasi bersama siswa non inklusif namun yang memiliki bakat yang sama. Dengan demikian siswa yang memiliki pemahaman yang kurang baik dan kurang menerima kehadiran anak-anak inklusif dapat diminimalisir. Pimpinan sekolah dan guru dapat bertindak yang sama baik terhadap siswa yang berkebutuhan khusus maupun yang normal dan membuat program ekstrakurikuler yang memberikan ruang yang sama antara siswa inklusif dengan non inklusif.

4. **Strategi WO-4. Meningkatkan kapasitas guru mengelola fasilitas sekolah yang dibutuhkan siswa.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “tenaga kependidikan yang terampil menjaga sekolah”. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengatasi masalah “sekolah yang belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa, sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan [W4] dan [O4] pada Gambar 1. Strategi ini dapat membantu sekolah untuk mengatasi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa inklusif. Kehadiran tenaga kependidikan yang terampil dalam menjaga fasilitas sekolah akan memperkuat dan memberikan pengetahuan bagi sekolah yang berkaitan apa saja kebutuhan atau fasilitas yang perlu disediakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus serta strategi menjaga fasilitas sekolah yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

5. **Strategi WO-5. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang biaya pendidikan relative murah di sekolah inklusif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Penggunaan biaya Pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan yang disajikan pada matriiks SWOT yang disimbolkan [W5] dan [O5] pada Gambar 1. Biaya pendidikan di sekolah inklusif sangat tergolong murah sehingga W5 terdapat kebutuhan siswa yang tidak tersentuh dan tidak terpenuhi oleh karena itu sangat perlu adanya keterlbatan masyarakat dan orang untuk terlibat juga dalam penanganan masalah biaya pendidikan yang belum menyentuh kebutuhan siswa inklusif. Strategi ini dapat dikembangkan melalui program dana BOS dan juga adanya dana komite sekolah yang sebagian besar adalah orang tua siswa.

**d. Strategi Weakness – Threats**

1. **Strategi WT-1. Pengembangan kurikulum modifikasi yang didukung sumber daya manusia yang inovatif untuk memperkuat pendidikan inklusif.** Strategi ini perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan ”sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman ” terbatasnya pemahaman konsep Pendidikan inklusif”, sesuai dengan yang disajikan pada matrik SWOT yang disimbolkan [W1] dan [T1] pada Gambar 1. Pengembangan kurikulum modifikasi merupakan strategi yang sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kurikulum layanan pendidikan inklusif

dalam sekolah reguler. Pengembangan dilakukan oleh sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan sehingga guru dan tenaga pendidik lainnya juga memahami layanan pendidikan inklusif dan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti halnya untuk anak-anak non inklusif.

**2. Strategi WT-2. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang terintegrasi dengan siswa non inklusif.**

Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan tidak adanya pembinaan bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan inklusif ini hanya sebatas kepala sekolah. Oleh karena itu strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi ancaman "tidak ada guru pendamping khusus" sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W2] dan [T2]. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas kepada guru dalam bentuk pelatihan atau workshop penyusunan skenario pembelajaran dan pembimbingan kepada anak yang berkebutuhan khusus di dalam kelas anak non inklusif. Disamping itu guru diberikan penguatan model pelayanan pembimbingan berdasarkan kebutuhan siswa sehingga siswa yang berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya, dihargai dan termotivasi untuk megembangkan dirinya sesuai dengan minatnya. Dengan strategi ini, guru akan lebih siap dalam mendesain pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dan juga memiliki model pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus.

- 3. Strategi WT-3. Sosialisasi pendidikan inklusif dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk semua siswa.** Strategi ini diperoleh untuk mengatasi kelemahan "siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif". Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman "siswa belum memahami konsep Pendidikan inklusif secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya", sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan [W3] dan [T3] pada Gambar 1. Strategi ini dapat dilakukan secara berkala melalui program Pengajar bisa menumbuhkan budaya inklusi di kelas dengan program kelas yang dapat dikembangkan guru yaitu memberdayakan siswa reguler untuk membantu siswa yang berkebutuhan siswa misalnya kemampuan membaca dan menghitung sehingga pembelajaran tutor sebaya dapat memahamkan kepada siswa reguler tentang pentingnya penerimaan mereka terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian strategi ini dapat mendekatkan siswa berkebutuhan khusus dengan yang normal serta munculnya saling tenggang rasa, dan saling menghargai, sehingga terjadi penerimaan siswa lainnya (normal) terhadap siswa yang berkebutuhan khusus.
- 4. Strategi WT-4. Meningkatkan manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan "sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa". Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman "kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah", sesuai dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan [W4] dan [T4] pada Gambar 1. Salah satu bagian penting yang harus harus

diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu meningkatkan manajemen sarana prasarana yang tersedia untuk digunakan dalam layanan pendidikan inklusif, sehingga mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program yang dapat dikembangkan dari strategi ini adalah melakukan peningkatan kapasitas guru atau tenaga kependidikan untuk memiliki kemampuan mengelola fasilitas pendidikan sekolah seperti perpustakaan yang kondusif dan representatif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, laboratorium, tempat olah raga dan akses fasilitas lainnya. Disamping itu peningkatan manajemen sarana prasarana menjadi solusi jika terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu terjadi. Dengan demikian jika terjadi perubahan kebijakan terhadap pendidikan inklusif secara tiba-tiba, maka guru dan tenaga kependidikan sudah memiliki kompetensi yang baik dan lebih siap dalam mememanajemen sarana prasarana di sekolah inklusif.

5. **Strategi WT 5. Mengoptimalkan pelibatan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan di sekolah inklusif.** Strategi ini diperoleh untuk mengatasi kelemahan "penggunaan biaya pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus". Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman "perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten seperti yang disajikan di matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W5] dan [T5] pada Gambar 1. Dalam pendidikan inklusif keterlibatan orang tua dan masyarakat turut berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk dalam dukungan anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan fisika maupun materi penyelenggaraan pendidikan

inklusif. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusif sehingga jika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah maka keberlanjutan pendidikan inklusif tetap dapat memberikan pelayanan kualitas pendidikan yang memenuhi target pemerintah.

Berdasarkan uraian strategi di atas, maka selanjutnya adalah pembuatan matriks strategi dari analisis SWOT, sebagaimana yang disajikan oleh Gambar 3.

	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
	<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF</b>	S9. Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. S10. Tenaga Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya. S11. Penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa inklusif. S12. Buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman. S13. Adanya biaya dari pemerintah.
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strength-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
O1. Uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi	SO-13. Diversifikasi kurikulum SO-14. Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif	WO-12. Revitalisasi kurikulum untuk model pengembangan sekolah terintegrasi

<p>sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif,</p> <p>O2 Kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan.</p> <p>O3 Sekolah yang mendukung penyelenggaraan Proses belajar yang inklusif.</p> <p>O4 Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah.</p> <p>O5 Biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif.</p>	<p>bagi sekolah dan tenaga pendidikan Mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>SO-15. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif.</p> <p>SO-16. Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.</p> <p>SO-17. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pendidikan inklusif</p>	<p>pendidikan anak inklusif.</p> <p>WO-13. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif</p> <p>WO-14. Meningkatkan komunikasi siswa berkebutuhan khusus dengan siswa non inklusif.</p> <p>WO-15. Meningkatkan kapasitas guru mengelola fasilitas sekolah yang dibutuhkan siswa.</p> <p>WO-16. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas.</p>
<p><b>W1. ANCAMAN (THREATS)</b></p>	<p><b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b></p>	<p><b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b></p>
<p>W1. Terbatasnya pemahaman konsep Pendidikan inklusif.</p> <p>W2. Tidak ada guru pendamping khusus.</p> <p>W3. Siswa belum memahami konsep Pendidikan inklusif secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya.</p> <p>W4. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah.</p> <p>W5. Perubahan</p>	<p>ST-12. Meningkatkan Pemahaman Konsep tentang Kurikulum Pendidikan Inklusif yang disusun berdasarkan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus.</p> <p>ST-13. Mengembangkan Strategi Pembelajaran yang Berkelanjutan</p> <p>ST-14. Memfasilitasi sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belajar</p>	<p>WT-13. Pengembangan kurikulum modifikasi yang didukung sumber daya manusia yang inovatif untuk memperkuat pendidikan inklusif</p> <p>WT-14. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang terintegrasi dengan siswa non inklusif.</p> <p>WT-15. Sosialisasi</p>

Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten	bersama dengan anak sebaya yang non inklusif ST-15. Meningkatkan aksesibilitas pusat sumber belajar sebagai sistem pendukung pembelajaran bagi anak inklusif. ST-16. Mengoptimalkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif.	pendidikan inklusif dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk semua siswa. WT-16. . Meningkatkan manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif WT-17. Mengoptimalkan pelibatan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan di sekolah inklusif
---	--	---

**Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Inklusif**

**5. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-langkah umum prioritas adalah sebagai berikut :

1). Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1= tidak penting, 2 =cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

2) Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

### 3) Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

**Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT**

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>Kekuatan (Strengths)</b>					
1	Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus.	4	0,12	4	0,47
2	Tenaga Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas	4	0,12	3	0,35

	mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya.				
3	Penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa inklusif.	3	0,09	3	0,26
4	Buku-buku penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman.	2	0,06	3	0,18
5	Adanya biaya dari pemerintah.	4	0,12	4	0,47
<b>Sub Total</b>		<b>17</b>			<b>1,74</b>
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>					
1	Sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan.	4	0,12	1	0,12
2	Tidak ada pembinaan bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan inklusif ini hanya sebatas kepala sekolah .	4	0,12	1	0,12
3	Siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif	2	0,06	2	0,12
4	Sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa .	3	0,09	2	0,18
5	Penggunaan biaya Pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus.	4	0,12	1	0,12
<b>Sub Total</b>		<b>17</b>			<b>0,65</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>43</b>	<b>1</b>		<b>2,38</b>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>					
1	Uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif,	3	0,13	3	0,39
2	Kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan.	4	0,17	4	0,70

3	Sekolah yang mendukung penyelenggaraan Proses belajar yang inklusif.	4	0,17	4	0,70
4	Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah.	2	0,09	4	0,35
5	Biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif.	4	0,17	4	0,70
<b>Sub Total</b>		<b>17</b>			<b>2,83</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>					
1	Terbatasnya pemahaman konsep Pendidikan inklusif.	1	0,04	1	0,04
2	Tidak ada guru pendamping khusus.	1	0,04	1	0,04
3	Siswa belum memahami konsep Pendidikan inklusif secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya.	2	0,09	2	0,17
4	Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah.	1	0,04	1	0,04
5	Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten	1	0,04	1	0,04
<b>Sub Total</b>		<b>6</b>			<b>0,35</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>		<b>23</b>	<b>1</b>		<b>3,18</b>

- 4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Strategi SO :</b> $1,74 + 2,83 = 4,57$	<b>Strategi WO :</b> $0,65 + 2,83 = 3,48$
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST :</b> $1,74 + 0,35 = 2,35$	<b>Strategi WT :</b> $0,65 + 0,35 = 1,00$

**Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi**

5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi *Strength-Opportunities* dengan nilai **4.57**. Sehingga strategi kebijakan pendidikan inklusif yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah **Strategi SO (*Strength-Opportunities*)**.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritas faktor, diketahui bahwa **Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)** merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Diversifikasi kurikulum	a. Review kurikulum. b. Diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2	Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi sekolah dan tenaga pendidikan	a. Pelatihan dan Workshop pembelajaran berbasis inklusif b. Pelatihan penyusunan media dan evaluasi dalam pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus
3	Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif.	c. Memetakan hasil evaluasi dan karakteristik siswa d. Komunikasi guru dan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus

4	Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Memetakan kebutuhan fasilitas penunjang anak berkebutuhan khusus</li> <li>e. Memprioritaskan anggaran pengadaan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus</li> <li>f. Melatih tenaga pendidik yang dapat melakukan manajemen fasilitas penunjang bagi anak berkebutuhan khusus</li> </ul>
5	Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pendidikan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendekatan dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus</li> <li>b. Memberikan sosialisasi kepada guru untuk memahami pentingnya pendidikan inklusif</li> <li>c. Melibatkan siswa normal untuk turut memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan inklusif kepada teman sebaya</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1) Diversifikasi kurikulum

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

#### a. Review kurikulum.

Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009 bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif memiliki prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, dan prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan (Kemendikbud, 2011). Untuk itu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya. Satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan kembali review kurikulum dan menentukan model kurikulum yang akan diterapkan terutama pada kurikulum akademik dan kurikulum kekhususan. Dengan adanya review kurikulum maka terdapat arah pendidikan inklusif yang memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa tanda terkecuali.

- b. Diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Untuk program yang perlu dilakukan setelah proses review kurikulum adalah menyusun kurikulum sebagai diversifikasi kurikulum yang bersesuaian dengan kebutuhan peserta didik yang terdapat dalam satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

## **2) Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi sekolah dan tenaga pendidikan**

- a. Pelatihan dan Workshop pembelajaran berbasis inklusif  
Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Inklusif sehingga dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak didik berkebutuhan khusus di sekolah. Guru dibimbing untuk memahami prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, mampu membedakan jenis-jenis gangguan perkembangan dan karakteristik kondisi kekhususan yang disandang anak didik, guru mampu membuat program pembelajaran yang efektif bagi anak dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian guru memiliki kompetensi memadai dalam menyusun, mengembangkan, dan menerapkan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kekhususan anak didik di sekolah.
- b. Pelatihan penyusunan media dan evaluasi dalam pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus  
Menurut Tarnoto (2016) bahwa permasalahan utama yang dikeluhkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif diantaranya adalah kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, dan guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu guru sebagai ujung tombak pemberi layanan pendidikan yang bermutu di sekolah inklusif harus diberikan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan seperti pembuatan media yang menarik minat belajar dan konsentrasi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Purnomo (2016) bahwa salah satu usaha guru dalam pembelajaran inklusif yaitu mengembangkan media berbasis video karena media video memiliki keunggulan dapat memvisualisasikan dengan lebih menarik suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang disertai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping media, Wibowo (2015) juga menjelaskan bahwa peran kemampuan guru sangat penting dalam mengevaluasi siswa berkebutuhan khusus, karena hasil evaluasi sangat menentukan perkembangan anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu program pelatihan penyusunan media dan evaluasi dalam pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus perlu untuk dilaksanakan dalam satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

### **3) Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif.**

#### **a. Memetakan hasil evaluasi dan karakteristik siswa**

Salah satu langkah awal dan utama yang wajib dilakukan adalah guru untuk memperlancar proses belajar di sekolah inklusif adalah melaksanakan identifikasi atau menemukan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka serta mengenali kondisi dan kebutuhan belajarnya. Menurut Mirnawarti (2020:11) bahwa upaya mengidentifikasi ini merupakan langkah awal untuk mengenal atau menandai dan menemukan anak yang memiliki kelainan atau masalah dengan melakukan evaluasi dalam konsep penyaringan (*screening*) dan identifikasi aktual (*actual identification*).

#### **b. Komunikasi guru dan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus**

Komunikasi sangat penting dibangun sebagai sarana yang efektif dalam memperkuat pendidikan inklusif terutama komunikasi antara guru dengan orang tua siswa maupun komunikasi antara guru dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Komunikasi guru dengan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan tujuan untuk bekerjasama dalam memantau perkembangan anak

sekaligus untuk saling memberikan dukungan dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Novianti dkk, 2016 bahwa dalam rangka memperkuat hubungan antara guru dan orang tua, penting untuk membangun sistem komunikasi yang efektif di sekolah antara guru dan orang tua guna mendukung anak-anak mereka belajar di sekolah maupun di rumah. Ruang lingkup pekerjaan yang dikembangkan sebagai gambaran pemberian layanan untuk peningkatan kemampuan belajar siswa dengan kebutuhan khusus melalui peningkatan guru dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan memberikan program aktivitas keseharian pada anak sehingga akan menunjang perkembangan potensi anak-anak mereka.

- 4) Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.
  - a. Memetakan kebutuhan fasilitas penunjang anak

berkebutuhan khusus

Pendidikan inklusi memberikan ruang bagi semua untuk bebas mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi ataupun pembedaan terhadap peserta didik. Hak asasi mendapatkan pendidikan yang layak, menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kekhususan. Untuk itu pemerintah menjamin pendidikan untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam memberikan kenyamanan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka penting bagi satuan pendidikan untuk memetakan fasilitas penunjang bagi mereka sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pimpinan sekolah beserta guru dapat memetakan dan memproyeksikan fasilitas penunjang yang masih sangat terbatasnya sarana

dan peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak berkelainan, misalnya ruang keterampilan khusus, ruang dan alat latihan artikulasi, ruang dan peralatan latihan fisioterapi, ruang perpustakaan dan lain sebagainya.

- b. Memprioritaskan anggaran pengadaan fasilitas yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus.

Hasil pemetaan terhadap fasilitas pendukung bagi pendidikan anak yang berkebutuhan khusus ditentukan fasilitas yang prioritas untuk sediakan di satuan pendidikan inklusif. Anggaran yang menggunakan menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah. Dengan adanya pemetaan fasilitas pendukung maka dapat ditentukan anggaran yang dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas penunjang belajar bagi anak-anak berkebutuhan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat menyusun rencana kerja anggaran yang dapat dikomunikasikan dengan pemerintah dan juga orang tua dan masyarakat yang dapat berkontribusi juga dalam penyeleenggaraan pendidikan inklusif. Pemberdayaan masyarakat dapat mendukung pendidikan inklusif karena dengan adanya peran masyarakat akan membangun kepercayaan orang tua dan memperlancar sistem pendidikan inklusif.

- c. Melatih tenaga pendidik yang dapat melakukan manajemen fasilitas penunjang bagi anak berkebutuhan khusus.

Tenaga pendidikan dan kependidikan berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar termasuk dalam mengelola fasilitas penunjang bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Menurut Hermanto (2010) bahwa dalam penggunaan sarana prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus maka membutuhkan manajemen

sekolah dalam mengatur penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam kegiatan belajar mengajar dan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Ini artinya bahwa Keberhasilan program pendidikan inklusif di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan kemampuan sumber daya manusia di sekolah yang mampu mememanajemen pemanfaatan fasilitas penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk itu tenaga pendidik perlu diberikan penguatan kapasitas dalam memberikan layanan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunagrahitas, autisme, anak yang mengalami kesulitan belajar dan jenis lainnya.

## **5) Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pendidikan inklusif**

### **a. Melakukan pendekatan dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus**

Setiap individu memiliki keunikan masing-masing dalam kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu sebagai seorang pendidik perlu memahami karakteristik dari setiap individu yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat penyandang disabilitas optimal serta memiliki karakter yang luhur. Pendidikan inklusif sebenarnya adalah hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan tepat, sehingga dapat meningkatkan toleransi sosial dan tidak membedakan antara individu satu dengan lainnya yaitu individu yang memiliki kelainan pada fisik maupun non-fisik. Pada umumnya masih banyak sekolah-sekolah yang enggan melaksanakan pendidikan inklusi, hal tersebut dikarenakan apabila siswa yang berkebutuhan khusus

mendapatkan pola pembelajaran yang sama dengan siswa pada umumnya, maka dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar (Bahri, 2022). Kondisi yang demikian selayaknya tidak terus dijadikan alasan belaka dalam melaksanakan pendidikan inklusif sehingga dengan hadirnya pendidikan inklusif ini sesuai dengan tujuan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Di sisi lain terdapat sikap negatif dan stigma masyarakat bahkan orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus bahwa anak berkebutuhan khusus menyulitkan proses pembelajaran di sekolah reguler khusus anak normal (Sari dan Hendriani, 2021). Untuk itu perlu pendekatan komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa dapat meminimalisir kesenjangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak normal.

- b. Memberikan sosialisasi kepada guru untuk memahami pentingnya pendidikan inklusif

Salah satu hambatan yang ditemukan oleh (Damayanti dkk, 2017) dalam implementasi pendidikan inklusif adalah ditemukan fenomena guru yang memberikan *labeling negative* pada siswa berkebutuhan khusus. Umumnya, siswa diberi cap anak bodoh”, “lemot”, atau “bandel”, dikarenakan siswa-siswi berkebutuhan khusus tersebut memiliki daya tangkap yang kurang atau memiliki hambatan dalam belajar. Sehingga, labeling menjadi hambatan dalam optimalisasi proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Perbedaan penanganan tersebut menunjukkan adanya gambaran perbedaan kompetensi di kalangan guru dalam proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini artinya perlu program sosialisasi kepada guru untuk memberikan pemahaman dan tentang pendidikan inklusif dan strategi

dalam menangani proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif paradigma guru yang berposisi sebagai pengajar (*teacher*), kini beralih sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*) dan manajer belajar (*learning manager*), Kunandar, 2007).

- c. Melibatkan siswa normal untuk turut memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan inklusif kepada teman sebaya

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam penerimaan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus adalah melalui pola sosialisasi yang menggunakan pendekatan tutor sebaya. Pendekatan ini merupakan strategi untuk mendekatkan siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa normal sehingga siswa normal memahami bahwa siswa berkebutuhan khusus itu membutuhkan pendidikan yang dinikmati seperti oleh siswa normal. Dengan demikian siswa normal memahami bahwa betapa penting untuk memberikan ruang belajar dan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, karena siswa berkebutuhan khusus adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan berkembang seperti halnya anak-anak normal. Berdasarkan hasil penelitian Silvi dkk, 2013 bahwa ternyata peranan tutor sebaya dalam hal ini teman dekat siswa berkebutuhan khusus memiliki komunikasi yang lebih lancar untuk membantu siswa berkebutuhan khusus untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di luar jam pelajaran. Tutor sebaya berperan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar seperti menjelaskan kembali apa yang disampaikan guru, membantu dalam menghadapi tugas-tugas yang tidak dimengerti, menerangkan pelajaran yang tidak dimengerti dan berbagai kesulitan lainnya dalam pembelajaran.

Berdasarkan analisis SWOT yang dijabarkan dalam tulisan tentang kebijakan dalam pendidikan inklusif maka dapat dipetakan faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh satuan pendidikan. Adapun analisis SWOT pada faktor internal meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa skor strategi kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) – SO lebih tinggi (4,57) dibandingkan dengan strategi WO (*weakness-opportunities*), strategi ST (*strengths-threats*), dan strategi WT (*weakness-threats*). Dengan demikian **Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)** merupakan strategi prioritas, yang direkomendasikan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif yang memiliki 5 strategi yaitu :

1. Diversifikasi kurikulum
2. Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi sekolah dan tenaga pendidikan Mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi sekolah inklusif.
4. Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif.
5. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program pendidikan inklusif

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT kebijakan pendidikan inklusif, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Kebijakan pendidikan inklusif di sekolah memiliki 5 kekuatan yaitu kurikulum dapat disusun berdasarkan tipe anak berkebutuhan khusus, adanya dedikasi yang tinggi dari tenaga pendidik terhadap pendidikan, adanya penerimaan anak non inklusif terhadap anak inklusi, adanya fasilitas penunjang dan terutama adanya biaya dari pemerintah.
2. Kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif adalah, sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan, tidak ada pembinaan bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan inklusif ini hanya sebatas kepala sekolah, siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif, sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa, dan penggunaan biaya pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus.
3. Peluang untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif terdiri dari 5 peluang yaitu, adanya uji coba pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif, adanya kerjasama dengan orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan, adanya sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif, adanya tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah, dan yang terpenting saat ini adalah adanya biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif.
4. Ancaman untuk pelaksanaan pendidikan inklusif terdiri dari 5 ancaman yaitu, terbatasnya pemahaman konsep pendidikan inklusif, tidak ada guru pendamping khusus, siswa belum memahami konsep pendidikan inklusif secara baik, sehingga

seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya, kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah, dan juga adanya perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten

5. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa skor strategi kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) – SO lebih tinggi (4,57) dibandingkan dengan strategi WO (*weakness-opportunities*), strategi ST (*strenghts-threats*), dan strategi WT (*weakness-threats*). Dengan demikian **Strategi SO** (***Strengths-Opportunities***) merupakan strategi prioritas, yang direkomendasikan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif

**Analisis Kebijakan Pendidikan dan  
Teknologi Informasi : Literasi Digital****A. Pendahuluan****1. Latar Belakang dan Permasalahan**

**R**evolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* telah membawa perubahan besar pada cara manusia bekerja, belajar, dan hidup. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah konsep yang mengacu pada perubahan besar dalam cara produksi dan manufaktur, dimana teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan, digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi. *Society 5.0* adalah konsep yang diusung oleh pemerintah Jepang yang menggabungkan teknologi dan inovasi untuk mencapai masyarakat yang lebih berkelanjutan dan beradab. *Society 5.0* melihat teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan, bukan hanya sebagai alat untuk menciptakan keuntungan ekonomi. Perubahan besar yang dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* antara lain adalah perubahan dalam cara bekerja, perubahan dalam cara belajar, dan perubahan dalam cara hidup. Perubahan dalam cara bekerja artinya banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini telah digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Perubahan dalam cara belajar artinya teknologi telah memungkinkan siswa bisa belajar darimana saja dan kapan saja dengan pembelajaran online. Perubahan cara hidup artinya teknologi telah memudahkan kehidupan sehari-hari manusia, seperti belanja online, kemudahan dalam pengiriman barang, dan perbankan digital. Namun, semua perubahan tersebut juga

membawa tantangan dan resiko yang perlu diatasi. Beberapa tantangan dan resiko yang muncul antara lain adalah kesenjangan digital, kerentanan terhadap serangan siber, penyebaran berita bohong (hoaks), penipuan online, *cyberbullying*, bahkan hilangnya pekerjaan tradisional akibat penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari pambangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dalam konteks ini, kebutuhan akan literasi digital menjadi semakin penting karena masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengoperasikan teknologi digital dan memanfaatkan informasi dengan efektif. Pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan terhadap literasi digital pun menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Hingga saat ini, literasi digital terus berkembang dan semakin penting dengan adanya perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat dan kompleks. Oleh karena itu, kebijakan dan program literasi digital terus diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Setiap kebijakan termasuk kebijakan yang terkait dengan dengan literasi sebaiknya didukung oleh dasar hukum tertulis, karena keberadaan dasar hukum yang jelas dan kuatakan memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Dalam konteks literasi digital, keberadaan dasar hukum kebijakan akan memastikan bahwa implementasi dan pelaksanaan kebijakan literasi digital dapat diawasi dengan baik, melindungi kepentingan masyarakat, dan mempromosikan penggunaan teknologi digital yang aman dan bertanggung jawab.

## 2. Dasar Hukum Kebijakan

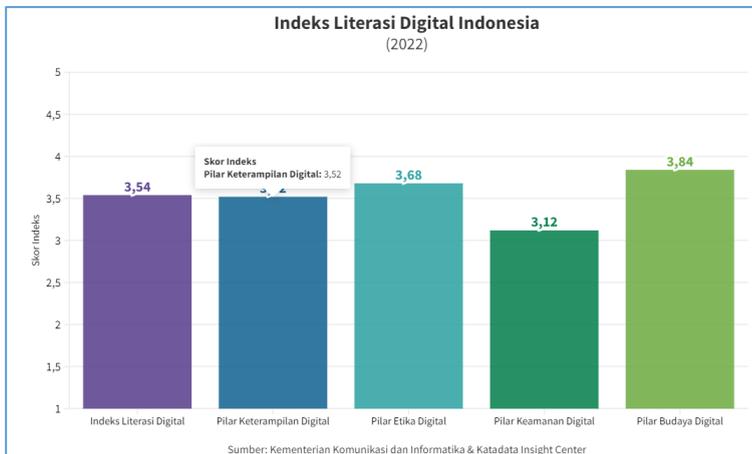
Sejauh ini, belum ada regulasi khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terkait dengan kebijakan literasi digital. Namun untuk membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai bagian dari implementasi PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non-pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan salah satu turunan program dari Gerakan Literasi Nasional (GLN). Pelaku Gerakan Literasi Nasional (GLN) tidak hanya didominasi oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan seperti pegiat literasi, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, serta kementerian/lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dihardapkan dapat memperkaya program Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan mengoptimalkan potensi masing-masing pihak.

Gerakan Literasi Nasional (GLN) memiliki 3 (tiga) turunan program, yaitu : Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM). **Gerakan Literasi Sekolah (GLS)** yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut berfokus pada pengembangan literasi di lingkungan sekolah, di mana sekolah menjadi pusat literasi yang aktif. Program ini melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah dalam berbagai kegiatan literasi seperti membaca bersama, lomba menulis, dan pengembangan perpustakaan sekolah. GLS juga mendorong pengembangan

literasi digital di kalangan siswa, baik siswa Sekolah Dasar siswa Sekolah Menengah Pertama, maupun siswa Sekolah Menengah Atas, Sedangkan **Gerakan Literasi Keluarga (GLK)** lebih menitikberatkan pada pengembangan literasi di keluarga. Program ini melibatkan orang tua dalam mengembangkan minat baca anak melalui kegiatan seperti membacakan buku sebelum tidur, membaca bersama di waktu senggang, dan menyediakan bahan bacaan di rumah. GLK juga memberikan edukasi tentang pentingnya membaca dan cara membaca yang baik dan benar, serta mendorong peningkatan karakter dan kompetensi siswa dari rumah. Adapun **Gerakan Literasi Masyarakat (GLM)** yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berfokus pada pengembangan literasi di kalangan masyarakat secara luas. Program ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti komunitas, organisasi, dan lembaga sosial dalam berbagai kegiatan literasi, seperti pembentukan perpustakaan umum, program literasi di lingkungan kerja, dan pelatihan literasi untuk masyarakat umum. Ketiga gerakan literasi ini saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan ketiga gerakan ini, diharapkan dapat menciptakan budaya literasi yang kuat di kalangan siswa, keluarga, dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Fokus utama Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi literasi dasar yang terdiri atas enam aspek, yaitu : Literasi Baca-Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Finansial, Literasi Digital, serta Literasi Budaya dan Kewargaan. Sebagai bagian dari aspek cakupan Gerakan Literasi Nasional (GLN), Literasi Digital semakin digalakkan di Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan baik dan bijak. Pemerintah dan berbagai pihak terkait program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, sebagai salah

satu bentuk respon dari hasil survei yang dilakukan oleh *Program for International Student Assessment (PISA)* yang dirilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati rangkin ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi. Namun berdasarkan hasil survei Kementerian KOMINFO bersama Ketadata Insight Center (KCIC) skor indkes literasi digitalI indonesia sebesar 3.54 poin pada tahun 2022, meningkat 1.43% atau 0.05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 3.49 poin.



**Gambar 1. Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022**

Untuk mendukung Gerakan Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI meluncurkan 4 (empat) buah kerangka yaitu ***Digital Skill***, ***Digital Safety***, ***Digital Ethics***, dan ***Digital Culture***, serta 3 (tiga) kerangka untuk tiga komponen masyarakat, yaitu ***Digital Society***, ***Digital Economy***, dan ***Digital Government***. Empat kerangka tersebut kemudian telah dikembangkan menjadi Modul Literasi Digital yang disusun oleh tim penulis dari dari Jaringan Pegiat Literasi Digital bersama dengan Tim Literasi Digital Kementerian KOMINFO, dan melibatkan para pegiatan literasi digital GNLD

(Gerakan Nasional Literasi Digital) Siberkreasi. **Ketrampilan digital (*digital skill*)** adalah kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan tertentu. Keterampilan digital mencakup berbagai kemampuan seperti penggunaan komputer, internet, perangkat lunak aplikasi, perangkat mobile, media sosial, analisis data, pemrograman, dan keamanan siber. Di era digital saat ini, keterampilan digital sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital dan memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efisien dan produktif menjadi suatu keharusan. Selain itu, keterampilan digital juga sangat penting dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun jejaring sosial secara online. **Budaya digital (*digital culture*)** adalah suatu fenomena budaya yang terbentuk oleh interaksi manusia dengan teknologi digital. Hal ini mencakup segala aspek budaya yang terpengaruh oleh teknologi digital, seperti perilaku, kebiasaan, gaya hidup, seni, musik, film, literatur, dan sebagainya. Budaya digital mencakup penggunaan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan, mulai dari penggunaan media sosial, hiburan, hingga pendidikan dan bisnis. Dalam budaya digital, konten digital seperti video, musik, foto, dan teks menjadi sangat penting, dan platform digital seperti media sosial dan website memainkan peran penting dalam distribusi dan pertukaran konten ini. Budaya digital juga memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam budaya global secara lebih luas dan terbuka. **Etika digital (*digital ethics*)** adalah kumpulan nilai, prinsip, dan standar moral yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup segala aspek etika yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti privasi, keamanan siber, hak cipta, akses informasi, dan penggunaan data. Dalam era digital saat ini, etika digital menjadi semakin penting karena teknologi digital memiliki potensi besar untuk

menimbulkan dampak negatif pada masyarakat jika tidak digunakan dengan benar. Etika digital memastikan bahwa individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam penggunaan teknologi digital dan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang positif. **Keamanan digital** (*digital savety*) adalah praktik untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman dan risiko yang terkait dengan teknologi digital seperti kejahatan siber, cyberbullying, penipuan online, pencurian identitas, dan virus komputer. Hal ini mencakup segala tindakan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital aman dan tidak membahayakan individu atau organisasi. Keamanan digital sangat penting dalam kehidupan modern karena teknologi digital semakin terintegrasi dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan praktik keamanan digital yang baik, individu dan organisasi dapat melindungi diri mereka dari ancaman siber dan memastikan bahwa informasi pribadi dan rahasia tetap aman dan terlindungi. **Masyarakat digital** (*digital society*) merujuk pada masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan transaksi bisnis, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencakup segala aspek masyarakat yang terpengaruh oleh teknologi digital, seperti gaya hidup, komunikasi, pendidikan, hiburan, politik, dan sebagainya. Namun, masyarakat digital juga membawa beberapa tantangan, seperti keamanan siber, privasi, dan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak memiliki akses. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mempromosikan partisipasi yang adil dan merata dalam masyarakat digital, serta memastikan bahwa individu dan organisasi dapat mengakses teknologi digital dengan aman dan terjamin. **Ekonomi digital** (*digital economy*) merujuk pada semua aktivitas ekonomi yang dilakukan secara digital, terutama melalui internet. Hal ini mencakup segala jenis bisnis dan

transaksi keuangan yang dilakukan melalui internet dan teknologi digital, termasuk *e-commerce*, perbankan online, pembayaran digital, periklanan online, dan layanan berbasis *cloud*. Ekonomi digital telah mengubah cara bisnis dan perekonomian beroperasi dengan menghilangkan batasan geografis dan memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini juga memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan layanan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Dalam ekonomi digital, penting untuk memperhatikan nilai-nilai seperti inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Ekonomi digital yang sehat memungkinkan inovasi dan kreativitas yang lebih besar, memperkuat daya saing bisnis, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. **Pemerintahan digital (*digital government*)** merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mengelola tugas-tugas administratif. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menyediakan informasi publik, pengumpulan data, komunikasi dengan warga negara, dan pengambilan keputusan. Pemerintahan digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan efektif, mengurangi biaya administratif, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti keamanan siber, privasi, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi dan praktik yang mempromosikan keamanan, privasi, dan keterlibatan yang adil dan merata dalam pemerintahan digital. Pemerintahan digital juga memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan akses yang lebih mudah ke informasi publik. Dalam pemerintahan digital, penting untuk memperhatikan nilai-nilai seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintahan digital yang sehat memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari warga negara,

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memberikan layanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kebocoran dan penyalahgunaan data dan resiko kejahatan siber lainnya, maka Indonesia telah menerbitkan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada Oktober 2022. Sebelumnya, pada tahun 2016, telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih dikenal dengan istilah UU ITE. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi juga pernah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016, yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Peraturan Menteri tersebut merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak Oktober 2012.

Kebijakan literasi digital harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di era digital yang semakin dinamis dan cepat. Untuk itu, analisis kebijakan literasi digital diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu ditingkatkan. Analisis kebijakan literasi digital juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dengan melakukan analisis kebijakan literasi digital,

dapat diidentifikasi masalah dan tantangan dalam literasi digital, sehingga dapat dirumuskan strategi dan program yang tepat untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan literasi digital adalah Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), dengan harapan dapat memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan literasi digital, dengan membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada, memanfaatkan peluang yang muncul, serta mengatasi hambatan dan tantangan ada dalam lingkungan literasi digital.

## **B. Analisis Kebijakan Literasi Digital**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan literasi digital di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat implementasi program.

Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan pemerintah terkait literasi digital :

#### **A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan.**

Berikut adalah beberapa **faktor internal yang menjadi kekuatan** (*strengths*) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang disimbolkan dengan [S1] sampai dengan [S5] :

**a. Kepemimpinan yang Kuat [S1]**

Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, kepala sekolah, atau orang tua dapat menjadi faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat mampu memberikan arahan dan motivasi kepada orang lain untuk meningkatkan literasi digital.

**b. Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten [S2]**

Tenaga pendidik dan orang tua yang berkompeten dalam literasi digital dapat mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah dan keluarga. Tenaga pendidik yang mampu memberikan edukasi dan pelatihan tentang literasi digital akan membantu meningkatkan literasi digital siswa, sementara orang tua yang berkompeten dalam literasi digital akan membantu meningkatkan literasi digital anak-anak mereka.

**c. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai [S3]**

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti perangkat teknologi digital dan akses internet yang cepat dan stabil, dapat mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan memudahkan orang untuk mengadopsi teknologi digital dan meningkatkan literasi digital mereka.

**d. Kurikulum yang Mendukung [S4]**

Kurikulum yang mendukung literasi digital di sekolah dapat mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah. Kurikulum yang mendukung literasi digital akan memastikan bahwa siswa mendapatkan edukasi yang memadai tentang literasi digital.

**e. Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital [S5]**

Program edukasi yang berkaitan dengan literasi digital dapat menjadi faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di keluarga dan masyarakat. Program

edukasi tersebut akan membantu orang untuk memahami pentingnya literasi digital dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi digital secara aman dan produktif.

Berikut adalah beberapa **faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang disimbolkan dengan [W1] sampai dengan [W5] :

**a. Keterbatasan Sumber Daya [W1]**

Keterbatasan sumber daya seperti dana, perangkat teknologi digital, dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan literasi digital.

**b. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital [W2]**

Kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi digital dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di keluarga dan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat adopsi teknologi digital dan meningkatkan literasi digital.

**c. Keterbatasan Keterampilan [W3]**

Keterbatasan keterampilan dalam literasi digital dari tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keterbatasan keterampilan ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan literasi digital.

**d. Kurangnya Inovasi dan Kreativitas [W4]**

Kurangnya Inovasi dan Kreativitas dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kurangnya Inovasi dan Kreativitas dapat menyebabkan kehilangan daya saing dan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia.

**e. Resistensi terhadap Perubahan [W5]**

Resistensi terhadap perubahan dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Resistensi ini dapat menghambat adopsi teknologi digital dan upaya meningkatkan literasi digital.

**B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman.**

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan literasi masyarakat, yang disimbolkan dengan [O1] sampai dengan [O5] :

**a. Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat [O1]**

Adopsi teknologi yang berkembang pesat dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Teknologi yang berkembang pesat dapat mendorong adopsi teknologi digital dan meningkatkan literasi digital.

**b. Perkembangan Industri Teknologi Digital [O2]**

Perkembangan industri teknologi digital dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perkembangan ini dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital.

**c. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia [O3]**

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal keterampilan digital, dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kebutuhan ini dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan literasi digital.

**d. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Literasi Digital [O4]**

Perubahan kebijakan pemerintah dalam mendukung literasi digital dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perubahan ini dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan literasi digital.

**e. Partisipasi Aktif Masyarakat [O5]**

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi digital dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Partisipasi ini dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk memperkuat kebijakan dan program literasi digital.

Berikut adalah beberapa **faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*)** dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang disimbolkan dengan [T1] sampai dengan [T5] :

**a. Kesenjangan Digital [T1]**

Kesenjangan digital atau ketimpangan akses dan penggunaan teknologi digital antara masyarakat yang berbeda dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah,

keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam keterampilan dan aksesibilitas teknologi digital.

**b. Risiko Keamanan dan Privasi [T2]**

Risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi digital dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap teknologi digital dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi.

**c. Perubahan Teknologi yang Cepat [T3]**

Perubahan teknologi yang cepat dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyebabkan kesenjangan literasi digital.

**d. Persaingan Global yang Ketat [T4]**

Persaingan Global yang ketat dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan persaingan di pasar global yang semakin kompetitif di mana kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dapat menjadi faktor penentu dalam kesuksesan.

**e. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Tidak Konsisten [T5]**

Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mendukung literasi digital dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat menghambat perkembangan program dan kebijakan literasi digital yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan literasi digital, yang memasukkan semua faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom matriks yang sesuai, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2.

**C. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak matriks yang sesuai.**

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan (*Strengths*) dan kolom Kelemahan (*Weakness*) diisi dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari kebijakan literasi digital yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [S1] sampai dengan [S5] serta simbol [W1] sampai dengan [W5] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian juga halnya dengan kolom Peluang (*Opportunities*) dan kolom Tantangan (*Threats*) diisi dengan faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi kebijakan literasi digital yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai dengan [O5] serta simbol [T1] sampai dengan [T5] pada uraian tahapan sebelumnya.

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S10. Kepemimpinan yang Kuat.	W10. Keterbatasan Sumber Daya.
S11. Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten.	W11. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital.
S12. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai.	W12. Keterbatasan Penguasaan Keterampilan Digital.
S13. Kurikulum yang Mendukung.	W13. Kurangnya inovasi dan kreativitas.
S14. Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital.	W14. Resistensi terhadap Perubahan.

PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O19. Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat.	T10. Kesenjangan Digital.
O20. Perkembangan Industri Teknologi Digital.	T11. Risiko Keamanan dan Privasi.
O21. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.	T12. Perubahan Teknologi yang Cepat.
O22. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Literasi Digital.	T13. Persaingan Global yang Ketat.
O23. Partisipasi Aktif Masyarakat.	T14. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten

**Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Literasi Digital**

Berdasarkan matriks analisis SWOT pada Gambar 2, maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan literasi digital.

#### **D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)**

Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) adalah strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk

meningkatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang telah dimiliki, berupa :

- 1) **Strategi SO-1. Meningkatkan Program Pengembangan Kepemimpinan dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan.** Strategi ini diperoleh dengan **memanfaatkan peluang** adanya "perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung literasi digital". Hal ini bertujuan untuk **meningkatkan kekuatan** "kepemimpinan yang kuat di sekolah, keluarga, dan masyarakat", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S1] & [O4] pada Gambar 1. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung literasi digital, organisasi atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan program pengembangan kepemimpinan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program pengembangan kepemimpinan dapat membantu meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terkait dengan literasi digital.
- 2) **Strategi SO-2. Mengembangkan Program Pelatihan Literasi Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [O1] pada Gambar 1. Pemberian pelatihan teknologi yang berkualitas tinggi bagi tenaga pendidik bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi terbaru dengan baik dalam pembelajaran. Pelatihan dapat mencakup berbagai topik, seperti penggunaan platform pembelajaran online, penggunaan aplikasi

pembelajaran, pembuatan video pembelajaran, dan penilaian pembelajaran berbasis teknologi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga pendidik, mereka dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan efektif menggunakan teknologi terbaru. Sedangkan pelatihan kepada orang tua ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi agar bisa mendukung pembelajaran anak-anak mereka. Pelatihan dapat mencakup penggunaan aplikasi pendidikan, monitoring dan mengontrol penggunaan teknologi oleh anak-anak, serta pemanfaatan sumber daya digital untuk membantu anak-anak belajar di rumah.

- 3) **Strategi SO-3. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi digital melalui program pengembangan kemitraan dengan perusahaan teknologi digital.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Perkembangan Industri Teknologi Digital". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S3] & [O2] pada Gambar 1. Strategi ini berfokus pada peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi digital untuk memperluas jaringan internet dan memperbaiki aksesibilitas di daerah yang masih tertinggal. Hal ini akan membantu memperluas jangkauan program literasi digital dan memberikan kesempatan bagi siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk belajar dan mengakses sumber daya secara online. Strategi membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi digital juga dapat dilakukan untuk memperoleh akses ke teknologi terbaru dan memberikan dukungan untuk pengembangan program literasi digital. Hal ini akan

membantu mempercepat pengembangan program literasi digital dan meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur yang tersedia.

**4) Strategi SO-4. Mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "Kurikulum yang Mendukung", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S4] & [O2] pada Gambar 1. Strategi ini berupaya bagaimana mengintegrasikan pembelajaran literasi digital dalam kurikulum yang ada, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kurikulum tersebut harus dirancang agar mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, penggunaan internet, pemrograman, desain web, keamanan cyber, dan etika digital. Selain itu, kurikulum juga harus mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang terkait dengan literasi digital. Dalam mengembangkan kurikulum, perlu melibatkan para ahli dan praktisi teknologi digital serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti komunitas industri, perusahaan teknologi, dan institusi pendidikan.

**5) Strategi SO-5. Melakukan kampanye literasi digital melalui platform digital media sosial dan Membuat program mentoring literasi digital yang melibatkan anggota masyarakat yang sudah ahli dalam literasi digital.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang "Partisipasi Aktif Masyarakat". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan

"Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S5] & [O5] pada Gambar 1. Strategi kampanye literasi digital ini dapat mencakup konten edukatif tentang literasi digital, video tutorial, dan informasi tentang program-program literasi digital yang tersedia. Strategi pembuatan program mentoring literasi digital yang melibatkan anggota masyarakat yang sudah ahli dalam literasi digital, dan kemudian mempertemukan mereka dengan orang tua dan siswa yang ingin meningkatkan kemampuan literasi digital mereka, juga dapat dilakukan secara daring atau tatap muka, dalam bentuk seminar, lokakarya, atau webinar tentang literasi digital yang melibatkan masyarakat, tenaga pendidik, dan orang tua. Program ini dapat membahas topik-topik seperti keamanan digital, etika internet, dan penggunaan teknologi digital untuk memperoleh informasi dan meningkatkan produktivitas.

## **b. Strategi ST (*Strengths-Threats*)**

- 1) Strategi ST-1. Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Digital dan Mengurangi Biaya Akses.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan "Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai". Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman "Kesenjangan Digital", sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S3] & [T1] pada Gambar 1. Pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi digital dengan membangun infrastruktur yang memadai, seperti akses internet, pusat komputer, dan penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai. Fasilitas dan

infrastruktur yang memadai juga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi biaya akses bagi individu yang tidak mampu. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan digital di kalangan masyarakat.

- 2) **Strategi ST-2. Mengembangkan Strategi Adaptasi dan Program yang Berkelanjutan.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Kepemimpinan yang Kuat”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S1] & [T5] pada Gambar 1. Kepemimpinan yang kuat dapat mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program-program alternatif, penyesuaian program-program yang telah ada dengan kebijakan yang baru, serta pengembangan program-program yang berkelanjutan dalam konteks literasi digital. Program-program tersebut harus memiliki tujuan dan target yang jelas, serta terukur. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan kebijakan, program-program tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- 3) **Strategi ST-3. Memfasilitasi Forum Publik dan Mengembangkan Program Inspeksi Keamanan Digital.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Resiko Keamanan dan Privasi”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S5] & [T2] pada Gambar 1. Memfasilitasi forum publik untuk membahas isu-isu keamanan dan privasi digital, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

berbagi pengalaman dan masalah terkait dengan keamanan dan privasi. Forum ini dapat membantu membangun kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu ini, serta memberikan solusi yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan program inspeksi keamanan dan privasi yang bertujuan untuk membantu pengguna mengevaluasi keamanan dan privasi perangkat mereka. Program ini dapat dilakukan secara online atau melalui kunjungan ke tempat-tempat publik, seperti pusat perbelanjaan atau sekolah.

**4) Strategi ST-4. Melakukan Peninjauan dan Memperbaharui Kurikulum Secara Berkala.**

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Kurikulum yang Mendukung”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Persaingan Global yang ketat”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S4] & [T4] pada Gambar 1. Membuat peninjauan dan evaluasi kurikulum berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Pembaharuan kurikulum mencakup teknologi dan inovasi terbaru yang relevan dengan industri di tingkat global, mendorong pengajaran dan pengembangan keterampilan kreativitas dan inovasi dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan praktis, serta menerapkan sistem pengajaran berbasis proyek atau praktik yang menghubungkan siswa dengan industri dan organisasi yang terkait dengan teknologi dan inovasi di tingkat global.

**5) Strategi ST-5. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dalam Proses Pembelajaran.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi

ancaman “Perubahan Teknologi yang Cepat”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [T3] pada Gambar 1. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform pembelajaran *online*. Sekolah dapat menggunakan platform pembelajaran online yang dapat diakses oleh orang tua, sehingga mereka dapat memantau kemajuan anak dan terlibat dalam diskusi dengan guru. Orang tua yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi dapat membantu anak-anak mereka untuk belajar menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Selain itu, orang tua yang aktif dalam mendampingi anak-anak saat menggunakan teknologi juga dapat membantu mencegah risiko keamanan dan privasi yang dapat terjadi akibat penggunaan teknologi yang kurang bijak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membantu anak-anak menghadapi perubahan teknologi yang pesat.

### c. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*)

1) **Strategi WO-1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Platform Digital dan Metode Pembelajaran yang Inovatif.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat”. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Keterbatasan Sumber Daya”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W1] & [O1] pada Gambar 1. Strategi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan tempat dan tenaga pengajar. Dengan adanya adopsi teknologi yang berkembang pesat, dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform digital seperti *e-learning*, forum diskusi

online, dan media sosial. Adopsi teknologi yang berkembang pesat dapat digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, seperti penggunaan video, game, dan simulasi. Kebijakan literasi digital dapat mendorong pengembangan metode pembelajaran yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan dana, dan meningkatkan kualitas pembelajaran literasi digital.

- 2) **Strategi WO-2. Melibatkan masyarakat dalam program literasi digital dan memanfaatkan media sosial.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Partisipasi Aktif Masyarakat”. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W2] & [O5] pada Gambar 1. Kebijakan literasi digital dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam program literasi digital yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan forum diskusi atau pelatihan literasi digital secara gratis, serta mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk memperkenalkan manfaat literasi digital. Kebijakan literasi digital dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan program literasi digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan membagikan artikel dan informasi yang relevan tentang literasi digital, serta mengadakan kampanye online tentang manfaat literasi digital.
- 3) **Strategi WO-3. Menyeimbangkan Aspek Positif dan Negatif dari Perkembangan Teknologi.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Perubahan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Literasi

Digital”. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Resistensi terhadap Perubahan”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W5] & [O4] pada Gambar 1. Perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung literasi digital juga dapat membantu menyeimbangkan aspek positif dan negatif dari teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat yang terkait dengan penggunaan teknologi. Dalam hal ini, masyarakat dapat merasa lebih terinformasi dan terlatih dalam menghadapi perubahan, sehingga akan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat literasi digital.

- 4) **Strategi WO-4. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Digital.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Keterbatasan Keterampilan”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W3] & [O3] pada Gambar 1. Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memicu peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan digital. Program pelatihan dapat dirancang untuk meningkatkan keterampilan dasar seperti komunikasi, pengolahan data, dan teknologi, sehingga meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
- 5) **Strategi WO-5. Mendorong Kolaborasi dengan Industri.** Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Perkembangan Industri Teknologi Digital”.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Kurangannya inovasi dan kreativitas”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W4] & [O2] pada Gambar 1. Perkembangan industri teknologi digital dapat mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah untuk mengembangkan program inovasi dan kreativitas yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Kolaborasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana individu dapat belajar dan berkolaborasi dengan para ahli di industri untuk mengembangkan solusi inovatif dan kreatif yang mampu menyelesaikan tantangan teknologi terbaru.

#### **d. Strategi WT (*Weakness-Threats*)**

- 1) **Strategi WT-1. Meningkatkan Ketersediaan Sumberdaya Digital.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Keterbatasan Sumber Daya”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Kesenjangan Digital”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W1] & [T1] pada Gambar 1. Dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya seperti akses internet, perangkat komputer, dan infrastruktur teknologi lainnya, maka kesenjangan digital dapat diminimalkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan digital juga dapat membantu mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi masyarakat yang lebih luas.
- 2) **Strategi WT-2. Meningkatkan Edukasi Literasi Keamanan Digital.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Kurangannya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Risiko Keamanan dan Privasi”,

sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W2] & [T2] pada Gambar 1. Strategi meningkatkan edukasi literasi digital dengan fokus pada keamanan dan privasi, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, mencakup topik-topik seperti keamanan data, privasi online, *phishing*, dan *cyberbullying*. Selain itu, dapat dilakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran akan risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi digital. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang literasi digital, individu akan lebih mampu memahami risiko keamanan dan privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan informasi pribadi mereka.

- 3) **Strategi WT-3. Pengembangan Program Sertifikasi Keterampilan Digital.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Keterbatasan Keterampilan”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Persaingan Global yang ketat”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W3] & [T4] pada Gambar 1. Pengembangan program sertifikasi keterampilan dapat dilakukan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri. Dalam hal ini, peran pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam menginisiasi program-program tersebut dan membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Program sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan kompetensi seseorang dalam bidang teknologi digital dan memberikan pengakuan formal atas kemampuan tersebut. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan daya saing individu dan

organisasi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat di era digital saat ini.

4) **Strategi WT-4. Mengembangkan Budaya Inovasi dan Kreativitas di Lingkungan Pendidikan.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Kurangnya inovasi dan kreativitas”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Perubahan Teknologi yang Cepat”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W4] & [T3] pada Gambar 1. Strategi mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan pendidikan, dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide baru dan mendorong mereka untuk berpikir kreatif. Selain itu, pihak sekolah juga dapat melakukan kolaborasi dengan pihak luar, seperti perusahaan teknologi atau lembaga riset, untuk meningkatkan akses siswa terhadap teknologi terbaru dan memperluas wawasan mereka tentang tren terbaru di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa akan lebih siap dan mampu menghadapi perubahan teknologi yang cepat di masa depan.

5) **Strategi WT-5. Meningkatkan Komunikasi dan Pelibatan Publik.** Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Resistensi terhadap Perubahan”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman “Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten”, sesuai dengan yang disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W5] & [T5] pada Gambar 1. Pemerintah dapat berkomunikasi dengan jelas dan terbuka tentang alasan perubahan kebijakan yang dilakukan dan dampak yang diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi ini tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga dapat memperkuat

partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan yang diusulkan atau diubah.

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya adalah pembuatan Matriks Strategi dari Analisis SWOT, sebagaimana yang disajikan oleh Gambar 3.

<b>SWOT ANALISIS KEBIJAKAN LITERASI DIGITAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
		S14. Kepemimpinan yang Kuat. S15. Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten. S16. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai. S17. Kurikulum yang Mendukung. S18. Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital.
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>STRATEGI SO (Strength-Opportunities)</b>	<b>STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)</b>
O7. Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat. O8. Perkembangan Industri Teknologi Digital. O9. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. O10. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Literasi Digital. O11. Partisipasi Aktif Masyarakat.	SO-18. Meningkatkan Program Pengembangan Kepemimpinan dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan. SO-19. Mengembangkan Program Pelatihan Literasi Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua. SO-20. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi melalui program	WO-17. Mengoptimalkan Pemanfaatan Platform Digital dan Metode Pembelajaran yang Inovatif. WO-18. Melibatkan masyarakat dalam program literasi digital dan memanfaatkan media sosial. WO-19. Menyeimbangkan Aspek Positif dan Negatif dari Perkembangan Teknologi. WO-20. Peningkatan Pendidikan dan

	<p>pengembangan kemitraan dengan perusahaan teknologi digital.</p> <p>SO-21. Mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>SO-22. Melakukan kampanye literasi digital melalui platform digital media sosial dan membuat program mentoring literasi digital.</p>	<p>Pelatihan Ketrampilan Digital.</p> <p>WO-21. Mendorong Kolaborasi dengan Industri.</p>
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b>	<b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b>
<p>T9. Kesenjangan Digital.</p> <p>T10. Risiko Keamanan dan Privasi.</p> <p>T11. Perubahan Teknologi yang Cepat.</p> <p>T12. Persaingan Global yang Ketat</p> <p>T13. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten</p>	<p>ST-17. Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Digital dan Mengurangi Biaya Akses.</p> <p>ST-18. Mengembangkan Strategi Adaptasi dan Program yang Berkelanjutan.</p> <p>ST-19. Memfasilitasi Forum Publik dan Mengembangkan Program Inspeksi Keamanan Digital.</p> <p>ST-20. Melakukan Peninjauan dan Memperbaharui Kurikulum Secara Berkala.</p> <p>ST-21. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dalam Proses Pembelajaran.</p>	<p>WT-18. Meningkatkan Ketersediaan Sumberdaya Digital.</p> <p>WT-19. Meningkatkan Edukasi Literasi Keamanan Digital.</p> <p>WT-20. Pengembangan Program Sertifikasi Ketrampilan Digital.</p> <p>WT-21. Mengembangkan Budaya Inovasi dan Kreativitas di Lingkungan Pendidikan.</p> <p>WT-22. Meningkatkan Komunikasi dan Pelibatan Publik.</p>

**Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Literasi Digital**

**E. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

2) Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

3) Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman.

**Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT**

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>Kekuatan (<i>Stengths</i>)</b>					
1	Kepemimpinan yang Kuat.	3	0.12	2	0.24
2	Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang Berkompeten.	4	0.15	3	0.45
3	Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai.	4	0.15	3	0.45
4	Kurikulum yang Mendukung.	3	0.12	4	0.48
5	Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital.	4	0.15	4	0.6
<b>Sub Total</b>					<b>2.22</b>
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>					
1	Keterbatasan Sumber Daya.	2	0.08	1	0.08
2	Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital.	2	0.08	3	0.24
3	Keterbatasan Penguasaan Keterampilan Digital.	2	0.08	2	0.16
4	Kurangnya inovasi dan kreativitas.	1	0.04	3	0.12
5	Resistensi terhadap Perubahan.	1	0.04	4	0.16
<b>Sub Total</b>					<b>0.76</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>26</b>	<b>1</b>		<b>2.98</b>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>					
1	Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat.	4	0.15	4	0.6
2	Perkembangan Industri Teknologi Digital.	4	0.15	3	0.45
3	Kebutuhan Peningkatan	4	0.15	4	0.6

	Kualitas Sumber Daya Manusia.				
4	Perubahan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Literasi Digital.	3	0.12	2	0.24
5	Partisipasi Aktif Masyarakat.	3	0.12	4	0.48
<b>Sub Total</b>					<b>2.37</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>					
1	Kesenjangan Digital.	2	0.08	2	0.16
2	Risiko Keamanan dan Privasi.	2	0.08	1	0.08
3	Perubahan Teknologi yang Cepat.	1	0.04	3	0.12
4	Persaingan Global yang Ketat	2	0.08	3	0.24
5	Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten.	1	0.04	4	0.16
<b>Sub Total</b>					<b>0.76</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>					<b>3.13</b>

4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Strategi SO :</b> $2.22 + 2.37 = 4.59$	<b>Strategi WO :</b> $0.76 + 2.37 = 3.13$
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST :</b> $2.22 + 0.76 = 2.98$	<b>Strategi WT :</b> $0.76 + 0.76 = 1.52$

**Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi**

5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi *Strength-Opportunities* dengan nilai **4.59**. Sehingga strategi kebijakan literasi digital yang

menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah **Strategi SO (*Strength-Opportunities*)**.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritas faktor, diketahui bahwa **Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)** merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan literasi digital disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Meningkatkan Program Pengembangan Kepemimpinan dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan.	a. Pelatihan dan Konsultasi Kepemimpinan. b. Pendekatan Kolaboratif. c. Penelitian dan Evaluasi Kebijakan.
2	Mengembangkan Program Pelatihan Literasi Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua.	a. Pelatihan dan Workshop Literasi Digital. b. Program Edukasi Literasi Digital. c. Penyediaan Sumber Daya dan Konten Edukatif.
3	Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi melalui program pengembangan kemitraan dengan perusahaan teknologi digital.	a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi. b. Program Pelatihan Tenaga Kerja. c. Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan.
4	Mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital untuk	a. Pemetaan kompetensi literasi digital yang dibutuhkan.

	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	b. Pengembangan Kurikulum Literasi Digital c. Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Literasi Digital.
5	Melakukan kampanye literasi digital melalui platform digital media sosial dan membuat program mentoring literasi digital.	a. Kampanye Literasi Digital di Media Sosial. b. Program Mentoring Literasi Digital. c. Pelatihan bagi Penyedia Konten Digital.

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 3.

### 1) Strategi Meningkatkan Program Pengembangan Kepemimpinan dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan.

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

#### a. Pelatihan dan Konsultasi Kepemimpinan.

Mengadakan pelatihan dan konsultasi kepemimpinan terkait literasi digital bagi para pemimpin di sektor publik dan swasta. Pelatihan dan konsultasi ini dapat membantu para pemimpin memahami perubahan kebijakan literasi digital dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikannya dalam organisasi mereka. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan literasi

digital di masyarakat, membangun strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan literasi digital. Pelatihan juga harus mencakup keterampilan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Masa saat ini, sejak pandemi Covid-19 telah semakin mengokohkan beberapa situasi masa depan yang disebut dengan era disruptif, era milenial, era digital 4.0 dan era society 5.0. Agar menjadi pemimpin masa depan yang sesuai harapan dan kondisi, serta karakteristik masa depan, maka seseorang membutuhkan karakter (*soft skills*) dan ketrampilan atau kompetensi (*hard skills*) yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mereka harus memiliki kemauan, tekad, dan terbuka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai hal, termasuk adanya perubahan terhadap kebijakan terkait literasi digital. Salah satu strategi untuk beroleh *softskill* dan *hardskill* yang sesuai dengan kebutuhan zaman adalah dilaksanakannya pelatihan dan konsultasi kepemimpinan yang efektif terkait dengan literasi digital. Efektivitas pelatihan kepemimpinan tidak hanya tergantung pada pada sistem pelatihan kepemimpinan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan peserta pelatihan dan juga lingkungan organisasi.

Konsultasi kepemimpinan dapat membantu pemimpin dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi dengan perubahan kebijakan. Dengan memperoleh perspektif dari konsultan kepemimpinan yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, pemimpin dapat memahami masalah yang mendasari dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif, serta mengembangkan strategi untuk memperbaiki kebijakan yang ada, atau

mengimplementasikan perubahan kebijakan yang lebih efektif.

b. Pendekatan Kolaboratif.

Mengadakan pertemuan antar pemimpin dan praktisi literasi digital untuk membahas tantangan dan peluang yang terkait dengan perubahan kebijakan literasi digital. Ini akan memungkinkan pemimpin untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi tujuan kebijakan literasi digital. Pertukaran pengalaman dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau secara virtual, dan dapat mencakup pembahasan tentang strategi literasi digital yang efektif, pembelajaran terbaik dari kebijakan literasi digital yang ada, dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan literasi digital. Pemerintah dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman ini dan memastikan bahwa semua pemimpin kebijakan literasi digital dapat berpartisipasi.

Pendekatan kolaboratif melalui program pertukaran pengalaman dalam kepemimpinan di era digital sangatlah dibutuhkan karena tantangan bagi para pemimpin bukan hanya terkait cara beradaptasi dengan perangkat teknologi digital saja, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan karakter dan potensi dari personilnya yang lahir dan tumbuh kembang di era digital, dan barangkali ada juga diantara personil yang masih belum memahami esensi keberadaan digitalisasi atau belum memiliki kemampuan dalam beradaptasi terhadap digital, sehingga pemimpin dituntut untuk terlebih dahulu memiliki pemahaman dan kemampuan dasar terkait teknologi digital dan pemanfaatannya.

c. Penelitian dan Evaluasi Kebijakan Literasi Digital.

Melakukan penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap kebijakan literasi digital yang ada untuk memastikan

bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan literasi digital yang diinginkan. Hasil penelitian dan evaluasi ini harus digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada kebijakan yang ada dan untuk memperbaiki program-program pelatihan dan kampanye literasi digital. Dalam pembaharuan kebijakan dan program pendidikan, kegiatan evaluasi terhadap program yang sedang maupun telah berjalan sebelumnya, perlu dilakukan dengan baik, dengan menjadikan hasil evaluasi program sebelumnya menjadi acuan yang tidak dapat ditinggalkan. Sejumlah penelitian terkait dengan evaluasi atas kebijakan literasi baik sekolah maupun di masyarakat, telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar.

## **2) Strategi Mengembangkan Program Pelatihan Literasi Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua**

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

### **a. Pelatihan dan Workshop Literasi Digital.**

Mengadakan pelatihan dan workshop literasi digital bagi tenaga pendidik dan orang tua. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami kepentingan literasi digital dan bagaimana cara menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Workshop ini juga dapat membantu mereka mengembangkan strategi dan aktivitas pembelajaran yang menarik bagi anak-anak dan siswa mereka. Penyelenggaraan workshop literasi digital dalam proses pembelajaran telah banyak dilaksanakan bagi guru-guru maupun bagi orang tua.

### **b. Program Edukasi Literasi Digital.**

Membuat program edukasi literasi digital bagi anak-anak dan siswa. Program ini dapat mencakup aspek-aspek

seperti keamanan online, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, pemahaman tentang privasi dan data, penangkalan *hoax* dan *cyberbullying*, dan lain sebagainya. Dalam program ini, orang tua dan tenaga pendidik dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi digital mereka.

c. Penyediaan Sumber Daya dan Konten Edukatif.

Membuat sumber daya dan konten edukatif yang dapat diakses oleh tenaga pendidik dan orang tua untuk membantu mereka mengajar literasi digital kepada anak-anak dan siswa mereka. Konten ini dapat berupa video, infografis, buku panduan, atau sumber daya online lainnya. Pemerintah dapat bermitra dengan organisasi dan komunitas untuk membuat sumber daya ini lebih mudah diakses dan dipahami oleh orang tua dan tenaga pendidik.

### **3) Strategi Meningkatkan Investasi dalam Infrastruktur Teknologi Melalui Program Pengembangan Kemitraan dengan Perusahaan Teknologi Digital.**

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi.

Mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan *broadband* dan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur ini. Dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah dapat menawarkan insentif seperti peraturan pajak yang lebih ramah bagi perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur teknologi.

b. Program Pelatihan Tenaga Kerja Terampil di bidang Teknologi Digital

Mengembangkan program pelatihan tenaga kerja di bidang teknologi digital untuk memperkuat keahlian dan pengetahuan teknis, serta membantu menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi digital. Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan teknologi digital untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi.

c. Investasi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Teknologi Digital

Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi digital untuk memperkuat keunggulan teknologi dan inovasi dalam negeri. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk membangun pusat riset dan pengembangan serta memberikan dukungan keuangan dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan di Indonesia.

**4) Strategi Mengembangkan Kurikulum yang Mencakup Berbagai Aspek Literasi Digital untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Pemetaan kompetensi literasi digital yang dibutuhkan.

Pemerintah dapat memulai dengan mengidentifikasi kompetensi literasi digital yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Misalnya, kompetensi dalam hal penggunaan perangkat lunak dan aplikasi, pengelolaan data, keamanan siber, dan kreativitas

digital. Kompetensi-kompetensi ini kemudian dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum literasi digital.

b. Pengembangan Kurikulum Literasi Digital.

Pemerintah dapat mengembangkan kurikulum literasi digital yang mencakup kompetensi-kompetensi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kurikulum ini dapat dirancang untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Kurikulum tersebut juga dapat mencakup modul khusus untuk siswa yang membutuhkan pendekatan khusus dalam belajar, seperti anak-anak dengan kebutuhan khusus atau siswa yang berasal dari latar belakang kurang mampu.

c. Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Literasi Digital.

Setelah pengembangan kurikulum, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada guru tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum literasi digital dalam pembelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan data, keamanan siber, dan kreativitas digital. Dalam pelatihan ini, guru juga dapat mempelajari teknik-teknik untuk mengajarkan literasi digital kepada siswa dengan cara yang menarik dan interaktif.

## **5) Strategi Melakukan Kampanye Literasi Digital Melalui Platform Digital Media Sosial dan Membuat Program Mentoring Literasi Digital.**

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Kampanye Literasi Digital di Media Sosial.

Melakukan kampanye literasi digital melalui platform digital media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya literasi digital. Kampanye ini dapat berupa konten-konten informatif seperti video

tutorial, infografis, gambar, dan artikel yang dapat diakses secara online oleh masyarakat luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan kampanye ini dan memastikan bahwa konten yang disajikan relevan dan mudah dipahami.

b. Program Mentoring Literasi Digital

Mengembangkan program mentoring literasi digital yang dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Program mentoring ini dapat mencakup materi-materi seperti penggunaan perangkat lunak dan aplikasi, keamanan online, media sosial yang bertanggung jawab, dan literasi data dan informasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi dan komunitas untuk mengembangkan program mentoring ini dan memastikan bahwa mereka dapat diakses oleh semua masyarakat di seluruh negeri.

c. Pelatihan bagi Penyedia Konten Digital.

Memberikan pelatihan bagi penyedia konten digital untuk memastikan bahwa konten yang disajikan di media sosial dan platform digital lainnya mempromosikan literasi digital yang positif dan bertanggung jawab. Pelatihan ini dapat mencakup pedoman tentang penggunaan bahasa yang tepat dan bertanggung jawab, pembuatan konten yang informatif dan mudah dipahami, serta penanganan yang tepat terhadap konten yang bersifat tidak layak atau tidak benar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk memberikan pelatihan ini dan memastikan bahwa penyedia konten digital di seluruh negeri memahami pentingnya literasi digital.

Secara keseluruhan, program-program yang telah diuraikan di atas, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan literasi digital masyarakat secara luas. Dengan

demikian diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital, membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi era digital, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi digital secara positif, aman, dan bertanggung jawab. Dukungan terhadap adanya kebijakan yang terkait literasi digital sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya literasi digital dalam era digital saat ini. Kebijakan literasi digital dapat membantu meningkatkan aksesibilitas teknologi digital di seluruh negeri, termasuk di wilayah perdesaan, serta membantu mengurangi adanya kesenjangan digital antara kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi digital dengan mereka yang masih tertinggal. Dengan adanya kebijakan literasi digital, kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang lebih bijaksana dan aman dalam menggunakan teknologi digital, serta membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang semakin didominasi oleh teknologi digital.

Namun untuk memastikan keberhasilan kebijakan literasi digital, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, sektor pendidikan, dan masyarakat, serta upaya yang berkelanjutan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, dan memastikan bahwa manfaat literasi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil Analisis SWOT Kebijakan Literasi Digital, yaitu :

1. Kebijakan literasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Dengan adanya akses yang lebih luas dan peningkatan kesadaran, literasi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan partisipasi aktif dalam era digital.
2. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan aksesibilitas teknologi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan literasi digital.
3. Dalam menghadapi tantangan literasi digital, terdapat peluang besar untuk kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat. Kerjasama yang kuat dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat implementasi kebijakan literasi digital dan memaksimalkan dampaknya.
4. Pentingnya pendekatan holistik, dimana literasi digital tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang keamanan siber, evaluasi informasi, etika digital, dan keterampilan kritis lainnya
5. Perlunya evaluasi dan pemantauan untuk memastikan keberhasilan kebijakan literasi digital. Hal ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area perbaikan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kesimpulan-kesimpulan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan literasi digital.

## **2. Rekomendasi**

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT kebijakan literasi digital, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan:

1. Memperkuat aksesibilitas untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas teknologi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas infrastruktur teknologi, meningkatkan konektivitas internet, dan menyediakan perangkat yang terjangkau kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasamayang kuat antara pemerintah, sektor pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyediaan sumber daya, pelatihan, dan pengembangan kurikulum yang mencakup literasi digital.
3. Fokus pada pelatihan literasi digital yang efektif kepada tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat umum. Pelatihan ini harus meliputi keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi, kriticalitas dalam mengonsumsi informasi digital, keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai konteks.
4. Integrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sehingga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan modul atau pelajaran khusus yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
5. Gunakan platform digital media sosial dan kampanye lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Kampanye ini dapat menyediakan

informasi, saran, dan sumber daya praktis tentang literasi digital kepada masyarakat.

6. Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan literasi digital yang diimplementasikan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area perbaikan yang perlu diperhatikan. Dari hasil evaluasi, lakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai kebutuhan.
7. Selain menyediakan pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital juga penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas literasi digital, lokakarya, atau program pengajaran sebaya.

Rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan literasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi era digital.

## BAB 12

# Analisis Kebijakan Pendidikan Politik dan Kajian Reformasi

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

**M**eskipun istilah "pendidikan" banyak digunakan dalam budaya modern setiap hari, arti sebenarnya masih diperdebatkan. Pendidikan memiliki banyak arti yang berbeda, tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi bahkan di kalangan spesialis pendidikan. Setiap ahli mendefinisikan pendidikan berbeda satu sama lain. Variabilitas definisi ini pada hakekatnya merupakan fenomena yang wajar karena terdapat banyak disparitas di antara para ahli, terutama yang berkaitan dengan latar belakang, antara lain latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Politik Dalam Kajian Reformasi Dapat Dilihat Dari Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Dalam Konteks Sosial, Politik, Dan Pendidikan Suatu Negara. Reformasi Adalah Proses Perubahan Sistem Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Memperbaiki Kebijakan Publik, Dan Mengatasi Masalah Yang Ada Dalam Masyarakat. Dalam konteks pendidikan, analisis kebijakan pendidikan dalam kajian reformasi melibatkan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya, mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan yang ada, dan merumuskan strategi perubahan yang lebih baik untuk memperbaiki sistem pendidikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang

lebih inklusif, berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Dalam konteks politik, analisis kebijakan politik dalam kajian reformasi berkaitan dengan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ada, sistem politik yang berlaku, serta peran dan interaksi antara berbagai aktor politik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kajian reformasi, analisis kebijakan politik bertujuan untuk mendorong perubahan dalam sistem politik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian reformasi dapat melibatkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut: (1). Tuntutan masyarakat: Perubahan dalam tuntutan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan politik yang lebih baik seringkali menjadi pendorong utama bagi adanya kajian reformasi. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan berkualitas dan sistem politik yang akuntabel cenderung mendorong perubahan. (2) Evaluasi kebijakan sebelumnya: Analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian reformasi melibatkan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi ini mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut sebagai dasar untuk merumuskan perubahan kebijakan yang lebih baik. (3) Perubahan sosial dan politik: Perubahan sosial dan politik dalam suatu negara, seperti perubahan demografi, perkembangan teknologi, dan pergeseran kekuatan politik, dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian reformasi. Perubahan tersebut seringkali menciptakan kebutuhan akan adaptasi kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi yang baru. (4). Pengalaman negara lain: Analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian reformasi juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman negara lain dalam melakukan reformasi. Melihat contoh keberhasilan atau kegagalan reformasi di negara lain dapat memberikan wawasan dan pembelajaran yang berharga dalam merumuskan strategi

perubahan. Penjelsan Di Atas Dapat Di Identifikasih masalah Bahwa Pendidikan dan politik Secara nasional saat ini menghadapi problem atau masalah yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu: 1. Pendidikan Yang Setara. Jika inisiatif pemerintah di bidang pendidikan tidak mencakup semua masalah nasional di bawah lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka besar kecilnya negara menjadi keuntungan sekaligus masalah. Tugas untuk mencapai pemerataan dalam sistem pendidikan harus diselesaikan secara bertahap dan konsisten. Karena merupakan tanggung jawab setiap orang untuk memajukan negaranya dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas. 2. Standar Pendidikan. Standar pertumbuhan sumber daya manusia suatu bangsa didasarkan pada kualitas sistem pendidikannya. Jika pendidikan belum mencapai tujuannya, maka masih harus berkembang dari segi kualitas. Penilaian awal kaliber produk pendidikan dilakukan. 3. Pendidikan yang Efektif. Fokus efisiensi pendidikan adalah pada seberapa efektif sistem pendidikan dapat menggunakan sumber dayanya untuk melaksanakan tujuan pendidikan tertentu. Tingkat efisiensinya yang tinggi dapat disimpulkan jika digunakan dengan benar dan menghemat energi. Sebaliknya, jika terjadi sebaliknya, sistem pendidikan tidak efektif. Penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana yang digunakan, serta sumber daya manusia pada tingkat lembaga pendidikan merupakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan persoalan efisiensi pendidikan. 4. Masalah dengan Relevansi Pendidikan. Sejauh mana sistem pendidikan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan nasional disebut sebagai relevansi pendidikan. Semua disiplin ilmu seharusnya termasuk produk pendidikan.

Pendidikan politik diartikan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 34 ayat 3a, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memberikan dukungan finansial untuk inisiatif pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dan masyarakat.

Penjelasan dan permasalahan yang di identifikasih serta rumusan masalah yang diatas maka di pandang perlu menganalisis kebijakan melibatkan tinjauan terhadap kebijakan pendidikan dan politik yang telah diterapkan. Identifikasi kebijakan yang relevan dan pelajari konteks pelaksanaannya.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan termasuk menerapkannya. Menurut Hasbulla, proses pembuatan kebijakan adalah aktivitas politik yang terjadi selama berbagai tahapan pembuatan kebijakan politik. Kegiatan politik ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain dan disusun menurut urutan waktu, seperti penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. . Tergantung pada negara dan sistem hukum yang sesuai, landasan hukum untuk kebijakan pendidikan dan politik dapat berubah.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbulla [4] bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan

Dasar hukum kebijakan pendidikan dan politik dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur sistem pendidikan Dan Politik di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Merupakan konstitusi Indonesia yang menyediakan dasar hukum untuk pendidikan dan politik di negara ini. Undang-Undang Dasar mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak untuk pendidikan dan hak-hak politik. (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk tujuan pendidikan nasional, prinsip-prinsip pendidikan, struktur pendidikan, kurikulum, penyelenggaraan pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Undang-undang ini mengatur tentang hak, tugas, kewajiban, pengembangan profesional, dan sertifikasi bagi guru dan dosen di Indonesia. (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Undang-undang ini mengatur tentang pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, kurikulum, akreditasi, dan pengelolaan perguruan tinggi. (4). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini: Peraturan ini mengatur tentang standar proses pendidikan anak usia dini, termasuk standar kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. (5). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah: Peraturan ini mengatur tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, termasuk standar kurikulum. Standar kurikulum mencakup kompetensi inti,

kompetensi dasar, alokasi waktu pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. (6).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah: Peraturan ini mengatur tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). (7).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah: Peraturan ini mengatur tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, termasuk konten dan materi pembelajaran yang harus diajarkan dalam kurikulum. (8).Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini menetapkan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pendidikan. (9).Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pendidikan Karakter: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan sebagai bagian dari pendidikan nasional. Dari keterangan dasar hukum jelas bahwa Pendidikan dan politik saling keterkaitan dalam pelaksanaannya, atau implentasinya dalam pengambilan kebijakan baik dalam bidang Pendidikan maupun politik, Literasi politik Juga merupakan aspek penting dalam konsolidasi demokrasi. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik tidak jarang menyebabkan masyarakat apatis terhadap berbagai proses demokrasi dan dinamika politik pemerintahan di sekitarnya.

Dasar hukum diatas merupakan Langkah menganalisis kebijakan Pendidikan dan politik dalam membangun dan mengembangkan Pendidikan dan politik sehingga terbitlah undang- undang dan peratauran Menteri, yang di buat oleh pemerintah dari hal ini maka perlu dilakukan Langkah analisis kebijakan Pendidikan dan politik melalui analisis swot.

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Politik Dalam Kajian Reformasi**

### **1. Analisis SWOT**

Analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) pendidikan dan politik dalam kajian reformasi dapat memberikan pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan sektor pendidikan dan politik dalam konteks perubahan sistemik. Berikut adalah analisis SWOT pendidikan dan politik dalam kajian reformasi

#### **A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan.**

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dalam mempengaruhi Pendidikan dan politik Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi apapun yang telah dibuat pemerintah, dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan.

##### **1. Akses pendidikan yang luas S1**

Adanya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam kajian reformasi. Misalnya, program beasiswa atau subsidi pendidikan yang memungkinkan akses yang lebih luas ke pendidikan.

## **2. Kualitas pendidikan yang mumpuni S2**

Adanya lembaga pendidikan yang unggul dan tenaga pendidik berkualitas merupakan kekuatan dalam kajian reformasi. Kualitas pendidikan yang baik dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global.

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan mempengaruhi kebijakan Pendidikan dan politik

### **1. Ketimpangan akses Pendidikan w1**

Ketimpangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial, dapat menjadi kelemahan dalam kajian reformasi. Perlunya upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut agar semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

### **2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik w2**

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat menjadi kelemahan dalam kajian reformasi. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan menghambat perubahan yang efektif.

## **B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman.**

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) dan mempengaruhi kebijakan Pendidikan dan politik:

### **1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi O1**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk meningkatkan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang inovatif, serta

keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui platform digital.

## **2. Kebijakan reformasi politik 02**

Adanya kebijakan reformasi politik yang mengarah pada peningkatan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi peluang dalam kajian reformasi. Reformasi politik yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan inklusif.

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) dan mempengaruhi kebijakan Pendidikan dan politik

### **1. Ketidakstabilan politik T1**

Ketidakstabilan politik, konflik, atau ketegangan politik dapat menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketidakstabilan politik dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan dan politik yang efektif.

### **2. Ketimpangan sosial dan ekonomi T2**

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketimpangan tersebut dapat memperburuk akses pendidikan yang tidak merata dan mempengaruhi partisipasi politik yang adil.

Berdasarkan uraian di atas yang telah di uraikan, maka berikut disajikan matrik Analisis SWOT.

**C. Matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak matriks yang sesuai.**

**Tabel 1. Analisis Matriks SWOT**

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S1. Akses pendidikan yang luas S2. Kualitas pendidikan yang mumpuni	W15. Ketimpangan akses Pendidikan W16. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik
PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O24. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi O25. Kebijakan reformasi politik	T15. Ketidakstabilan politik T16. Ketimpangan sosial dan ekonomi

**Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Dan Politik**

Berdasarkan matriks analisis SWOT pada Gambar 2 Di atas, maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.

**D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta eksternal berupa peluang dan ancaman, maka selanjutnya dikembangkanlah dan di kaitkan dengan sejumlah strategi, karena Pendidikan bukan hanya dalam ruang lingkup sosial dan budaya, tetapi mencakup pada segala bidang, termasuk bidang politik :berikut Strategi SO

(*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

**a. Kekuatan (*Strengths*) dan strategi yang di hasilkan SO**

Berikut ini adalah kaitannya beberapa strategi yang menggunakan kekuatan (*Strengths*) untuk memanfaatkan peluang (*Opportunities*) dalam pendidikan dan politik: 1) Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi: Mengembangkan program *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan konten pendidikan berkualitas, seperti video pembelajaran, materi interaktif, dan platform belajar online. 2).Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media sosial: Menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan partisipasi politik masyarakat, seperti menyebarkan informasi tentang pemilihan umum, debat politik, atau kampanye sosial. Mendorong dialog dan diskusi politik melalui platform media sosial untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. 3).Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil: Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pendidikan dan politik untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat. 4). Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum: Mendorong pengembangan metode pembelajaran yang inovatif,

seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran kolaboratif, untuk meningkatkan keterlibatan dan minat siswa dalam pendidikan. 5). Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Membangun jejaring internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman: Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi internasional dalam rangka pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam bidang pendidikan dan politik. Mengikuti dan mengadakan konferensi, seminar, atau pertemuan internasional untuk memperluas wawasan dan koneksi dengan pemangku kepentingan global dalam bidang pendidikan dan politik. 6). Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah: Membangun struktur partisipasi siswa di tingkat sekolah, seperti dewan siswa atau komite siswa, yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada siswa dalam hal kepemimpinan, kerjasama, dan kemampuan komunikasi untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.

#### **b. Kelemahan (*Weaknesses*) dan strategi yang di hasilkan WO**

Ketimpangan akses pendidikan: Ketimpangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial, dapat menjadi kelemahan dalam kajian reformasi. Perlunya upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut agar semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik: Kurangnya

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat menjadi kelemahan dalam kajian reformasi. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan menghambat perubahan yang efektif.

Berikut ini Adalah Beberapa Strategi Yang Menggunakan Pemangkasan Kelemahan (*Weaknesses*) Untuk Memanfaatkan Peluang (*Opportunities*) Dalam Pendidikan Dan Politik Sebagai berikut: 1) Meningkatkan akses pendidikan melalui mitigasi ketimpangan: Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab ketimpangan akses pendidikan, seperti infrastruktur yang tidak memadai atau kurangnya dukungan finansial bagi kelompok rentan. Mengalokasikan sumber daya tambahan dan program khusus untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial. 2) Meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan kesadaran: Mengadakan kampanye kesadaran politik untuk mengatasi kelemahan dalam partisipasi politik, seperti kurangnya pengetahuan tentang hak-hak politik atau rasa tidak percaya terhadap proses politik. Melakukan pendidikan politik yang terarah, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. 3).Memperkuat kualitas pendidikan melalui pengembangan tenaga pendidik: Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara terus-menerus kepada guru dan staf pendidikan untuk mengatasi kelemahan dalam kualitas pendidikan. Mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan universitas dan institusi pendidikan tinggi untuk memperkuat program pengembangan profesional bagi para pendidik. 4).Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik:

Mengatasi kelemahan dalam pemanfaatan teknologi dengan memberikan pelatihan dan akses yang memadai bagi guru, siswa, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan dan partisipasi politik. Mendorong pengembangan aplikasi atau platform teknologi yang mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan pendidikan dan partisipasi politik.

5).Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga dan pemangku kepentingan: Membentuk forum atau kelompok kerja untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan serta politik yang efektif. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan dan politik untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang secara holistik.

6).Mendorong pendekatan inklusif dalam pendidikan dan politik: Memastikan bahwa pendidikan dan politik mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan individu, termasuk mereka yang memiliki kelemahan atau berkebutuhan khusus.

Mendorong pengembangan kebijakan dan program yang memperhatikan perspektif gender, budaya, agama, dan kelompok minoritas

**c. Peluang (*Opportunities*) dan strategi yang di hasilkan ST**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk meningkatkan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang inovatif, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui platform digital. Kebijakan reformasi politik: Adanya kebijakan reformasi politik yang mengarah pada

peningkatan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi peluang dalam kajian reformasi. Reformasi politik yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan inklusif.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang menggunakan kekuatan (*Strengths*) untuk mengatasi ancaman (*Threats*) dalam pendidikan dan politik sebagai berikut 1). Meningkatkan literasi politik dan pendidikan masyarakat: Menggunakan kekuatan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, termasuk pemahaman tentang proses politik, hak-hak politik, dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Melibatkan lembaga pendidikan dalam menyediakan program pendidikan politik yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ancaman politik yang ada. 2). Membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi terkait: Memanfaatkan kekuatan dalam memiliki akses ke lembaga pendidikan dan organisasi terkait untuk membangun jejaring dan kemitraan yang kuat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pembelajaran yang fokus pada memahami dan mengatasi ancaman dalam politik, seperti pelatihan pemikiran kritis dan analisis politik. 3). Memperkuat tata kelola pendidikan dan politik: Menggunakan kekuatan dalam sistem tata kelola yang baik untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pendidikan dan politik. Memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah ancaman korupsi, nepotisme, atau praktik tidak etis dalam sistem pendidikan dan politik. 4). Mendorong partisipasi aktif dalam proses politik: Memanfaatkan kekuatan dalam partisipasi masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap

proses politik yang kurang inklusif atau otoriter. Mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan debat publik untuk memperkuat demokrasi dan mengatasi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan keadilan politik. 5). Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik: Memanfaatkan kekuatan teknologi untuk melawan ancaman dalam pendidikan dan politik, seperti disinformasi, propaganda, atau serangan siber. Mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital, literasi media, dan keterampilan kritis untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman teknologi dalam politik. 6). Memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dan politik: Menggunakan kekuatan dalam komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan untuk mengatasi ancaman diskriminasi, segregasi, atau marginalisasi dalam pendidikan dan politik. Mendorong kebijakan inklusif yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam pendidikan dan politik.

**d. Ancaman (*Threats*): dan strategi yang di hasilkan WT**

Ketidakstabilan politik: Ketidakstabilan politik, konflik, atau ketegangan politik dapat menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketidakstabilan politik dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan dan politik yang efektif. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketimpangan tersebut dapat memperburuk akses pendidikan yang tidak merata dan mempengaruhi partisipasi politik yang adil. Untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam pendidikan dan politik, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan: 1). Memperkuat partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dan politik melalui mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik, forum diskusi, atau kelompok kerja. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola pendidikan dan politik. 2). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan politik melalui publikasi informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan, program, anggaran, dan tindakan politik. Menerapkan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, tata kelola pendidikan, dan proses politik. 3).Mendorong partisipasi siswa dalam pendidikan: Memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, seperti melalui pengembangan dewan siswa atau asosiasi siswa. Mendorong pendidikan yang responsif dan inklusif, dengan melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dalam proses perencanaan dan evaluasi kurikulum. 4).Meningkatkan kualitas pendidikan dan politik: Melakukan evaluasi dan perbaikan berkala terhadap sistem pendidikan dan politik, dengan fokus pada peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas. Mendorong pengembangan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik serta politisi melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi. 5).Memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas untuk bekerja sama dalam perbaikan pendidikan dan politik. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi untuk memastikan perspektif yang beragam dan kepentingan yang saling didengar dan diperhatikan.

6).Memanfaatkan teknologi dan inovasi: Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas dalam pendidikan dan politik. Mengembangkan platform digital, aplikasi mobile, atau sistem online untuk mempermudah akses informasi, partisipasi, dan komunikasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya dibuatkan matriks strategi dari analisis SWOT yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut,

SWOT ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN POLITIK	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	S1. Akses pendidikan yang luas S2. Kualitas pendidikan yang mumpuni	W1. Ketimpangan akses Pendidikan W.2.Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI SO (Strenght-Opportunities)	STRATEGI WO (Weakness-Opportunities)
O12. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi O13. Kebijakan reformasi politik	SO-23. Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi SO-24. Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media social SO-25. Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil SO-26. Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum	WO-22.Meningkatkan akses pendidikan melalui mitigasi ketimpangan WO-23.Meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan kesadaran WO-24.Memperkuat kualitas pendidikan melalui pengembangan tenaga pendidik WO-25.Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik

	<p>SO-27. Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.</p> <p>SO-28. Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah</p>	<p>WO-26. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga dan pemangku kepentingan</p> <p>WO-27. Mendorong pendekatan inklusif dalam pendidikan dan politik</p>
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI ST (Strength-Threats)</b>	<b>STRATEGI WT (Weakness-Threats)</b>
<p>T14. Ketidakstabilan politik</p> <p>T15. Ketimpangan sosial dan ekonomi</p>	<p>ST-22. Meningkatkan literasi politik dan pendidikan masyarakat</p> <p>ST-23. Membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi terkait</p> <p>ST-24. Memperkuat tata kelola pendidikan dan politik</p> <p>ST-25. Mendorong partisipasi aktif dalam proses politik</p> <p>ST-26. Memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dan politik</p>	<p>WT-23. Memperkuat partisipasi masyarakat</p> <p>WT-24. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p> <p>WT-25. Mendorong partisipasi siswa dalam Pendidikan</p> <p>WT-26. Meningkatkan kualitas pendidikan dan politik</p> <p>WT-27. Memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan</p> <p>WT-28. Memanfaatkan teknologi dan inovasi</p>

**Gambar 2. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan politik**

**F. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi :

a. Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

b. Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

c. Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Berikut tabel

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>STRATEGI SO</b> <i>(Strength-Opportunities)</i> <b>KEKUATAN MEMANFAATAKAN PELUANG</b>					
1	Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi	4	0.12	2	0.24
2	Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media social	4	0.15	3	0.45
3	Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil	4	0.15	3	0.45
4	Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum	4	0.12	4	0.48
5	Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.	3	0.15	4	0.6
6	Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah	4	0.15	3	0.45
<b>Sub Total</b>					<b>2,67</b>

STRATEGI WO (Weakness-Opportunities) KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG					
1	Meningkatkan akses pendidikan melalui mitigasi ketimpangan	2	0.08	3	0.08
2	Meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan kesadaran	2	0.08	2	0.24
3	Memperkuat kualitas pendidikan melalui pengembangan tenaga pendidik	2	0.08	3	0.16
4	Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik	2	0.08	4	0.12
5	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga dan pemangku kepentingan	2	0.08	4	0.16
6.	Mendorong pendekatan inklusif dalam pendidikan dan politik	1	0,04	2	0,08
<b>Sub Total</b>					<b>0.68</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>34</b>	<b>2</b>		<b>3,35</b>
STRATEGI ST (Strength-Threats) KEKUATAN DALAM MENGATSI ANCAMAN					
1	Meningkatkan literasi politik dan pendidikan masyarakat	4	0.15	4	0.06
2	Membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi terkait	4	0.15	3	0.45
3	Memperkuat tata kelola pendidikan dan politik	4	0.15	4	0.06
4	Mendorong partisipasi aktif dalam	3	0.12	2	0.24

	proses politik				
5	Memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dan politik	3	0.12	4	0.48
				13	<b>1,29</b>
<b>Sub Total</b>					<b>1.29</b>
<b>STRATEGI WT (Weakness-Threats) KELEMAHAN DALAM MENGATASI ANCAMAN</b>					
1	Memperkuat partisipasi masyarakat	2	0.08	3	0.24
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	2	0.08	3	0.24
3	Mendorong partisipasi siswa dalam Pendidikan	1	0.04	4	0.16
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dan politik	2	0.08	4	0.24
5	Memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan	1	0.04	4	0.16
6	Memanfaatkan teknologi dan inovasi	2	0.08	4	0.16
<b>Sub Total</b>					<b>1.2</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>		<b>28</b>		<b>22</b>	<b>2,49</b>

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Strategi SO : $3.51+2.49 = 6$	Strategi WO : $1.2+0.68 = 1,88$
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Strategi ST : $2.67+1.2 = 3,87$	Strategi WT : $1.2+1.2 = 2,4$

**Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan politik**

Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi *Strength-Opportunities* dengan nilai 6. Sehingga strategi kebijakan Pendidikan dan politik yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah **Strategi SO (*Strength-Opportunities*)**. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritasasi faktor, diketahui bahwa **Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)** merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan Pendidikan dan politik disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 1. Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 2

**Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Akses pendidikan yang luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi</li> <li>b. Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media social</li> <li>c. Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil</li> </ul>
2	Kualitas pendidikan yang mumpuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum</li> <li>b. Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.</li> <li>c. Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 1, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 2.

## 1. Akses pendidikan yang luas

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan berdasarkan Strategi Meningkatkan Program Pengembangan Akses pendidikan yang luas adalah sebagai berikut :

### a. Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi

Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi adalah upaya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel kepada individu yang ingin memperoleh pendidikan. Nicholas Negroponte: Nicholas Negroponte, pendiri Media Lab di Institut Teknologi Massachusetts (MIT), telah mengadvokasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Dia berpendapat bahwa dengan adanya perangkat elektronik, seperti laptop, yang terhubung ke internet, pendidikan dapat diakses oleh semua orang tanpa terbatas oleh batasan fisik atau geografis. Saat ini Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sehingga, tuntutan mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal oleh masyarakat sangat tinggi. Dengan tingkat kebutuhan akan layanan pendidikan yang tinggi.

### b. Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media social

Media sosial memberikan platform di mana individu dapat dengan mudah berbagi informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Mereka dapat berinteraksi dengan pemimpin politik, kelompok advokasi, dan warga lainnya, serta memobilisasi dukungan untuk kampanye atau gerakan politik tertentu. Media sosial memungkinkan individu dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis untuk terhubung secara langsung. Ini memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses atau keterlibatan dalam

proses politik untuk berpartisipasi, berbagi pandangan, dan berdiskusi tentang isu-isu penting

c. Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil

Kemitraan dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pusat penelitian, dapat memberikan akses kepada organisasi masyarakat sipil terhadap sumber daya pendidikan yang berharga. Misalnya, lembaga pendidikan dapat berbagi kurikulum, materi pembelajaran, dan fasilitas fisik mereka untuk meningkatkan program pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil. Lembaga pendidikan memiliki pengetahuan dan keahlian yang berharga dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk mengakses pengetahuan dan keahlian ini, baik melalui pelatihan, bimbingan, atau kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan program .

## **2. Kualitas pendidikan yang mumpuni**

a. Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum

Pertukaran pengetahuan dan pengalaman: Kemitraan antara lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan tantangan di lapangan, sementara lembaga pendidikan dapat berbagi pengetahuan akademik dan metodologi pembelajaran yang terkini. Kolaborasi semacam ini dapat memicu inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Desain dan pengembangan kurikulum yang relevan: Kemitraan ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil

untuk memberikan masukan langsung dalam proses desain dan pengembangan kurikulum. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat, lembaga pendidikan dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Ini dapat mencakup integrasi keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, pendekatan inklusif, dan pengembangan keahlian kritis. Kolaborasi dalam penelitian dan eksperimen: Kemitraan dapat mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan penelitian dan eksperimen terkait pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dalam menguji metode pembelajaran baru, teknologi pendidikan, atau pendekatan kurikulum yang inovatif. Hasil penelitian dan eksperimen ini dapat memberikan wawasan dan bukti yang berguna dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan teknologi pendidikan: Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Bersama-sama, mereka dapat menjelajahi cara-cara baru untuk menggunakan platform digital, perangkat lunak, atau aplikasi mobile dalam mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, terjangkau, dan mudah diakses. Inovasi dalam penggunaan teknologi pendidikan dapat membuka pintu bagi pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi dan pembaruan berkelanjutan: Kemitraan ini memungkinkan evaluasi dan pembaruan berkelanjutan terhadap kurikulum dan pendekatan pembelajaran. Dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan dapat mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk

meningkatkan kurikulum, mengidentifikasi kekurangan, dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.

- b. Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya, merupakan langkah penting dalam memastikan pendidikan yang komprehensif dan relevan bagi semua peserta didik. Berikut adalah penjelasan mengenai hal ini: (1)Inklusifitas: Pendekatan kurikulum inklusif menekankan pentingnya mengakomodasi perbedaan individu, termasuk perbedaan latar belakang sosial, kebutuhan khusus, dan kemampuan. Kurikulum yang inklusif menyediakan ruang untuk memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik secara individual, sehingga memastikan bahwa semua siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. (2)Aspek Sosial: Pendekatan kurikulum yang holistik mencakup aspek sosial yang luas. Ini berarti memperkenalkan siswa pada isu-isu sosial yang relevan seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, toleransi, keberagaman, dan pemahaman masyarakat yang beragam. Dengan melibatkan siswa dalam pemahaman dan refleksi terhadap masalah sosial, kurikulum ini mendorong pemikiran kritis, empati, dan keterlibatan sosial. (3).Aspek Ekonomi: Mengadopsi pendekatan kurikulum yang mencakup aspek ekonomi berarti memberikan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan kepada peserta didik. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang pengelolaan keuangan pribadi, pengusaha kecil, pemahaman tentang pasar tenaga kerja, dan keterampilan kewirausahaan. Dengan demikian, peserta didik menjadi

lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan memiliki landasan pengetahuan yang kuat untuk masa depan mereka. (4).Aspek Lingkungan: Penting untuk memasukkan aspek lingkungan dalam kurikulum agar siswa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan. Ini mencakup pembelajaran tentang keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan, kurikulum tersebut mendorong kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan di sekitar mereka. (5)Aspek Budaya: Kurikulum yang holistik juga memasukkan aspek budaya, mengakui keragaman budaya yang ada di masyarakat. Melalui pembelajaran tentang budaya, tradisi, dan sejarah, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang identitas budaya mereka sendiri dan budaya orang lain. Hal ini mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, mengurangi prasangka, dan membangun toleransi di antara siswa.

c. Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah

Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah merupakan pendekatan yang memperkuat peran siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya dan manfaat dari partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah: (1).Pemberdayaan siswa: Partisipasi siswa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pembelajaran mereka di sekolah. Hal ini membantu pemberdayaan siswa, meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah, dan memperkuat motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran.

(2).Pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan: Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah melibatkan kerjasama, komunikasi, negosiasi, dan keterampilan kepemimpinan. Siswa akan belajar berbagi pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain, bekerja dalam tim, dan mencapai kesepakatan bersama. Ini membantu pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang penting dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Peningkatan kualitas keputusan: Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Siswa memiliki pengalaman langsung dalam konteks pembelajaran dan pengalaman sehari-hari di sekolah, sehingga mereka dapat memberikan perspektif unik dan ide-ide inovatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang dewasa. Dengan melibatkan siswa, keputusan yang diambil menjadi lebih beragam, inklusif, dan akurat.

(3).Pembelajaran yang relevan: Ketika siswa terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah, mereka memiliki pengaruh langsung terhadap isi, metode, dan pelaksanaan pembelajaran. Ini memungkinkan penyesuaian dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Siswa dapat berkontribusi dalam menentukan topik pembelajaran, pemilihan materi, dan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar mereka.

(4).Penciptaan iklim sekolah yang inklusif dan demokratis: Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah memperkuat prinsip demokrasi, merangsang pembentukan iklim sekolah yang inklusif, demokratis, dan menghargai keragaman. Hal ini menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didengar, dihargai, dan memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat mereka. Iklim sekolah yang

inklusif dan demokratis mendorong rasa kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif.

Akses pendidikan yang luas berarti memberikan kesempatan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, untuk memperoleh pendidikan. Ini mencakup peningkatan akses fisik, seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau, serta akses finansial, melalui bantuan keuangan atau program beasiswa. Akses pendidikan yang luas juga melibatkan mengatasi hambatan seperti diskriminasi gender, ketimpangan regional, atau kesenjangan etnis sehingga semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk belajar. Di sisi lain, kualitas pendidikan yang mumpuni berfokus pada penyediaan pendidikan yang efektif, relevan, dan berkualitas tinggi bagi setiap individu. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang komprehensif, penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan responsif, serta pemberian sumber daya yang memadai, seperti guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan teknologi pendidikan yang mutakhir. Kualitas pendidikan yang mumpuni juga melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian hasil pembelajaran yang optimal.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dalam analisis kebijakan pendidikan dan politik terkait akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni saling terkait dan harus diperhatikan secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan yang efektif dan inklusif.

2. Keberhasilan mencapai akses pendidikan yang luas membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan seperti ketimpangan regional, sosial, budaya, atau gender. Program beasiswa dan bantuan keuangan, infrastruktur pendidikan yang memadai, dan pengembangan teknologi pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas.
3. Kualitas pendidikan yang mumpuni melibatkan pengembangan kurikulum yang inklusif dan holistik, penggunaan metode pengajaran inovatif, serta fasilitas dan sumber daya yang memadai. Pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan peninjauan berkala terhadap kurikulum adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, industri, dan lembaga pendidikan tinggi dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan membangun sinergi untuk mencapai akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni.
5. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan dan politik. Data dan hasil evaluasi harus digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengarahkan sumber daya dengan efektif.
6. Pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam mencapai akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni.

## **2. Rekomendasi**

Berikut adalah beberapa rekomendasi berdasarkan kesimpulan analisis kebijakan pendidikan dan politik terkait akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni:

1. Membangun kebijakan inklusif yang mendukung akses pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Meningkatkan akses pendidikan di daerah pedesaan dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai.
2. Meningkatkan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk individu dengan latar belakang ekonomi rendah agar dapat mengakses pendidikan secara merata. Memperbarui dan meninjau kurikulum secara berkala agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
3. Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang kontinu bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Menggunakan teknologi pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran.
5. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, industri, dan lembaga pendidikan tinggi untuk memperkaya pengalaman pembelajaran.
6. Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara berkala untuk mengukur kemajuan dalam mencapai akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni.
7. Membuat kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, konsisten, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Menggunakan data dan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengarahkan sumber daya dengan efektif.

## BAB 13

# Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

**K**ebijakan Pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu Negara. dalam penyelenggaraan Pendidikan di setiap lembaga Pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan dalam Negara tempat lembaga Pendidikan itu ada.

Di Indonesia yang merupakan Negara hukum juga menitik beratkan sektor Pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negaranya. Bagaimana tidak Kebijakan demi kebijakan selalu di lakukan perubahan untuk menghasilkan kualitas Pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan. Pendidikan merupakan sebuah alat utama demi tercapainya tujuan sebuah Negara karena muara dari semua kebutuhan Negara harus berdasarkan pengetahuan yang memadai dan Sumber daya yang telah di siapkan sejak dini.

Pendidikan adalah sebuah dasar menuju pembangunan sumber daya manusia. (SDM ) yang berkualitas sumber daya manusia merupakan sebuah kunci terwujudnya tahun 2045 dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. dimana mencetak sumber daya manusia yang utuh, adil dan sejahtera, aman dan damai, yang di mulai sejak usia dini, berbagai upaya

perubahan pendidikan telah kita tempuh. Akan tetapi berbagai masalah tetap muncul mewujudkan pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan yang mendasar, yakni soal kualitas pendidikan. Dan tingkat SDM yang masih rendah, oleh karena itu melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan berfokus pada kebijakan pendidikan implementasi kurikulum merdeka belajar dinilai lebih fleksibel untuk dorongan kreatifitas anak dengan peningkatan kualitas layanan satuan PAUD hal ini merupakan pondasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menata dan memaksimalkan pelayanan pendidikan anak usia dini PAUD yang menjadi sebuah kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang di cita citakan oleh para pendiri pendidikan sejak awal kemerdekaan, melalui kebijakan terkini yang diindonesia yakni pengimplentasia kurikulum merdeka belajar menjadikan anak usia dini bebas berkeksplorasi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang merdeka dan di merdekakan.

Pendidikan di Indonesia bagi PAUD masih jauh dari harapan masih belum terlaksana dengan baik rasio layanan lembaga pendidikan anak usia dini di bandingkan dengan yang belum di layani masih terlalu besar jumlahnya. hal ini sangat memprihatinkan. Jika ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintah, masrakat dan orang tua aka n menimbulkan kendala bagi peningkatan SDM, dengan baik olehnya berdasar diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bendang-Undang No 20 tanhun 2003 pasal ayat 1 Pasal 1 butir 14 bahwa pendidikan Anak Usia Dini PAUD upaya pembinaan untuk anak usia dini dari sejak lahir sampai sampai pada usia 6 tahun ydan dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani di diharapkan agar anak memperoleh kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih ketingkat lebih lanjut,

Di Indonesia pendidikan terbagi ke dalam tiga jalur, yakni melalui Jalur formal, Jalur nonformal, dan jalur informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Prioritas Kebijakan Pendidikan untuk Memajukan Pembelajaran di Indonesia, Kualitas Pendidikan di Indonesia ini, tergolong rendah, dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO. Hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Prioritas Kebijakan Pendidikan untuk Memajukan Pembelajaran di Indonesia,.

Dalam memacu pendidikan yang bermutu dan relevan para ahli analisis hal yang yang urgen adalah peningkatan bagaimana menganalisis segala kebijakan dengan tepat. dalam menghadapi segala bentuk permasalahan bukan hanya isu – isu yang ada akan tetapi permasalahan pada pendidikan anak usia dini namun juga dalam hal masalah pada guru/pendidik anak usia dini, karena rata-rata para pendidik PAUD di Indonesia masih berkualifikasi rendah. juga dalam hal rendahnya rendahnya prestasi siswa, rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan kesejahteraan masih tergolong rendah yang ada dalam pendidikan sebab bukan hanya faktor anak usia dini namun juga faktor guru/ pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya dalam hal mendidik anak. olehnya seorang guru PAUD harus memiliki kemampuan atau memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan PAUD, agar dapat melakukan pengajaran dengan baik dan memaksimalkan potensi – potensi yang dimiliki anak perlu di perhatikan sebagai kebijakan yang dilakukan kebijakan yang efisien.

Dari identifikasi masalah diatas dapat di rumuskan sebagai berikut Bagaimanakah pemenuhan dan pemerataan lembaga PAUD dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar

anak serta bagaimana peningkatan penyediaan sarana prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan guru, hal ini perlu di perhatikan berbagai kebijakan yang di lakukan pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga satuan PAUD dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan rumusan permasalahan Pendidikan diatas maka dapat di gambarkan bagaimana kualitas Pendidikan kita dalam menyiapkan Sumber daya manusia permasalahan dalam rangka peningkatan mutu layanan dapat di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dan dalam proses penyelenggaraan PAUD tidak terlepas dari layanan pendidikan yang berkualitas dimana pendidikan sejak dini adalah menjadi dasar dalam mempersiapkan SDM sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas dalam menyikapi segala permasalahan terkait untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu peningkatan pendidikan menghadapi tantangan globalisasi. dengan memperhatikan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini secara berkelanjutan karena dasar hukum menjadi tolak ukur dan patokan dalam penyelenggaraan Pendidikan maka dibawah ini diuraikan apa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan khususnya pada pendidikan jenjang paling bawah yakni Pendidikan Anak Usia Dini.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan**

Adapun dalam proses Pendidikan tentunya harus mengacu pada dasar hukum yang mengatur segala kebijakan yang di tetapkan yang di uraikan sebagai berikut : Undang – Undang UD RI tahun 1945 pasal 31 ayat 1. yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggaraan Pendidikan satu sistem yaitu sistem Pendidikan Nasional yang tujuannya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 yang memuat tentang pedoman penerapan Pedoman yang ada pada isi kurikulum tentang pembelajaran Standar PAUD terbagi menjadi dalam empat kelompok, yaitu: Standar tingkat pencapaian Perkembangan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar isi dan Standar Proses serta penilaian, Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Melihat landasan hukum penyelenggaraan Pendidikan di atas, paling tidak ada 4 peraturan yang belum banyak dipahami oleh yaitu terkait memasuki awal tahun 2022 telah ada beberapa produk hukum terkait dunia Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. dengan keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjadikan produk hukum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Landasan tertinggi penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional setelah UUD 1945, tetap berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**

NO	DOKUMEN KEBIJAKAN
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 Tentang Renstra
3	Permendikbudristek Nomor 7 TAHUN 2022 Tentang Standar Isi Pada PAUD Jenjang DIKDAS

## **B. Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**

### **1. Analisis SWOT**

Presedur analisis kebijakan merupakan suatu tehnik yang digunakan dalam suatu kajian berfikir manusia dalam upaya untuk menggali suatu informasi dalam dunia pendidikan terkait dengan masalah – masalah yang timbul dan perlu diadakan evaluasi, di analisis secara bijak dalam upaya pemecahan masalah terhadap alternative yang timbul. Pada kegiatan analisis swot dilakukan analisis internal dan analisis eksternal lembaga PAUD analisis internal untuk mendapatkan kekuatan –kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga PAUD analisis eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran peluang dimiliki tantangan yang dihadapi oleh lembaga PAUD kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dalam memanfaatkan peluang untuk menghadapi tantangan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan adanya kelebihan yang dimiliki dapat menjadikan layan PAUD menjadi berkualitas.

Berikut adalah beberapa kompilasi permasalahan yang ada dan diharapkan nantinya tersedia solusi agar terciptanya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dapat di uraikan pada analisis swot atas

kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini . kekuatan yang harus di perhitungkan dengan cermat dalam pengimplemetasian kebijakan pemerintah dalam layanan pendidikan anak usia dini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Faktor – faktor internal yang mempengaruhi kualitas Kekuatan (*strength*) dan Kelemahan (*Weaknes*) Layanan di satuan PAUD.

Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan (*strength*) yang di singkat sampai dengan pada kualitas layanan PAUD saat adalah situasi atau kondisi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang bersifat internal merupakan kekuatan yang terkait dengan kebijakan dari lembaga PAUD ini dapat di uraikan Sbb :

- a. Layanan PAUD mulai terbentuk (S1)

kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program layanan PAUD kentyataannya kesadaran masyarakat, pemerintah dan orang tua sudah ada, dewasa ini layanan PAUD dengan berbagai bentuk / model PAUD sudah tersebar di seluruh wilayah. Mereka menyadari bahwa anak yang memperoleh layanan PAUD akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu PAUD tak luput dari perhatian pemerintah berbagai Kebijakan Pemerintah tentang PAUD hadir sebagai sub-struktural pemerintah, dalam masyarakat telah tumbuh berkembang dalam berbagai jenis layanan PAUD di masyarakat baik jenis layanan pendidikan secara Informal, Formal dan Non Formal.

- b. Jumlah Anak Usia Dini Masih Relatif Banyak (S2)

Indonesia termasuk Negara yang jumlah penduduk sangat banyak jika di lihat dari segi kuantitas di mulai anak usia dini masih tergolong banyak. dengan banyaknya jumlah anak usia dini dan dari jumlah anak yang masih terdapat anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD, hal ini merupakan kekuatan untuk dapat memaksimal

terhadap anak usia dini ini merupakan potensi bagi pendidikan masa akan datang mempersiapkan pendidikan sejak dini pemerintah di bawah Dikjen PAUD Formal, Non Formal dan Informal hal ini menjadi perhatian dari semua pihak terkait di lihat dari struktur organisasi pendidikan anak usia dini di Indonesia kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan ketersediaan lokasi yang luas dengan jumlah anak usia dini yang dalam jumlah banyak memungkinkan untuk pembangunan di semua akses untuk membuka lembaga PAUD sebagai layanan agar anak usia Dini dapat secara merata terserap di berbagai satuan PAUD yang ada di sekitarnya, agar semua anak memperoleh pendidikan secara maksimal di semua layanan PAUD.

## 2. Kelemahan (*Weaknes*)

Adapun yang menjadi kelemahan pendidikan anak usia dini Kelemahan yang bersipat internal harus diperhitungkan dengan cermat mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini :

### a. Sarana Prasarana kurang memadai (W1)

Sarana Prasarana pada layanan lembaga PAUD masih belum memadai ada pemerataan, terutama pada daerah pedesaan. Terkadang gedung yang di pakai hanya pinjam pakai, sehingga tidak memungkinkan bagi lembaga itu untuk menata sesuai dengan layaknya lembaga PAUD yang memenuhi kebutuhan anak dan stimulus terhadap aspek pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan karakteristik untuk menjadi bekal melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut.

### b. SDM Kurang berkompeten (W2)

Mayoritas para tenaga pendidik dan kependidikan yang meangani lembaga PAUD belum berkualifikasi rendah yakni bukan dari lulusan S1 PG – PAUD masih berasal

dari lulusan SMA/SMK sederajat sehingga itu kemampuan di dalam melaksanakan pengajaran masih rendah.

Dengan melihat berbagai kelemahan – kelemahan yang ada pada layanan PAUD maka diperlukan kerja sama dari stakeholder yang terkait anataranya orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam peningkatan layanan PAUD untuk meningkatkan tujuan pendidikan nasional dan tarap hidup bangsa menyiapkan generasi 2045 yang berkualitas.

### 3. Peluang (*OPPORTUNITIES*)

Dengan melihat berbagai realita kekuatan dan kelemahan yang diuraikan diatas peluang yang harus di ciptakan dan di kembangkan dengan segera dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan demi tercapainya layanan PAUD yang optimal dan berkualitas saat ini berikut berbagi peluang yang di luar dan dalam lembaga bisa kita lakukan :

- a. Adanya Perhatian Pemerintah tentang layanan PAUD (O1)  
Memberikan motivasi kepada setiap lembaga PAUD baik Formal, Informal dan Non formal akan lebih memperhatikan Sarana prasarana dengan bekerja sama dengan saling bekerja sama antar masrakat pemerintah dalam hal ini pemangku, para usahawaan, LSM yang peduli terhadap pengembangan layanan PAUD di seluruh wilayah baik di perkotaan dan di pedesaan.mengadakan penyebaran pemerataan lembaga PAUD di kota dan di desa, memfasilitasi Stekholder masyarakat dan pemerintah, LSM desa yang belum memiliki lembaga PAUD untuk mendirikan lembaga PAUD. Dan juga mensosialisasikan di pentingnya layanan PAUD di media cetak dan media elektronik. Perolehan agar setiap anak berhak mendapatkan layanan PAUD.
- b. Pengalokasian dana APBN dan APBD secara signifikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (O2)

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan P3K Bagi tenaga Honorer, Menciptakan layanan (LPTK) Diklat atau pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD untuk meningkatkan kualitas para pendidik PAUD, juga mengalokasikan dana APD dan APBN untuk memeberikan honor atau gaji bagi pendidik PAUD yang lebih baik dan memadai agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke S1 PG – PAUD dalam meningkatkan Kuaalitas SDM sebagai Pendidik PAUD, juga merekrut dan membuka pengngkatan ASN baik pendidik di lembaga PAUD Negeri dan swawta. Demi peningkatan pelayanan terhadap anak usia dini yang optimal berkualitas yang meliputi sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian di layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik formal nonformal maupun layanan informal.

Dengan melihat Peluang yang ada masyarakat dan pemerintah lebih memanfaatkan semua peluang ini dengan sebagai – baiknya guna peningkatan mutu pendidikan khususnya layanan lembaga PAUD, karena untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik diawali dari pelayanan pendidikan sejak dini.

#### 4. Tantangan

Tantangan yang harus di perhitungkan dalam hal kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada tepat sasaran sekarang ini tentang layanan PAUD ada beberapa hal yang harus di perhatikan :

##### a. Tekhnologi dan Informasi yang semakin Pesat (T2)

Dengan kemajuan tehnologi yang semakin maju dan informasi, serta adanya teknologi yang semakin maju dengan adanya gadget pada anak usia dini yang belum layak menggunakannya tetapi di kalangan atas para orang tua sudah memfasilitasi yang didalamnya memuat segala informasi yang tidak selayaknya di tonton oleh anak

sehingga mengakibatkan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak. Sehingga guru menjadi sulit untuk menerapkan konteks pembelajaran yang bertentangan dengan konten media sosial yang ditonton anak.

b. Biaya Pendidikan yang Semakin Tinggi (T3)

Dalam hal peningkatan mutu Pendidikan PAUD yang berkualitas Indonesia masih tergolong rendah karena hanya anak – anak yang orang tuanya memiliki penghasilan tinggi dapat menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD swasta yang biayanya sangat mahal, sehingga anak – anak lain yang penghasilan orang tuanya masih rendah dan di tuntut untuk kebutuhan mendasar maka memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Sehingga ini sangat mengakibatkan tidak adanya pemerataan layanan PAUD bagi semua anak.

**2. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak matriks yang sesuai.**

**Tabel 1. Analisis Matriks SWOT**

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
S15. Layanan PAUD mulai terbentuk S16. Jumlah anak usia dini masih relatif banyak	W17. Sarana Prasarana Kurang Memadai W18. SDM Kurang berkompeten
PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )
O26. Adanya Perhatian Pemerintah tentang layanan PAUD O27. Pengalokasian dana APBN dan APBD secara signifikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	T17. Tekhnologi Informasi yang semakin pesat T18. Biaya Pendidikan yang semakin Tinggi

**Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**

Berdasarkan matriks analisis SWOT pada Gambar 2, maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.

### **3. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta eksternal berupa peluang dan ancaman, maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weakness-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weakness-Threats*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan (*Strength*) dan strategi yang di hasilkan SO**

Hubungan berbagai strategi yang menggunakan kekuatan agar dapat memanfaatkan peluang adalah upaya memaksimalkan layanan pada pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan mengoptimalkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan layanan terhadap anak usia nol sampai enam tahun yang selalu distimulus melalui pemberian rangsangan terhadap anak. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan anak usia dini ini adalah agar pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak dapat dimaksimalkan agar anak siap untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk memaksimalkan layanan Paud yang berkualitas yang telah dirumuskan melalui standar Paud yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/2014. Indonesia haruslah belajar ke negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Negara berkembang seperti Kolombia dengan GDP yang lebih tinggi

dari negara Indonesia pun memiliki layanan paud yang memiliki ketimpangan.

Pada negara Indonesia, kesadaran para orang tua masih sangat rendah terhadap pendidikan anak usai dini. Tidak sedikit para orang tua yang menganggap remeh pendidikan anak usia dini. Sehingga banyak anak didik yang langsung masuk SD tanpa melalui bangku Pendidikan Anak usia dini. Akses layanan PAUD pun masih terbatas di negara kita dimana banyak desa desa yang belum memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menurut sumber data pada tahun 2020 terdapat 22.629 (26,85) desa yang belum memiliki layanan Pendidikan anak Usia Dini. Ada beberapa provinsi yang mencapai 50 % data desa yang belum memiliki layanan PAUD. Padahal layanan pendidikan anak usai dini dapat dilaksanakan dengan berbagai layanan yakni layanan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan anak usia dini formal dapat ditempuh melalui lembaga layanan taman kanak-kanak (TK) sedangkan layanan paud nonformal dapat diikuti anak melalui layanan kelompok bermain, satuan paud sejenis (SPS), maupun Taman Penitipan anak (TPA)

Masa anak usia dini adalah masa golden age dimana anak memiliki daya serap kognitif yang tinggi. Sehingga masa ini harus dilewati dengan baik oleh anak, kesempatan untuk memanfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya merupakan modal yang besar bagi seorang anak untuk mengarungi kehidupan dimasa yang akan datang. Memenuhi kebutuhan hak dasar anak usia dini dimana usaha perlindungan serta memaksimalkan hak untuk setiap murid adalah tugas dar negara. Setiap tahun melakukan sensus data yang didapatkan masih tetap konsisten diana anak belum terlayani pendidikannya secara maksimal. Padahal Indonesia selalu mendambakan akan datangnya generasi emas di tahun 2045. Genarasi emas tersebut tidak akan terwujud jika bangsa kita

tidak mampu melayani pendidikan anak usia dini dengan optimal.

b. Kelemahan (*Weakness*) dan strategi yang dihasilkan (WO)

1. Pemerataan Akses- Akses layanan PAUD di Indonesia belum merata

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki layanan PAUD di berbagai desa dengan persentasi yang minim sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah di negara kita untuk meningkatkan pemerataan pendidikan anak usia dini dan dengan berbagai layanan. Berdasarkan data yang di dapatkan pada tahun 2020 masih terdapat 26,85 persen desa yang tidak memiliki layanan PAUD. Provinsi Aceh, Provinsi Papua, serta Provinsi Papua Barat belum mencapai 50 % dari sejumlah desa yang ada di provinsi tersebut.

2. Sumber Daya Organisasi Sumber daya

Fokus utama pada upaya meningkatkan kinerja Direktorat PAUD. Upaya ini berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini. Guru dan tenaga kependidikan banyak yang selalu bekerja tanpa mengharpkan imbalan serta pamrih.

Guru dan tenaga kependidikan di Indonesia khususnya pada layanan PAUD masih banyak yang memiliki ijazah SLTA bahkan dibawah dari SLTA, Terutama para pendidik di layanan PAUD nonformal yakni sekitar 68 %. Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi direktorat, karena menurut standar nasional PAUD, pendidik PAUD mestinya berpendidikan S-1 atau D-4. Sebagian besar tenaga pendidik di layanan PAUD bekerja secara sukarela jika pun digaji jumlahnya sangat kurang dari kata cukup.

c. Peluang ( *Opportunities* )

Efisiensi anggaran, dengan adanya dana APBN dan APBD yang menstimulus program layanan PAUD. Upaya yang telah dijalankan dalam upaya peningkatan layanan PAUD sebagaimana contoh diatas adalah: (1) Bantuan RKB PAUD; (2) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD; (3) Bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marjinal; dan (4) Bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Usaha tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan PAUD di Indonesia.

Anak merupakan sumber daya manusia yang mesti di lindungi dan dijaga oleh pemerintah negara Indonesia. Anak adalah investasi negara yang nanti menjaga serta meneruskan cita-cita bangsa.

d. Ancaman ( *Threats* ): dan strategi yang di hasilkan WT

Perkembangan teknologi dapat mendorong terwujudnya beragam terobosan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di belahan dunia maupun di dalam negeri beragam *keyword*, semisal otomatisasi, big data, kecerdasan buatan dan seterusnya selalu menjadi yel-yel yang terus dinyanyikan. Aspek pendidikan pun tak lepas dari cepatnya perkembangan teknologi ini. Apalagi dengan adanya revolusi industri 4.0 ataupun masyarakat 5.0. para pendidikan dan tenaga kependidikan harus berdaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini.

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya dibuatkan matriks strategi dari analisis SWOT yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut,

SWOT Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
		Layanan PAUD mulai terbentuk  Jumlah anak usia dini masih relatif banyak
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>		
Adanya Perhatian Pemerintah tentang layanan PAUD  Pengalokasian dana APBN dan APBD secara signifikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Membentuk layanan PAUD melalui melakukan kerjasama Pemerintah (SO 1)  Layanan terhadap pembentukan PAUD berkualitas (SO 2)  Memanfaatkan jumlah anak usia dini yang relatif banyak (SO 3)  Pemerataan akses Layanan PAUD (SO 4)	Efisiensi Anggaran adanya dana APBN dan APBD mensimulus program layanan PAUD (WO 1)  Memperhatikan tumbuh kembang dan karakteristik anak (WO 2)  Peningkatan SDM Pada Layanan PAUD (WO 3)  Meningkatkan Pemerataan Akses- Akses layanan PAUD di Indonesia (WO 4)
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>		
Teknologi Informasi yang semakin pesat  Biaya Pendidikan yang semakin Tinggi	Meningkatkan pengawasan layanan pendidikan terhadap konten teknologi yang dikonsumsi anak (ST 1)  Menerapkan kebijakan subsidi silang bagi layanan PAUD (ST 2)	Memanfaatkan teknologi untuk peningkatan SDM PAUD (WT 1)  Mengalokasikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai (WT 2)

**Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**

**G. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara.**

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi :

a. Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif.

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 100%.

b. Menentukan Nilai Rating.

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang.

c. Menentukan Nilai Skor.

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin banyak kekuatannya dibanding

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Berikut tabel,

No	Faktor Internal / Eksternal	Bobot	Bobot Relatif	Rating	Skor
<b>STRATEGI SO</b> <i>(Strength-Opportunities)</i> <b>KEKUATAN MEMANFATKAN PELUANG</b>					
1	Membentuk layanan PAUD melalui melakukan kerjasama Pemerintah	4	0.12	4	0.48
2	Layanan terhadap pembentukan PAUD berkualitas	4	0.15	3	0.45
3	Memanfaatkan jumlah anak usia dini yang relatif banyak	4	0.15	3	0.45
4	Pemerataan akses Layanan PAUD	4	0.12	4	0.48
<b>Sub Total</b>					<b>1,86</b>
<b>STRATEGI WO</b> <i>(Weakness-Opportunities)</i> <b>KELEMAHAN MEMANFATKAN PELUANG</b>					
1	Efisiensi Anggaran adanyanya dana APBN dan APBD mensimulus program layanan PAUD	2	0.08	3	0.24
2	Memperhatikan tumbuh kembang dan karekteristik anak	2	0.08	3	0.24
3	Peningkatan SDM Pada Layanan PAUD	2	0.08	3	0.24
4	Meningkatkan Pemerataan Akses- Akses layanan PAUD di Indonesia	2	0.08	4	0.32
<b>Sub Total</b>					<b>1.04</b>
<b>Total Skor Faktor Internal</b>		<b>34</b>	<b>2</b>		<b>2,90</b>

STRATEGI ST (Strength-Threats) KEKUATAN DALAM MENGATSI ANCAMAN					
1	Meningkatkan pengawasan layanan pendidikan terhadap konten teknologi yang dikonsumsi anak	4	0.15	4	0.06
2	Menerapkan kebijakan subsidi silang bagi layanan PAUD	4	0.15	3	0.45
				7	<b>0,51</b>
<b>Sub Total</b>					<b>0,51</b>
STRATEGI WT (Weakness-Threats) KELEMAHAN DALAM MENGATASI ANCAMAN					
1	Memfaatkan teknologi untuk peningkatan SDM PAUD	2	0.08	3	0.24
2	Mengalokasikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai	2	0.08	3	0.24
				<b>Sub Total</b>	<b>0,48</b>
<b>Total Skor Faktor Eksternal</b>		<b>28</b>		<b>13</b>	<b>0,48</b>

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan matriks SWOT berikut :

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunities)	Strategi SO : $1.86 + 1.04 = 2.90$	Strategi WO : $1.2 + 0.68 = 1,88$
Ancaman (Threats)	Strategi ST : $1.67 + 1.2 = 2,87$	Strategi WT : $1.2 + 1.2 = 2,4$

**Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**

Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh dari kombinasi *Strength-Opportunities* dengan nilai 2,90. Sehingga strategi kebijakan Pendidikan dan politik yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah Strategi SO (*Strength-Opportunities*). Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritasasi faktor, diketahui bahwa Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan kebijakan Pendidikan anak usia dini disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 1. Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 2.

**Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi *Strength-Opportunities* (SO)**

No	Strategi <i>Strength-Opportunities</i> (SO)	Rekomendasi Program
1	Pemerataan akses layanan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini melalui efisiensi anggaran PAUD.</li> <li>b. Memperluas jangkauan anak untuk mendapati layanan PAUD</li> </ul>
2	Membentuk layanan PAUD melalui melakukan kerjasama Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah</li> <li>b. Mendiskusikan perencanaan pembentukan layanan PAUD kepada pemerintah</li> </ul>

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 1, maka selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan strategi *Strength-Opportunities* (SO), pada sub bab hasil analisis dan pembahasan.

## 2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi *Strength-Opportunities* (SO) berdasarkan strategi yang disajikan pada matriks strategi Gambar 2.

### 1. Pemerataan akses layanan PAUD

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan berdasarkan Strategi Meningkatkan Pemerataan akses layanan PAUD yang luas adalah sebagai berikut :

#### a. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini melalui efisiensi anggaran PAUD

Meningkatkan layanan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui efisiensi anggaran PAUD adalah sebuah program yang urgen dan sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap lembaga layanan PAUD. Karena selama ini kucuran anggaran dana terhadap lembaga PAUD kurang efisien menyentuh pada aspek peningkatan layanan untuk pembelajaran anak usia dini yang lebih baik.

Pemerintah setiap tahunnya selalu memberikan dana bantuan operasional pendidikan pada layanan PAUD tanpa terkecuali baik layanan formal nonformal maupun informal. Namun setiap tahun alokasi anggaran setiap lembaga selalu memprioritaskan pembelanjaan modal dan perjalanan dinas yang notabene hal ini kurang menyentuh aspek layanan langsung terhadap anak didik.

#### b. Memperluas jangkauan anak untuk mendapati layanan PAUD

Saat ini belum semua anak usia dini mendapatkan layanan PAUD. Hal ini dikarenakan beberapa lembaga yang maju

secara sarana dan prasarana PAUD adalah lembaga swasta dan memiliki kebijakan iuran yang tidak dapat dicapai oleh keluarga yang berasal dari kalangan bawah. Pun ada lembaga PAUD negeri yang lebih murah namun terkendala dengan jarak yang jauh dari rumah tempat tinggal dan beberapa alasan lain seperti ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan anak didik lain meskipun hanya pada persoalan pakaian seragam sekolah dan iuran kelas yang tak seberapa.

2. Membentuk layanan PAUD melalui melakukan kerjasama Pemerintah

a. Menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah

Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan maupun pengelola PAUD yang merupakan stekholder yang langsung bersentuhan dengan anak usia dini maka sudah saatnya untuk melakukan loby-loby anggaran pemerintah untuk dibangun layanan PAUD yang optimal. Stekholder pendidikan harus melakukan jemput bola kepada pemerintah untuk memprioritaskan layanan PAUD dengan mengadakan pertemuan-pertemuan baik formal maupun nonformal.

b. Mendiskusikan perencanaan pembentukan layanan PAUD kepada pemerintah

Setelah ada upaya loby maka harus dipastikan perencanaan pembentukan dan pengalokasian anggaran PAUD yang lebih terhadap layanan PAUD tercapai. Hal ini untuk memaksimalkan layanan PAUD yang ada saat ini untuk lebih termotivasi untuk meningkatkan layanannya. Baik itu dari segi media dan alat pembelajaran, aktivitas pendukung pembelajaran maupun peningkatan kapasitas pendidik dalam memaksimalkan pembelajaran dengan baik.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Untuk Meningkatkan Taraf hidup Indonesia serta pendidikan Indonesia yang berkualitas maka sangat jelas bahwa kebijakan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini. Mengalokasikan anggaran yang lebih kepada pembangunan dan penyelenggaraan PAUD maka kualitas pendidikan di Indonesia perlahan tapi pasti akan mengalami kemajuan. Pendidikan Anak Usia Dini harus menjadi fokus perhatian pemerintah karena majunya suatu bangsa dimasa yang akan datang ditentukan oleh generasi saat ini. Jika generasi saat ini baik dan berkualitas maka bisa dapat dipastikan Negara bangsa akan mengalami kemajuan yang sangat pesat dimasa yang akan datang. Sebaliknya jika generasi saat ini adalah generasi memble maka kita akan terus menjadi bangsa pengikut dari berbagai hal karena kita tidak mampu berkreasi dan berinovasi menjadi sebuah bangsa yang mandiri karena di awal generasi kita tidak terbiasa berkreasi sebagai mana ciri khas layanan PAUD berkualitas yakni mendampingi dan memaksimalkan kreativitas anak didik yang diharapkan dimasa yang akan datang menjadi insan pencipta berbagai produk ilmu pengetahuan dan tekhnologi terbaru.

### **2. Rekomendasi**

Untuk peningkatan layanan PAUD berkualitas dan Maksimal yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai layanan PAUD di perlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta stekholder terkait dalam upaya peningkatan mutu kualitas layanan PAUD secara merata terorganisasi baik dari pemerintah pusat perkotaan dan pedesaan. Dengan upaya ini diharapkan

semua anak memperoleh layanan PAUD sesuai dengan UUD 1945 setiap anak memperoleh pendidikan demi mempersiapkan generasi di masa akan datang.

- “Buku Politik Pendidikan Tiga Rezim.”
- A. R. W. Dkk, “No Title,” *J. Educ. Dev. Inst. Pendidik. Tapanuli Selatan*, vol. Vol.10 No., no. KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN, hal. 88–93, 2022.
- Ab Marisyah<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, R. (2019). PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN. 3, 2–3
- Abdillah, F. (2020). *Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Guru Kejuruan*. Cerdas Ulet Kreatif Publisher.
- Abdulsyari. 2001. *Sosiologi Kelompok dan masalah sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad, S. (2019). Membangun pendidikan berwawasan gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 70-91.
- Adha, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267-298.
- Adirilany, S. F., Sari, S. Y., Ferdiansyah, S., Nisa, K., & Doutel, J. D. S. (2023). Pengawasan Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa di Era Society 5.0. *Proceedings Series of Educational Studies*, 1(1).
- AF, M. A., Nurfadilah, K., & Hilman, C. (2022). Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 90-95.
- Afrizal, S., Kuntari, S., Setiawan, R., & Legiani, W. H. (2020, November). Perubahan Sosial pada Budaya Digital dalam Pendidikan Karakter Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 3, No. 1, pp. 429-436).

- Agusta, A. R., Hanum, S., Simaremare, J. A., Wahab, A., Minar Trisnawati Tobing, M. P., Owon, R. A. S., ... & Saputra, N. (2021). *Inovasi Pendidikan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Agustian, N., & Salsabila, U. H. (2021). Peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran. *Islamika*, 3(1), 123-133.
- Agustin, M., & Nugroho, R. (2017). Kemampuan Keaksaraan Anak Jalanan Melalui Bimbingan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya. *E-Journal UNESA*, 1, 0-10.  
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalpendidikan-luar-sekolah/article/view/21879>
- Ahmad Saebani, Beni. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ahmad, A., Madani, F., Ishaq, M., Purwito, L., & Sari, R. P. (2022). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1143-1154.
- Ahmad, I. F. (2022). Urgensi literasi digital di Indonesia pada masa pandemi Covid-19: Sebuah tinjauan sistematis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1-18.
- Ahmad, M. (2021). Manajemen Hubungan Sekolah Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19. *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(02), 55-71.

- Ahmanda, W., Maulana, A., Murtinugraha, R. E., & Arifah, S. IMPLEMENTASI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN DILIHAT DARI KONSEP 8+ i LINK AND MATCH. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 2(2), 1-14.
- Aji, N.B., (2018), “Analisis SWOT Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah SMA Swasta Di Kota Tangerang”, *Jurnal Operations Excellence*, Vol.10(1):68.
- Ajziah, I., & Munawir, M. (2021). Urgensi teknologi pendidikan: analisis kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 25-36.
- Akbar, Nadzmi. (2021). Kepemimpinan Karakter Berbasis Multikultural UIN Antasari Press.
- Al Anshori, F., Sohriati, E., Syam, S., & Baharuddin, M. R. (2021). Pelatihan Literasi Digital Bagi Guru SMPN 7 Palopo. *Jurnal IPMAS*, 1(3), 105-109.
- Aldiyah, E. (2021). Perubahan gaya belajar di masa pandemi covid-19. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 8-16.
- Alfath, M. D., & Huliatusunisa, Y. (2021). Analisis kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)*, 2(2), 78-91.
- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7954-7966.
- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 36-47.
- Alfred, W. (2020). Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Digital Universitas Kristen Petra di Surabaya. *eDimensi Arsitektur Petra*, 8(1), 169-176

- Alghozi, A. A., Setiawan, F., Mardiah, A., Majmudin, A., Fitriani, R., Fadillah, A. N., & Jannah, M. (2022). Kebijakan Kontroversial Dana Bos Tahun 2021. *TSAQOFAH*, 2(4), 455-465.
- Aliyyah, R. R., Ulfah, S. W., Herawati, E. S. B., Rachmadtullah, R., & Asmara, A. S. (2020). Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *Alignment: Journal of Administration and Educational Management*, 3(1), 37-54.
- Alzanaa, A. W., & Harmawati, Y. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 51-57.
- Amelia, C., & Pratiwi, I. (2021). Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif Bagi Guru TK Al-Munawwaroh Dan TK Dewantara. *Ihsan Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 238-243.
- Amilia, E. (2021). Implementasi hak belajar tiga semester di luar program studi. In *SEMINAR NASIONAL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA BERBASIS INTEGRASI KEILMUAN DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU* (p. 124).
- Amirullah, R. U. (2021). Analisis SWOT kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi covid 19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Ammas, S. (2021). Pembelajaran daring dalam perspektif merdeka belajar. *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel*, 2(1), 35-45.
- Amri, M et al. (2010). Pendidikan Keaksaraan: Kawasan Pesisir dan Kepulauan. Makassar: Pustaka Pena Press.

- Andriyani, D., & Suhartono. (2017). Pengelolaan Program Pemberantasan Buta Aksara Bertemaketerampilan di Desa Bojong Renged Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. SENADIMAS, 2017.  
<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senadimas/article/view/898>
- Angin, R., & Putra, P.M. (2017)
- Angga, A., Abidin, Y., & Iskandar, S. (2022). Penerapan pendidikan karakter dengan model pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1046-1054.
- Anggraini, D. S. (2019). EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 33-52.
- Angin, R., & Putra, P.M. (2017). Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Jember. *Jurnal POLITICO Fisipol*, 16, 1-16.  
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/742>
- Ansori, A., & Sari, A. F. (2020). Inovasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 133-148.
- Antoro, B., Boeriswati, E., & Leiliyanti, E. (2021). Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran)*, 5(1), 1-15.
- Anwar, M. (2019). Inovasi Sistem Pendidikan. *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 180-192.
- Anwar, M. (2019). Inovasi Sistem Pendidikan. *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 180-192.

- Apriani, L. (2021). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 MUARO JAMBI. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 27(1), 47-58.
- Aprianto, A., Praherdhiono, H., & Wedi, A. (2021). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Penguatan Keterampilan Fleksibilitas terhadap Hasil Belajar Kognitif. *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 6(2), 264-274.
- Apriyanti, Y. O., Darmansyah, R., Kurnia, L. I., Zebua, R. S. Y., Ramli, A., Mamlu'ah, A. W., & Barokah, A. (2023). *ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN: Teori dan praktek mengelola Lembaga Pendidikan Era Industri 4.0 & Soceity 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arda, M. (2019). Meningkatkan keunggulan bersaing melalui analisis SWOT. *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61-69.
- Arda, M. (2019). Meningkatkan keunggulan bersaing melalui analisis SWOT. *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61-69.
- Arda, M. (2019). Meningkatkan keunggulan bersaing melalui analisis SWOT. *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61-69.
- Ardhyantama, V. (2020). Creativity Development Based on the Ideas of Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 73-86.
- Ariandy, M. (2019). Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 137-168.
- Arianto, B. (2021). Pandemi Covid-19 dan Transformasi Budaya Digital di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(2), 233-250.

- Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 1-17.
- Arifin, S. (2020). Kebijakan Disruptif Pendidikan Tinggi. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Arifin, S. F. A. (2023). Pembelajaran E-Learning Sebagai Pelaksanaan Merdeka Belajar Siswa Sekolah Dasar Abad 21. *IJEB: Indonesian Journal Education Basic*, 1(1), 1-12.
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Arnita, H., & Fadriati, F. (2022). Efektifitas Kebijakan Pendidikan Vokasi di Sekolah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8129-8137.
- Aruni, F., & Faisal, F. (2021). Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 42-48.
- Aryanto, H., Azizah, M. D., Nuraini, V. A., & Sagita, L. (2021). Inovasi Tujuan Pendidikan di Indonesia. *JIRA: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(10), 1430-1440.
- Aslan, “No Title,” *Cross-Border J. Kaji. Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hub. Int.*, vol. 2 No 2, no. MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN, hal. 101–109, 2019.
- Asmadi, I., Ilyas, A. A. R. M., Tirtajaya, A., Muctar, H. S., & Wahidin, D. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Tengah Kompleksitas Perubahan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 6050-6056.

- Asnawi, A. (2022). Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 398-413.
- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65-76.
- Astini, N. K. S. (2022). Tantangan implementasi merdeka belajar pada era new normal covid-19 dan era society 5.0. *Lampuhyang*, 13(1), 164-180.
- Astuti, P., & Febrian, F. (2019). Blended learning: Studi efektivitas pengembangan konten e-learning di perguruan tinggi. *Jurnal Tatsqif*, 17(1), 104-119.
- Aswir, A., Gunadi, R. A. A., Misbah, H., & Zaitun, Z. (2020). Workshop Literasi Digital dalam Pembelajaran Abad 21 untuk Guru-Guru Sekolah SMP dan SMA Se-Sukabumi. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 4(2), 143-156.
- Awaludin, L. (2019). Strategi penguatan kompetensi SDM Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 118-134.
- Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya Digital dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20-25.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201.

- Aziz, F. Z., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sebagai Landasan Pengelolaan Pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 217-228.
- Azizah, F., Pramesti, W., & Fitriani, F. (2022). Analisis Education Mapping Terkait Pengelompokan Kesenjangan Pembangunan Pendidikan Menurut Provinsi di Indonesia. *MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology*, 7(2), 130-138.
- Azkiah, L. (2021). Peran Edukatif Oleh Komunitas blogger Bengkulu Dalam Meningkatkan Literasi Digital. *J-SIKOM*, 2(1).
- Azzam, A. A. (2022). Analisis Kebijakan Kewirausahaan Nasional Di Metaverse. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-13.
- Babys, S. A. (2021). Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 3(1).
- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. A., & Diandra, A. (2020). Ekonomi Digital untuk Siapa. *Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia. The SMERU Research Institute, Jakarta*.
- Badan Statistik Indonesia. 2023. Konsep Perusahaan Industri Pengolahan. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Badri, M. (2022). Pribumi Digital Moderat: Profil Kecakapan Komunikasi Digital Generasi Z. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(2), 291-303.
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94-100.
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94– 100.
- Bambang sarwoko. 2005. Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah. *Bangung ; IKIP Semarang Press*

- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063-1073.
- Basleman, A dan Mappa. 2011. Teori Belajar Orang Dewasa. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.
- Basuki, S. (2019). Etika Informasi. *Media Pustakawan*, 26(1), 1-8.
- Batubara, H. H., & Ariani, D. N. (2019). Model pengembangan media pembelajaran adaptif di sekolah dasar. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 5(1), 33-46.
- Batubara, R., Raudatussaadah, R., Amirah, R., & Siregar, A. H. (2023). Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 63-73.
- Bempa, M.S. Pido, A.T. (2020). Evaluasi Sistem Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Diri Peserta Didik di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Volume 5 No 1*, Halaman 77-98.
- Bintari, A. dan L. H. S. Pandiangan. 2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta *Jurnal Ilmu Pemerintahan. CosmoGov*, Vol.2 No.2, Oktober 2016.

- Biringan, J. (2021). Internalisasi nilai melalui pendidikan informal dalam prospek perubahan sosial. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 34-42.
- BPS. (2022). Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang), 2021-2022. <https://www.bps.go.id>
- Buaton, R., & Yel, M. B. (2022, July). Model Pembelajaran Adaptif dan Cerdas Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)* (Vol. 4, No. 2, pp. 149-157).
- Budi Winarno. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Penerbit Center of Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta. pp: 31.
- Cahyolaksono, B. A., Mahardhika, A., & Zakaria, M. I. (2021). Usulan kebijakan pencegahan risiko perbankan di era digital. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 18-26.
- Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Global. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5143-5149.
- Cholik, M., Ekohariadi, E., Putra, R. E., & Utami, A. W. (2020). Pedoman teknis revitalisasi SMK dalam peningkatan kompetensi lulusan untuk beradaptasi di dunia industri.
- Citradi, T. (2020). Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!. CNBC Indonesia 16 December 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news>.
- Daheri, M. (2021). Pendidikan Multikultural di Amerika: Tinjauan Sejarah dan Kebijakan. *Jurnal Pendidikan "EDUKASIA MULTIKULTURA"*, 3(1), 8-14.

- Dakabesi, E. D., & Wicaksono, L. (2022). Kepemimpinan Kolaborasi Kepala Sekolah Dalam Membangun Tim Kinerja Guru Di Era Society 5.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).
- Damayanti, D. (2019). MANAJEMEN SERTIFIKASI PROFESI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PARAMITHA JAKARTA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Damayanti, D. (2019). MANAJEMEN SERTIFIKASI PROFESI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PARAMITHA JAKARTA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Damayanti, S. D., & Effane, A. (2022). Fungsi Kewirausahaan Dalam Pendidikan. *KARIMAH TAUHID*, 1(1), 90-98.
- Damayanti, T, Hamdani, S.R., dan Khasanah, A.N. (2017). Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran Inklusi Pada Guru Sd Negeri Kota Bandung. *SCHEMA - Journal of Psychological Research*, Volume 3, No.1.
- Daryanto., & Tarno, H. (2017). Pendidikan Orang Dewasa (POD). Yogyakarta: Gava Media.
- David, Freddy R. 2015. Personal Swot Analysis. Jakarta: Gramedia Utama
- Deayana, I., Ambri, M., & Syafari, M. R. (2021). Efektivitas gaya kepemimpinan kolaboratif (studi kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong). *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 14-22.
- Delpa, D., & Afrida, P. D. (2023, January). Metode Pembelajaran Inovatif dan Adaptif melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Gadget. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Pengabdian, dan Diseminasi* (Vol. 1, No. 1, pp. 601-613).

- Depdiknas. (2003). Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diunduh dari [https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf) pada 22 Juli 2019
- Desi Pristiwanti<sup>1</sup>, Bai Badariah<sup>2</sup>, Sholeh Hidayat<sup>3</sup>, Ratna Sari Dewi, 2022. Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022 E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Dewanti, A. K. (2021). Program Sekolah Penggerak. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Dewanti, A. K. (2021). Urgensi Penerapan Pembelajaran Adaptif. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Dini, J. P. A. U. (2021). Kesiapan lembaga PAUD dalam pembelajaran tatap muka pada new normal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 2158.
- Diputra, K. S., Trisiantari, N. K. D., & Jayanta, I. N. L. (2020). Gerakan literasi digital bagi guru-guru sekolah dasar. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(1), 118-128.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Statistik Pendidikan Tinggi (2020). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta.
- Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231-242.
- Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231-242.
- Djudju Sudjana, (2001). Pendidikan Luar Sekolah, Bandung: Falah
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey. USA.

- E. Yuliah, "No Title," *at-Tadbir Media Huk. dan Pendidik.*, vol. 2, no. Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies, hal. 129–153, 2020.
- Edi Purnomo. (2016) Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Inklusi Dalam Meningkatkan Kompetensi Melalui Media Video, Kwangsan, Vol. 4 No. 2,
- Effendy, M. H., Maulidiawati, M., & Putikadyanto, A. P. A. (2022). Kearifan Lokal Madura Rokot Bhuju'Siti Rohana sebagai Alternatif Muatan Lokal Era Merdeka Belajar. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 134-150.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Emalia, E., & Farida, F. (2019, July). Inovasi Pendidikan Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Dalam Upaya Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Erlinawati, E. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI SMK DALAM BIDANG PENGUATAN KERJASAMA INDUSTRI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA MALANG (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

- Erlinawati, E. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI SMK DALAM BIDANG PENGUATAN KERJASAMA INDUSTRI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA MALANG (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Eugenia, C. M., Hagijanto, A. D., & Malkisedek, M. H. (2022). Instagram Sebagai Media Pendukung Kampanye Pentingnya Literasi Digital. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1, 10.
- EVALUASI KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, INFRASTRUKTUR, APLIKASI, DAN PERENCANAAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KOTA BATU. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 6(6).
- Evita, N., & Mukhaer, A. A. (2022). Evaluasi Komunikasi dan Literasi Digital Warga Jakarta dalam Implementasi Society 5.0. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(2), 172-186.
- Evitasari, A. D., Musyadad, F., & Sholihah, F. (2021). Kesesuaian RPP Tematik Integratif Dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 18-34.
- Fadhillah, F. R., Suwena, I. N., & Wiasti, N. M. (2023). Komunitas Rumah Belajar Kambodja Sebagai Ruang Pendidikan Alternatif Bagi Anak Marginal di Kota Denpasar, Bali. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 579-588.
- Fadhli, R. (2021). Implementasi kompetensi pembelajaran sepanjang hayat melalui program literasi di perpustakaan sekolah. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 9(1), 19-38.
- Fadli, M. R. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pendidikan Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 152-161.

- Fahmayani, E. N. (2021). Pelaksanaan Link and Match 8+ I di SMK Pusat Keunggulan SMKN 1 Dlingo. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 16(1).
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). Program Guru Penggerak Sebagai Sumber Belajar. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 82-88.
- Falah, B. N., & Fatimah, S. (2019). Pengaruh gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. *Euclid*, 6(1), 25-34.
- Faqih, M. (2022). *Urgensi pengawasan layanan konten melalui internet (Over The Top): perspektif hak asasi manusia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Faradita, M. N., & Afiani, K. D. A. (2021). Pelatihan pembuatan rpp kurikulum darurat pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 258-266.
- Fathurrahmani, F., Herpendi, H., & Hafizd, K. A. (2021). Pentingnya Memiliki Digital Skills Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 83-90.
- Fatmawati, E. (2021). Kebijakan Kurikulum di Masa Pandemi. *MATAAZIR: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(1), 158-173.
- Fattah, N. (2014). Analisis Kebijakan Pendidikan. Penerbit PT Remaja Rosda Karya. Bandung, pp: 3.
- Fattah. (2000). Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatwa, A. (2020). Pemanfaatan teknologi pendidikan di era new normal. *Indonesian Journal of Instructional Technology*, 1(2).

- Fauzia, F., Virantika, A., & Firmansyah, G. (2021). Langkah langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan SDM Talenta Digital di Lingkungan Pemerintahan Indonesia. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 39-46.
- Febriyanti, N. (2021). Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1631-1637.
- Ferguson, T., & Roofe, C. G. (2020). SDG 4 in higher education: Challenges and opportunities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(5), 959-975.
- Fernandes, R. (2019). Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 70-80.
- Fima Widyatami Nurmiayuni. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keaksaraan Fungsional Melalui Peningkatan Budaya Tulis Koran Ibu Di Rumah Pintar Nuraini Desa Jeruksari Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul. Skripsi ; Universitas Negeri Yogyakarta
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021). *Penilaian Teknologi Sebagai Analisis Kebijakan: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Fitra, K. R., Aprilliya, S., & Lidinillah, D. A. M. (2022). LITERASI DIGITAL ETHIC GURU SEKOLAH DASAR. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 6(2), 202-209.
- Fitri, M., Yuanita, P., & Maimunah, M. (2020). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika terintegrasi keterampilan abad 21 melalui penerapan model problem based learning (PBL). *Jurnal Gantang*, 5(1), 77-85.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617-1620.

- Fitriawati, M. (2017). Perkembangan infrastruktur teknologi informasi dari evolusi infrastruktur. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 7(1), 79-87.
- Fitroh, I., & Rosidi, M. I. (2023). Taman Siswa: Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Tinjauan Historis. *Journal on Education*, 5(2), 2677-2688.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi Digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2).
- Girsang, S. E. E., Kurniawan, A., Sarjana, S., Akbar, M. A., Lotulung, C. V., Rafid, R., ... & Nawawi, I. (2022). *KONSEP INOVASI PENDIDIKAN*. Get Press Indonesia.
- Gozali, A. (2020). Layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi pada masa psbb (pembatasan sosial berskala besar). *Coution: journal of counseling and education*, 1(2), 36-49.
- Gunawan, P. (2019). Implementasi kebijakan revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia: Studi pada SMK Negeri 13 Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Gusdwisari, B. (2020, April). Digital Skill Education Concept, Upaya Peningkatan Kualitas Generasi Muda dan Mengurangi Tingkat Pengangguran Menuju SDGs 2030. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Hadiyana. (2010). Model Paket C Integrasi Keterampilan Berbasis Potensi Lokal. Jayapura: Kemdiknas.
- Haekal, M. (2022). Tantangan Distribusi Guru di Daerah Terpencil Indonesia: Antara Manajemen, Isu Personal, dan Faktor Geografi. *Ta'dib*, 12(1), 16-21.

- Haeran, S. S., Mainuddin, M. P. I., Muhibullah, M., Umami, R., Syatriadin, S., Pd, M. M., ... & Syahid, M. (2022). *GAGASAN KONSEP INOVASI PENDIDIKAN*. EDU PUBLISHER.
- Haerullah, H., & Elihami, E. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 199-207.
- Hafids, J. (2018). Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 22-37.
- Hairani, E. (2018). Pembelajaran sepanjang hayat menuju masyarakat berpengetahuan. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1), 355-377.
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1).
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1).
- Hamzah B. Uno. (2014). *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, T. U. (2020). Penguatan budaya literasi sebagai upaya pembentukan karakter. *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya*, 4(1).
- Hanum. (2009). Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Bangsa. Makalah disampaikan pada seminar Regional. Yogyakarta: UNY.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

- Hasanah, M., & Hakim, T. F. L. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(3), 252-260.
- Hasibuan, H. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan: internalisasi nilai toleransi untuk mencegah tindakan diskriminatif dalam kerangka multikultural. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 440-453.
- Hasibuan, H. A. (2022). Peran Modul Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pendidikan Merdeka Belajar. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 292-301.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., ... & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81-86.
- Helmy, Z., & Jamil, A. S. (2020). Restrukturisasi Sistem Pelatihan Kepemimpinan dalam Membentuk Calon Pemimpin Masa Depan: Pendekatan Studi Literatur. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 1(1), 1-17.
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(1), 1-29.
- Herawati, S. (2020). Kebijakan Pendidikan kewirausahaan dalam menumbuhkan kesadaran bela negara bagi generasi muda. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 161-178.
- Hermanto, S.P. 2010. Penyelenggaran pendidikan inklusif membutuhkan keseriusan dalam manajemen sekolah. *Jurnal pendidikan Khusus*, Volume 6 No.1.

- Hermawan, I., Supiana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Kebijakan Pengembangan Guru Di Era Society 5.0. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 2(2), 117-136.
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(1)
- Hidayat, D. R., Rohaya, A., Nadine, F., & Ramadhan, H. (2020). Kemandirian belajar peserta didik dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(2), 147-154.
- Hikmasari, D. N., Susanto, H., & Syam, A. R. (2021). Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Thomas Lickona dan Ki Hajar Dewantara. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 6(1), 19-31.
- HM, M. A. (2018). Inovasi Sistem Pendidikan. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 7(2), 161-170.
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15-30.
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/18040/pemerintah-fokus-pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/18040/pemerintah-fokus-pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel_gpr). Diakses 23 april 2023.
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/47179/siaran-pers-no-10hmkominfo022023-tentang-indeks-literasi-digital-tahun-2022-meningkat-kominfo-tetap-perhatikan-indeks-keamanan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47179/siaran-pers-no-10hmkominfo022023-tentang-indeks-literasi-digital-tahun-2022-meningkat-kominfo-tetap-perhatikan-indeks-keamanan/0/siaran_pers) (diakses tanggal 11 Mei 2023).
- [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/32927/siaran-pers-no-54hmkominfo022021-tentang-bangun-literasi-digital-dengan-5-pilar-menkominfo-realisasikan-untuk-indonesia-digital-nation/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/32927/siaran-pers-no-54hmkominfo022021-tentang-bangun-literasi-digital-dengan-5-pilar-menkominfo-realisasikan-untuk-indonesia-digital-nation/0/siaran_pers) (diakses tanggal 11 Mei 2023).

- <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/direktorat-smk-sosialisasikan-banper-untuk-sertifikasi-kompetensi>
- Huda, M. N., Mulyono, M., Rosyida, I., & Wardono, W. (2019, February). Kemandirian belajar berbantuan mobile learning. In *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika* (Vol. 2, pp. 798-806).
- Hutami, N. P., Ifnaldi, I., & Sumarto, S. (2022). Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan dan Kegiatan Praktik Kerja Industri Terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa Kelas Xii Di Smk N 1 Rejang Lebong (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- I Wayan CJ, 2019. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar Volume. 4, Nomor 1 April 2019 ISSN: 2527-5445.
- Idhartono, A. R. (2022). Literasi Digital Pada Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Anak. *Devosi: Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 6(1), 91-96.
- Ilmananda, A. S., Marcus, R. D., Pamuji, F. Y., No, J. T. D., & Klojen, P. C. (2022). Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengembangan Smart City: Studi Kasus Pemerintah Kota Batu. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(1), 253-268.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Abdullah, R., & Samala, A. D. (2021). 21st Century Skills: TVET dan Tantangan Abad 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4340-4348.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi kurikulum merdeka belajar dengan model pembelajaran abad 21 dalam perkembangan era society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024.

- Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan pada tahun 2013.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.
- Indonesia. Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 31 Januari 2012.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Indra, I. M., Mawaddah, I. A., Harahap, T. K., Khasanah, U., Darmawati, L. E. S., Trisnawati, S. N. I., ... & Hasan, M. (2023). Guru Penggerak Era Merdeka Belajar. *Penerbit Tahta Media*.
- Indriani, R., & Yemardotillah, M. (2021). Literasi Digital Bagi Keluarga Milenial Dalam Mendidik Anak Di Era Digital. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 2(2), 1-13.
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan pendidikan tinggi: Studi tentang urgensi kampus berperspektif gender. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55-72.
- Intan, R. (2023). BAGIAN IX REVITALISASI SISTEM PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA. *WAWASAN PENDIDIKAN GLOBAL*, 214.
- Irawati, D., Iqbal, A., Hasanah, A., Arifin, B. (2022). “Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa”. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 1224-1238.
- Iskandar, A. G. (2022). Optimalisasi Link and Match Melalui Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4773-4791.
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., Nisa, F. F., Nisrina, F. A., Oktaviani, O., & Realistiya, R. (2023). Penggunaan Platform Merdeka Mengajar Sebagai Sarana Guru Dalam Pemahaman Kurikulum Merdeka. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1301-1306.

- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84.
- Isnaini, M., Sabaryati, J., Zulkarnain, Z., & Islahudin, I. (2021). Pelatihan Pembuatan Media Permainan Edukatif (MPE) Dalam Pembelajaran Pada Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Nw Sabe Lendang. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 241-243.
- Istianah, A. (2021). Implementasi Metode Among Untuk Meningkatkan Karakter. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 34-41.
- Istiq'faroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia. *Lintang Songo: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1-10.
- Jasmidalis, D. A. S., Purnamasari, O., & Zulhaini, L. (2023). Edukasi Gadget Ramah Anak Usia Dini bagi Orang Tua. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1-10.
- Jaya, A., Azis, A., & Sari, S. S. (2019). *Analisis Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA Negeri Se-Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Jayadi, K., Abduh, A., Basri, M. (2022). "A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia". *Journal Heliyon*. Vol 8 (2022) 1-5.
- Jessica, A. R. A., Harmianto, S., & Mareza, L. (2020). Penerapan Literasi Digital dalam Pembelajaran Kurikulum 2013 Berbasis E-Learning Tema 8 Bumiku Kelas VI SD Negeri 2 Purbalingga Lor. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 2(2), 139-146.

- Joesoef Soelaiman. 2004. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Johan, R. C., Emilia, E., Syahid, A. A., Hadiapurwa, A., & Rullyana, G. (2020). Gerakan literasi masyarakat berbasis media sosial. *Berkala ilmu perpustakaan dan informasi*, 16(1), 97-110.
- Julhadi, J., Faizul, F., & Dina, H. (2022). Homeschooling Sebagai Pendidikan Alternatif. *Tarbiyatul Aulad*, 8(01).
- Junaidah, J., Ambiyar, A., Jalinus, N., & Waskito, W. (2022). PENGARUH KOLABORASI SMK DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PEMASARAN LULUSAN. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(2), 265-275.
- Junaidi, R., & Albahri, F. P. (2021). Model Perangkat RPP Bahasa Inggris Satu Halaman Untuk Pembelajaran Masa Krisis. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 4(1), 91-104.
- K. Bashori, "No Title," *SUKMA J. Pendidik.*, vol. Volume 2, no. 2, hal. 287–310, 2018.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.
- Kalsum, T. U., Fredricka, J., Yulianti, L., Kanedi, I., & Sukmo, A. (2022). Sosialisasi Pentingnya Keamanan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 di Desa Gajah Mati Bengkulu Tengah. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(1), 37-40.
- Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 6(3), 191-203.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal mappesona*, 3(1).

- Kasmawati, Y. (2021). Kepemimpinan Kolaboratif: Sebuah Bentuk Kepemimpinan Untuk Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 197-207.
- KEBUDAYAAN, K. P. D. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI.
- Kemdikbud. (2017). Revitalisasi SMK untuk Produktivitas dan Daya Saing Bangsa. Retrieved from diakses 23 April 2023 dari <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kemendikbud. (2020). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PowerPoint Presentation diakses [https://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.a-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035\\_Kemendikbud.pdf](https://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.a-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035_Kemendikbud.pdf) 30 Maret 2023, 10:30AM.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009).
- Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum. (2010). Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama". Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- Keputusan Pemerintah No 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka.

- Ketaren, A., Rahman, F., Meliala, H. P., Tarigan, N., & Simanjuntak, R. (2022). Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar pada Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10340-10343.
- Khairiah. (2020). *Multikultural Dalam Pendidikan Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bahan Ajar Mata Kuliah.
- Kopnina, H. (2020). Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals. *The Journal of Environmental Education*, 51(4), 280-291.
- Kristanto, A., Dewi, U., & Pradana, H. D. (2022). Pelatihan Intensif Pembuatan Alat Permainan Edukatif Pada Guru PAUD. *DEDICATE: Journal of Community Engagement in Education*, 69-77.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Kuntoro, T. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Oleh LSPP3 di Kabupaten Banyumas Menggunakan Model CIPP (Doctoral dissertation, Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Semarang)*.
- Kurniawan, F., & Dewanti, R. (2023). Efektivitas Kampanye Literasi melalui Social Media (Facebook). *Jotika Journal in Education*, 2(2), 37-40.
- Kurniawan, N. A., Saputra, R., Daulay, A. A., & Zubaidah, Z. (2020, August). Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon Konselor. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang* (pp. 69-72).
- Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 5(1).

- Kusnadi. (2005). *Panduan Umum Pelatihan Program Keaksaraan Fungsional*. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Kusumah, W., & Alawiyah, T. (2021). *GURU PENGGERAK: Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional*. Penerbit Andi.
- Kuswandi. (2021). Dongkrak Kualitas Kampus, Dosen Harus Bergelar Doktor. <https://www.jawapos.com>
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699-706.
- Laksita, A., & Mawardi, M. (2022). Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8869-8878.
- Latiana, L., Sumanto, R. P. A., Hasjiandito, A., & Shofwan, I. (2021). Utilization Of Digital Media Literacy For Parents of Early Childhood During The Covid-19 Pandemic in Semarang City. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 699-704.
- Leite, S. (2022). Using the SDGs for global citizenship education: Definitions, challenges, and opportunities. *Globalisation, Societies and Education*, 20(3), 401-413.
- Limbong, M. Firmansyah. Fahmi, Fauzi. (2021). Integrasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan Vol.5, 4, 343-354.
- Lince, L. (2022, May). Implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* (Vol. 1, pp. 38-49).

- Lubis, S. S. W. (2020). Membangun Budaya Literasi Membaca dengan Pemanfaatan Media Jurnal Baca Harian. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 9(1).
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 126-143.
- Luturmas, Y., Diana, E., Abdusshomad, A., & Wiranata, R. R. S. (2022). Implementasi Struktur Kurikulum Berdasarkan Kemendikbudristek No 371/M/2021 Dan Pp No 57 Tahun 2021 Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Tahun Ajaran 2022/2023 Di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Multidisipliner BHARASA*, 1(2), 71-81.
- Maarif, M. A. (2019). Pendidikan Multikultural Sebagai Pembentukan Karakter Peserta Didik. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 136-152.
- Magdalena, N., Asrori, M., & Chiar, M. PENGELOLAAN PRAKERIN DALAM PROGRAM KEMITRAAN SMK NEGERI 2 PEMANGKAT DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 10(8).
- Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14-26.
- Mahdaleni, F. (2022). MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MUTU GURU SMP NEGERI 3 KISARAN. *TAFAMHAM*, 1(2).
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175.
- Malawat, M. S. (2019). *Kewirausahaan Pendidikan*. Deepublish.

- Malik, H. (2021). Cyber Religion Dan Real Religion Di Tengah Masyarakat Digital. *KOMUNIKA*, 4(1), 63-78.
- Manfaat, B., Rosidin, D. N., & Budiningsih, H. S. (2022). Evaluasi Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah. *Holistik*, 6(1), 41-52.
- Mardiana, D., & Umiarso, U. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 13(2), 78-91.
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235-244.
- Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, 6(2), 234-239.
- Marjanto, P. (2022). IMPLEMENTASI KELAS INDUSTRI PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO) DI SMK ISLAM 1 KOTA BLITAR (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Martin. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maryam, S., Prasetyo, P., & Mahdalena, V. (2021). Literasi Media Digital Pada Kampanye Greenpeace Id Di Media Sosial Instagram Dalam Merubah Perilaku Masyarakat. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1-12.
- Marzuki Alie. (2013). Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi di Indonesia. <http://www.marzukialie.com>
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.

- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.
- Masril, M. (2020). Pelatihan Literasi Media Digital Bagi Orang Tua Di TK Nurul Huda Bangun Purba, Deli Serdang. *Persepsi: Communication Journal*, 3(2), 132-136.
- Mawati, A. T., Permadi, Y. A., Rasinus, R., Simarmata, J., Chamidah, D., Saputro, A. N. C., ... & Prasetya, A. B. (2020). *Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.
- Mayudana, I. K. Y., & Sukendra, I. K. (2020). Analisis kebijakan penyederhanaan RPP: Surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2019. *Indonesian Journal of Educational Development*, 1(1), 61-68.
- Merdeka, M. B. K. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Mirawati, 2020. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Deepublish Publisher ((Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA). ISBN : 978-623-02-1190-4.
- Mu'arif, A. N., Damayanti, F., Akmalia, R., Arsfenti, T., & Darmadi, D. (2021). Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 44-57.
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan karakter menurut kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50-57.
- Muhamad YS, 2015. PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIA MOBILITAS SOSIAL. AULADUNA, VOL. 2 NO. 1 JUNI 2015.

- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Mulyasa. 2012. Manajemen pendidikan karakter. Jakarta: Bumi aksara
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183-1190.
- Mursalim, M., & Tech, M. I. (2019). Kebijakan dan Strategi: Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia (Makalah). *Kendari. Kendari*.
- Musfah, J. 2022. Analisis Kebijakan Pendidikan. Teori dan Praktik. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Musfita, R. (2019, May). TRANSISI PAUD KE JENJANG SD: DITINJAU DARI MUATAN KURIKULUM DALAM MEMFASILITASI PROSES KESIAPAN BELAJAR BERSEKOLAH. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, No. 1, pp. 412-420).
- Muslim, A. Q., & Suci, I. G. S. (2020). Peran Manajemen Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Peningkata Sumber Daya Manusia Di Indonesia. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 159-168.
- Mustadi, A. (2020). Landasan pendidikan sekolah dasar (Vol. 174). UNY Press
- Muta'ali, J. A. (2020). Opini masyarakat tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Nababana, S. A., & Tanjung, H. S. (2022, November). Pelatihan Guru dalam Mengembangkan Soal Model Asesmen High Order Thinking Skills (HOTS). In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 5).

- Nahak, R. L., & Benu, A. Y. (2021). Analisis Kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu Lembar Tematik Berbasis Active Learning dengan Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1539-1546.
- Najmina, N. (2018). “Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 52-56.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.
- Nashihin, H. (2019). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara.
- Nasir, R. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi: Kajian Penerapan Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021. *Buletin Edukasi Indonesia*, 1(01), 9-12.
- Nasrudin, E., & Firmansyah, M. I. (2022). Progresivisme dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia: Studi Literatur Nilai Sepanjang Hayat, Kemanusiaan, dan Keyakinan. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(2), 137-147.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
- Nguyen, H. H., & Tran, H. V. (2022). Digital society and society 5.0: Urgent issues for digital social transformation in Vietnam Masyarakat digital dan masyarakat 5.0: Isu mendesak untuk transformasi sosial digital di Vietnam. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(1), 78-92.

- Nhamo, G., & Mjimba, V. (2020). The context: SDGs and institutions of higher education. *Sustainable development goals and institutions of higher education*, 1-13.
- Nina Trisnawati. (2014). Analisis Pembelajaran Matematika Pada Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Utama Surabaya. Skripsi.
- Nizar, N. I., & Sholeh, A. N. (2021). Peran Ekonomi Digital Terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(1), 87-99.
- Nor, B., Andrian, S. M., & Kusuma, I. P. J. (2023). PEMETAAN HASIL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEKALIMANTAN SELATAN. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH (Vol. 8, No. 2, pp. 16-20).
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498-507.
- Novianti, R., Sabrina, S., Umari, T., Maemunaty, T., & Bahar, A. (2021). RESILIENSI SEBAGAI PENDUKUNG KESIAPAN ANAK MASUK SEKOLAH DASAR. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(6), 1428-1435.
- Novianti, R., Santos, Y. B, dan Andini, D. W. (2016). Model Komunikasi Efektif Antara Guru Dan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pemberian Program Adl (Aktivitas Keseharian) Dan Pola Asuh Di Sekolah Inklusif Kabupaten Bandung. *Inclusive: Journal of Special Education*, Volume II Nomor 2 .

- Novianto, K. (2020). Indeks Pemerataan Guru (IPG): Ikhtiar Mempercepat Distribusi Guru. *Karangan: Jurnal Bidang Kependidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan*, 2(02), 83-91.
- Novrianti, D., & Yeni, F. (2020). Model Kompetensi Digital Mahasiswa Dalam Sistem Pembelajaran Jarak Jauh. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(2).
- Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2022). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia: Awal Kebijakan Politik Etis Terhadap Pendidikan, Sistem Pendidikan Di Zaman Belanda, Lembaga Pendidikan Belanda. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(1), 88-94.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy. Teori, Manajemen, Dinamika, Analisa, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145-6154
- Nurhadi, N. (2021). Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *PALAPA*, 9(1), 31-54.
- Nurhalita, N., & Hudaidah, H. (2021). Relevansi pemikiran pendidikan ki hajar dewantara pada abad ke 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 298-303.
- Nurharjadm, W. (2008). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda di sekolah kejuruan. *Spirit Publik*, 4(2), 215-228.
- Nurhayati, R. (2021). *Road to Guru Penggerak*. Guepedia.
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 98-114.

- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 98-114.
- Nurjanah, I. (2022). Analisis Transformasi Budaya Digital Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia.
- Nurjannah, N. (2022). Tantangan Pengembangan Kurikulum dalam Meningkatkan Literasi Digital Serta Pembentukan Karakter Peserta Didik di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6844-6854.
- Nursalim, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar Bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 3(1), 19-25.
- Okagbu, E. F., Wang, M., Ezeachikulo, U. P. (2022). “Does school bullying show lack of effective multicultural education in the school curriculum?”. *International Journal of Educational Research Open*, Vol (3) (2022), 2-10.
- Oktavian, R., & Aldya, R. F. (2020). Efektivitas pembelajaran daring terintegrasi di era pendidikan 4.0. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2).
- Oktiani, H., Gunawibawa, E. Y., & Raharjo, T. B. (2019). Pelatihan Digital Parenting melalui Pemanfaatan Aplikasi Parenting Tools sebagai Upaya Pencegahan Media Addiction (Kecanduan Media) pada Anak dan Remaja (Pelatihan dan Penyuluhan pada Guru dan Orang Tua Murid di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung). *e-prosiding snppm UM Metro 2019*, 1-10.
- Palupi, M. F. T., & Norhabiba, F. (2021). Edukasi Literasi Digital pada Remaja dalam Menangkal Cyberbullying. *Jurnal Abdidas*, 2(4), 1014-1020.
- Palupi, M. T. (2020). Hoax: Pemanfaatannya sebagai bahan edukasi di era literasi digital dalam pembentukan karakter generasi muda. *Jurnal Skripta*, 6(1).

- Pardede, A. M. H. (2022). PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN DARING UNTUK SMK PUSAT KEUNGGULAN. *JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama)*, 6(1), 339-346.
- Patilima, S. (2022, January). Sekolah Penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Patmasari, L., Hidayati, D., Ndari, W., & Sardi, C. (2023). Digitalisasi Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa Di Smk Pusat Keunggulan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1).
- Pawero, A. M. V. D. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1), 42-59.
- Pedoman Penyelenggaraan program Paket C Umum direktorat Pendidikan Kesetaraan direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional 2010.
- Pemerintah, P. (1990). PP no. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 86 TAHUN 2014. TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 1991 TENTANG PENDIDIKAN  
LUAR SEKOLAH

- Perdana, N. S. (2021). Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan. *Dharmas Education Journal (DE\_Journal)*, 2(2), 337-348.
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161-170.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Ponto, H. (2016). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kejuruan.
- Praptiyono, K. (2021). Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan (Perguruan Tinggi) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial Dan Agama*, 64-73.
- Prasasti, W. (2020). Membangun Relationship Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Di Smk Pelita 2 Bandung). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 134-142.
- Prasetyo, E. (2020). Peran Strategis Kewirausahaan dalam Mendukung Kebijakan Four Track Strategy di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Optimum*, 10, 1-15.
- Prasetyo, O., & Pratomo, A. R. (2021). Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4102-4107.

- Prasetyono, H., Nurfahana, A., Ramdayana, I. P., Anita, T., & Hikmah, N. (2022). Penguatan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 155-164.
- Pratiwi, M. E., Imbar, K., & Prawiradilaga, D. S. (2022). Pemanfaatan Prinsip Personalisasi Belajar dalam Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Designing E-Learning. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 5(1), 56-62.
- Prayogi, R. D. (2020). Kecakapan abad 21: Kompetensi digital pendidik masa depan. *Manajemen Pendidikan*, 14(2).
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial belanda di Surabaya tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya at 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.
- Precalya, H. M. (2021). LINK & MATCH PENDIDIKAN SEBAGAI IDEOLOGI NEOLIBERALISME (Analisis Wacana tentang Dominasi Elit dalam Pendidikan Kejuruan di Indonesia). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Priantini, D. A. M. M. O., Suarni, N. K., & Adnyana, I. K. S. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 238-244.
- Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1479-1491.
- Primawati, L. (2013). Pembelajaran Multikultural Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai Kebangsaan. *JUPIIS Vol. 5 Nomor 2*, 82-92.
- Pujowati, Y. (2021). Dinamika Kebijakan Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 158-164.

- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2020). Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik. *Publikasi Pendidikan*, 10(3), 189-196.
- Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. *JUSTISI*, 7(2), 155-166.
- Purwaningsih, E., & Ariyanti, E. R. N. (2021). Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi Dan Peningkatan Kemampuan Inovasi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 163-172.
- Purwanti, E., Setiawan, F., Pertiwi, A. R., & Purwaningsih, P. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 743-748.
- Puspasari, I., & Dafit, F. (2021). Implementasi gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 5(3), 1390-1400.
- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020, April). Selamat tinggal revolusi industri 4.0, selamat datang revolusi industri 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Putra, A. D. (2023). Implimentasi Link and Match 8+ I Sekolah Pusat Keunggulan SMK Negeri 7 Pekanbaru. *Journal of Education Informatic Technology and Science*, 5(1), 81-90.
- Putra, A. E. (2022). PENDIDIKAN ISLAM ORDE REFORMASI (PENDEKATAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN). *Ta'lim*, 4(1), 23-33.

- Putri, A. A., Asa, D. S. M., Khairiya, F. P., Rofifah, F. P., Faturramadhan, M., Hafizhah, N., ... & Laitupa, W. (2023, April). Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 453-464).
- Putri, A. S., & Zakaria, R. (2020, November). Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital. In *Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC* (Vol. 1, pp. 1-14).
- Putri, V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infrastruktur Teknologi Informasi: Keuangan, Fleksibilitas Ti, Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 333-343.
- Q. Y. Z. Asep Abdul Aziz<sup>1</sup>, Rida Nurfarida<sup>2</sup>, Nurti Budiyan<sup>3\*</sup>, "No Title," *Tapis J. Penelit. Ilm.*, vol. 4 no 2, no. Model Analisis Kebijakan Pendidikan, hal. 192–201.
- R. F. Sari, "No Title," *HIJRI - J. Manaj. Pendidik. dan Keislam.*, vol. Vol. 6. No, no. OPTIMALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI MANAJEMEN STRATEGIK ANALISIS SWOT, hal. 95–113, 2017.
- Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 58-67.
- Rachman, A., & Usman, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Muhammadiyah Kota Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 1-12.25-29.
- Rachman, M. F., & Susan, N. (2021). Modal Sosial Masyarakat Digital dalam Diskursus Keamanan Siber. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 1-11.

- Rachmi, Y., Wibowo, S., & Gatot, M. (2022). Implementasi Gerakan Literasi Keluarga dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi Anak Usia Dini. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(2), 199-206.
- Rahayu, N. W., & Sofia, N. (2021). Pelatihan Literasi Digital Pada Sekolahrumah Salihah Yogyakarta: Animasi, Poster Digital, Video Dan Gim. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 2(2), 50-59.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319.
- Rahayuningsih, F. (2021). Internalisasi filosofi pendidikan ki hajar dewantara dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 1(3), 177-187.
- Rahmadana, M. F. (2021). *Ekonomi Digital*. Nilacakra.
- Rahmadi, I. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 75-84.
- RAHMATIKA, A., Rum, M., & Wahyuni, S. A. (2020). Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tebo (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Rangkuti, Freddy. (2005). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Rawanoko, E. S., Komalasari, K., Al-Muchtar, S., & Bestari, P. (2021). The use of social media in ethic digital perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 148-157.

- Retnasari, L. (2018). Strategi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme di Era Globalisasi. Prosiding Seminar Nasional Kerjasama PGSD-POR UMS. ISBN 978-602-70471-3-6. Hal 161-170.
- Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24.
- Ridwan, H., Darmawati, I., & Rahmawati, M. N. (2020). Implementasi kebijakan physical distancing dalam pelaksanaan utbk sbmptn di perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(4), 197-201.
- Rifa'i, A., & Choli, I. (2020). Relevansi Pendidikan Agama Islam Terintegrasi Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Era Digital 4.0. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 59-76.
- Rifai, D., Fitri, S., & Ramadhan, I. N. (2022). Perkembangan ekonomi digital mengenai perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(1), 49-52.
- Riowati, R., & Yoenanto, N. H. (2022). Peran Guru Penggerak pada Merdeka Belajar untuk Memperbaiki Mutu Pendidikan di Indonesia. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 5(1), 1-16.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Ritonga, N. C., & Rahma, I. F. (2021). Analisis gaya belajar VAK pada pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa. *Jurnal Analisa*, 7(1), 76-86.
- Rivalina, R., & Siahaan, S. (2020). Pemanfaatan Tik Dalam Pembelajaran: Kearah Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik. *Jurnal Teknodik*, 73-87.
- Riyanti, B. P. D. (2019). *Kreativitas dan Inovasi di Tempat Kerja*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

- Rokhyani, E. (2022). Penguatan Praksis Bimbingan Konseling Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 3(1), 26-38.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan pendidikan inklusi sebuah solusi di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109-115.
- Roman Hadi Saputro, "No Title," *Civ. Soc. Stud.* ., vol. DOI: 10.31, no. Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang, hal. 147–157, 2021.
- Romdloni, M., Kasuwi Saiban, Kasuwi Saiban dan Mufarrihul Hazin . (2021). Problematika Pendidikan Tinggi, Kurikulum dan Pendidik di Indonesia (Studi Analisis Kualitas Sistem Pendidikan Indonesia). Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pascasarjana STAIMA Aly Hikam Malang. *Jurnal Al-Murabbi Volume 7 Nomor 1 Desember 2021*. <https://jurnal.yudharta.ac>.
- Roshonah, A. F., Damayanti, A., Rahmatunnisa, S., & Masykuroh, K. (2021). Pelatihan literasi digital untuk guru PAUD di wilayah Sukabumi Jawa Barat. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 47-56.
- Rositawati, D. N. (2019). Kajian berpikir kritis pada metode inkuiri. In *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)* (Vol. 3, pp. 74-84).
- Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Alim/ Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.
- Rozikin, M., Harmini, F. P., & Wiradita, A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Negeri Malang). *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 5(2), 129-144.

- Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 110-122.
- Rusnaini., Raharjo., Suryaningsih, A., Noventari, W. (2021). “Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27 (2), 2021,. 230-249. DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.67613>
- Sa’adah, M. (2018). Kepemimpinan Sekolah Berbasis Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 6, No 2, 141-150.
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis kebijakan terkait kebijakan literasi digital di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 176-180.
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis kebijakan terkait kebijakan literasi digital di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 176-180.
- Said, U. (2019). *Inovasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Berbasis Entrepreneur*. Zifatama Jawaara.
- Sajow, G. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Menengah Melalui Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring). *Jurnal Politico*, 11(1).
- Saleh, M. (2020, May). Merdeka belajar di tengah pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas* (Vol. 1, pp. 51-56).
- Saleh, S., Nasution, T., & Harahap, P. (2020). Pendidikan Luar Sekolah.
- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). Analisis SWOT dengan Metode kuesioner. CV. Pilar Nusantara.
- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). Analisis SWOT dengan Metode Kuesioner. CV. Pilar Nusantara.

- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). *Analisis SWOT dengan Metode kuesioner*. CV. Pilar Nusantara.
- Salsabila, U. H., Ilmi, M. U., Aisyah, S., Nurfadila, N., & Saputra, R. (2020). Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi. *Journal on Education*, 3(01), 104-112.
- Sandora, M. (2019). Konsep Pendidikan Anak Marginal Dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 196-216.
- Sanoto, H., Soesanto, S., Soegito, A. T., & Kardoyo, K. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 166-172.
- Santoso, I. N. A., & Rakhmad, W. N. (2020). Pengawasan Orangtua Dan Literasi Digital Keluarga Melalui Dialog Serta Mediasi Terhadap Anak-Anak Mereka. *Interaksi Online*, 8(2), 1-11.
- Sanusi, S., & Prasetyo, A. (2019). Pengenalan Gerakan Literasi Pada Masyarakat. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 162-166.
- Saputra, B. A., & Nurdiansyah, N. (2020). Penguatan Literasi Digital melalui Model Pengembangan Kurikulum SMA Islam Berbasis Media Digital di Era 4.0. *Islamika*, 2(1), 36-45.
- Sari, C.N., dan Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 09No. 01. Pp 97 -116
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441-9450.

- Sari, E., & Noor, A. F. (2022). Kebijakan Pembelajaran Yang Merdeka: Dukungan Dan Kritik. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 45-53.
- Sari, K. P., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 113-120.
- Sari, M.E.P., Farid, Y., & Pratiwi, D.A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Batam dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara di Daerah Hinterland. *Dimensi*, 6, 63-76.  
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/525>
- Sariani, N., Megavitry, R., Syukur, T. A., Sianipar, D., Hamsiah, A., & Safii, M. (2023). *Pendidikan Sepanjang Hayat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sasi, K. K. (2022). *LKP: Pembuatan Konten Edukatif Seputar Dunia Teknik melalui Media Sosial di PT Anak Teknik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika).
- Sasikirana, V. (2020). Urgensi Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Society 5.0. *E-Tech*, 8(2), 393456.
- Selvi, Iswari, M., dan Ardisal. (2013). P Eranan Tutor Sebaya Dalam Membantu Proses Pembelajaran Bagi Siswa Tunarungu Di Smp N 23 Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 2. Nomor 3.
- Sentoso, A., Octavia, O., Wulandari, A., Jacky, J., Kurniawan, S., & Thieng, S. (2021, October). Pentingnya Literasi Dalam Era Digital Bagi Masa Depan Bangsa. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 3, No. 1, pp. 767-776).
- Septiana, M. D. (2021). Proses Transformasi ke Ekonomi Digital Masyarakat Indonesia. *Sospoli*, 1(1), 47-63.

- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD). *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3).
- Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901-907.
- Setiawan, M. H. (2018, November). Pola Dan Arah Kebijakan Profesionalisasi Guru Bimbingan & Konseling/Konselor Indonesia. In *Seminar Nasional Bimbingan Konseling* (Vol. 2, No. 1, pp. 42-48).
- Setiawan, N., & Sofyan, H. (2022). Implementasi kurikulum merdeka belajar di SMK Pusat Keunggulan. *Jurnal Taman Vokasi*, 10(1), 31-37.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *NIZĀMULILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1-17.
- Setiyaningsih, L. A., Fahmi, M. H., & Jatmikowati, S. H. (2020). Budaya digital dan literasi new media generasi milenial.
- Setyasih, E. T. (2022). TRansformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(3), 59-66.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021, August). Merdeka belajar: kajian literatur. In *UrbanGreen Conference Proceeding Library* (pp. 183-190).
- Sholeh, B., Syarifudin, E., & Suherman, S. (2023). Guru Penggerak in Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 982-986.
- Sholihatinnisa, I., Nurcahyono, N. A., & Fitria, R. (2021). Realisasi bisnis digital siswa guna mewujudkan profil pelajar pancasila sebagai SMK Pusat Keunggulan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 86-93.

- Siahaan, S. B., Simanjuntak, A., Simanjuntak, W. A., & Pasaribu, D. (2022). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS BIROKRASI PEMERINTAHAN DIGITAL UNTUK MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 154-163.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88-99.
- Sidauruk, D. I., Simanullang, C. M., Sitompul, E. M., & Turnip, H. (2023). Administrasi Tentang Hubungan Sekolah Dan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 74-88.
- Silalahi, S., Hardiansyah, R., Siregar, W. W., & Hardiansyah, S. (2021). TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 1(2), 71-74.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka belajar kampus merdeka terhadap perubahan paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30-38.
- Siregar, I. A., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2718-2731.
- Sistem Informasi Rujukan Statistik. 2023. Survei Industri Besar Sedang Tahunan. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Situmorang, J. R. (2021). Kesiapan masyarakat Indonesia bertransformasi menjadi masyarakat digital.

- Soesilowati, E. dkk. (2010). *Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI).
- Solihin, L. (2020). Darurat Literasi Membaca Di Kelas Awal. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 34-48.
- Sonhadji. (2015). *Membangun Peradaban Bangsa Dalam Perspektif Multikultural di Indonesia*, Malang: Universitas Negeri Malang-UM PRESS.
- Sri Adiningsih, S. E. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Srilaksmi, N. K. T., & Indrayasa, K. B. (2020). Inovasi Pendidikan Dalam Peningkatan Strategi Mutu Pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1).
- Subandriyo, B., ST, S., & Stat, M. (2020). Pelayanan Publik Digital. *Pusdiklat. Bps. Go. Id*, 1-121.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Peneerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suciono, W. (2021). *Berpikir kritis (tinjauan melalui kemandirian belajar, kemampuan akademik dan efikasi diri)*. Penerbit Adab.
- Sudjana, D. 2000. *Manajemen program pendidikan untuk pendidikan luar sekolah dan pengembangan sumber daya manusia*. Bandung : Falah Production
- Sudjana, D. 2000. *Pendidin Luar sekolah ; falsafah, dasar teori pendukung azas*. Bandung : Falah Production
- Sudjana, D. 2004. *Manajemen Program Pendidikan (untuk pendidikan non formal dan pengembangan sumber daya mausia*. Bandung : Falah Production
- Sudjana, D.2001. *Pendiikan Luar Sekolah*. Bandung : Fallah Production

- Sudjimat, D. A. (2022). Mencetak SDM terampil dan berkarakter melalui implementasi model IPJBL pada pendidikan vokasi di era industri 4.0.
- Sudrajat, H., & Hariati, R. H. (2021). Hakikat Pendidikan Sepanjang Hayat Untuk Ditanamkan Pada Siswa Sekolah Dasar. *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies*, 6(02), 253-262.
- Sudradjat, S., & Djanegara, M. S. (2020). PKM Uji Kompetensi Bidang Keahlian Akuntansi Di SMK Bina Sejahtera Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 21-28.
- Sugema Dan Setyabudi.2002. Psikologi Belajar Orang Dewasa. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., & Adiarta, A. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124-136.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), 175-191.
- Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan tantangan kurikulum baru: Analisis peran guru dalam kebijakan kurikulum baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5936-5945.
- Suharyani., & Tamba, I.W. (2017). Evaluasi Program Kampung Literasi dalam Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari. *Jurnal Transformasi*, 3, 1-12.  
<http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/748>
- Sujai, I., Aditiyawarman, A., Nursetiawan, I., & Yuliani, D. (2022). Analisis Budaya Literasi Digital Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 252-259.

- Sukiyanto, S., Mufidah, E., & Maulidah, T. (2021). Pendampingan Gerakan Literasi Masyarakat Melalui Rumah Baca. *Aksiologi: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 5(1), 112-120.
- Sulistyo, A. (2017). Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4, 48-58.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak Vol*, 7(2).
- Sumarno. (2016). Rendahnya Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia: Penyebab Dan Strategi Peningkatannya. Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau.
- Sumiati, E., & Wijonarko, W. (2020). Manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi Covid-19. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(2), 65-80.
- Sunarso, *Buku Politik Pendidikan Tiga Rezim (1)*. CV. INDOTAMA SOLO Penerbit & Supplier Bookstore Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM Mojosongo, Jebres, Surakarta, 2021.
- Suniti. (2014). Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural. *Jurnal Edueksos Vol III No 2*, 23-44.
- Suriani, A. I. (2022). Kebijakan literasi digital bagi pengembangan karakter peserta didik. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(1), 54-64.
- Suriani, A. I. (2022). Kebijakan literasi digital bagi pengembangan karakter peserta didik. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(1), 54-64.
- Suriani, A. I. (2022). Kebijakan literasi digital bagi pengembangan karakter peserta didik. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(1), 54-64.

- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).
- Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan efektifitas pelatihan kepemimpinan: telaah teoretis dan empiris. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 69-86.
- Susanty, S. (2020). Inovasi pembelajaran daring dalam merdeka belajar. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 9(2), 157-166.
- Susilo, A., & Irwansyah, Y. (2019). Pendidikan Dan Kearifan Lokal Era Perspektif Global. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 1(1), 1-11.
- Sutirma dan Asep Samsudin. (2015). Landasan Kependidikan Teori dan Praktek. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sutjipto. (2017). Implementasi Kurikulum Multikultural di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Sutopo, I. R. (2010). Peran Paku Buwono X Dalam Pergerakan Nasional
- Sutrisna, I. P. G. (2020). Gerakan literasi digital pada masa pandemi covid-19. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 8(2), 269-283.
- Suyahman, M. S. (2020). *Pendidikan dalam Perspektif Global*. Penerbit Lakeisha.
- Syafaruddin, S., Asrul, A., Mesiono, M., Wijaya, C., & Usiono, U. (2016). Inovasi pendidikan: suatu analisis terhadap kebijakan baru pendidikan.
- Syafi'i, F. F. (2022, January). Merdeka belajar: sekolah penggerak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Syafitri, E., Armanto, D., & Rahmadani, E. (2021). AKSIOLOGI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS (Kajian Tentang Manfaat dari Kemampuan Berpikir Kritis). *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 320-325.

- Syafrudin, A. (2020, November). Metode Pembelajaran Reformasi Sosial dalam Pendidikan Politik Islam. In *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 176-189).
- Syahroni, F. (2020). Persepsi Siswa terhadap Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Industri di SMK N 1 Lembah Gumanti. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 275-281.
- Syifauzakia, S. (2023). Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Perubahan Sosial di Satuan PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 2137-2147.
- Syuaeb Kurdie. 2002. *Pendidikan Luar Sekolah*. Cirebon ; CV. Alawiyah
- Talan, M. R., Liuban, M. M. J., & Nalenan, J. S. (2022). Potret Gerakan Literasi Sekolah Menengah Atas Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 23-27.
- Taqiyah, R. L. (2022). Pengaruh Personalisasi Pembelajaran Berbasis Asesmen Psikologi Tes VAK terhadap Prestasi Belajar Siswa.
- Tarigan, M., Alvindi, A., Wiranda, A., Hamdany, S., & Pardamean, P. (2022). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 149-159.
- Tarnoto, dan Nissa. 2016. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol. 13 No. 1 Februari 2016. pp. 50-61.(Online) dalam <http://journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/> diakses 7 Agustus 2016.

- Tavares, O. M., & Tjiptabudi, F. M. H. (2020). Inovasi Pemerintahan Digital Melayani Berbasis Sistem Layanan Aspirasi Dan Informasi Pada Kelurahan Oeufu. *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, 3(1), 10-23.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107-117.
- Tayibnapis, A. Z., Wuryaningsih, L. E., & Gora, R. (2019). Pentingnya Inovasi dan Kreativitas Era Teknologi Digital.
- Teguh, M. (2020). Gerakan literasi sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 1(2), 1-9.
- Tjakrawala, F. K., & Iskak, J. (2021). Edukasi aspek keamanan dan pengendalian data guna membangun literasi digital bagi pelaku umkm. *Prosiding SENAPENMAS*, 321-330.
- Trianggoro, I. R. W., & Koeswanti, H. D. (2021). Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah (Gelis) di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 4(3), 355-362.
- Triyono, U. (2019). *Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan: (Formal, Non Formal, dan Informal)*. Deepublish.
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).
- UGM. (2023). Menaker: 12 Persen Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma 22 Februari 2023. <https://ugm.ac.id>.
- Ulfah, T. (2020, November). Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Gerakan Literasi Digital Di Sekolah Menengah Pertama. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 727-736).

- Ulum, M. (2020). Kebijakan standar nasional pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 11(1), 105-116.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta ; Citra Umbara
- Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024
- Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, H., & Raharjo, N. E. (2012). Model Pendidikan Karakter Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 21(2).
- UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tahun 2005.
- Vaporizki, S. (2019). Manajemen Kurikulum Berbasis Industri Kreatif Pada Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan SMKN 12 Surabaya. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 3(2), 62-71.
- Wahad, G., & Kahar, M. I. (2021). Problematika Pembelajaran Anak Usia Dini Di Masa Covid-19. *Jurnal Paedagogia*, 10(1).
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18-22.

- Wahyuni, S. (2022). Konsep Dasar Tentang Pembelajaran Bermakna dan Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa. *Pembelajaran Aktif Dengan Case Method*, 7.
- Wardani, G. A., & Astuti, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9450-9456.
- Wardhana, I. P., & Pratiwi, V. U. (2020). Konsep pendidikan taman siswa sebagai dasar kebijakan pendidikan nasional merdeka belajar di Indonesia.
- Wati, E. F., & Sari, A. P. (2021). Edukasi Literasi Digital terhadap Perkembangan Anak pada TPA Al Ihsan. *SENADA: Semangat Nasional Dalam Mengabdi*, 2(1), 38-46.
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57-71.
- Wibawanta, B., Chrismastianto, I. A. W., & Mumu, B. (2021). Teachers Competencies Profile in Digital Learning Era: Professional Engagement and Selecting Digital Resources. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1), 103-116.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-179.
- Wibowo, H.S. (2015). Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif Bagi Peserta Didik Difabel Netra. *INKLUSI*, Vol. 2, No. 1 Januari - Juni 2015
- Wicaksono, A., & Siska, Y. (2020, May). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.

- Wicaksono, A., & Siska, Y. (2020, May). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.
- Wicaksono, D., Rakhmawati, Y., & Suryandari, N. (2021). Pelatihan “Cerdas Ber Internet” Bagi Orang Tua di Desa Burneh Bangkalan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 137-143.
- Wicaksono, D., Rakhmawati, Y., & Suryandari, N. (2021). Pelatihan “Cerdas Ber Internet” Bagi Orang Tua di Desa Burneh Bangkalan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 137-143.
- Widiantara, I. K. A. (2021). Model Kampanye Literasi Digital Dalam Menghadapi Gelombang Infodemik. *Communicare*, 2(2).
- Widodo, A. (2020). Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(1), 11-21.
- Widodo, A. P. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 89-108.
- Widodo, A., Badrujaman, A., & Rahayu, W. (2020, November). Peningkatan Karakter Siswa Melalui Gerakan Literasi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 680-689).
- Widodo, S., & Wardani, R. K. (2020). Mengajarkan keterampilan abad 21 4C (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation) di sekolah dasar. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 7(2), 185-197.
- Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 35-42.

- Wijaya, S. (2023). PENTINGNYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MENCIPTAKAN KINERJA KARYAWAN DI ERA DIGITAL. *ANALISIS*, 13(1), 106-118.
- Wiratsiwi, W. (2020). Penerapan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 230-238.
- Wirawan, S. M. S., & Sembiring, H. R. U. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Daring. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 11(1), 19-27.
- Wulandari, R. T. (2019). PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL. *KATA PENGANTAR*, 153.
- Wulandari, T. (2016). Rekayasa Sosial Kolaborasi Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Multikultural: Praksis Di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 4, No 2, 186-193.
- Wulandari, T. (2020). *Konsep dan Praksis Pendidikan Multikultural*. UNY Press.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307-6317.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

- Yuliana, E., Nirmala, S. D., & Ardiasih, L. S. (2023). Pengaruh Literasi Digital Guru dan Lingkungan Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 28-37.
- Yulianti, Y., Syarifah, I. L., Hidayah, F. N., Raharani, F. A. N., Mukarromah, S., & Azzahra, N. I. (2021). Pentingnya Literasi Digital di Era Pandemi. *Jurnal Implementasi*, 1(2), 162-168.
- Yuwono, I. (2017). Indikator Pendidikan Inklusif. Penerbit : Zifatama Jawara Publisher: Sidowarjo.
- Z. T. A. Dkk, "No Title," Diterbitkan oleh: CV. Dwiputra Pustaka Jaya Star Safira Cluster Nizar Mansion E4 no. 14 Taman - Sidoarjo, 2018, hal. 123.
- Z. W. Arman Paramansyah1, "No Title," *Tarbiatuna J. Islam. Educ. Stud.*, vol. 3, no. Analisis SWOT Lembaga Pendidikan : Studi Kasus Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, hal. 31-42, 2023.
- Zamani, F. E. (2022). Peran Pendidikan Teknologi Dalam Proses Transformasi Sosial. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 84-94.
- Zulfikar, F. (2022). Universitas Asal Inggris dan Austrasia Buka Cabang di Indonesia, Bakal Ada 3 Fakultas. Detikedu 19 Oktober 2022. <https://www.detik.com/edu>
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini, I. (2019). Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. *LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 19(2), 130-136.
- Zullaikah. (2013). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket C (Setara SMA) Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Studi Kasus PKBM Bina Harapan Bangsa Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). Tesis. IKIP PGRI Semarang.

Zulfa, Z., Rohmah, K., & Widyaningrum, A. (2022, September). Efektivitas Penggunaan Platform Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring. In *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 34-44).

**Buku :**

Ahmad Nurabadi. 2014. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Ani Widayani Soetjipto (2005), *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas.

Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

Anugrah. Astrik. (2008). *UU Parpo 2008 dan Keterwakilan Perempuan dalam Parpol*. Jakarta : Pancuran Alam.

Aruan, C. D. (2019). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*. Jakarta.

Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah*.

Barnawi. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jakarta: Ar-Ruzz Media)

Button, B. (2016). Sexually harassed and abused on campus

Carol Miller andb Shahra Razavi , (1998). *Gender Analysis : Alternative Paradims*, <http://www.undp.org/gender/resources/momo6.html>.

Connell. R.W. (1987). *Gender & Power*. United Kindom : T.J. Press (Padstow). Ltd. Padstow. Cornwall.

Darwin, Muhammad., & Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Wacana.

- Djunaedi, Wawan Ida Rosyidah, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. 2014. *Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Engineer. Asghar, Ali. (2007). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta : LkiS
- Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). *Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*. Jakarta : LBH APIK.
- Indrarini, I. (2020). *Gender dalam Infrastruktur*. Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000 Jakarta: Balai Pustaka
- Kartika, Sandra, et. Al (editor). 2001. *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- KemenPPPA. (2011). *Kertas Kebijakan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.( 2011). *Resume Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta
- Liza Hadiz. (2004). *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta : LP3ES Indonesia.
- Mangkoesapoetra, Arief A. (2005). Implementasi Model Cooperative Learning dalam Pendidikan IPS di Tingkat Persekolahan. 2005, h.2 [Online]. Diakses dari <http://researchengines.com/0805arief6.html>.
- Mariyana, dkk. (2008). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki. (2010). *Potret Ekonomi Politik Indonesia Menjaga Daya Tahan Ekonomi Menghadapi Krisis dan Demokratisasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Masitoh, et al. (2005). *Strategi Pembelajaran TK*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Matin dan Fuad, Nurhattati. g. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McClosky. (1972). *Political Participation; International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York : The Macmillan Company. Huntington
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- Mousse. Jula Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muthali'in, Achmad. (2001). *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nanda Amelia, et.al. (2015). *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh, Baseline dan Analisis Institusional Pangusutamaan Gender pada Universitas Malikussaleh*. Lhokseumawe : Unimal Press
- Nugroho, Riant. (2008). *Gender Dan Strategi Pengarustamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nugroho. Riant. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurochimah, Iin. (2003). *Kualifikasi Aktivitas Politik Muslimah, dalam Musliman Menuju Era Siyasa*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman. A[p H.I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yoyakarta : Graha Ilmu
- Rashila Ramli. (1999). *Gender dan Politik, Suatu Penelitian Teoritis dan Empiris*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Rasyidah. (2007). *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry.

- Rasyidin. (2014). *Politik Gender Aceh : Studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe : Unimal Press,
- Rodee. Carlton Clymer. (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rush. Michael and Phillip Althoff. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Samuel P., & Nelson, Joan. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siti, H. (2009). *Gender and Politic*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana
- Somantri, G. R. 2018. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Human Behavior Studies in Asia.
- Sugondo, Lies et all. (2007). *Hak-hak Sipil dan Kedudukan Perempuan di Aceh Peluang dan Tantangan*. Jakarta : GTZ and GG PAS.
- Suryadi, Ace Idris, Ecep. ( 2014). *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Ganesindo.
- Suryosubroto, 2004, *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- United Nation Development Programs (UNDP). (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. UNDP Indonesia.
- Wardani, Sri Budi Eko. (2013) *Profil Keterpilihan Perempuan di Legislatif Pada Pemilu 2009*. Jakarta : Puskapol Fisip Universitas Indonesia.

### **Jurnal :**

- Aan Komariyah, Engkoswara. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM*, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141

- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 160.
- Bafadal, Ibrahim, 2004, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Børge, B., & Bent, H. (2015). Towards evidence-based, quantitative Sustainable Development Goals for 2030. In *The Lancet* (Vol. 385, Issue 9964, pp. 206–208).
- Ellemers, N. (2018). Gender Stereotypes. In *Annual Review of Psychology* (Vol. 69, pp. 275–298)
- Encyclopedia of Volcanoes. Safitri, D. P., & Edison, E. (2020). Evaluasi Formatif: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2), 571–590.
- Esteves, Maria. (2018). ‘Gender Equality in Education: A Challenge for Policy Makers’, *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4.2. 893–905.
- Falk, A., & Hermle, J. (2018). Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality. *Science*, 362(6412).
- Fathy, R. (2019). *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. 1-17
- Fuad, Z. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partispasi Politik masyarakat pada PEMILU Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. XXI (No. 1), pp. 23-33
- Gurjar, M.S. (2017), ‘The Comparative Analysis over Women Education. via Tagore and Gandhi’, *Educational Quest*, 8.3, 589–94.

- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Prespektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 (No. 2), pp. 403-430
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317.
- Jalal. (2002). Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan yang Mendasar. *Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*. Vol. 03 Hal. 4-8.
- Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 (No. 2) , pp. 221-232
- Kerkhoven, Anne H. and others. (2016) '*Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis*', PLoS ONE, 11.11, 1–13.
- Lindo, D. (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten minahasa tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3 (No. 2), pp. 14-28
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender sebagai Strategi Pencapaian Kesenjangan Gender. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 121–136.
- Meyer. J. (2017). 'Towards Equality for Women and Men from One Race: Sophie Rogge-Borner's Racial-Feminist', *Philosophy of Education Gender and Education*, 29.2 (2017), 147–64.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Mediator*, Vol. 9 (No. 2), pp. 257-270

- Mulyani, T. (2018). Kajian sosiologis mengenai perubahan paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3 (2), 149–158
- Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 (No. 2), pp. 17-30
- Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*, Vol. 1 (No. 2), pp. 173-182
- Pratiwi, Andi Misbahul dkk. (2016). Status Perempuan dalam STEM (Sains, Teknologi, Engineerin, Matematika) *Jurnal Perempuan*. Vol. 21 No. (4). Pp. 431-441
- Ratnawati. (2004). Potret Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. (No.. 3). pp. 295-313.
- Shaukat, Sadia. Pell, Anthony William. (2016) '*Gender Inequity at Workplace in Pakistani Higher Education Institutions*', *Bahria Journal of Professional Psychology*, 15.1. 29–44.
- Thalib, Nur A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Cita Hukum*, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(3), 203.
- Umami, R. H. (2020). Relevansi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(1).

- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27.
- Wittbom, E.E. (2015) '*Management Control for Gender Mainstreaming a Quest of Transformative Norm Breaking*', *Journal of Accounting and Organizational Change*, Vol.11 No.4 pp 527–45.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(1).

### **Tesis :**

- Tarmizi, Nurlina. (2003). *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui tagihan masa pekerja keluarga wanita : Kajian Provinsi Sumatera Selatan Indonesia*, UKM, Tesis.

### **Makalah :**

- Komariah Emong Sapardjaya. (2004). *Perempuan Indonesia Ketinggalan Kenderaan Partai Politik*. Makalah disajikan pada Seminar : Kesiapan Publik Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Politik Pada Pemilu 2004 Bandung.

### **Dokumen Kebijakan :**

- (2014). *Pengenalan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia*. Jakarta: Dipersiapkan Oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

- Indonesia Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing
- Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kemendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Kemendikbud. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum.
- Kemendikbud. (2013). Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. Kemendikbud. (2013).
- Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum. Kemendikbud. (2013). Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dan Pedoman Umum Pembelajaran.

**Blog:**

Affifah, A. N., & Nurani, F. (2019). Kesetaraan Gender dan Gap Pendapatan di Indonesia. Blog.Ub.Ac.Id.

<https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm>

[https://worldpopulationreview.com/country-](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country)

[rankings/education-rankings-by-country](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country)

<https://pusdatin.kemdikbud.go.id/kebijakan-kampus-merdeka-beri-otonomi-perguruan-tinggi-buka-prodi-baru/>

<https://lldikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/256>

<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggerak/>